POLITIK EKOLOGI SOSIAL
MUNISIPALISME LIBERTARIAN

Janet Biehl

*berdasar inspirasi teoritisi sosial **Murray Bookchin***

DAFTAR ISI

CATATAN PENGARANG

Munisipalisme libertarian merupakan dimensi politis dari gagasan utama ekologi sosial yang dikembangkan selama beberapa dekade oleh Murray Bookchin, teoritisi anarkis sosial. Ini adalah puncak pemikiran selama rentang masa hidupnya, yakni tentang kemungkinan terbaik bagaimana masyarakat bisa mengubah hidupnya secara radikal dengan cara yang manusiawi dan rasional.

Dibesarkan oleh faksi kiri Komunis sejak masa mudanya pada 1930-an, Bookchin mencurahkan sepenuh hidupnya mencari jalan untuk menggusur masyarakat kapitalis masa kini, yang telah menggerus kemanusiaan dan meracuni dunia alamiah, dengan alternatif yang lebih mencerahkan dan rasional. Ia seorang pelajar otodidak yang sangat dekat dengan tradisi revolusioner Eropa dan amat dikenal sebagai yang menyuntikkan gagasan ekologi kedalam pemikiran kalangan kiri. Di tahun 1962, ia pertama kali menegaskan bahwa masyarakat yang memerdekakan tidak bisa tidak akan berupa masyarakat ekologis.

Nyaris sepanjang abad lalu keberadaan Uni Soviet telah menggoreskan masalah-masalah besar bagi kalangan kiri. Utamanya sejak negara ini tampil menghimpun abad aspirasi-aspirasi revolusioner demi masyarakat yang baik dengan sistem totalitarianisme, gulag dan pembantaian-pembantaian massal. Pukulan akibat penyatuan yang salah ini

membuat kalangan kiri masih terhuyung-huyung. Dan seperti juga dialami para sejawatnya dari kalangan kiri, Bookchin pun harus bergulat untuk menyelamatkan tradisi ini dari parahnya penodaan oleh kaum Stalinis.

Bookchin muda meninggalkan gerakan Komunis pada pertengahan 1930-an dan sejak itu berbalik mengkritik keras Marxisme vulgar: karena otoritarianisme, instrumentalisme dan ketiadaan etika. Namun, keluarnya ia secara pribadi dari gerakan Komunis bukanlah berarti ia meninggalkan proyek revolusioner. Sebaliknya, dia mulai mengolah-ulang gagasan dan praksis yang telah ia jalani, kini dalam kerangka libertarian, dengan memetik yang terbaik dari tradisi-tradisi anarkis dan Marxis untuk menciptakan sintesa unik yang ia namakan ekologi sosial. Masyarakat masa depan yang ditatapnya akan menjadi masyarakat yang menggusur bukan hanya kapitalisme melainkan juga Negara-Bangsa. Masyarakat yang tidak hanya menghapus kelas-kelas tetapi juga hierarki-hierarki, tidak hanya eksploitasi tapi juga dominasi, dan ini adalah masyarakat alternatif yang rasional dan ekologis.

Sementara kritiknya terhadap kapitalisme bertolak dari Marxisme, gagasan-gagasannya tentang komunalisme, anti-Negara dan konfederalisme bertolak dari tradisi anarkis. Meski anarkisme juga tidak lepas dari kritisismenya. Berbeda dengan kebanyakan anarkis yang cenderung individualistis, Bookchin tidak begitu saja memusuhi

institusi-institusi. Baginya, kebebasan yang dipahami sepenuhnya dalam kerangka personal, yakni yang tidak mewujud dalam kelembagaan, akan merosot menjadi dorongan narsistik. Masyarakat yang mendukung kebebasan individu dan sosial harus dipersiapkan melalui institusi-insitusi yang pada dirinya sendiri pun memerdekakan. Masyarakat ini harus melengkapi dirinya dengan perkakas struktural yang dengannyalah para warga bisa secara kolektif mengelola urusan mereka sendiri. Dengan begitu, masalahnya bukan apakah masyarakat bebas akan memiliki institusi-institusi atau tidak, melainkan lebih pada serupa apakah institusinya.

Bagian terpenting proyek Bookchin adalah mengidentifikasi "bentuk-bentukkebebasan" revolusioner yang menyajikan substansi organisasional terhadap gagasan kebebasan. Setelah selama beberapa dekade dihabiskannya untuk studi sejarah dan keterlibatan politik, ia mulai menulis tentang munisipalisme libertarian pada 1972.

Secara ringkas, munisipalisme libertarian berupaya membangkitkan kemungkinan-kemungkinan demokrasi yang tersembunyi dalam pemerintahan-pemerintahan lokal yang ada dan mengubahnya menjadi demokrasi langsung. Ia bertujuan mendesentralisasikan komunitas-komunitas politik ini sehingga secara manusiawi terjalin dan terikat dengan lingkungan alamiahnya. Ia juga bertujuan memulihkan praktik-praktik dan kualitas kewargaan sehingga laki-laki dan perempuan

secara kolektif berpeluang mengelola komunitas-komunitas mereka sendiri, sesuai dengan etika pembagian dan kerjasama, dan bukan bergantung pada kelompok elit. Manakala demokrasi-demokrasi langsung telah tercipta, munisipalitas-munisipalitas yang terdemokratisasi bersatu dalam konfederasi-konfederasi yang pada gilirannya mampu menghadirkan perlawanan terhadap kapitalisme dan Negara-Bangsa, untuk menuju pada masyarakat anarkis-ekologis rasional.

Pada penghujung 1970-an dan awal 1980-an, ketika dia telah sepenuhnya mengembangkan gagasan-gagasan ini, berbagai gerakan akar rumput di Amerika dan Eropa banyak terpengaruh oleh pemikirannya tersebut. Bahkan kini gagasan-gagasannya itu secara potensial memiliki signifikansi lebih besar, mengingat runtuhnya Uni Soviet —terlepas dari penodaannya terhadap tradisi revolusioner–secara paradoks mengakibatkan goncangan di kalangan kiri dan mengharuskan adanya pencarian arah baru, jalan baru untuk member dayakan rakyat dalam masyarakat yang memerdekakan.

Pemikiran Bookchin relevan bukan hanya bagi situasi dilema yang dihadapi kalangan kiri masa kini. Melintasi spektrum politik Amerika, beragam pemikir menyesali terpecahnya lingkungan sipil di Amerika dewasa ini. Bukan hanya kalangan kiri, tapi juga pihak tengah dan bahkan kanan, semua meratapi merosotnya kehidupan komunitas dan

partisipasi sipil. Bagi situasi ini pula pendekatan munisipal Bookchin menawarkan perspektif kiri-radikal.

Akhirnya, di seluruh dunia kapital lintas-nasional tengah menciptakan pasar raksasa dimana keuntungan-keuntungan tak terhitung dijaring segelintir orang, memerosotkan banyak orang ke dalam kemiskinan dan keputusasaan, melenyapkan masyarakat-masyarakat tradisional dan meracuni lingkungan hidup. Munisipalisme libertarian Bookchin menggali institusi-institusi yang secara potensial bisa menahan sistem penghisapan dan biocide yang tamak ini.

Tulisan-tulisan Bookchin yang diterbitkan dewasa ini sayangnya belum mendapatkan perhatian khalayak luas sebagaimana mestinya. Alasannya mungkin karena tulisan-tulisan itu tidak mudah dimengerti. Banyak artikelnya dimuat oleh media-media berkala yang sulit ditemukan. Sementara bukunya sendiri, *From Urbanization to Cities*, yang begitu kaya akan olahan teoritis dan sejarah serta cukup luas cakupan dan tilikannya, dirasa terlalu berat bagi kebanyakan pembaca.

Selama beberapa tahun saya melihat bahwa diperlukan penjelasan ringkas agar gagasan-gagasan munisipalisme libertarian itu menjadi lebih mudah dimengerti bagi pembaca umum. Karenanya buku ini dimaksudkan sebagai gambaran singkat sekaligus menjadi pengantar. Saya tidak berusaha menaf-

sirkan, menganalisa atau menilai munisipalisme libertarian. Tetapi tujuan saya adalah memberikan ringkasan langsung tentang unsur-unsur dasar yang dimilikinya sebagaimana yang dikembangkan oleh Bookchin, termasuk sketsa konteks historis yang didalamnyalah Bookchin mengembangkan gagasan-gagasannya. Saya juga berusaha memberikan materi tentang aspek-aspek praktis ihwal mengorganisasikan gerakan munisipalis libertarian. Saya tegaskan bahwa gagasan-gagasan yang muncul dalam buku ini semuanya adalah gagasan-gagasan Bookchin, hanya artikulasinya adalah buatan saya. Dalam wawancara yang dimuat pada bagian kedua buku ini, saya bersama Bookchin mengangkat permasalahan yang, selama sepuluh tahun hubungan saya dengannya, seringkali telah saya tanyakan dalam diskusi-diskusi mengenai gagasan-gagasan tersebut.

Saya berterimakasih kepada Bookchin atas dukungannya bagi proyek ini dan atas wawancaranya. Dia membaca manuskrip dalam naskah dan mengomentarinya. Ini memberikan keuntungan besar. Cindy Milstein dan Gary Sisco juga membaca naskah awal dan memberikan saran-saran yang tidak ternilai harganya. Saya juga menghaturkan terima kasih kepada mereka. Rasa terima kasih yang mendalam juga saya sampaikan kepada Dimitri Roussopolous dari *Black Rose Books* atas dukungannya yang tak henti-henti bagi proyek ini.

Saya berupaya menyajikan gagasan-gagasan ini dalam istilah-istilah yang sesederhana mung-

kin agar memudahkan bagi para pembaca yang sepenuhnya belum mengenalnya. Tulisan-tulisan Bookchin sendiri mengandung nuansa filosofis dan historis yang tidak terdapat di sini. Para pembaca yang tertarik mempelajari lebih jauh tentang munisipalisme libertarian sebaiknya merujuk pada daftar tulisan-tulisan yang tertera di akhir buku ini. Buku ini tidak semestinya dianggap sebagai pengganti karya-karya asli Bookchin melainkan hanyalah pengantar ringkas baginya.

Saya berharap bahwa munisipalisme libertarian akan menjadi batu ujian bagi penyadaran kembali kalangan kiri, manakala mereka mengalami goncangan dan terhuyung-huyung. Saya yakin bahwa gagasan-gagasan ini bisa membawa hasil bagi kalangan kiri dalam skala internasional. Dan juga tidak bisa dihindari adanya kemungkinan bahwa penyajian saya bisa membias lewat lingkup budaya tempat saya hidup dan menulis. Saya harap para pembaca diluar Amerika mampu menafsirkan prinsip-prinsip utama menurut konteks kebudayaan mereka sendiri.

Janet Biehl
Burlington, Vermont
November 27, 1996

BAB 1

POLITIK VERSUS KENEGARAAN

Munisipalisme libertarian adalah salah satu di antara sekian banyak teori politik yang memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip dan praktek-praktek demokrasi. Berbeda dengan kebanyakan teori lain-nya, munisipalisme libertarian tidak menerima gagasan konvensional bahwa Negara beserta sistem pemerintahan yang menjadi khas negara-negara Barat dewasa ini adalah betul-betul demokratis. Sebaliknya, teori ini menganggap negara-negara tersebut sebagai Negara-Negara republik yang berkeinginan menjadi demokratis. Negara-Negara republik memang lebih "demokratis" ketimbang jenis-jenis Negara lainnya seperti monarki dan kediktatoran, karena Negara-Negara macam ini memiliki ber bagai macam lembaga perwakilan.

Namun Negara-negara ini mendirikan struktur dominasi tempat segelintir orang berkuasa atas mayoritas. Negara pada hakikatnya, secara struktural dan profesional, terpisah dari khalayak umum. Dalam kenyataannya ia ditegakkan di atas orang-orang biasa, laki-laki dan perempuan. Ia menjalankan kekuasaan atas rakyat dan membuat keputusan-keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Kekuasaannya pada akhirnya toh bersandar pada kekerasan. Negara juga melegalkan penggunaan monopoli dalam bentuk angkatan bersenjata dan kepolisian. Dalam struktur dimana kekuasaan didistribusikan secara tidak merata,

demokrasi adalah hal yang mustahil. Jauh dari mewujudkan kedaulatan rakyat, bahkan sebuah Negara republik bertentangan dengan kedaulatan rakyat.

Munisipalisme libertarian mengembangkan sejenis demokrasi yang bukan semata-mata kekuasaan Negara. Demokrasi yang dikembangkannya adalah demokrasi langsung—di dalamnya semua warga dalam komunitas-komunitas mengelola urusan mereka sendiri melalui proses pertimbangan dan pengambilan keputusan dalam pertemuan langsung *(face to face)*, yang berbeda dengan yang dilakukan Negara terhadap warganya.

Tidak seperti teori-teori "demokrasi" perwakilan, munisipalisme libertarian membedakan-secara tajam antara politik dengan ke-Negara-an. Dalam penggunaannya yang konvensional, konsep-konsep ini memang agak mirip. Politik, sebagaimana kita pahami seperti biasanya, merupakan komponen penting bagi sistem perwakilan dalam pemerintahan. Ia adalah seperangkat prosedur dan praktek yang dengannyalah "rakyat" memilih sekelompok kecil individu—para politisi–untuk berbicara dan mewakili mereka dalam lembaga legislatif atau eksekutif.

Para politisi ini, dalam politik sebagaimana yang sering kita pahami, berafiliasi dengan partai-partai politik, yang merupakan ikatan-ikatan sekelompok orang yang memiliki kesamaan komitmen dalam filosofi atau agenda politik tertentu. Para politisi yang menjadi anggota suatu partai, dalam teori, berbicara demi agendanya dan mengembangkan fi-

losofinya. Seiring makin dekatnya pemilihan umum bagi terbentuknya pemerintahan, berbagai partai mengedepankan para politisinya sebagai kandidat dan, dengan dibantu oleh banyak konsultan, menjalani kampanye pemilihan dengan tujuan membujuk warga untuk memilih mereka. Tiap partai menggembar-gemborkan kelayakan calonnya masing-masing untuk menduduki jabatan dan mengolok-olok para saingannya. Selama kampanye, para kandidat mengungkapkan posisinya masing-masing terhadap isu-isu penting saat itu, yang memperjelas perbedaan antar mereka, agar para pemilih memahami pilihan-pilihan yang mereka miliki.

Para pemilih—yang sekarang telah menjadi "*electorate*" (orang yang berhak memilih dalam pemilihan)–setelah dengan hati-hati menimbang isu-isu tersebut dan secara jernih menilai kualitas setiap kandidat, menetapkan pilihannya dengan penuh harap. Para kontestan yang posisinya paling sesuai dengan mayoritas dianugerahi jabatan yang mereka dambakan. Ketika memasuki koridor pemerintahan, para pemegang jabatan ini diyakini akan bekerja tanpa kenal lelah atas nama mereka yang memilihnya (yang belakangan mendapat sebutan lain yaitu "konstituen"). Mereka dengan seksama mematuhi komitmen yang telah mereka akui selama kampanye pemilihan. Saat mereka memberikan suaranya dalam pembuatan undang-undang atau membuat keputusan, loyalitas utama mereka, sebagaimana mereka katakan kepada khalayak, diarahkan pada posisi yang didukung oleh para "konstituen" mereka. Hasilnya, tatkala perundang-undangan atau per-

aturan pemerintah atau apa pun jenis ketetapan lain telah diputuskan, maka dikatakan itu semua mencerminkan keinginan mayoritas warga.

Pasti jelas bagi pembaca manapun bahwa sketsa ini adalah ilusi kelas sipil, dan bahwa karakter "demokratis"-nya tidaklah masuk akal. Jauh dari mewujudkan keinginan rakyat, para politisi sebenarnya adalah kaum profesional yang kepen tingan karirnya terletak pada jalur meraih kekuasaan. Persisnya, dengan melalui dipilih atau diangkatnya mereka dalam jabatan yang lebih tinggi. Kampanye pemilihan yang mereka jalankan, yang hanya sebagian atau bahkan sedikit sekali mencerminkan kepentingan khalayak, acap memanfaatkan media massa untuk mempengaruhi dan memanipulasi kepentingan mereka, atau bahkan membangkitkan kepentingan-kepentingan palsu sebagai sesuatu yang membingungkan. Sifat manipulatif sistem ini telah sangat dikenal dalam pemilihan-pemilihan di AS akhir-akhir ini, dimana kampanye-kampanye politik yang didanai oleh keuangan yang besar semakin memfokuskan diri pada isu-isu yang sepele tetapi secara emosional mudah berubah dengan mengalihkan perhatian "*electorate*" (para pemilih) dan menutupi permasalahan mendasar yang berpengaruh nyata terhadap kehidupan mereka. Program-program yang dijalankan para kandidat lebih merupakan kekosongan, dipadati kebohongan dan kian lama semakin tidak terkait dengan perilaku kandidat pada waktu mendatang setelah ia menduduki jabatan.

Sekali mereka memperoleh kedudukan,

para politisi itu sungguh-sungguh mengingkari komitmen yang telah mereka akui. Ketimbang mengikuti kebutuhan orang-orang yang memberikan suaranya bagi mereka atau orang-orang yang menjalankan kebijakan-kebijakan yang mereka dukung, kaum politisi ini biasanya menganggap bahwa melayani kelompok-kelompok kepentingan yang memiliki uang adalah lebih menguntungkan karena bisa melancarkan karir mereka. Mula-mula sejumlah besar uang diperlukan agar bisa menjalankan kampanye pemilihan, dan karenanya para kandidat bergantung pada kalangan donatur besar dalam upayanya memperoleh kedudukan. Sampai tingkat tertentu, mereka yang terpilih mewakili rakyat besar kemungkinan justru menjalankan kebijakan-kebijakan yang melindungi kepentingan orang-orang kaya ketimbang kepentingan kelompok yang mereka wakili.

Kaum politisi menjalani pilihan-pilihan demikian bukan karena mereka adalah "orang jahat" sebab kebanyakan dari mereka pada mulanya memasuki bidang layanan publik dengan motivasi idea listis. Mereka membuat pilihan-pilihan ini karena mereka telah menjadi bagian dari sistem interaksi kekuasaan yang perintah-perintahnya telah berkuasa atas diri mereka. Sistem interaksi kekuasaan ini, tiada lain adalah Negara itu sendiri, yang didominasi oleh keuangan yang besar. Dengan menjalankan fungsinya berdasarkan kerangka ini, mereka sama-sama bertujuan mengamankan dan mempertahankan monopoli kekuasaan bagi sekelompok elit profesional, juga melindungi dan menjalankan

kepentingan-kepentingan kaum kaya, ketimbang tujuan-tujuan yang lebih umum, yaitu member dayakan orang banyak dan meredistribusikan kekayaan.

Partai-partai politik yang dengan inilah para "politisi" sering dikaitkan, pada gilirannya bukanlah merupakan kelompok-kelompok warga berpikiran luas yang berbagi pandangan politik. Mereka pada dasarnya adalah birokrasi *top-down* yang tersusun secara hierarkis yang berusaha memperoleh kekuasaan Negara bagi diri mereka sendiri melalui para kandidat. Kepentingan utama mereka adalah kepentingan faksi, kekuasaan dan mobilisasi, bukan kepentingan demi kesejahteraan sosial para "konstituen" dari pemegang jabatan—kecuali jika kepentingan konstituen kebetulan berseiring dengan kepentingan orang-orang yang menambang suara. Maka tidak masuk akal jika dikatakan bahwa jenis-jenis partai politik ini berasal dari politik lembaga atau terbentuk darinya. Jauh dari mengungkapkan keinginan para warga, fungsi partai tepatnya adalah membuat politik lembaga, mengendalikan dan memanipulasinya, juga mencegahnya agar tidak mengembangkan keinginan yang mandiri.

Sesengit apa pun partai-partai politik itu bersaing satu sama lain dan mungkin berselisih dalam beberapa isu tertentu, semuanya memiliki kesamaan dalam menyetujui adanya Negara dan beroperasi menurut parameter didalamnya. Setiap partai yang terlempar dari kekuasaan sebenarnya adalah "hantu" yang tengah mengintai Negara untuk merebut kekuasaan—sebuah Negara-dalam-penantian.

Menyematkan label ‘politik’ pada sistem demikian adalah kesalahan penamaan yang kasar. Sistem ini mestinya lebih tepat dinamai kenegaraan *(Statecraft)*. Dengan sifatnya yang profesional, manipulatif dan imoral, sistem elit dan massa ini berkedok demokrasi, menghina ideal demokrasi yang secara sinis seringkali mereka ikrarkan dalam seruan berkala kepada para “pemilih”. Jauh dari memberdayakan rakyat sebagai warga, ke-Negara-an mensyaratkan pelucutan umum kekuasaan warga. Sistem ini mengerdilkan warga menjadi sekadar “pembayar pajak,” “pemberi suara” dan “konstituen,” seolah-olah mereka terlalu muda atau tidak berkemampuan untuk mengelola urusan-urusan publik mereka sendiri. Warga diharapkan berfungsi semata-mata secara pasif dan membiarkan para elite mencarikan jalan terbaik bagi mereka. Mereka mesti berpartisipasi dalam “politik” terutama pada hari-hari pemilihan ketika “kehadiran pemilih” memberikan legitimasi terhadap sistem itu sendiri, juga pada waktu membayar pajak yang tentu saja guna membiayai sistem tersebut. Dan sepanjang tahun, para ahli ke-Negara-an akan lebih senang jika orang-orang cenderung lebih memusatkan perhatian pada urusan pribadi masing-masing dan tak ambil pusing dengan aktivitas para “politisi.” Jika orang-orang semakin bisa menanggalkan kepasifannya dan mulai berminat aktif dalam kehidupan politik, mereka akan menciptakan masalah bagi Negara dengan mengusik-usik perkara ketidak cocokan antara realitas sosial dengan retorika yang menyertainya.

Politik sebagai Demokrasi Langsung

Kendati memiliki kemampuan untuk berubah dalam praktik konvensionalnya, politik sama sekali tidaklah serupa dengan ke-Negara-an. Negara juga bukanlah bidang alami politik. Pada abad-abad yang lalu, sebelum kemunculan Negara-Bangsa, politik dipahami sebagai aktivitas warga dalam sebuah badan publik yang diberdayakan dan dilaksanakan bersama melalui institusi-institusi partisipatif. Berbeda dengan Negara, politik sebagaimana adanya dan sebagaimana jadinya, secara langsung bersifat demokratis. Sebagaimana dikembangkan oleh munisipalisme libertarian, politik adalah pengelolaan langsung atas urusan-urusan komunitas oleh para warga melalui institusi-institusi demokratis yang bersifat *face-to-face*, terutama berupa majelis rakyat.

Pada masyarakat dewasa ini, prospek akan kondisi-kondisi yang memungkinkan orang bisa mengelola urusan mereka sendiri tampaknya terlihat kecil dan menyedihkan. Namun masa-masa dalam sejarah ketika orang mengalaminya ternyata lebih dekat kepada kita ketimbang yang kita pikir. Demokrasi langsung adalah unsur pokok dalam tradisi politik sehingga masyarakat Barat mengklaim sangat menghargai sistem ini. Demokrasi langsung merupakan unsur paling mendasar dalam politik, karena tradisi politik demokratis berasal bukan dari Negara-Bangsa melainkan dari demokrasi berhadap-hadapan wajah di Athena kuno pada pertengahan abad kelima sebelum Masehi. Politik,

sebagaimana pertama kali digambarkan dalam tulisan-tulisan Aristoteles, pada mulanya merupakan demokrasi langsung. Kata politik secara etimologis berasal dari kata *polis*, kata Yunani kuno (umumnya disalahartikan sebagai "negara-kota") yang berarti publik, sebuah dimensi partisipatif dalam komunitas.

Dalam *polis* Athena, demokrasi langsung mencapai tingkat penerapan yang luar biasa. Selama salah satu periode paling mengherankan di Eropa, juga dalam sejarah dunia—antara abad kedelapan dan kesembilan sebelum Masehi–orang-orang Athena beserta para juru bicaranya seperti Solon, Cleisthenes dan Pericles (ketiga orang ini, ironisnya, adalah para aristokrat pembelot) secara perlahan-lahan memecah sistem feodal tradisional yang telah begitu melekat pada masa Homeric, sembari menciptakan institusi-institusi yang menggelarkan kehidupan umum yang terbuka bagi semua lelaki dewasa di Athena. Kekuasaan terhenti menjadi hak prerogatif segolongan kecil aristokrat dan bahkan berkembang menjadi aktivitas warga. Pada puncaknya, politik lembaga pada masa Athena kuno kurang lebih terdiri dari sekitar empat puluh ribu warga pria dewasa. (Sayangnya, kaum perempuan, para budak dan para penduduk asing, termasuk Aristoteles sendiri, dilarang memberikan partisipasi politik).

Orang-orang Athena kuno memiliki konsep kehidupan politik yang benar-benar berbeda dari yang biasa dianut oleh "demokrasi" Barat dewasa ini. Pada masa kini bukankah kita se-

makin kerap beranggapan bahwa individu pada dasarnya adalah makhluk pribadi yang terkadang menyadari bahwa alangkah diperlukan dan bijaksananya memasuki kehidupan publik, yang mungkin saja bertentangan dengan keinginannya, dalam rangka melindungi atau menjalankan kepentingan-kepentingan pribadinya. Pada saat yang sama, dalam pandangan umum kini, partisipasi politik adalah (biasanya) sebuah beban asing yang tidak menyenangkan tetapi tidak bisa dihindari, yang harus dipikul dengan sabar sebelum seseorang kembali kepada "kehidupan nyata"-nya dalam ruang lingkup pribadi.

Sedangkan orang-orang Athena kuno justru menganggap bahwa kaum pria dewasa Yunani pada dasarnya adalah makhluk politik, yang dengan sifat alamiahnya itu mereka berhubungan satu sama lain dalam tujuan mengorganisasikan dan mengelola kehidupan komunitas mereka secara bersama-sama. Kendati pembawaan alamiahnya memiliki komponen politik sekaligus komponen pribadi, orang-orang Athena percaya bahwa kemanusiaan mereka yang khas terletak pada komponen politik. Sehingga sebagai makhluk politik, para lelaki Yunani tidak bisa sepenuhnya menjadi manusia kecuali mereka terjun berpartisipasi dalam kehidupan komunitas yang terorganisasi. Tanpa peranserta mereka, tidak ada kehidupan komunitas, tidak ada komunitas terorganisasi dan tidak ada kemerdekaan.

Berbeda dengan para profesional yang menjalankan benteng kekuasaan Negara saat ini dan melaksanakan mekanisme ke-Negara-an, orang-

orang Athena kuno mempertahankan sistem pemerintahan oleh diri sendiri yang secara sadar bersifat amatir. Institusi-institusinya—terutama rapat-rapat majelis warga kota yang dilaksanakan nyaris saban minggu dan sistem peradilannya yang tersusun dari para hakim tinggi–memungkinkan partisipasi politik menjadi luas, umum dan berlangsung terus menerus. Kebanyakan pejabat sipil dipilih dari para warga kota melalui undian dan selalu bergilir. Inilah komunitas dimana para warga memiliki kompetensi tidak hanya untuk memerintah diri mereka sendiri tetapi juga memangku jabatan ketika kesempatan memanggil mereka untuk melakukannya.

Demokrasi langsung Athena melemah akibat perang Peloponnesia dan selama masa kekuasaan Kekaisaran Roma serta sesudah ide demokrasi itu sendiri menerima sebutan jelek ketika disamakan dengan "kekuasaan rakyat banyak" *(mob rule)*, terutama dari para teoritisi politik dan para penulis yang melayani kalangan istana. Tetapi gagasan bahwa politik sebagai swa-kelola yang dilakukan rakyat tidak pernah benar-benar padam habis. Sebaliknya, baik gagasan maupun realitasnya nyatanya tetap berjalan selama berabad-abad yang meliputi era mereka maupun yang juga menjangkau jaman kita. Di pusat-pusat kota di banyak komune Eropa pada jaman pertengahan, di tanah jajahan New England dan di Paris revolusioner, di antara banyak tempat lain, para warga berkumpul mendiskusikan dan mengelola komunitas tempat mereka hidup. Para paus, pangeran dan raja seringkali mengembangkan struktur kekuasaan bertingkat. Tetapi pada tingkat

lokal, di desa-desa, kota-kota dan lingkungan kecil, orang mengendalikan kehidupan komunitasnya sendiri dengan baik hingga ke masa modern.

Harus diakui, sedari mula sejarah tidak memberi kita contoh demokrasi langsung yang ideal. Semua contoh yang telah terkemuka, termasuk Athena kuno, dirusak oleh patriarki dan jenis-jenis penindasan lainnya. Namun demikian gambaran terbaik contoh-contoh ini dapat dipilih dan disusun untuk membentuk suatu bidang politik campuran yang tidak bersifat parlementer juga tidak birokratis, tidak tersentralisasi, tidak terprofesionalisasi, melainkan demokratis dan politis.

Dengan berbasis pada masyarakat yang demikian itulah budaya politik yang kaya akan tumbuh subur. Diskusi publik harian akan meluap di lapangan dan taman-taman, di sudut-sudut jalan, sekolah, kafe dan klub, dimanapun orang berkumpul secara informal. Banyak pusat-pusat lingkungan di kota-kota besar jaman kuno, pertengahan dan Renaissans adalah tempat para warga secara spontan berkumpul, memperdebatkan masalah mereka dan memutuskan tindakan. Kultur politik yang hidup ini meliputi aspek-aspek budaya yang sekaligus secara eksplisit bersifat politis, dengan ritual-ritual sipil, festival-festival, perayaan-perayaan dan ungkapan-ungkapan kegembiraan serta kesedihan yang dirasakan bersama-sama. Di desa-desa, kota-kota kecil, lingkungan-lingkungan kecil dan kota-kota besar, partisipasi politik merupakan proses pembentukan diri dimana setiap warga berdasarkan kemampuan mereka mengelola komunitasnya, mengembangkan

bukan hanya melimpahnya rasa keutuhan sebagai sebuah lembaga politik melainkan juga kayanya individualisme diri.

Penciptaan Kembali Politik

Dengan bangkit dan bergabungnya Negara-Negara Bangsa, kekuatan yang tersentralisasi mulai melumpuhkan partisipasi publik ini, bahkan memerintah tempat-tempat yang jauh untuk tunduk dibawah kontrol Negara dan menghilangkan otonomi apapun yang sampai saat ini mereka nikmati. Awalnya invasi ini dijalankan atas nama raja dengan mengklaim hak istimewa untuk berkuasa yang diperoleh dari Tuhan. Tetapi bahkan setelah konsep demokrasi menjadi objek aspirasi rakyat yang bergairah pada awal abad sembilan belas, para pendiri Negara-Negara republik mengambilnya sebagai penghalus bagi institusi-institusi "representatif" mereka—parlemen dan kongres–dan pada saat yang sama juga dijadikan sebagai jubah untuk menutupi sifatnya yang elitis, paternalistik dan koersif. Alhasil, Negara-Negara-Bangsa Barat-lah yang dewasa ini secara rutin dirujuk sebagai "demokratis" tanpa sedikit pun keberatan. Dengan terciptanya kesejahteraan Negara Sosial, kekuasaan Negara —sekaligus akseptabilitasnya terhadap pihak yang tidak berhati-hati–malah sudah lebih jauh merambah sampai ke memikul tugas-tugas sosial yang pernah menjadi tanggung jawab komunitas-komunitas dalam masyarakat.

Di banyak belahan dunia Eropa dan Amerika,

kehidupan politik sampai taraf tertentu masih tetap menggeliat pada tingkat lokal, sebagaimana yang terjadi hingga saat ini. Demokrasi langsung tentu saja tidak lagi berwujud dalam pengertian Athena kuno. Bahkan di komunitas-komunitas yang telah tercerabut dari kekuasaan yang dibanggakan oleh para pendahulunya, masih terdapat arena politik formal dan informal—ikatan-ikatan sipil, rapat-rapat kota, forum-forum, inisiatif-inisiatif yang berorientasi pada isu-isu tertentu dan semacamnya–yang berjalan sebagai tempat proses-proses publik secara *face-to-face*. Bahkan jika demokrasi langsung tidak lagi ada, bidang publik lokal tetap berlangsung.

Celakanya, bidang-bidang publik yang tersisa itu dengan susah payah tengah diruntuhkan dewasa ini bersamaan dengan kekuatan-kekuatan sosial yang lebih besar yang merusak lingkungan kecil dan kehidupan komunitas. Tekanan-tekanan ekonomi memaksa orang menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk memperoleh penghidupan, yang membuat mereka kekurangan waktu untuk mencurahkan dirinya atau bersosialisasi dalam kehidupan keluarga, apalagi dalam urusan-urusan komunitas. Etos konsumsi dalam masyarakat kapitalis membetot pria dan wanita agar menyerahkan banyak waktu senggang yang mereka miliki untuk berbelanja, bahkan sebagai bentuk rekreasi, atau menonton televisi yang dapat memancing mereka untuk terus lebih banyak lagi berbelanja. Ketika kehidupan keluarga, karena kebutuhan, menjadi suatu "tempat berlindung dalam dunia yang tak berhati,"

kehidupan politik menyusut lebih jauh lagi dari genggaman mereka. Dalam situasi seperti ini, baik kehidupan politik maupun kehidupan keluarga tidak bisa tumbuh subur.

Alhasil, makna dasar politik secara berangsur-angsur dilupakan. Orang-orang dalam masyarakat-masyarakat Barat kehilangan memorinya terhadap politik sebagai proses vital manajemen-diri yang aktif, sementara konsep yang melemahkan tentang kewarganegaraan—seperti pemungutan suara, pembayaran pajak dan penerimaan pasif atas pelayanan yang disediakan Negara–disalahgunakan demi kewarganegaraan itu sendiri. Karena tercerabut dari komunitas, individu terasingkan dan tidak memiliki kekuatan, sendirian dalam masyarakat massa yang kurang bermanfaat baginya sebagai makhluk politik.

Namun jika orang kurang berminat dalam kehidupan publik, sebagaimana yang dikeluhkan banyak komentator saat ini, ini mungkin disebabkan kehidupan publik kian hampa makna —yakni lantaran kehidupan publik ini kekurangan kekuasaan substansial. Bukannya bertumbuh sebagai bidang-bidang politik lokal, kebanyakan kewenangan pengambilan keputusan berada dalam genggaman Negara. Ini terjadi bukan karena ketidak sengajaan, hukum Tuhan atau kekuatan alam. Ini terjadi semata karena perilaku manusia. Para pendiri Negara mewujudkannya dengan memaksa atau membujuk rakyat agar menyerahkan kekuasaan mereka kepada pihak yang lebih besar.

Tetapi meskipun kekuasaan telah direnggut

dari tangan rakyat, sebenarnyalah rakyat dapat merebutnya kembali. Tidak mengejutkan bahwa di seluruh belahan dunia Euro-Amerika dewasa ini, laki-laki dan perempuan semakin menolak sistem partai yang ada dan peran politik yang kecil yang telah diberikan kepada mereka oleh Negara. Alienasi dari proses-proses "politik" telah tersebar luas, bersamaan dengan masifnya suara kosong (atau abstain) dalam pemungutan suara. Para "politisi" semakin tidak dipercayai. Bahkan ketika diminta untuk ikut serta, warga kian bereaksi dengan kebencian dan bahkan permusuhan terhadap manipulasi pemilihan umum. Reaksi mendadak yang menentang ke-Negara-an seperti ini merupakan kecenderungan yang baik. Di sinilah politik munisipalis libertarian bisa dibangun.

Proyek munisipalisme libertarian berupaya menyadarkan politik kembali ke makna asal katanya —membangun dan mengembangkan demokrasi langsung lokal, yakni bahwa warga membuat keputusan-keputusan bagi komunitas dan masyarakat mereka sendiri sebagai suatu keutuhan. Mesti dipahami bahwa ini bukanlah upaya untuk memperluas keterlibatan warga dalam proses-proses Negara republik. Ini bukanlah seruan agar lebih banyak lagi jumlah pemilih pada pemilihan umum mendatang, atau demi mobilisasi warga dalam mempengaruhi perundang-undangan ("tulis wakilmu"), atau bahkan untuk memperluas penerapan prosedur-prosedur seperti hak inisiatif, referendum dan *recall* dengan maksud "mendemokratisasikan" Negara-Bangsa. Ini juga bukan upaya untuk menggantikan

sistem *voting* suara terbanyak memenangi segalanya atau *winner-take-all* (yang khas Amerika, Inggris dan Kanada) dengan sistem perwakilan berimbang dan memperbolehkan para anggota partai-partai kecil atau parta-partai ketiga untuk menduduki jabatan sesuai dengan suara yang mereka terima. Singkatnya, proyek munisipalisme libertarian tidak berjalan diatas selubung "demokratis" Negara dengan bekerja untuk "reformasi demokrasi", yaitu proyek yang menganjurkan laki-laki dan perempuan agar aktif berpartisipasi dalam sebuah struktur yang dicocokkan untuk mengontrol mereka. Munisipalisme libertarian justru merupakan antitesis terhadap Negara karena Negara tidak selaras dengan swa-kelola komunitas dan kehidupan sipil yang berkembang.

Tujuan munisipalisme libertarian adalah membangkitkan kehidupan sipil yang telah hilang dengan begitu cepat dan mentransformasikannya ke ranah politik. Ia hendak melahirkan warga aktif keluar dari konstituen pasif dan memberi mereka konteks politik dimana mereka memiliki pilihan-pilihan berarti. Ia juga bertujuan menciptakan konteks ini dengan melembagakan kekuatannya dalam majelis lingkungan dan rapat-rapat kota. Dalam pengertian yang sangat radikal, munisipalisme libertarian kembali ke akar politiknya, yaitu membangkitkan demokrasi langsung dan mengembangkannya, dengan nilai-nilai yang rasional dan etis beserta praktik-praktik yang mendukungnya.

BAB 2

KOTA HISTORIS

Sebelum kita mendiskusikan proyek munisipalis libertarian yang spesifik yaitu tentang membangkitkan ranah politik, kita harus melalui beberapa bab untuk menguji asal mula ranah tersebut dan memperjelas apa yang kita maksud tatkala merujuknya. Ranah politik memiliki konteks sosial bahkan konteks antropologis dan historis serta juga tradisi khusus yang telah berkembang selama berabad-abad.

Yang terpenting, tampaknya adalah bahwa ranah politik harus dipahami sebagai salah satu dari tiga wilayah yang melekat dalam masyarakat manusia pada umumnya: ranah politik, ranah sosial dan Negara.*

Ranah Sosial

Ranah sosial (jangan dicampurbaurkan dengan istilah *society* atau masyarakat), mencakup produksi dan kehidupan ekonomi. Lebih tua lagi, ranah ini

*Pembedaan Bookchin menjadi tiga ranah ini, berbeda dengan banyak teoritisi sosial lainnya yang hanya menempatkan dua ranah. Misalnya, Aristoteles berpikir dengan berdasar pada ranah sosial dan politik, tetapi bukan Negara (karena Athena tidak memilikinya). Haanah Arendt, dalam *Human Condition* dan karya-karya lainnya, pada dasarnya mengikuti Aristoteles dalam membahas ranah sosial dan politik—tetapi yang ia namakan ranah politik sebenarnya adalah Negara, sebuah misidentifikasi yang menimbulkan sejumlah kebingungan.

merupakan arena personal kehidupan keluarga, tindak memberi perhatian, persahabatan, pemeliharaan diri dan reproduksi serta kewajiban keluarga. Keberadaan kelompok-kelompok keluarga seperti ini bersifat konstan sepanjang kebudayaan manusia, kendati bentuknya berbeda-beda pada setiap masyarakat. Dalam kelompok-kelompok keluarga inilah individu bergaul hingga tingkat keintiman tertinggi. Ranah sosial karenanya bisa dibatasi sebagai fenomena lintas-budaya, yang telah melebur ke dalam komunitas-komunitas manusia.

Ranah sosial sejauh ini adalah ranah tertua dari ketiga ranah tadi. Sejak kemunculannya yang paling awal pada masa prasejarah yang berupa kelompok-kelompok dan suku-suku, komunitas manusia tersusun dalam ranah sosial tersebut. Ini membentuk bagian terbesar masyarakat-masyarakat. Pada inti kelompok atau suku, ranah sosial berakar pada dunia domestik kaum perempuan dan menyusul dilengkapi oleh dunia sipil yang baru lahir yang dihuni kaum laki-laki. Tapi sejak ranah sipil ini menjadi sangat terbatas dan Negara belum ada sama sekali, kelompok kehidupan pada masyarakat-masyarakat yang paling awal sesungguhnya seusia dengan ranah sosial.

Sesuai dengan sifat kekeluargaannya, masya rakat kelompok dan suku terorganisasi berdasarkan prinsip biologis “alamiah” dalam kekerabatan. Ikatan darah dan prinsip pertautan keturunan, adalah ikatan bersama yang menyatukan suatu suku. Seluruh anggota suku itu dikatakan memiliki hubungan darah, keturunan dari nenek moyang yang sama

—kesamaan keturunan itulah yang menjadikan mereka anggota dari suku yang sama. Ikatan darah tidak mesti secara nyata. Jika perlu, suatu suku dengan penuh kemauan bisa memperluas ikatan itu diluar kekerabatan yang sebenarnya sampai tingkat fiksi sekalipun. Misalnya, ketika orang-orang asing dikooptasi ke dalam suku tersebut, atau dalam kasus perkawinan antar suku. Penyatuan semacam ini dilegitimasi dengan cara diumumkan dalam hubungan kekerabatan. Bahkan jika ikatan ini seringkali harus diperluas, kekerabatan adalah prinsip adat yang membatasi dan secara ideologis mengikat kesatuan suku.

Kekerabatan bukanlah satu-satunya prinsip biologis “alamiah” yang bisa mengorganisasikan masyarakat kesukuan. Fakta biologis tentang seks menandai bermacam tanggung jawab dalam kehidupan kesukuan sebagai laki-laki atau perempuan, yang menghasilkan pembagian gender dalam kerja dan bahkan budaya. Fakta biologis usia juga masih menjadi batu ujian lainnya bagi organisasi sosial: anggota yang telah hidup lebih lama, terutama dalam masyarakat yang belum mengenal tulisan, dihargai sebagai nara sumber adat dan kebijakan suku. Ini status yang memungkinkan anggota-anggota yang lebih tua mengklaim kekuatan supra-natural sebagai para cenayang. Semua prinsip “alamiah” ini memiliki komponen-komponen fiksional besar dan seringkali dihormati dalam ritual penebusan. Tapi karena mereka berakar pada apa yang terlihat sebagai fakta-fakta biologis yang tidak bisa diubah, mereka membatasi komunitas ini secara bersama-sama.

Dalam komunitas-komunitas yang paling awal, pembagian biologis mungkin hampir tidak rasional lantaran adanya status beserta hierarkinya, ditambah lagi juga terdapat dominasi dan kepatuhan. Untuk kemudian kebudayaan laki-laki dinilai tidak hanya berbeda dari kebudayaan perempuan melainkan juga ditempatkan lebih tinggi sehingga merasa berhak mendominasi. Pengetahuan kaum yang lebih tua tentang kebijaksanaan suku menjadi tuntutan akan adanya *gerontocracy* (kekuasaan orang yang lebih tua), sementara kekerabatan menjadi rasional untuk diyakini karena superioritas satu suku terhadap suku lainnya yang akhirnya membangkitkan *chauvinisme* etnis dan rasisme.

Hubungan saling antipati antara suku-suku yang berbeda dipastikan berakar pada masyarakat kesukuan nyaris sejak awal. Suku-suku kerap mengklaim diri mereka dengan label "orang" sebagai lawan dari anggota-anggota suku lain yang pada dasarnya mereka anggap datang dari tatanan taksonomis yang berbeda, yaitu yang mereka nilai sebagai bukan manusia. Identifikasi-diri yang dilakukan suatu suku, yang menganggap bahwa diri mereka adalah spesies yang secara efektif berbeda, telah membangkitkan etos solidaritas yang kuat antar para anggotanya sendiri—namun seringkali menimbulkan rasa permusuhan hebat terhadap anggota-anggota suku lain yang dianggap sebagai ancaman.

Maka kelompok-kelompok dan suku-suku bersikap hati-hati dan kerap dengan penuh rasa permusuhan jika berurusan dengan orang luar.

Mereka boleh jadi menganggap orang asing yang mengganggu mereka sebagai nenek moyang yang telah mati dan karenanya akan merampas hati mereka. Atau mereka mungkin menganggapnya sebagai roh, atau roh orang yang mati, atau sebagai mahluk jahat yang berniat jelek terhadap suku tersebut dan karenanya bermaksud menghancurkan mereka. Adapun sikap ramah biasanya bergantung pada niat baik suku tersebut dalam kasus tertentu, pada norma-norma tradisional dalam berperilaku, juga pada kebutuhan suku itu untuk membangun jaringan pendukung melalui penyatuan perkawinan dan menghasilkan para lelaki dewasa yang bertindak sebagai prajuritnya.

Kebangkitan Kota

Sebagai jalan utama dalam mempertahankan hidup, masyarakat kelompok dan suku umumnya bertualang. Mereka berburu binatang dan mengumpulkan tumbuh-tumbuhan untuk memperoleh makanan, pakaian dan tempat perlindungan yang menopang keberadaan mereka. Terkadang mereka bercocok-tanam sejenis bentuk hortikultura yang bersifat temporer dengan cara membakar hutan untuk membuat petak-petak ladang demi mendapatkan hasil panen sampai kesuburan tanah di tempat itu habis. Namun pada awal periode Neolitikum, kira-kira pada pertengahan antara tahun 10.000 dan 7.000 SM, perubahan penting terjadi. Masyarakat kesukuan secara berangsur-angsur mengganti cara-cara mendasar yang mereka jalankan dalam mem-

pertahankan hidup, dari mengumpulkan makanan dan berladang tidak tetap menuju penanaman tumbuhan biji-bijian. Dengan kata lain mereka tidak lagi mengembara mencari makanan dari sumber-sumber yang relatif cepat habis melainkan mendirikan pemukiman tetap, bahkan desa-desa permanen dan secara sistematis menanam biji-bijian dan memelihara binatang.

Perubahan menuju budaya Neolitikum ini—bercocok tanam secara berkelanjutan dan beternak–menyebar dengan cepat dan meluas ke seluruh Eurasia. Ini berdampak pada banyak aspek kehidupan sosial, mengubah masyarakat kesukuan menjadi tampilan unik yang sama sekali baru. Lantaran bijian-bijian menjadi kurang tahan lama dibandingkan daging dan tumbuhan, maka suplai makanan disimpan sebagai cadangan di gudang penyimpanan, yang memungkinkan para anggota suku mengontrol distribusi pasokan makanan. Alhasil, anggota-anggota suku terpecah menjadi para pemilik properti dan akhirnya para pemilik ke kayaan, dan ini membangkitkan pembentukan kelas. Kelas-kelas pada gilirannya memperburuk stratifikasi hierarkis yang telah ada: seiring munculnya pertanian skala-besar, terutama disertai peternakan, dan munculnya sebagian pekerjaan kaum pria beserta hasil-hasilnya yang merupakan properti mereka sehingga menciptakan masyarakat patriarki yang memberi keunggulan bagi kaum pria dan nilai-nilai "kelelakian." Para pendeta yang menggantikan cenayang pada gilirannya meminta biji-bijian sebagai persembahan kepada dewa-dewa dan

melengkapi klaim-klaim spiritualistik yang kurang formal dan bersifat sesaat yang dihasilkan oleh para pendahulu mereka dengan menambahkan bentuk kelembagaan.

Namun bagi tujuan kita, akibat paling penting dari perubahan menuju pertanian ini adalah apa yang oleh V. Gordon Childe dinamakan *revolusi urban*. Sebagian pemukiman desa yang didirikan oleh para petani Neolitikum tumbuh membesar menjadi kota-kota kecil. Sebagian dari kota-kota kecil ini berkembang lebih lanjut menjadi kota-kota besar. Itulah pemukiman-pemukiman permanen besar dimana para penduduknya tidak menyediakan makanannya sendiri tetapi bergantung pada biji-bijian yang didatangkan dari daerah pedalaman. Bagi para penduduk kota-kota besar tersebut, kehidupan lebih terstruktur karena kedekatan tempat tinggal ketimbang kekerabatan dan aktivitas di lapangan kerja yang bersama-sama dijalani. Orang hidup berdampingan tanpa perlu menjadi kerabat, bahkan akhirnya tidak perlu mengenal satu sama lain. Saat itu, orang luar atau orang asing bisa bergabung dalam komunitas di sebuah kota besar hanya dengan tinggal di sana dan membawa serta pekerjaannya tanpa perlu menikah dengan penduduk setempat atau tanpa direkrut sebagai seorang prajurit. Dalam kenyataannya, dari sudut pandang kesukuan, kota besar adalah tempat dimana hampir semua orang yang ditemui mungkin adalah orang asing.

Di kota-kota besar yang paling awal sebagai mana di kota-kota besar sekarang, banyak orang

memiliki hubungan satu sama lain melalui pertalian klan yang memilih tinggal di lingkungan yang sama sebagai kerabat atau sebagai akibat dari diskriminasi etnis. Mereka terpaksa berbuat demikian terlepas dari kehendak mereka. Tapi hal terpenting adalah bahwa perlahan-lahan, seraya berkembangnya kehidupan kota menjadi jalan hidup, ikatan-ikatan kekerabatan semakin merosot sebagai prinsip orga nisasi sosial dan memberi jalan pada yang lainnya. Karena kekurangan rekan satu etnis, orang yang tinggal berdampingan berangsur-angsur saling melihat satu sama lain, bukan melalui pertimbangan keanggotaan suku melainkan melalui pertimbangan tempat tinggal dan lapangan kerja, status dan properti: sebagai tukang atau pedagang kaya, sebagai bangsawan atau pendeta.

Tanpa memandang kategori khusus, kekangan tertentu yang membuat orang terjebak dalam rasa kesukuan yang picik dan perseteruan antar suku telah menghilang. Tidak ada lagi orang-orang dari latar belakang keturunan yang sama yang bersikeras menganggap bahwa diri mereka adalah "manusia" dan orang lain adalah makhluk asing yang mungkin memusuhi atau nyata-nyata memusuhi. Prasangka etnis memang masih ada, tetapi dalam bentuk yang lebih mencair ketimbang pada masa kesukuan, yakni manakala perbedaan etnis bisa mengijinkan orang bahkan untuk membunuh orang luar. Tatanan sosial baru ini mengubah orang dari rakyat suku menjadi para penduduk kota yang heterogen dan kosmopolitan. Kota besar telah mengenyampingkan masalah keturunan sesuai dengan *humani-*

tas yang lebih umum, atau kemanusiaan yang sama, sebagai prinsip dasar organisasi sosial, dan mengakibatkan dimulainya satu proses penting yaitu proses penciptaan universalitas manusia. Dengan demikian, perubahan menuju kehidupan kota sama revolusionernya dengan revolusi pertanian, juga seperti halnya revolusi industri yang terbukti beberapa milenium kemudian.

Kemunculan Ranah Politik

Kota-kota besar heterogen, tiada lain itulah surga-surga egaliter. Sebaliknya, hubungan-hubungan sosial yang menggantikan kekerabatan kerap berdasarkan atas kelompok-kelompok status, kelas-kelas, hierarki militer dan hierarki relijius, sebagaimana juga stratifikasi gender. Elit-elit berkuasa mendominasi orang-orang biasa yang bekerja menyediakan barang-barang juga jasa militer bagi kelas berkuasa tersebut. Kependetaan memperoleh kekuasaan besar sebagai akibat ketidakacuhan terhadap fenomena alam pada era itu. Kota-kota yang paling awal seringkali merupakan kota kuil. Kota-kota besar tersebut—lebih dari jaman kesukuan–juga tidak kebal dari masa-masa brutal peperangan.

Terlepas dari tirani-tirani ini, revolusi urban menyingkapkan kemungkinan mengejutkan bagi sejarah bahwa komunitas-komunitas merdeka dan egaliter juga bisa terwujud dan bahwa orang-orang, sekali mereka mengenal kemanusiaannya yang universal, bisa mengatur diri mereka sendiri menurut standar yang rasional dan etis. Kebangkitan kota

telah membuka perkembangan ranah politik.

Adanya perhatian yang sama dan ruang publik yang dijalani bersama oleh komunitas-komunitas antar suku dalam kota inilah yang memungkinkan perkembangan tersebut terjadi. Ketika mereka keluar meninggalkan dinding-dinding rumah pribadinya—yakni, ketika mereka meninggalkan dunia sosial–para penduduk asing memasuki kota, lapangan, majelis dan tempat-tempat akomodasi umum. Mereka semua menentukan tempat dimana mereka bisa berinteraksi satu sama lain. Disinilah terjadi jual-beli dan juga disinilah laki-laki dan perempuan bisa bersosialisasi. Mereka bisa bertukar berita tentang minat bersama dan mendiskusikan perhatian khalayak. Permukaan dinding-dinding bisa menjadi tempat pengumuman publik serta berita. Pawai-pawai dan festival-festival keagamaan berbaris memadati jalan-jalan. Sehingga, sebagaimana terwujudnya kota-kota, terwujud pula ruang-ruang publik, ruang-ruang yang secara potensial bisa dirancang untuk tujuan sipil dan aktivitas politik.

Polis Athena membuat loncatan paling awal dalam mengubah ruang-ruang publik semacam demikian menjadi arena-arena politik. Terlepas dari masih adanya khayalan etnis, perbudakan dan dominasi gender di sana, polis itu mendefinisikan dan mengkonkritkan ranah politik sebagai arena swa-kelola demokrasi-langsung. Ia juga membuka kemungkinan sejarah akan adanya kebebasan politik—yakni, kebebasan positif sebuah komunitas sebagai satu kesatuan, yang dengan inilah kemerdekaan

individu terjalin erat.

Lebih banyak lagi yang akan kita miliki untuk diceritakan mengenai polis tersebut saat ini. Cukup untuk diamati di sini bahwa setelah kematian polis, demokrasi langsung ditenggelamkan oleh kekaisaran Alexandria dan Roma. Sebagian gambaran demokrasi langsung dipergunakan untuk propaganda kekaisaran, tetapi substansinya sebagai program kesadaran-diri telah dihancurkan. Namun beberapa abad setelah kejatuhan Roma, gagasan tentang kebebasan sipil bangkit kembali manakala sejumlah kota kecil di lembah Po dan Flanders mulai mengupayakan otonomi lokal untuk lepas dari para penguasa sementara. Komune-komune jaman pertengahan ini segera menuntut kemerdekaan sipil, termasuk kebebasan membuat hukum mereka sendiri dan menciptakan pengadilan sekuler sendiri serta bentuk-bentuk administrasi sipil.

Seperti pada *polis* Athena, para warga dalam komune-komune ini lantas mengelola urusan mereka menurut kriteria sekuler mereka sendiri, bukan menurut kaum elite yang memerintah mereka. Dengan demikian, mereka telah membangkitkan tradisi Hellenis, yakni kota sebagai wadah swa-kelola dan kebebasan. Karena begitu lama terbenam dalam masyarakat feodal otoriter, tidak heran satu peribahasa *Germanic* jaman pertengahan mengatakan, "udara kota membebaskan" *(stadtluft macht frei)*.

Tetapi ketimpangan sosial dan permusuhan etnis sama sekali belum lenyap seiring munculnya ranah politik. Bahkan tidak lebih baik dari masa-masa awal munculnya kota. Sejak jaman kuno

hingga sekarang, elit-elit politik telah menjalankan otoritas kehidupan politik, bahkan melegitimasi kekuasaan mereka dengan membuat klaim-klaim semi-kesukuan bahwa mereka adalah keturunan bangsawan kuno. Di Athena kuno, polis diracuni oleh perbudakan, patriarkisme, kekuasaan kelas dan imperialisme. Sementara komune-komune jaman pertengahan, bahkan yang paling demokratis pun, *toh* bersifat setengah oligarki, berdasar pada kekuasaan saudagar ningrat dan para tukang yang mengabdi para penguasa. Komune-komune ini lebih mirip republik ketimbang demokrasi. Kota-kota kecil di New England—sebuah babak penting lainnya dalam sejarah demokrasi langsung–mulanya melarang para anggota non-gereja untuk turut serta dalam rapat-rapat kota yang mereka adakan, juga tidak memperbolehkan perempuan ikut bersuara. Selain itu, orang-orang kulit putih merdeka yang menggelar rapat-rapat demokratis itu menangkapi dan menjual orang-orang Indian dalam perbudakan. Bahkan selama periode paling radikal dan demokratis sekalipun pada Revolusi Perancis, majelis Paris dipenuhi oleh xenofobia (rasa anti yang berlebihan terhadap orang asing) sehingga selalu berpikir tentang akan adanya konspirasi asing.

Namun semua kelemahan ini bukanlah semata-mata karakteristik masa demokrasi dalam sejarah melainkan juga karakteristik seluruh era yang mencakup jaman demokrasi tersebut. Menengok masa 2.400 tahun yang lampau, sekarang kita mungkin menilai bahwa patriarki dan perbudakan adalah menjijikkan dan tidak manusiawi, tetapi kepada

orang-orang Athena sulit diharapkan untuk bangkit menentang ciri-ciri mendasar masyarakat Mediterrania tersebut sebagai satu kesatuan. Hal yang luar biasa adalah bahwa Athena bangkit menentang otoritas kerajaan dan budaya penindasan, yang juga merupakan khas dunia Mediterrania. Mereka juga memperkenalkan dunia politik yang baru. Bahkan sebagai demokrasi munisipal sepanjang sejarah yang terperosok dalam ciri-ciri hierarkis pada era mereka, peristiwa-peristiwa liberatif yang mereka perjuangkan telah menopang dan melanjutkan tradisi demokrasi langsung melawan rintangan yang lebih besar. Kepada peristiwa-peristiwa emansipatif inilah kita akan melanjutkan pengkajian.
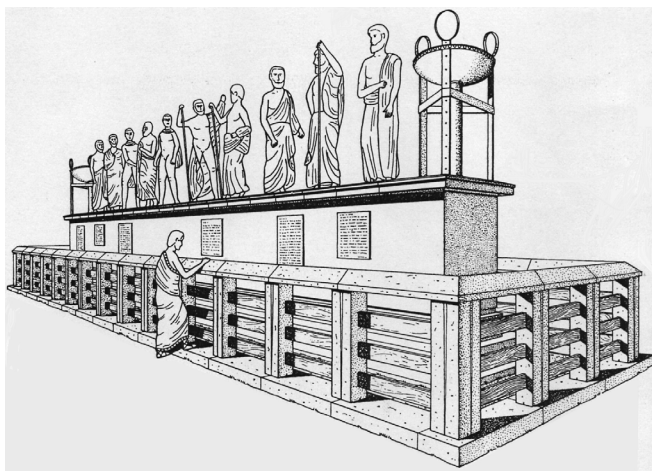
BAB 3

DEMOKRASI MUNISIPAL JAMAN KUNO DAN PERTENGAHAN

Marilah kita uji sebagian episode penting dalam tradisi demokrasi langsung.*

Polis Athena

Pada abad ketujuh SM, Attica—pusat kota Athena dan wilayah sekitarnya–adalah tempat permusuhan kelas yang tajam. Sekelompok kecil keluarga aristokrat menguasai kawasan ini, sementara sejumlah besar kaum petani kecil hidup sebagai budak. Kaum petani yang tertindas diwajibkan membayarkan sebagian hasil panen tahunannya kepada para majikan mereka. Ini keharusan yang kerap menjerumuskan mereka kedalam hutang dan kemiskinan parah. "Mayoritas orang biasa dibebani hutang yang harus mereka bayar kepada segelintir orang

*Catatan tentang perisitwa-peristiwa demokrasi yang ada dalam bab ini dan selanjutnya memang dipersingkat, demi keringkasan ruang dan proporsi. Ini memang tidak diniatkan untuk disajikan secara penuh atau lengkap. Tulisan dalam bab ini tidak hendak mengklaim untuk menguji sebab-sebab kemunculan maupun kemerosotan demokrasi, melainkan disajikan disini untuk membuktikan bahwa tradisi ini memang ada dan untuk menggambarkan sebagian ciri-cirinya. Para pembaca yang tertarik untuk belajar lebih banyak tentang episode-episode ini bisa melihat karya-karya yang terdaftar dalam "Bacaan Lebih Lanjut" di bagian akhir buku ini.

kaya," demikian dikabarkan oleh Plutarch. Jika hutang tidak dibayar, akibatnya seringkali sangat mengerikan. "Banyak orang tua yang bahkan dipaksa untuk menjual anaknya atau pergi ke pengasingan karena takut akan kekerasan para kreditor." Dalam situasi yang bengis ini, *demos*—kata yang acap kali digunakan untuk merujuk pada "orang awam" dan "rakyat sebagai satu kesatuan"–mendekati tepian revolusi. Keputusasaan memaksa mereka mencari sosok yang akan "membebaskan para penghutang yang diperbudak, meredistribusikan tanah dan melakukan reformasi total terhadap konstitusi."[1]

Perang sipil yang sengit sepertinya sudah diambang pintu untuk meledak di Attica. Namun akhirnya, pada 594 SM, segenap klan yang berjuang sepakat memilih Solon sebagai *archon* atau pimpinan mereka, untuk mewujudkan ketertiban di polis tersebut. Solon memulai langkahnya dengan menghapuskan semua hutang yang belum dilunasi dan menyatakan perbudakan hutang sebagai ilegal. Solon dipilih dengan tugas luar biasa yaitu untuk mengubah konstitusi dan mencegah timbulnya krisis-krisis baru. Begitulah, hukum-hukum yang dia berlakukan secara resmi telah mengubah struktur politik kota itu secara radikal yang mendorong dia mengembangkan konstitusi yang sama sekali baru.

Solon membangkitkan kembali *ecclesia*, majelis rakyat yang pernah ada pada jaman-jaman kesukuan namun menghilang pada abad-abad berikutnya. Pada masa pemerintahannya, ia tidak hanya

1. lutarch, "Solon," dalam *The Rise and Fall of Athens* (Harmondsworth: Penguin, 1960), hal. 54.

memulihkan kembali eklesia namun juga memperluas fungsinya—yang berbarengan dengan diperoleh kembalinya otoritas majelis tersebut untuk membuat hukum-hukum komunitas, memilih para pemimpinnya dan menggelar pertemuan rutin atas kehendak mereka sendiri. Akhirnya, *archon* baru memberi khalayak hak yang bukan hanya untuk menghadiri rapat-rapat eklesia melainkan juga memberikan suara terhadap isu-isu yang dirundingkan disana. Ini langkah krusial menuju pemberdayaan *demos*.

Selain eklesia, Solon membentuk dewan baru, Dewan Empat Ratus—disebut *the Boule*–untuk menangani bidang administratif pemerintahan swakelola Athena. Tapi Solon bukanlah seorang demokrat bersih. Ia masih mempertahankan elitisme tertentu dalam Boule dengan hanya memperbolehkan orang yang memiliki properti untuk memasuki dewan itu. Elite ini mempersiapkan agenda eklesia dan mengawasi perundingan-perundingannya. Namun *Boule*-nya Solon setidaknya menjalankan kontrol atas kekuasaan dewan Areopagus yang aristokrat, yang dengan dewan inilah keluarga-keluarga kaya pernah memerintah Attica sesuka hati mereka.

Reformasi Solonis lainnya adalah memperluas hak-hak individu dan menegakkan pengadilan rakyat untuk menjalankan persidangan. Dalam serangan lebih lanjut terhadap oligarki, keluarga-keluarga kaya diwajibkan melepaskan klaim keturunan mereka untuk menjabat *archon* Athena dan ia membukakan pintu kekuasaan eksekutif bagi *demos*. Namun tampaknya ungkapan paling me-

nyolok yang dihubung-hubungkan dengan Solon adalah keyakinannya bahwa siapa pun warga yang, sebagaimana dikatakan Plutarch, "dalam peristiwa revolusi, tidak berpihak kepada kelompok manapun," mesti dicabut hak suaranya. Ini menghina konsep Helenistis tentang kewargaan karena orang, atas kepentingannya sendiri, harus menunggu pihak mana saja yang muncul dalam sebuah konflik. Orang-orang Athena diharapkan secara politis terlibat, berpihak kepada salah satu golongan selama konflik sipil.

Setelah melakukan reformasi konstitusional ini, Solon pergi ke pengasingan sukarela selama sepuluh tahun. Meski kerusuhan sipil yang sengit muncul lagi, warga Athena memahami perubahan pada diri Solon dan mulai terbiasa dengan eklesia yang telah dikembangkan dan diberdayakan olehnya. Mereka memompanya dengan vitalitas politik dan mengembangkan etiket politik yang memajukan komunalitas sipil. Perlahan-lahan eklesia mulai diterima di kebanyakan bagian kota sebagai badan pengambilan keputusan akhir di polis tersebut. Ini membukakan jalan bagi adanya demokrasi umum.

Setengah abad setelah 561, "tirani-tirani" (bukan kata yang berkonotasi jelek saat itu) Peisistratus dan putranya Hippias lebih lanjut mengurangi kekuasaan kaum bangsawan Attic. Pada kenyataannya, banyak ciri-ciri demokrasi Athena harus dilihat sebagai upaya-upaya yang dilembagakan untuk mencegah bangkitnya kembali aristokrasi. Meskipun aristokrasi berulangkali berusaha memu-

lihkan oligarki kelompoknya yang lama, reformasi Solon dan Peisistradae dalam sistem ini tidak menjadi goyah. Para bangsawan yang keras kepala terpaksa pergi ke pengasingan dan tanah mereka dibagi-bagikan kepada orang miskin yang tidak memiliki lahan.

Sementara itu, tepatnya melalui partisipasi mereka dalam struktur konstitusi Solon, level politik warga Athena terangkat tinggi dan membuat mereka lebih yakin terhadap diri mereka sendiri dan kapasitas yang mereka miliki untuk mengelola urusan-urusan mereka sendiri.

Terbukanya kehidupan politik yang luar biasa yang menciptakan rasa percaya diri ini mencapai puncaknya antara kekuasaan Cleisthenes (berawal pada 506) hingga ke pecahnya perang Peloppone-sia pada 431. Cleisthenes menjalankan demokratisasi Athena dengan bersungguh-sungguh. Walaupun dia mempertahankan dewan Aeropagus, dia menghapuskan basis sosial kekuasaan aristokrasi —jaringan kekerabatan tradisional kaum bangsawan Attic–dengan melumpuhkan kekuasaan klan-klan itu dan menghapus sistem *Ionian* tradisional, yaitu sistem empat suku nenek-moyang. Sebagai pengganti sistem lama, dia menciptakan sekitar 170 *demes*, unit-unit yang berdasar bukan pada kekerabatan melainkan pada tempat tinggal. Tentu saja dengan demikian dia telah merekapitulasi revolusi urban, mengganti kesukuan dengan kedekatan sebagai kriteria keanggotaan dan membuat kewargaan menjadi tidak bisa dipisahkan dari teritorialnya. *Demes* tersebut segera menjadi pusat-pusat

demokrasi lokal yang bersemangat, yang setiap pusat itu dilengkapi majelis rakyat dan dewannya sendiri beserta pejabat-pejabat lain, semuanya dipilih setiap tahun.

Struktur kelembagaan baru ini (yang terdiri dari beberapa *demes* dan unit-unit lebih besar yang disusun *demes* dan dinamakan *trittyes*, sebagaimana halnya unit semi-kesukuan yang dipertahankan Cleisthenes agar membuat perubahan menjadi lebih mudah) merevolusi kehidupan politik di Attica. Eklesia—majelis warga–saat itu, tidak tertolak lagi, menjadi tempat seluruh kekuasaan politik. Semua warga pria Athena punya hak suara dan bisa berpartisipasi serta memberikan suaranya, bebas dari kualifikasi properti, tanpa memandang batasan-batasan kelas dan status. Hak politik mereka benar-benar sederajat, kaya dan miskin sama, seperti yang dinyatakan Pericles: "kemiskinan bukanlah halangan, setiap orang bisa menguntungkan polisnya betapapun rapuh kondisi dirinya."[2]

Perubahan-perubahan konstitusional lebih lanjut yang dibuat pada 462 telah melenyapkan jejak-jejak terakhir sistem hak istimewa dari demokrasi Athena. Dewan Aeropagus banyak diamputasi kuasa terdahulunya ketika banyak ke kuasaannya didistribusikan kepada *Boule*, eklesia dan pengadilan-pengadilan demokrasi rakyat yang baru saja didirikan. Para warga pun duduk dalam dewan hakim, seperti majelis mini, untuk menyelesaikan hampir semua kasus sipil dan kriminal.

---

2. ericles, dikutip dalam *Thucydides, Peloponnesian War*, 2.37.1.

Pada masa jayanya, eklesia adalah rapat massa di tempat terbuka dengan ribuan warga pria Athena menghadirinya. Eklesia merupakan rapat besar yang terselenggara sedikitnya empat puluh kali dalam setahun, yang setiap pertemuannya memakan waktu selama satu hari penuh. Semua orang bisa berpartisipasi dalam debat yang terbuka tetapi tertib, sesuai prinsip *isegonia*, hak universal untuk berbicara di dalam majelis. Semua orang bisa menggunakan hak suaranya yang diatur oleh kekuasaan mayoritas. Keputusan-keputusan mereka mempengaruhi segala persoalan kebijakan publik, termasuk perang dan damai, perjanjian diplomatik, soal-soal keuangan dan tugas-tugas publik.

Seraya polis tersebut mempunyai para pemimpin, seperti Pericles sang *strategos*, toh masa jabatan mereka singkat—biasanya selama satu tahun–dan tindak-tanduk mereka terus diawasi serta dinilai oleh majelis berdasarkan tingkat akuntabilitas yang dimiliki para pemimpin itu. Dengan begitu bisa dicegah munculnya seorang atau elite yang terus menerus berkuasa. Tapi kebanyakan posisi dipilih melalui undian. Pada kenyataannya, ketimbang pengangkatan atau bahkan pemilihan, penyortiran menjadi cara yang paling tersebar luas untuk memilih para pejabat di hampir semua institusi politik. Ketua majelis, yang memimpin rapat-rapat eklesia, tidak hanya dipilih melalui undian tetapi juga memegang jabatan hanya selama satu hari. Anggota-anggota *Boule* dipilih melalui undian untuk masa jabatan selama satu atau dua tahun, bahkan para *archon* pun dipilih melalui undian (dipilih dari

anggota *Boule*), seperti halnya anggota-anggota dewan hakim dan para fungsionaris lainnya. Penyortiran itu dapat dimanfaatkan sedemikian luas untuk mensyaratkan tingkat kompetensi politik yang tinggi bagi warga biasa.

Yang demikian ini, pada kenyataannya, benar-benar dijustifikasi, karena dibawah sistem ini, sejumlah besar warga pria Athena memperolah pengalaman langsung dalam tatanan swa-kelola yang bersifat demokratis. Di bawah sistem inilah kehidupan budaya kota tumbuh subur, melahirkan perkembangan termasyhur dalam dunia filsafat, drama, seni penulisan sejarah, fisika dan biologi yang mengangkat keagungan Yunani.

Komune Abad Pertengahan

Satu milenium kemudian, lama setelah keruntuhan polis Athena, Imperium Roma jatuh dan sistem feodal menghantui nyaris seluruh daratan Eropa. Kendati orang-orang Romawi telah mendirikan banyak kota kecil di Eropa, kota-kota itu bukan lagi merupakan wadah aktivitas politik. Gereja secara fisik melestarikan banyak kota, tetapi semata-mata sebagai pusat-pusat kekuasaan kependetaan. Namun sesudah tahun 1000 M, di utara Italia, di lembah Rhone, Rhineland dan Flanders, mulai muncul kelas pedagang baru disela-sela feodalisme. Para inovator ini menghembuskan nafas kehidupan baru ke dalam kota-kota kecil abad pertengahan tersebut. Antara akhir abad kesepuluh dan paruh pertama abad ketigabelas, kota-kota—atau komune-komune–yang

mereka bangkitkan kembali itu, berubah menjadi pusat-pusat perdagangan dan produksi per tukangan yang menguntungkan.

Awalnya kota-kota perdagangan dan pertukangan tersebut tetap berada dibawah ke kuasaan otoritas lama—biasanya dibawah gereja atau seorang pangeran yang wilayah kekuasaannya meliputi lokasi kota-kota bersangkutan yang tunduk pada pemerintahan eksternal. Namun berangsur-angsur otoritas gerejawi dan para bangsawan tidak mampu memenuhi kebutuhan lokal para penghuni komune. Hukum-hukum gereja khususnya, tidak relevan bagi perdagangan karena tidak mampu mengaturnya. Dengan menolak tunduk pada kontrol eksternal, komune-komune itu menjalankan cara mereka sendiri dalam menangani a.l. pajak perkawinan dan warisan. Mereka juga mengembangkan sistem legal mereka sendiri dengan menjamin kebebasan pribadi penduduknya dan membatasi hak-hak para pangeran dalam persoalan fiskal, peradilan dan yang lainnya, sampai akhirnya mereka mengelola urusan-urusan lokal mereka sendiri secara *de facto* jika tidak *de jure*.

Secara tak tertolak, komune-komune menuntut bahwa kedaulatan mereka pun harus termasuk kemerdekaan-kemerdekaan lokal—tuntutan-tuntutan yang biasanya ditolak oleh kekuasaan gereja dan para pangeran. Pada gilirannya, selama abad keduabelas banyak komune yang mulai membebaskan diri dari kekuasaan tersebut. Di utara Italia sekelompok kota yang menamakan dirinya Liga Lombard memberontak melawan Imperium

Romawi Agung untuk memperoleh kemerdekaan. Melalui Perjanjian Perdamaian Constance yang ditandatangani pada 1183, Imperium memberikan pengakuan kepada beberapa kota dalam liga tersebut dan mengijinkan mereka memilih pejabat-pejabatnya sendiri, membuat hukum-hukum lokalnya dan terutama memerintah diri mereka sendiri.

Apakah komune-komune itu? Mereka pada dasarnya adalah kesatuan-kesatuan warga kota —para pedagang, profesional dan para tukang–yang bersumpah, atau *conjuratio*, untuk saling menghormati kebebasan individu satu sama lain dan membela serta memajukan kepentingan mereka bersama. *Conjuratio* merupakan ungkapan kewargaan dalam sebuah komunitas sipil tertentu.

Institusi komunal paling awal di kota-kota Italia, dalam kenyataannya, adalah majelis umum yang terdiri atas "semua anggota komune tersebut." Majelis ini menyetujui anggaran dasar dan memilih seorang pemimpin eksekutif dan peradilan yang, selama masa jabatan satu tahun, ditugasi menjalankan administrasi urusan-urusan kota.

Seiring membesarnya komune serta ber tambahnya penduduk, diperlukan lebih banyak lagi pekerja pertukangan untuk menghasilkan barang-barang kebutuhan lokal dan perdagangan regional, seperti laras senjata dan kendaraan. Juga para pekerja memerlukan jasa persediaan makanan dan penginapan. Orang-orang pedalaman yang tertarik ke kota untuk membebaskan diri dari kewajiban-kewajiban feodal dan untuk memperbaiki kondisi kehidupannya mengambil pekerjaan ini. Tetapi

sebelum tahun 1200 mereka biasanya tidak ikut menikmati kebebasan politik komune tersebut. Maklum, sebagian besar komune bukanlah suatu bentuk demokrasi sempurna. Keanggotaannya terbatas hanya bagi keluarga-keluarga pendiri beserta keturunannya. Betapapun, semua penduduk dewasa tunduk pada aturan komune seperti keharusan membayar pajak dan ikut serta dalam milisia. Dan tidak semua orang diijinkan menjadi warga kota yang aktif secara politis. Kewargaan yang aktif bergantung pada kualifikasi properti, lamanya tinggal dan koneksi sosial. Ini juga berlaku dalam hak memegang jabatan publik, hak yang dinikmati oleh segolongan kecil penduduk pria.

Kekuasaan politik pada abad dua belas sesungguhnya berkembang di sekitar kaum bangsawan, sehingga pada 1160 di banyak komune hanya keluarga-keluarga tertentu yang mem punyai kemampuan ulung dalam urusan-urusan sipil. Bahkan manakala komune-komune itu sebagai satu kesatuan berjuang menentang para uskup dan penguasa feodal untuk memperoleh otonomi, kaum bangsawan ini justru mendominasi kepemimpinan, memanipulasi majelis dan pada dasarnya menguasai kota, yang mengakibatkan majelis-majelis sipil itu mandeg.

Namun situasi ini tidak berlangsung lama. Sekitar tahun 1200 sentimen-sentimen demokrasi mulai berkobar pada banyak komune. Di Nimes, misalnya, pada 1198 semua orang memilih para pemimpin mereka. Dalam komune-komune Italia, *popolo*—pekerja pertukangan, penjaga toko, profe-

sional, notaris, pedagang, penanam modal, borjuis komersial tetapi tidak termasuk para kuli penenun dan buruh–bangkit menentang aristokrasi dengan tuntutan agar kehidupan politik komunal diperluas dengan melibatkan partisipasi mereka.

Dalam beragam komune, *popolo* membentuk gerakan-gerakan wilayah kecil berupa serikat-serikat pekerja berkeahlian khusus yang menghubungkan orang-orang yang mempunyai pekerjaan yang sama. Serikat-serikat ini segera dilengkapi dengan massa rakyat yang dipersenjatai, juga diorganisasikan meliputi wilayah-wilayah kecil itu. *Popolo* yang termobilisasi lantas menentang kaum bangsawan di kota-kota seperti Brescia, Milan, Piacenza, Cremona, Assisi dan Lucca, diantara banyak kota lainnya. Perlawanan mereka mencapai taraf luar biasa dan berhasil mendemokratisasikan kehidupan politik komunal secara radikal. Antara tahun 1200 sampai 1260, di sejumlah komune termasuk kota-kota utama seperti Bologna dan Florence, *popolo* benar-benar mengambil alih kendali kekuasaan. Dewan Pavia berkembang dari 150 menjadi 1000 anggota pada tahun yang sama dan dewan Milan tumbuh dari 400 menjadi 900 anggota. Sementara di Montpellier, organisasi-organisasi serikat kerja benar-benar melebur dengan pemerintahan munisipal itu sendiri. Proses demokratisasi yang dramatis ini tercerminkan dalam tulisan-tulisan filosof aliran Aristotelian, *Marsilio of Padua*, yang menulis, "legislator, atau pihak yang paling layak membuat hukum, adalah rakyat atau dewan warga kota, atau salah satu bagiannya yang lebih penting,

melalui pilihan atau kehendaknya secara lisan terekspresikan dalam majelis umum warga kota."[3]

Berbeda halnya dengan kota-kota di belahan utara. Disini demokratisasi kehidupan komunal terjadi lebih lambat dibandingkan dengan di Italia. Di Freiburg, setelah terjadinya sebuah pemberontakan rakyat, komune mengubah sistem oligarki menjadi dewan yang terdiri atas dua puluh empat orang pemimpin, dipilih setahun sekali. Sementara Liege menciptakan sebuah republik kota yang menyerupai serikat kerja dan pada 1313 menghasilkan hukum-hukum baru yang bergantung pada persetujuan majelis rakyat yang terdiri dari seluruh warga kota tanpa memandang status. Tetapi di Flanders, di kawasan pembuatan pakaian Ghent dan Ypres, pemerintahan sipil dibentuk oleh para penenun beserta kuli pencuci kain. Dengan terorganisasi ke dalam serikat-serikat kerja, orang-orang pekerja ini —kaum proletar sebenarnya–menjalani perang kelas yang sengit melawan kaum bangsawan yang mengeksploitasi mereka. Mereka akhirnya memperoleh kemenangan atas musuhnya, untuk lantas mendirikan stuktur sipil yang memberikan hak berharga baik bagi mereka sendiri maupun bagi orang-orang serikat "kelas rendah" dan meniadakan kaum bangsawan.

Namun pada situasi paling demokratis se kalipun, komune-komune rakyat di Flanders, lembah Rhone dan Italia masih belum memberikan hak politik yang sama kepada seluruh warga pria. Mereka

3. *Marsilio of Padua*, Defensor Pacis (1324), dictio I, chap. 23, sec. 3, dalam John H. Mundy dan Peter Reisenberg, *The Medieval Town* (New York: Van Nostrand Reinhold, 1958), hal. 125.

tidak mengikutsertakan orang-orang yang tidak berkecakapan, kaum miskin, para pekerja ladang dan kebanyakan imigran, yang mereka nilai kalangan-kalangan tersebut adalah orang-orang yang tidak mandiri dan karenanya dapat dengan mudah dikendalikan para saudagar kaya dan kaum aristokrat. Proses demokratisasi ini juga tidak bertahan lama: pada masanya, bentuk-bentuk demokrasi yang paling awal ini mengalah pada bentuk-bentuk pemerintahan republik dan kekuasaan politik kembali kepada keluarga-keluarga berpengaruh yang akhirnya mengakibatkan komune-komune itu berakhir dalam kekuasaan dewan-dewan oligarki atau elite-elitr seperti Medici di Florence.

Betapapun belum sempurnanya demokratisasi pada komune-komune abad pertengahan, namun telah membuat dunia politik yang terbengkalai bangkit dari tidurnya dan bergerak selama beberapa abad di taman-taman umum dan ruang-ruang publik lainnya. Komune-komune ini dengan demikian membentuk peristiwa penting dalam tradisi yang tengah berkembang, yakni tradisi demokrasi langsung.

BAB 4

DEMOKRASI MUNISIPAL KOLONIAL DAN REVOLUSIONER

Rapat Kota New England

Kaum Puritan yang mendiami New England tidak menginginkan, juga bukanlah orang-orang yang dengan sadar membawa tradisi demokrasi langsung. Generasi asli yang mendirikan Koloni Teluk Massachusetts pada 1629 berpikir bahwa demokrasi sesungguhnya sangat amoral. John Winthrop, gubernur pertama koloni tersebut beserta koleganya lebih menyukai kekuasaan melalui orang terpilih, melalui "orang suci yang tampak," begitu mereka menamakannya, yang diduga menikmati "berkah" Tuhan. Bagi mereka, al-Kitab memerintahkan bahwa orang yang terpilih itu harus berkuasa melalui aristokrasi atau monarki.

Namun demikian, orang-orang Puritan New England mempraktekkan agama yang disebut Kongregasionalisme *(Congregationalism)*, yang sungguh demokratis. Sebagai suatu bentuk Pro testanisme Inggris yang memperjuangkan otonomi jemaah individu menentang para pendeta dan uskup, Kongregasionalisme berdasar pada gagasan bahwa setiap jemaah hamba Tuhan adalah tempat otonomi bagi dirinya sendiri, tidak tunduk kepada manusia manapun, yakni hanya dibimbing oleh Al-Kitab. Sehingga Puritanisme Kongregasionalis menolak semua aspek liturgis dan eklesiastis yang

ada dalam agama Kristen—yakni, aliran ini menolak bukan hanya gereja Roma tetapi juga Anglikan, yang sama-sama mempunyai ciri-ciri hierarkis Katholisisme. Maka kaum Kongregasionalis bersandar pada Al-Kitab, pada relasi pribadi mereka sendiri dengan Tuhan dan hubungan satu sama lain, yang tidak menggunakan perantaraan pendeta, demi keselamatan jiwanya. Dengan mengikatkan diri dalam komunitas-komunitas yang disatukan oleh ikrar, dalam Dunia Baru, mereka berjanji menaati Tuhan dan saling mengawasi keselamatan jiwa satu sama lain dalam semangat persahabatan yang saling menguntungkan.

Ketika mereka mendiami Koloni Teluk Massachusetts pada 1630-an, kaum Puritan Kongregasional membentuk kota-kota yang hampir otonom, tersusun atas gereja-gereja yang mereka kumpulkan sendiri. Setiap jemaah mengatur perkumpulannya sendiri melalui perjanjian yang ditulis bersama oleh para anggotanya sebagai satu komunitas. Sebuah ideal demokrasi yang baru tumbuh karenanya menegaskan etos tiap jemaah: bahwa seluruh jamaah berpartisipasi dalam keputusan-keputusan kelompok yang menunjukkan kekuasaan demokratis dan ketika tiap jemaah telah membuat perjanjian relijiusnya sendiri, maka tiap kota juga membuat perjanjian kota yang melalui inilah urusan-urusan temporal ditangani.

Praktek-praktek perencanaan-kota mereka mencerminkan orientasi yang menuju komunitas demokratis. Kelompok awal yang mendirikan kota akan secara kolektif menerima bukti penyerahan

tanah dari koloni untuk kemudian dibagi-bagikan di antara mereka sendiri. Setiap penduduk laki-laki diberi satu sampai sepuluh are tanah sebagai pengguna bebas, yang dengan tanah itu dia bisa menopang diri dan keluarganya. Sehingga kepemilikan tanah tetap egaliter dan perbedaan besar antara yang kaya dan yang miskin bisa dihindari selama satu periode waktu penting. Milisia kota yang terdiri atas semua anggota pria yang berbadan cakap dalam komunitas tersebut, adalah produk semangat egaliter yang sama manakala mereka apel berbaris di lapangan kota.

Sedangkan mengenai pemerintahan kota, para penduduk New England mengadakan rapat-rapat kota—majelis-majelis umum—yang mengadakan pertemuan reguler untuk menyeselesaikan urusan-urusan kota. Rapat kota itu pada dasarnya adalah perkumpulan jemaah agama—dengan desakannya tentang kebangkitan diri dan perjanjian otonomi—yang dibentuk untuk mengelola urusan-urusan sipil. Kendatipun rapat kota tersebut kekurangan fondasi teori demokrasi, rapat itu justru demokratis dalam prakteknya.

Dalam teori, hanya anggota gereja pria dewasa—mereka yang telah menerima "berkah" dan menjadi "orang suci yang tampak"–yang memenuhi syarat untuk menggunakan hak suara dalam rapat-rapat kota. Anggota-anggota non-gereja bisa menghadiri rapat dan berpartisipasi dalam perundingannya tetapi tidak diijinkan ikut dalam pengambilam keputusan yang sesungguhnya. Namun kota-kota itu dengan cepat menyadari bahwa sama sekali

tidak mungkin jika memperbolehkan hanya kelompok minoritas untuk hidup dalam dunia politik dan kualifikasi agama dalam pemungutan suara pun menjadi surat mati. Hak suara diperluas dengan mengikutsertakan semua penduduk pria dewasa yang memiliki properti atau penghasilan tetap (20 pondsterling, jumlah yang relatif kecil), dan akhirnya siapa saja yang sungguh-sungguh bersumpah bahwa dia memiliki sejumlah hak properti. Dunia politik New England karenanya semakin terbuka bagi para pria yang sebelumnya tidak diikutsertakan di hampir setiap wilayah dan kota di Inggris—yakni, bagi banyak kepala rumah tangga. Selain itu, siapa pun yang bisa memberikan suara juga memenuhi syarat untuk menduduki jabatan. Berlawanan dengan sistem prerogatif oligarki di Inggris, posisi jabatan di Teluk Massachusetts didasarkan pada pemilihan secara luas ketimbang pengangkatan secara sempit.

Rapat kota pertama, yang digelar di Cambridge pada 1632, adalah rapat bulanan yang diadakan dalam rangka membuat keputusan-keputusan berkaitan dengan persoalan-persoalan lokal. Kota-kota lain pun segera menggelar rapat serupa yang mereka adakan sesering yang mereka anggap perlu. Pada 1635, *General Court*—pemerintahan seluruh koloni–secara hukum mengakui rapat kota sebagai badan pemerintahan tertinggi di tiap kota.

Mulanya rakyat kota sendiri hampir-hampir pasif dalam menjalankan kedaulatan luas yang diberikan kepada mereka, baik oleh undang-undang 1635 maupun oleh situasi yang ada. Rapat-rapat kota

mereka gelar jarang-jarang, hanya beberapa kali dalam setahun dan hanya mengadakan transaksi bisnis rutin ketika rapat itu digelar. Rakyat kota lebih suka mendelegasikan kekuasaannya kepada orang terpilih—sejumlah pejabat yang membentuk dewan terpilih yang memegang wewenang administratif rapat kota.

Tidak ada satu hal pun dalam kode legal koloni yang bisa memberikan kekuasaan yang lebih kepada orang-orang terpilih itu ketimbang rapat kota itu sendiri. Mereka hanya diharuskan mengambil keputusan-keputusan rapat kota tersebut di antara sidang-sidangnya. Namun dalam generasi pertama pemukiman tersebut, orang-orang terpilih itu adalah orang-orang relijius yang lebih tua dari para pemukim lainnya atau orang-orang sekuler yang sebaya, yang sebenarnya merupakan aristokrasi *de facto* yang terdiri atas "orang-orang suci yang tampak" *(visible saints)*. Sebagai kelompok kecil yang terdiri atas tujuh sampai sembilan anggota, dewan terpilih bisa mengadakan rapat lebih sering dan lebih informal ketimbang kelompok lebih besar yang hanya akan membuat rapat kota menjadi tidak praktis. Dewan terpilih ini bisa membuat keputusan lebih cepat tanpa perlu berkonsultasi dengan berbagai macam sudut pandang individu. Rakyat kota bisa menjatuhkan orang-orang terpilih itu dari jabatannya dengan mudah—masa jabatan mereka berlangsung hanya setahun tetapi dalam tahun-tahun pertama rakyat masih menghormati orang mulia yang telah membimbing mereka menuju tanah baru dan membentuk ikrar keagamaan

mereka. Karena terpesona pada orang-orang terpilih itu, mereka memilihnya lagi secara tidak tentu tahun demi tahun dan memperkenankan orang-orang terpilih itu untuk kekuasaan pemerintahan utama, sementara rapat-rapat kota itu sendiri hanya berlaku sebagai stempel karet, menjadi tidak terhormat lagi karena adanya pengalaman dan kebijaksanaan lebih tinggi yang dimiliki orang-orang terpilih itu.

Tetapi antara 1680 dan 1720, rapat-rapat kota memperoleh kedudukan lebih tinggi atas dewan terpilih dengan mengubah pemerintahan oligarki *de facto* menjadi demokrasi *de facto*. Setelah generasi pertama orang-orang terpilih meninggal satu demi satu, generasi kedua tidak memerintah dengan level penghormatan yang sama seperti yang dinikmati para pendahulunya. Semata-mata karena usia mereka yang relatif muda, orang-orang terpilih yang baru itu kurang berpengalaman dan kurang mempesona. Sejak itu rakyat kota berangsur-angsur mengambil alih kembali inisiatif pembuatan kebijakan dari dewan terpilih. Ketimbang sekedar mengadakan rapat-rapat yang digelar hanya beberapa kali dalam setahun untuk meratifikasi keputusan-keputusan dewan orang-orang terpilih, rapat-rapat kota malah mengadakan pertemuan lebih sering lagi dan dengan bebas menjatuhkan veto terhadap ajuan-ajuan dewan orang-orang terpilih ketimbang menerimanya dengan patuh. Mereka sekarang mempraktekkan kekuasaan yang telah mereka miliki secara legal.

Akhirnya rapat-rapat kota itu secara sem-

purna menjadi milik mereka yang berfungsi sebagai badan-badan pembuat keputusan. Mereka menetapkan pajak, membelanjakan uang, mengesahkan pembagian tanah, membuat surat bukti tanah dan menyelesaikan sengketa penggunaan tanah, memberi izin kepada para imigran, memberikan konsesi ekonomi dan memperkenankan didirikannya berbagai macam perusahaan ekonomi yang berfungsi sebagai dewan-dewan perencanaan ekonomi kota. Dengan dijalankannya kekuasaan yang meluas ini, debat dan adu pendapat mulai berkembang dan sebuah semangat baru, yakni semangat aksi dan harga diri memenuhi rapat-rapat.

Sementara tentang pemerintahan koloni di Teluk Massachusetts, tiap kota mengirimkan utusannya kepada majelis di Boston. Dalam sejarah koloni dulu, para utusan, seperti halnya orang-orang terpilih, juga adalah orang-orang yang lebih tua, dan tindakan mereka di luar pengawasan khalayak. Tetapi pada generasi-generasi berikutnya rapat-rapat kota itu sangat berkepentingan memastikan bahwa para delegasi mereka dipilih di Boston dengan cara yang telah diinstruksikan oleh publik di kota kelahirannya: komite terpilih kota menyusun seperangkat instruksi bagi delegasi, berdebat dan memungut suara untuk memilih mereka dalam rapat kota, lantas rapat-rapat tersebut akan mengikat para delegasi untuk memberikan suaranya. Di bawah ikatan mandat itu, pejabat deputi sungguh-sungguh hanya menjadi perwakilan warga kota-kota mereka.

Akibat tekanan rakyat sesudah kira-kira tahun 1700, para delegasi yang dikirim ke majelis Boston diharuskan membawa catatan setiap persidangan tatkala kembali ke rapat kota masing-masing. Setidaknya ada satu kota yang bahkan mengirimkan seorang pengawal bersama delegasi untuk memastikan bahwa delegasi bertindak sesuai mandat publik dan jurnal-jurnal majelis dicetak tepatnya untuk mempublikasikan bagaimana para delegasi memberikan suaranya. Akhirnya pemilihan deputi menjadi acara tahunan—ini bentuk lain dari tantangan-tantangan yang harus mereka hadapi. (Sebagaimana dinyatakan John Adams pada 1776, "Manakala pemilihan tahunan berhenti, perbudakan pun dimulailah"). Karena kuatnya kontrol kota-kota terhadap majelis, majelis Boston tidak lebih merupakan badan legislatif ketimbang dewan konfederal atau kongres.

Selama sebagian besar masa di abad kedelapan belas, kota-kota di Massachusetts menikmati tingkat kebebasan yang luar biasa, yakni setingkatan kedaulatan yang begitu menawan bagi era mereka atau era manapun, menurut standar apa pun. Kendati "kongres konfederal" di Boston memberlakukan hukum-hukum yang mempengaruhi kota-kota itu, kebanyakan kota mematuhinya terutama atas kebijaksanaan mereka sendiri. Pada kenyataannya, pembangkangan justru menyolok: Massachusetts abad kedelapan belas adalah kota-kota yang tampil sangat tangguh, tidak hanya di atas kertas tetapi juga dalam prakteknya.

Pengalaman bersama kekuasaan lokal ini membuat warga kota memiliki orientasi yang benar-benar baru terhadap otoritas. Lama sebelum *Declaration of Independence*, kota-kota Massachusetts bekerja berdasarkan prinsip bahwa satu-satunya pemerintahan sah yang berasal dari persetujuan pihak yang diperintah adalah pemerintahan sendiri *(self-government)*. Inilah demokrasi langsung yang dipraktekkan kota-kota di Massachusetts, beserta apa yang kemudian menjadi pandangan politik radikal mereka, bahwa kerajaan Inggris disadari sebagai yang paling tidak toleran, dan sesudah Pesta Teh Boston, salah satu undang-undang pertama London memberlakukan hukum yang menutup rapat-rapat kota. Inilah "undang-undang yang tidak bisa ditolerir" yang, dengan kedaulatan sendiri yang dimiliki kota-kota, tidak bisa menindas praktek-praktek politik rakyat kota, dan penentangan yang mereka lakukan secara terbuka telah menjadi pemicu bangkitnya pemberontakan semua koloni Amerika melawan kekuasaan Inggris.

Dalam salah satu ironi sejarah, rapat-rapat kota tidak bisa mempertahankan secara utuh revolusi yang mereka bangkitkan. Kekuasaan mereka dicerai-beraikan oleh konstitusi Negara yang disusun selama perang dan selanjutnya oleh konstitusi federal. Meskipun rapat-rapat kota masih ada dewasa ini, terutama di New England, hari-hari tatkala mereka berdaulat telah lama lewat sejak berlalu dalam sejarah.

Seksi Paris

Di Prancis, majelis seksi Paris 1793 adalah institusi paling demokratis dan radikal yang muncul selama berlangsungnya Revolusi Besar.

Dalam persiapan menghadapi rapat penting Dewan-Dewan Umum di Versailles pada 1789, kerajaan Perancis diharuskan mendirikan distrik-distrik pemilihan di seluruh Perancis dimana khalayak bisa berkumpul dalam majelis-majelis untuk memilih deputi-deputi mereka untuk Dewan Ketiga—atau lebih tepatnya memilih sejumlah pemilih perantara yang pada gilirannya akan memilih para deputi, di tengah begitu segannya pihak kerajaan mengijinkan khalayak umum, bahkan yang memiliki properti sekalipun, untuk memberikan suaranya secara langsung. Enam puluh majelis distrik dibentuk di Paris, dimana selayaknya mereka menjalankan tugasnya. Namun meski mereka memilih deputi-deputi mereka, majelis-majelis Paris tetap melakukan pertemuan—meskipun mereka telah kehilangan alasan legal atas keberadaannya. Bahkan tatkala Dewan-Dewan Umum—yang kemudian dinamakan Majelis Nasional–mengadakan pertemuan di Versailles, majelis-majelis distrik Paris tetap menggelar rapat secara rutin sebagai badan-badan semi-legal, yang bertindak sebagai pelindung bagi kebebasan terbatas yang mereka miliki dalam situasi politik yang bergerak cepat.

Sesudah Desember 1789, majelis-majelis tersebut menjadi basis legal pemerintahan munisipal di seluruh kota-kota besar Prancis. Majelis

Nasional dan kemudian Majelis Konstituen yang mengikutinya, menyusun kembali enam puluh distrik ke dalam empat puluh delapan seksi. Semua kota besar lain di Prancis—Lyons dan Marseilles, Boedeaux dan Toulouse–juga dibagi ke dalam seksi-seksi, beserta majelis-majelis yang menangani urusan-urusan komunitas. Berbagai majelis seksi di dalam satu kota secara kolektif menjalankan kontrol terhadap otoritas munisipal pusat di kota tersebut, juga terhadap komune.

Seiring dimulainya revolusi, sekitar 44.000 komune lokal otonom—komune-komune besar dikontrol oleh majelis-majelis seksi–ikut menjalankan dunia politik di Perancis dengan memusatkan perhatian tidak hanya pada isu-isu lokal tetapi juga isu-isu nasional. Mereka memperoleh kekuasaan untuk menyuarakan cabang-cabang mereka sendiri dalam Tentara Nasional dan dalam isi maupun struktur politik. Mereka menjadi semakin demokratis dan radikal. Di Paris, majelis-majelis seksi bahkan membuka pintunya bagi semua warga pria dewasa—dan dalam beberapa kasus juga terbuka bagi wanita–tanpa memandang kualifikasi status atau properti. Seksi-seksi Paris itu sendiri sesungguhnya telah membentuk basis bagi demokrasi sipil langsung yang luar biasa radikal.

Gerakan seksi ini, yang matang di Paris pada 1792 dan 1793, adalah fenomena demokrasi-langsung sadar-diri. Tanpa memandang apakah anggota-anggotanya radikal secara politis, tiap majelis rakyat dalam seksinya membentuk badan pembuat keputusan yang membebaskan-membang-

kitkan (deliberatif) dan fundamental. Secara ideologis, *sectionnaires* itu menganggap kedaulatan rakyat sebagai hak yang tidak dapat dicabut, hak untuk dinikmati semua warga, hak yang tidak bisa direbut oleh para wakil rakyat di majelis nasional. Melalui pertemuan yang digelar di kapel-kapel dan gereja yang diambil alih, tiap majelis seksi memilih enam deputi untuk ditempatkan dalam Komune Paris, yang salah satu fungsi utamanya adalah mengkoordinasikan semua seksi di kota itu.

Tiap seksi juga memiliki bermacam komite yang menjalankan fungsi-fungsi sebagai polisi, suplai, keuangan dan pengawas wilayah kecil. Hal yang terpenting, tiap seksi juga memiliki batalion Tentara Nasional sendiri, termasuk satu unit artileri, yang melakukan kontrol dan semua gerakannya bisa memberikan pengesahan. *Sectionnaires* tersebut dengan bersemangat menaruh perhatian pada unit-unit militer ini: rapat-rapat majelis untuk pemilihan para perwira Tentara Nasional meraih angka kehadiran terbanyak, bahkan lebih banyak dari jumlah kehadiran dalam rapat-rapat pemilihan para pejabat sipil.

Pada 1793, selama puncak demokrasi radikal Paris, kehidupan seksi begitu bergelora, penuh perdebatan dan bersahaja. Masa-masa krisis bisa menarik ribuan warga ke dalam rapat majelis, gedung pertemuan seringkali dijejali massa sampai penuh sesak, sementara debat-debat seringkali begitu bersemangat, berbagai faksi beradu pendapat satu sama lain dengan sengit. Beberapa majelis seksi adalah tempat pertempuran politik yang sesung-

guhnya. Dalam satu seksi tertentu, kepentingan-kepentingan warga begitu beragam sesuai dengan status ekonomi, ideologi dan latar belakang sosial. Bahkan selama masa-masa paling militan dalam revolusi, orang-orang istana dan para moderat masih menghadiri rapat-rapat, seperti halnya orang-orang radikal ekstrem. Konfrontasi penuh kemarahan seringkali meledak menjadi ancaman, tembakan dan saling tuduh, jika tidak dikatakan adu jotos.

Sectionnaires radikal yang menjalankan dunia politik ini adalah orang yang sama yang menyerbu Tuileries pada Agustus 1792 dan menurun kan raja serta membawanya menuju eksekusi. Mereka jugalah yang membangkitkan pemberontakan radikal menentang Konvensi pada Juni 1793. (Setelah berhasil, pemberotakan ini tampaknya memberikan kekuasaan penuh kepada konfederasi nasional yang terdiri atas majelis-majelis seksi.) Selama periode terakhir dalam masa bergejolak inilah sang demokrat radikal Jean Varlet, yang rumah politiknya adalah seksi bernama *Droits de l'Homme*, berupaya mengorganisasikan para delegasi dari tiap seksi ke dalam suatu kekuasaan tandingan yang kelak membentuk "Komune komune-komune" (komune yang terdiri atas komune-komune), sebuah konfederasi kota-kota besar dan kota-kota kecil (komune-komune) di seluruh Prancis, untuk menggantikan Konvensi Nasional. Sehingga *sectionnaires* radikal tersebut berdiri di garis depan gerakan revolusioner di Perancis. Tidak diragukan lagi bahwa karena alasan inilah para pemimpin mereka adalah kalangan pertama yang ditangkap oleh rejim Jacobin tatkala

ia naik ke tampuk kekuasaan pada Juni 1793.

Tumbuh dari majelis-majelis distrik, majelis-majelis seksional menelikung jalan keberadaan mereka ketika mereka berada di jalan pembangkangan terang-terangan terhadap Negara-Bangsa, institusi besar yang justru juga melahirkan mereka. Namun mereka terus bergerak untuk bisa membangun struktur kelembagaan bagi demokrasi langsung yang tidak biasa itu. Sekaligus dengan itu mereka telah melahirkan momen penting khas dalam tradisi yang masih tersisa itu. Dalam konteks munisipalisme libertarian peran penting mereka amat istimewa bukan saja karena munculnya yang di kota terbesar di daratan Eropa, melainkan juga telah tampil sebagai penggerak yang meradikalisasi salah satu revolusi besar dalam sejarah.

BAB 5

NEGARA DAN URBANISASI

Sebagaimana Negara telah lazim diakrabi dalam kehidupan modern, fungsi-fungsinya pun makin dikenal oleh setiap anak sekolah. Tentunya juga seiring sedemikian jelasnya Negara sebagai wahana kekuasaan, toh adalah Negara pula yang menjadi fenomena yang kerap disalahpahami oleh hamparan spektrum politik. Kalangan liberal dan konservatif sama-sama menyambut dipeliharan-ya kekuasaan yang begitu nyata dalam Negara, merasionalisasi Negara sebagai yang diperlukan untuk menjaga tatanan sosial yang teratur, karena sifat manusia, dalam pandangan mereka, jelas-jelas cacat. Sebagian diantara mereka menilai lebih jauh dengan mengagungkan Negara sebagai berkah, sebagai pendorong majunya peradaban bahkan, dalam periode-periode optimistis, berpuncak sebagai "akhir sejarah."

Sementara pada kalangan kiri, mereka tidak memiliki ilusi tentang Negara sebagai instrumen dominasi. Namun mereka keliru dalam membaca ciri-ciri khususnya. Kalangan Marxis cenderung menganggap negara melulu sebagai refleksi dominasi kelas dan pada saat yang sama sebagai alat yang tepat untuk dimiliki dan digunakan demi kepen tingan kelas pekerja—ini suatu substitusi yang hanya mengekalkan dominasi. Adapun pada kalangan libertarian-kiri, mereka sama sekali menolak Negara, tetapi mereka umumnya berpikir tentang Negara

dalam kerangka istilah-istilah yang ahistoris, seakan-akan Negara telah terwujud sepenuh-penuhnya di dunia, sebuah tugu batu tanpa leluhur-pandahulu.

Nyatanya, seperti kota serta hamparan politik dan sosial itu sendiri, Negara jelas memiliki perkembangan sejarahnya yang tersendiri. Negara lahir secara berangsur-angsur dari acuan atau pupuk utamanya, yakni relasi hierarkis, dengan tampil beragam bentuk seiring tingkat-tingkat perkem bangannya dalam bentangan panjang evolusi sosial. Jauh dari sekedar menjadi monolitik, "Negara" sebagai sebuah pokok, sebuah ihwal, meliputi dari muasal Negara, separuh-Negara yang belum stabil dan baru terbentuk sebagian, kekaisaran, monarki, Negara feodal, teokrasi, republik, Negara kesejahteraan, otokrasi, kediktatoran dan Negara totaliter. Seperti halnya semua sistem hierarki dan dominasi kelas, Negara tampil amat beragam bentuk. Perkembangannya berliku-liku, penuh sendat, sangat banyak variasinya dan rumit.

Kebanyakan Negara modern berstruktur tunggal—yakni, kekuasaan yang dihimpunnya mengalir tunggal dari ibukota. Lokalitas-lokalitas yang sangat sedikit atau tidak memiliki kekuasaannya tersendiri, pada dasarnya menawar pihak pusat. Sistem Perancis, misalnya, terkenal karena sentralisasi ekstrimnya, dimana pemerintahan lokalnya dikontrol ketat oleh pusat. Ada jalur administratif langsung yang diturunkan dari Paris yang ditebarkan ke bagian-bagian dan sub-divisi pemerintahan lokal *(arrondissements)* bahkan hingga ke komune-komune di pedesaan yang terkecil sekalipun. Peja-

bat-pejabat lokal bertanggungjawab ke pusat dan harus menjalankan perintah-perintah pusat. Bahkan untuk membangun sekolah baru di komune kecil pun memerlukan keputusan setingkatan kementerian di Paris. Sistem sentralisasi ini diwariskan kepada Prancis melalui Konstitusi 1791; sebagian besar negara-negara di Eropa yang pernah diserbu Napoleon mengadopsi sistem ini dalam berbagai versi dan dari situ menyebar ke wilayah-wilayah lain di dunia.

Berbeda dengan sistem pemerintahan lokal di Inggris yang secara tradisional lebih ter desentralisasi, kecuali proses perluasan kekuasaan yang diprakarsai Henry II dan Henry VII. Korporasi-korporasi munisipal, sebelum Penaklukan Norman, adalah sedari dulunya merupakan wilayah merdeka London, yang ditegaskan oleh perijinan pemerintah dan bentuk-bentuk pengesahan lainnya. Wilayah-wilayah *(counties)*, distrik-distrik pedesaan dan urban, kawasan sebaran jemaat gereja di pedesaan dan urban, sektor-sektor beserta kota-kota kecilnya dan sektor-sektor dari wilayah—semua yurisdiksi lokal ini secara tradisional bebas dari kontrol langsung otoritas pusat. Namun sejak pertengahan abad kesembilan belas, tradisi otonomi lokal ini digempur dan kini menghilang dengan cepat.

Kebangkitan Negara-Bangsa

Tanpa harus menimbang seberapa jauh Negara tersentralisasi atau terdesentralisasi, tampaknya *toh* Negara hadir berdampingan secara tidak gampang

dengan otonomi munisipal—dengan kota-kota besar dan kecil yang menikmati kebebasan yang amat berarti. Bahkan sudah sedari zaman Imperium Romawi, kaisar Augustus beserta para keturunannya menindas otonomi munisipal agar tunduk pada pusat administrasi kekaisaran. Mereka memberi kota-kota kebebasan yang hanya cukup untuk menjaga ketertiban kota-kota itu sendiri dan memeras upeti dari para penduduk yang takluk. Beberapa abad kemudian, para pangeran dan raja di Eropa menerapkan pendekatan serupa dengan membatasi kebebasan munisipal agar mereka bisa meng konsolidasikan kekuasaannya sendiri.

Memanglah, hal mendasar demi kebangkitan Negara-Bangsa ini adalah bahwa kekuasaan lokalitas-lokalitas yang ada harus dilemahkan dan terutama sekali kota-kota yang sudah nyaris otonom itu harus bertekuk lutut di hadapan kekuatan birokrasi Negara, polisi dan militer. Pusat pertama-tama menusuk lokal-lokal itu dengan menetapkan sistem-sistem legal terpadu yang diberlakukan pada daerah-daerah yang sebelumnya masing-masing unik. Di Inggris pada abad kedua belas misalnya, "hakim-hakim raja" menyebarkan hukum umum dalam yurisdiksi feodal yang terpecah-pecah. Dibawah kekuasaan Henry II, sistem itu diperluas mencakup kasus-kasus sipil maupun kriminal, sistem yang dirasionalisasi pada ranah persidangan pengadilan, hukuman dan para hakim, dan kehakiman kerajaan yang profesional. Di daratan ini, para raja dan pangeran memaksakan kode legal Romawi terhadap kawasan-kawasan luas yang menyapu ber-

sih konvensi-konvensi hukum lokal dan dengan demikian memperlemah kedaulatan lokal-lokal yang ada.

Penyeragaman sebaran lokalitas ini ditopang oleh kekerasan tatkala Negara-Negara kerajaan menyerbu lokal-lokal, menggabungkannya dan lantas memaksakan administrasi dari pusat. Bahkan para penguasa yang paling normal sekalipun pada periode awal era modern menggunakan kekuatan militer untuk memperluas kekuasaannya. Dan raja-raja absolut di Inggris dan Perancis menebar intervensi hanya demi menumpuk kekuasaan dalam genggaman mereka sendiri. Mereka membentuk Negara berskala besar dari penaklukan kota-kota bebas, konfederasi-konfederasi lokal dan banyak daerah yang masih bersifat feodal.

Sembari otoritas pusat berusaha membatasi kekuasaan bangsawan-bangsawan feodal lokal, mereka juga membatasi kebebasan munisipal-munisipal yang amat bergairah yang merintangi laju absolutisme mereka. Di Italia pada abad keenam belas, dengan gaya sinisnya Machiavelli menasehati "pangeran" pembangun-Negara, yakni sang penguasa atau raja dominion, bahwa lebih sulit menaklukkan kota-kota yang memiliki sejarah kemerdekaan dan pemerintah sendiri ketimbang kota-kota yang telah terbiasa dikuasai raja.

Raja-raja Prancis beserta para menterinya sangat mengikuti nasihat Machiavelli: Negara Prancis pun terbentuk membesar dengan "ongkosnya" berupa tergusurnya kemerdekaan-kemerdekaan munisipal. Pada 1463, Louis XI

menancapkan aturan yang menyatakan bahwa ia berhak mengubah konstitusi kota manapun sesuka hatinya, “orang-orang dibikin tak berdaya kecuali sekedar menonton,” sementara Louis XIII dan Richelieu semakin absolut untuk “merobohkan tembok-tembok kota”. Selama Revolusi Prancis, pemerintahan Jacobin sama sekali tidak membendung dorongan sentralisasi ini: Bisa kita simak, Konstitusi 1791 menciptakan departemen-departemen atau wilayah-wilayah terbagi yang dengan itu justru mengabaikan ekspresi politik lokal yang berharga, sementara pada 1793-94, Komite Keselamatan Publik bentukan para pendukung Robespierre, nyatanya tidak lain hanya menghapuskan lembaga-lembaga munisipal yang sedari awalnya sudah revolusioner di Paris dan Prancis pada umumnya.

Negara-Negara monarki yang berkuasa dan belakangan kemudian beralih menjadi republik-republik, terus meningkatkan tekanan dan tuntutan berupa penerobosan langsung terhadap kemerdekaan dan perampasan kedaulatan atas beragam sebaran kota yang berada di wilayah kekuasaan mereka. Ketika Negara menyusun administrasi yang lebih besar dan lebih efisien, Negara mengalihkan fungsi-fungsi yang secara tradisional sudah menjadi hak prerogatif kota-kota itu, menjadi sesuatu yang diberikan oleh Negara kepada kota-kota tersebut

> Sebenarnya tidak ada metode pasti untuk menguasai mereka kecuali dengan merampoknya. Dan siapapun yang menjadi pengua-

> sa sebuah kota bebas dan tidak menghancurkannya, pada gilirannya ia akan dihancurkan oleh kota itu, sebab kota itu akan senantiasa menemukan dorongan untuk memberontak atas nama kemerdekaan dan panggilan dari masa lampau, yang dilupakan bukan oleh perjalanan waktu juga bukan oleh keuntungan yang diterimanya.[1]

Dan itu bukan hanya berupa yurisdiksi legal tetapi juga regulasi ekonomi, pembuatan uang logam, pajak dan bahkan hubungan diplomatik. Sementara itu, perang yang tampaknya tak henti-henti antar para raja harus dibiayai. Kota-kota dengan segala kemakmuran perdagangannya, menjadi target utama untuk dijadikan sapi perah bagi kerajaan. Dalam proses memeras dana dari kota-kota, para raja memperluas kontrol atas kota-kota. Ini proses yang secara berangsur-angsur melumpuhkan kebebasan sipil. Pada abad ketujuh belas, kota yang tadinya bebas telah dicaplok sepenuhnya oleh Negara monarkis dan digabungkan ke dalam struktur yang tersentralisasi.

Perlawanan terhadap Penindasan Negara

Diluar Eropa, kita menemukan hanya sedikit konsep politik yang mengaitkan kota dengan kebebasan sebagai oposisi terhadap dominasi Negara, atau konsep yang menelaah kota dengan kehidupan poli-

---

1. Niccolo Machiavelli, *The Prince*, bab 5, dalam *The Prince and the Discourses* (New York: Modern Library, 1940), hal. 18-19.

tiknya sendiri, juga adat dan kebiasaannya dalam posisi keberbedaan yang bertentangan dengan Negara. Kota-kota Asia, misalnya, adalah utamanya berlaku sebagai pusat-pusat administrasi kerajaan teokratis, dimana Negara dan kota berada dalam kesinambungan yang sedikit sekali menyisakan ruang sipil untuk bisa terekspresikannya pemberontakan. Sebaliknya, pusat-pusat kota di Eropa yang gandrung-kemerdekaan, melahirkan pemaknaan yang unik tentang kota sebagai tempat kebebasan sipil. Dan demikianlah memang, sejak jaman kuno sampai sekarang, kota telah menjadi lawan utama terhadap sentralisasi dan perluasan Negara.

Pada abad keduabelas, konfederasi komune-komune Italia utara yang dikenal dengan nama Liga Lombard Pertama memberontak terhadap upaya Frederick I Barbarossa yang hendak merebut dan menancapkan "hak" kekaisaran terhadap komune-komune di lembah Po. Oleh sebab komune-komune yang berkonfederasi itu melawan dan mengalahkannya dalam pertempuran di Milan, maka mereka bisa menegakkan perdamaian pada 1183 yang kemudian menjadi basis bagi kemerdekaan komunal mereka. Sementara itu di Prancis, kawasan Nimes, Avignon dan Marseilles, yang setelah berhasil mempertahankan kemerdekaan mereka pada awal abad ketigabelas, mereka bergabung sebagai federasi-federasi bebas alias saling mengkonfederasikan diri dan dengan itu berarti mengurangi kekuasaan para pangeran. Etienne Marcel, seorang pemimpin terkemuka *Third Estate* pada abad ke empatbelas di Paris, berupaya membangun aliansi kota yang dengan

dukungan petani, yang akan mengurangi dan mungkin menghapuskan kekuasaan monarki Prancis.

Di belahan utara Eropa, kota-kota kecil dan besar berkonfederasi tidak hanya untuk memajukan perdagangan dan kemakmuran bersama tetapi juga untuk saling melindungi kemerdekaan mereka. Enam puluh sampai delapan puluh kota-kota di Jerman Utara, termasuk pelabuhan-pelabuhan utama di Baltic, berkonfederasi dalam Liga Hanseatic, yang mengontrol perdagangan laut utara selama beberapa abad. Konfederasi lain yang juga berbasis perdagangan dan pertahanan diri adalah Liga Rhenish pada abad kedua belas dan ketiga belas di kawasan yang sekarang dikenal sebagai wilayah Jerman. Pada tahun 1300 kebanyakan munisipal di hamparan Jerman selatan, persisnya di Swabia, tampil sebagai kota-kota berstatus bebas (dari) kekaisaran—mereka nyaris sepenuhnya bebas dari kontrol Kekasiran Roma Suci, dari Charles IV dan dari bangsawan-bangsawan, para raja kecil tuan tanah teritorial, yang *ngotot* mengklaim kekuasaan atas mereka. Dalam aksi perlawanan lebih lanjut, pada 1834, mereka membentuk Liga Swabia yang pertama, *(the Schwäbische Städtebund)*, tanpa persetujuan kekaisaran. Adapun di Belanda, pada abad keempat belas komune-komune Flemish menggabungkan kekuatan dalam pemberontakan melawan para bangsawan besar, sementara dua abad kemudian kota-kota besar di Belanda beserta warga pembentuk kelembagaan kota *(Stadholder)* bersatu untuk menggulingkan kekuasaan Spanyol dan meletakkan dasar-dasar bagi sebuah Konfederasi Be-

landa.

Dalam kenyataannya, seiring terbitnya abad kesembilan belas, masih belum jelas bahwa Negara-Bangsa, ketimbang konfederasi, akan menggoreskan tampilan kontur kekuasaan di Eropa. Formasi-formasi federatif-lah yang justru amat mewarnai dinamik di Eropa tengah dan selatan. Sendat dalam pembentukan Negara-bangsa Italia dan Jerman sebagian besar disebabkan rintangan-rintangan perlawanan dari kota-kota beserta konfederasi-konfederasinya dan kendati parokialisme atau kepicikan lokal juga merupakan salah satu faktor, demikian juga tradisi kuat otonomi munisipal dan perlawanan terhadap sentralisasi.

Sampai saat ini, perlawanan terhadap otoritas Negara berlanjut tumbuh menyebar ke desa, lingkungan kecil dan jaringan komunitas kota. Pada 1960-an, Gerakan Warga Madrid yang terbangun sepenuhnya atas berbagai kelompok dan institusi dari lingkup lingkungan-lingkungan kecil, memainkan peran utama dalam melemahkan rejim Franco. Pada akhir 1980-an, guncangan yang lantas meruntuhkan Uni Soviet sebagiannya toh disebabkan oleh gerakan-gerakan yang menuntut otonomi regional dan lokal. Manakala gerakan-gerakan komunal mekar meluas, Negara-Bangsa goyah.

Urbanisasi

Dewasa ini, munisipalitas terancam oleh kekuatan-kekuatan yang kekuasaannya tak terbayangkan oleh kota-kota yang memberontak memperjuangkan

otonomi pada abad-abad sebelumnya. Urbanisasi —hama luar biasa yang tak berbentuk dari kapitalisme–tengah melahap entitas-entitas berskala manusiawi yang jelas dari semula dikenali sebagai kota-kota. Komunitas-komunitas kecil diserap oleh yang lebih besar, kota-kota oleh metropolitan, metropolitan oleh aglomerasi atau penggabungan dalam gurita sabuk megalopolitan. Sebaran acak, kotak-kotak kondominium yang berkembang biak, jalan layang, pusat-pusat perbelanjaan tak berwajah, lahan parkir dan taman-taman industrial bahkan menjalar jauh melintasi batas-batas kekotaan. Gejala urbanisasi beralih menjadi penyakit yang menggerogoti potensi pembebasan kota-kota, sebutlah itu mengancam keberlangsungannya sebagai akar demokrasi langsung. Demikianlah urbanisasi lantas tampil menggenapkan upaya kaisar-kaisar Romawi, raja-raja absolut dan republik-republik "borjuis" pada masa lampau: penghancuran hamparan politik.

Pada masa kini, sebagaimana bisa kita cermati, populasi di Amerika Utara dan Eropa telah kehilangan makna kewarga(kota)an *(citizenship)* dan politik sebagai praktik swa-kelola komunitas demokratis; sekaligus juga tampaknya mereka kehilangan makna kota itu sendiri. Tak pelak, manajemen kota sudah tak ada bedanya dengan manajemen korporasi bisnis. Sebuah kota saat ini dianggap berhasil jika memperoleh surplus keuangan dan memiliki infrastruktur fisik yang diperlukan untuk memajukan pertumbuhan korporasi-korporasi. Kota dianggap gagal jika mengalami de-

fisit dan beroperasi secara tidak efisien menurut standar industri dan komersial. Kandungan etik kehidupan kota tengah digusur oleh pertimbangan-pertimbangan bisnis yang menegaskan "tuntutan dasar" *(bottom-line)*—memacu dan mempertinggi "pertumbuhan"–yang berupa akselerasi arus pemasukan kapital melalui peningkatan dan perluasan basis pajak lokal dan secara umum dengan me ninggikan dorongan ekspansi urban secara kanibal. Dengan begitu, jantung fondasi-fondasi demokrasi sipil terpojok dalam ancaman terbesarnya.

Respon Sipil

Di Amerika Serikat, merosotnya ruang sipil adalah topik kesedihan para komentator dari seluruh spektrum politik. Kalangan liberal dan konservatif sama-sama melemparkan penyesalan, mereka menatap ke masa lalu manakala orang-orang Amerika lebih berorientasi pada komunitas dan aktif secara politik serta lebih mau tahu dan peduli urusan-urusan publik. Mereka menyesalkan hilangnya kecenderungan yang digarisbawahi oleh Tocqueville pada 1832, bahwa warga Amerika mesti membentuk "asosiasi-asosiasi" sipil dan ketetanggaan —itulah, tiada lain berupa kelompok-kelompok sipil, asosiasi-asosiasi ketetanggaan, klub-klub dan yang semacamnya. Sementara kalangan liberal menyalah kan kekuasaan tak terbatas korporasi-korporasi atas kehilangan ini, kaum konservatif menyalahkan tirani negara yang tersentralisasi.

Munisipalisme libertarian juga menyesali

menyusutnya ruang publik yang pada tingkatan lokal, itu berarti merosotnya ranah politik. Tapi bukan salah satu diantara kapitalisme atau Negara-Bangsa yang bertanggungjawab atas kehilangan ini. Melainkan keduanya sama-sama bertanggungg jawab karena dua hal itu adalah bagian dari sistem yang sama. Negara, kita tahu, merusak kebebasan munisipal lama sebelum kapitalisme muncul berkuasa dan Negara terus melakukannya dengan mencerai-beraikan kehidupan komunitas sesuai selera birokrasi. Sedangkan kapitalisme, ia menggerogoti aktivitas publik sesuai selera pasar dan menciptakan tuntutan-tuntutan ekonomi yang luar biasa intensif terhadap orang-orang kebanyakan, laki dan perempuan. Kapitalisme mempercepat penggerusan kebebasan munisipal sampai suatu titik dimana kebebasan itu hilang sepenuhnya dari daratan Eropa dan Amerika Utara. Kombinasi sinergis mereka telah membinasakan kehidupan komunitas sekaligus individu, dan pada saat yang sama telah memaksa orang untuk hanya menyibuk kan diri dengan isu-isu tentang kelangsungan hidup materil ketimbang isu-isu yang meluas tentang komunitas swa-kelola.

Munisipalisme libertarian tidak setuju dengan jalan keluar yang ditawarkan kalangan liberal dan konservatif untuk memulihkan ruang publik. Kalangan konservatif menganjurkan pengalihan kekuasaan "federal", yakni kekuasaan Negara-Bangsa, turun ke "lokal" yaitu ke tingkat negara bagian atau propinsi dan dengan demikian akan menghapus birokrasi pusat. Dengan pendelegasian serupa

itu, demikian mereka meyakini, akan menghapus tangan beku (kekuasaan) pemerintah pusat sehingga "pasar bebas" dapat menggerakan tangan gaibnya dengan bebas dan memulihkan kepercayaan diri dan kewiraswastaan *(entrepreneurship)* individu. Solusi ini jelas tidak tepat, karena memperkuat ekspansi kapitalis hanya berarti mempercepat penghancuran hamparan politik.

Adapun kalangan liberal berkehendak memulihkan ruang sipil dengan memajukan partisipasi warga dalam proses-proses Negara. Mereka ingin warga memilih, menulis kepada para legislator mereka tentang isu-isu yang harus diperhatikan, untuk berperan-serta dalam "rapat-rapat kota" elektronis, memperluas penggunaan inisiatif dan referendum, atau melembagakan keterwakilan proporsional. Cara-cara seperti ini, menurut mereka, akan memperbesar kekuasaan Negara bagi mereka yang mau menggunakannya untuk menahan laju kapitalisme. Tetapi solusi liberal ini juga problematis, karena membuat kapitalisme maupun Negara-Bangsa tetap utuh. Ini adalah semata-mata jalan adaptif untuk bekerja dalam parameter Negara-Bangsa dan membiarkan kapitalisme relatif tidak terganggu, malah mungkin memberkahinya dengan "wajah manusiawi".

Amat berbeda dengan kedua ajuan itu, munisipalisme libertarian adalah filosofi politik revolusioner yang membidik pelenyapan kapitalisme dan Negara-Bangsa dan menggantikannya dengan relasi-relasi sosial yang lebih manusiawi dan kooperatif. Seperti akan kita lihat, sistem ini berang-

kat dari hamparan politik yang masih tersisa pada tingkat lokal, yang bekerja untuk membangkitkan dan mengembangkannya menjadi kekuatan besar yang ditopang oleh dirinya sendiri serta memberdayakan rakyat sehingga mereka mampu menghantarkan masyarakat kita melampaui proses-proses sosial yang destruktif itu.

Untungnya, kota sebagai situs perlawanan belum lenyap sepenuhnya. Kendati tenggelam dalam Negara-Bangsa terurbanisasi yang merujuk pada kapitalisme, kota tetap hidup sebagai sesosok keberadaan historis, sebuah lumbung yang berusia sangat panjang berisikan tradisi-tradisi, pertautan rasa yang halus dan dorongan-dorongan mendalam. Kota menyimpan memori-memori kebebasan masa silam, swa-kelola terdahulu, kemerdekaan sipil di masa lalu yang demi itulah lapis yang tertindas berjuang dalam abad-abad pergulatan sosial.

Tradisi-tradisi serupa demikian, yakni berupa tindak penghimpunan kembali memori yang toh tetap hidup dalam dirinya, tampil merepresentasikan tantangan terhadap Negara-Bangsa. Munisipalitas, dalam kenyataannya, terus-lanjut menghantui Negara sebagai situs swa-kelola politik yang tidak bisa dikekang. Sehingga separah apapun komunitas merdeka dan demokrasi langsung digerogoti oleh Negara, urbanisasi dan kapitalisme, kehidupan politik munisipal yang sadar-diri tetap berjalan sebagai prospek terpendam, sebagai kemungkinan yang bisa mekar, sebuah tujuan emansipasi manusia yang tetap belum terpenuhkan.

Pada masa kini, sayangnya, memori-

memori seperti itu lebih kerap dibangkitkan oleh golongan kanan ketimbang golongan kiri. Pada akhir 1980-an, Liga Lombard yang *chauvinis* tumbuh di utara Italia, yang dengan cerdas menyerukan pemecahan Negara Italia menurut otonomi regional. Bukan kebetulan jika Liga tersebut juga berupaya mengakhiri arus uang yang oleh Negara dialirkan dari utara—kawasan terkaya di Italia–menuju ke kawasan selatan yang lebih miskin di negeri itu. Gerakan tersebut mengingatkan kembali pada konfederasi kota-kota lembah Po pada abad pertengahan yang menjungkirkan kaisar Barbarossa —meskipun kali ini pihak yang dianggap musuh tidak berada di Alps melainkan di kawasan lain di Italia (yang tampaknya menjadi alasan Liga itu dengan cepat mengubah namanya dari Liga Lombard menjadi Liga Utara). Namun gerakan 1980-an itu tak ubahnya komentar menyedihkan bagi kondisi kalangan kiri libertarian yang pada masanya dulu justru melahir-kembangkan pengertian komunalisme munisipal dan konfederalisme, yang *toh* kini pemaknaan itu dikooptasi dan dikemas oleh kalangan kanan untuk melayani tujuan-tujuan reaksioner.

Munisipalisme libertarian bukanlah pemberontakan para pembayar pajak. Juga bukan siasat yang mengijinkan kota-kota kaya untuk melebarkan basis dan beban pembayaran pajak guna menopang kota-kota yang lebih miskin. Sebaliknya, sebagaimana akan kita lihat, munisipalisme libertarian berupaya menghapuskan seluruh kesenjangan kemakmuran antara daerah kaya dengan daerah miskin.

Kini antipati terhadap pemerintah pusat

tengah menjalar di negara-negara Barat. Antipati ini tampil beragam bentuk yang terentang mulai dari sekedar skeptisisme terhadap efisiensi Negara, kekecewaan atas direbutnya kuasa warganegara sampai ke kebencian terhadap pelanggaran yang dilakukan Negara. Sebelum ia lagi-lagi dieksploitasi oleh kalangan kanan, sentimen-sentimen tersebut harus disalurkan menuju tujuan-tujuan yang tercerahkan.

Meskipun saat ini dunia kompetitif tengah berkibar, yakni masyarakat pasar akumulatif yang dianggap sebagai "akhir sejarah" alamiah, tetaplah ranah politik harus dibangkitkan kembali dan diluaskan dalam gerakan yang sadar-diri demi demokrasi langsung munisipal. Disinilah penggolongan tiga elemen *(tripartite)*, yaitu masyarakat, politik dan Negara, membutuhkan programatis yang mendesak. Hamparan politik harus dibangkitkan —atau diciptakan, jika tidak ada–dan kandungan demokratisnya diperluas melampaui batas-batas era sebelumnya sehingga mampu menjadi arena hidup bagi perubahan, pendidikan, pem berdayaan dan arena konfrontasi terhadap Negara dan kapital. Sebagai lokus swa-kelola warga dan demokrasi warga langsung, ranah politik adalah sebuah arena yang berpotensi menentang Negara-Bangsa, urbanisasi, masyarakat kapitalis, juga penyakit-penyakit yang ditimbulkannya dalam masyarakat sebagai satu kesatuan.

BAB 6

MUNISIPALITAS

Munisipalisme libertarian adalah nama sebuah proses yang berupaya mencipta-ulang dan mengembangkan ranah politik demokratis sebagai wilayah dari komunitas swa-kelola. Alhasil, titik berangkat dari proses ini haruslah komunitas.

Komunitas terdiri dari individu-individu yang penghuniannya terhimpun dalam lingkungan berdekatan *(cluster)* dari sebuah ruang publik yang jelas, yang membentuk entitas komunitas tak terpisahkan. Ruang publik, apakah itu berupa tegalan atau lapangan, taman atau bahkan jalanan, adalah tempat kehidupan pribadi berbaur dalam kehidupan publik dimana yang personal, sedikit atau banyak, menjadi yang komunal. Di balik pintu-pintu pri badi mereka, orang-orang menikmati dan bergelut dengan tuntutan-tuntutan kehidupan pribadi; namun begitu ia keluar dari pintunya, ia memasuki dunia tempat ia diterima dan terbuka terhadap orang lain, bahkan dengan tingkat keakraban yang serapat kehidupan pribadi yang dijaganya. Disinilah orang-orang bertaut satu sama lain dengan tidak melalui perantaraan telepon atau pesan tertulis, secara rutin atau kadang-kadang, dan pertautan yang berulangkali membuat antar mereka kian mengenal.

Bukanlah kesamaan kekerabatan atau etnik yang memungkinkan terbentuknya ikatan-ikatan dalam sebuah wilayah publik (kendati di beberapa

bagian kota, orang-orang dari kelompok-kelompok etnis yang sama mungkin memilih hidup dalam lingkung ketetanggaan yang sama). Juga bukan kesamaan tempat kerja, yang dari sanalah orang pulang ke rumah setelah memperoleh penghasilan hariannya. Melainkan kedekatan tempat tinggal dan adanya ruang saling berbagi masalah dan kepentingan yang lahir dari sebuah komunitas tunggal, seperti masalah lingkungan, pendidikan dan ekonomi yang membentuk fondasi kehidupan sipil bersama. Pertautan antar anggota komunitas karenanya adalah embrio ranah politik. Isu-isu yang sama-sama dimiliki para anggota komunitas menjadi pokok-pokok utama yang dipertimbangkan dalam ranah politik. Adapun isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan pribadi tentunya diperlakukan berbeda sesuai keunikan masing-masing individu.

Lebih tepatnya lagi, orang bertemu satu sama lain di atas basis langsung berhadap-hadapan muka, *face-to-face*. Basis ini juga terjadi pada area-area lain kemasyarakatan, seperti tempat kerja dan universitas. Dengan kata lain, area-area tersebut pun memiliki potensi untuk didemokratisasi—karena senyatanya toh memang harus didemokratisasi. Betapapun demikian, hanya komunitaslah yang terbuka bagi semua anggota, yaitu penduduk dewasa dari berbagai latarbelakang, tidak hanya bagi para pekerja dan pelajar saja, dan karenanya bisa menjadi arena luas bagi pengelolaan urusan-urusan komunitas.

Dari level politik komunitas yang baru bermula inilah munisipalisme libertarian berusaha

keras menciptakan dan memperbaharui ranah politik untuk lantas mengembangkannya. Di sini orang memiliki potensi besar untuk bisa menata diri kembali dari kelompok-kelompok terisolasi menjadi warga komunitas yang saling mengenal, dalam relasi interdependen yang saling menguntungkan dan dengan demikian saling memperhatikan kesejahteraan bersama. Disinilah mereka bisa menciptakan institusi-institusi politik sebagai wadah yang luas bagi partisipasi komunitas dan menopang mereka terus menerus. Disinilah kewargaan bisa menjadi sangat berarti tatkala warga merebut kembali dan lantas mengembangkan kuasanya yang selama ini direbut oleh Negara.

Munisipalisme libertarian menamakan komunitas politik potensial semacam demikian sebagai *munisipalitas*. Berbagai munisipalitas yang ada saat ini begitu beragam dalam ukuran dan status legalnya. Mulai dari perkampungan atau kota kecil di pedalaman, kota kecil di sabuk urban sampai dengan lingkup ketetanggaan di metropolis besar seperti New York. Berbagai munisipalitas itu masih memiliki kesamaan ciri-ciri dan tradisi sehingga kita bisa menggunakan nama yang sama untuk mereka semua. Ciri umum terpenting, bahwa mereka adalah situs atau tempat potensial bagi lahirnya ranah politik baru dimana tradisi demokrasi langsung yang telah kita diskusikan berkemungkinan untuk ditinjau dan dikembangkan. Untuk mengantarkan ranah politik yang baru lahir itu, dari munisipalitas manapun ia berasal, menuju tujuannya sebagai arena kebebasan sipil, pemerintahan

kota harus dipegang oleh para penduduknya—para anggota komunitas yang telah dewasa, atau warga kota. Tiada lain, kota harus dibagi-bagi dalam beberapa skala lebih kecil dan didemokratisasi.

Desentralisasi

Manakala potensi politik munisipalitas hendak diwujudkan, kehidupan komunitas harus ditata-ulang, dalam hal ini diskala-ulang, berdasarkan dimensi-dimensi yang sesuai bagi ranah politik demokratis. Itulah, kota-kota besar yang berukuran luas sebaiknya didesentralisasi ke dalam munisipalitas-munisipalitas kecil dengan ukuran yang bisa dikelola.

Desentralisasi mengambil beberapa bentuk, tetapi salah satu yang terpenting pertama-tama adalah desentralisasi institusional. Desentralisasi institusional adalah desentralisasi struktur pemerintahan kota dengan menciptakan institusi-institusi politik di munisipal-munisipal yang lebih kecil dari yang sebelumnya berupa hanya satu munisipal besar. Di kota besar, desentralisasi bisa berarti memecah pemerintahan kota dan memindahkan tempat kekuasaan dan kontrol dari balai kota ke berbagai lingkungan kecil. Di kota yang lebih kecil atau kota kecil, desentralisasi bisa mengambil bentuk yang sama, kecuali bahwa unit-unit lokal akan menjadi lebih sedikit dan lebih besar dibandingkan dengan kota-kota besar yang ada sekarang ini. Di desa pedalaman, ukurang unit yang ada mungkin cukup kecil sehingga desentralisasi tidak diperlukan.

Akhirnya kota besar atau kota kecil yang terdesentralisasi akan menyaksikan terciptanya keragaman pusat-pusat lingkung ketetanggaan kecil *(neighbourhood)* dimana sebelumnya hanya ada satu balai kota. Maka akan tercipta keberagaman ruang-ruang publik, keragaman infrastruktur baru dibawah kontrol pusat-pusat yang lebih kecil. Kota itu akan melahirkan perkembangan produksi ekonomi lokal. Ruang-ruang hijau tercipta lebih banyak, dimana para penduduk bercocok tanam di ladang-ladang setempat. Orang yang semula menghabiskan waktu berjam-jam disedot pusaran kerja yang mati-rasa, mungkin kelak jadi mampu memilih untuk menghabiskan waktunya demi mengembangkan bakat mereka dalam bidang pekerjaan kayu, tembikar, menenun atau disain arsitektur—dan mengubahnya menjadi aktivitas sepenuh-waktu *(full-time)*. Mereka mungkin menyadari bahwa lebih berarti jika menjalani profesi-profesi yang alurnya jelas untuk menyembuhkan atau merawat, atau belajar bersama muda-mudi komunitas menyelami sejarah, sastra atau matematika ketimbang menjual, katakanlah, asuransi atau *real estate*. Yang lainnya mungkin lebih suka menghabiskan sebagian besar waktunya untuk merawat kanak-kanak dengan cara perawatan apa saja yang melibatkan komunitas.

Desentralisasi hampir tidak dibutuhkan andaikata segenap institusi kekariban dalam kehidupan kota dapat direplikasikan menjadi miniatur untuk setiap lingkup ketetanggaan kecil. Universitas misalnya, tetap bisa dipertahankan sebagai pusat-pusat pembelajaran; dan tentunya juga tidak

praktis jika harus mendirikan universitas baru di tiap lingkup ketetanggan kecil di kota. Tidak perlu juga menghilangkan rumah sakit-rumah sakit utama demi membangun klinik-klinik yang lebih kecil. Demikian pula institusi-institusi budaya seperti gedung teater dan museum tidak perlu diganti dengan gedung-gedung serupa yang lebih kecil di tiap tingkat tingkat rukun tetangga. Tetapi semua itu akan dialihkan dari kepemilikan pribadi dan dikembalikan kepada kontrol komunitas dimana semuanya itu berada. Selain itu, bangkitnya kehidupan politik komunitas dan kembalinya ke skala yang lebih kecil bisa menghasilkan kebangkitan budaya dalam lingkungan-lingkungan kecil, yang didalamnya para warga mungkin ingin dan perlu mendirikan sekolah-sekolah, pusat-pusat kesehatan, gedung teater dan museum di munisipal mereka, selain tetap terbukanya akses mereka terhadap gedung-gedung atau instusi yang lebih besar yang sudah ada.

Bahkan manakala desentralisasi institusional terjadi, *desentralisasi fisik* juga bisa dimulai. Desentralisasi fisik adalah dipecahnya besaran lingkungan-terbangun kota dalam kerangka bentangan wilayah dan infrastruktur. Munisipal-munisipal yang lebih kecil akan secara proporsional membutuhkan pusat-pusat kota yang lebih kecil ketimbang balai kota, juga sistem infrastruktur yang lebih kecil, ruang-ruang publik dan sejenisnya. Ruang-ruang hijau baru pun bisa diciptakan di dekat pusat setiap munisipal sehingga kehidupan sipil yang baru memiliki satu fokus. Bukan kebetulan bahwa desen-

tralisasi akan membantu menyeimbangkan kembali kesetimbangan antara kota dan kawasan pinggiran dan terus hingga ke desa-desa—ini kesetimbangan antara kehidupan sosial dengan lingkungan hidup, dengan biosfera. Demikianlah memang, desentralisasi fisik sangat diperlukan guna membangun komunitas yang ramah ekologi.

Demokratisasi

Ketika kedua jenis desentralisasi tersebut terjadi, munisipal-munisipal baru yang lebih kecil juga akan dengan sendirinya menjalani proses demokratisasi. Proses demokratisasi, dalam kenyataannya, tidak akan bisa dipisahkan dari desentralisasi. Disinilah munisipal-munisipal baru yang lebih kecil akan menjadi situs-situs demokrasi langsung.

Struktur kelembagaan demokrasi langsung ini akan berupa majelis-majelis warga—rapat-rapat umum besar yang didalamnya semua warga di suatu wilayah bertemu, berunding dan membuat keputusan-keputusan tentang persoalan-persoalan bersama. Majelis-majelis ini dengan demikian ikut terjun mewarnai konsep-konsep dan tindakan-tindakan paling tercerahkan yang telah ditegakkan oleh para pendahulu mereka dalam tradisi demokrasi langsung—eklesia di Athena kuno, *conjuratio* dan majelis-majelis dalam komune-komune abad pertengahan, rapat-rapat kota di New England dan majelis-majelis seksional di Paris–juga contoh-contoh lain tentang demokrasi langsung di wilayah manapun di dunia ini, tanpa harus dibebani apakah

itu asli berasal dari sejarah dan tradisi di wilayahnya.

Tentu saja warga yang menciptakan majelis-majelis ini tidak akan menggunakan eklesia, rapat kota dan seterusnya sebagai model atau *blueprint*-nya. Sebab, jika ya, itu berarti bukannya membuang tapi malah menjerumuskan diri ke dalam tong sampah sejarah, ke dalam hierarki etnis, ras, gender dan segala jenis prasangka-prasangka lainnya. Melainkan, para warga akan menyimak para pendahulu mereka, utamanya tentang institusi politik demokratis mereka yang spesifik—dan warga akan memajukannya lebih jauh dengan membuka institusi-institusi itu lebar-lebar demi partisipasi yang meluas.

Majelis-majelis akan menggelar rapat secara reguler, mungkin pada mulanya setiap bulan, lantas mingguan, dilengkapi dengan rapat-rapat tambahan yang dipandang perlu oleh warga. Mereka bisa menggelar rapat di auditorium, gedung teater, lapangan, aula, taman atau bahkan rumah ibadah—di fasilitas lokal manapun yang cukup besar untuk menampung seluruh warga munisipal yang menaruh perhatian. Kerja dewan akan mengikuti norma kelayakan politik yang adil bagi semua orang dan memperkenankan partisipasi seluas mungkin, tetapi pada saat bersamaan tetap menjaga durasi rapat sesuai dengan kerangka waktu yang pantas dan telah disetujui.

Salah satu tindakan pertama majelis adalah menyusun dirinya sendiri, yakni mendefinisikan diri dan menetapkan seperangkat aturan yang mengatur pelaksanaannya. Aturan-aturan ini akan

menetapkan prosedur pengambilan keputusan dan jabatan-jabatan, juga cara-cara memilih individu yang akan memegang jabatan-jabatan tersebut dan cara-cara untuk menjaga mereka agar tetap bertanggungjawab kepada majelis sebagai satu kesatuan. Aturan-aturan itu juga bisa menetapkan dewan-dewan, badan-badan dan komite-komite lingkungan kecil administratif dan konsultatif untuk mempelajari dan membuat rekomendasi atas ber bagai isu serta memperkuat kebijakan-kebijakan majelis. Mereka berikut tugasnya diawasi secara ber kelanjutan oleh majelis dan para anggotanya harus tunduk jika tiba-tiba di-*recall*. Yakni, jika anggota-anggotanya melanggar peraturan komunitas ber kaitan dengan kekuasaan dewan-dewan dan badan-badan, warga memiliki hak mencabut mereka dari jabatannya dan memilih para penggantinya.

Tiap sebelum rapat, sebuah agenda akan dibuat, tersusun dari bermacam persoalan dan isu yang diminta warga agar dirundingkan oleh majelis. Agenda itu akan diumumkan sebelum rapat, setidaknya beberapa hari sebelumnya, agar warga mempunyai waktu untuk menyusun kontribusi yang akan diberikan pada diskusi mengenai isu-isu spesifik. Dalam rapat itu, tiap isu dalam agenda akan diperdebatkan dan disaksikan para warga yang hadir. Semua segi isu, argumen dan argumen-balasan akan diperdengarkan selengkap mungkin. Masyarakat demokrasi-langsung yang memenuhi janji kebebasan tidak hanya akan mengijinkan debat tetapi juga akan membantu mengembangkannya. Institusi-institusi politiknya akan menjalankan

forum-forum diskusi dan majelis-majelis serta medianya akan terbuka bagi ekspresi sepenuhnya dari semua sudut pandang.

Untuk menjamin agar berbagai sudut pandang yang berbeda itu didengar, setiap orang akan memiliki hak penuh untuk berbicara di depan majelis. Mulanya, kemungkinan besar, mereka yang merasa belum pandai berbicara akan puas jika ada orang lain yang berpandangan sama telah mengungkapkannya dengan memuaskan. Tetapi setelah mengamati dan menyimak proses perundingan selama beberapa waktu, diharapkan—benar-benar diharapkan–mereka juga akan menimba rasa percaya diri yang cukup untuk berbicara atas nama diri mereka sendiri. Seiring warga mendapatkan pengalaman mengutarakan pendapat di muka umum, mereka akan menjadi semakin artikulatif, lebih mampu menyampaikan argumen yang mereka nilai sangat penting, sembari tetap harus disadari dan ini sangat penting, bahwa jika pun mereka tidak tampil barangkali memang tengah mempertimbangkan soal yang lebih rinci dan lebih layak menurut ukuran mereka. Setelah berdebat, melalui pemungutan suara *(voting)* warga akan memilih berdasarkan pemahaman terbaik mereka tentang konsekuensi-konsekuensi dari voting tersebut ter hadap diri mereka, terhadap anggota-anggota lainnya dalam komunitas tersebut dan terhadap ke baikan bersama. Pemungutan suara akan diambil berdasarkan aturan suara mayoritas, yakni sedikitnya 51 persen warga mendukung maka hasil pemungutan suara akan disahkan.

Proses-Proses Pengambilan Keputusan

Banyak suara alternatif, khususnya mereka yang berorientasi libertarian, menolak suara mayoritas sebagai prinsip pengambilan keputusan karena setelah pemungutan suara dilaksanakan, pan dangan mayoritas menjadi kebijakan yang ditetapkan bagi seluruh komunitas dan karenanya mendapatkan kekuatan hukum sampai tingkat tertentu. Menurut mereka, karena komunitas sebagai satu kesatuan mesti menuruti keputusan yang dihasilkan, terlepas dari keinginan individu, suara mayoritas bersifat memaksa dan karena itu tidak konsisten dengan kebebasan individu. Dalam pandangan ini, seperti dinyatakan oleh sejarawan Peter Marshall, "mayoritas tidak lebih berhak mendikte minoritas, bahkan minoritas yang terdiri dari satu orang sekalipun, demikian pula sebaliknya minoritas terhadap mayoritas".[1]

Bentuk pengambilan keputusan yang umumnya diajukan sebagai alternatif adalah proses konsensus yang, berbeda dengan suara mayoritas, menjaga otonomi pribadi. Dalam proses konsensus, tidak ada keputusan yang diambil sampai semua anggota komunitas menyetujuinya. Bahkan seorang saja yang tidak menyetujuinya, ini tetap menghalangi keluarnya keputusan. Kalangan libertarian ini percaya bahwa halangan semacam demikian adalah baik jika keinginan orang yang tidak setuju berbe-

1. eter Marshall, *Demanding the Impossible: A History of Anarchism* (London: HarperCollins, 1992), hal. 22.

da dengan pandangan mayoritas. Alias, orang ini punya hak mutlak untuk memveto sebuah keputusan.*

Pengambilan keputusan konsensus memiliki poin kelebihan tersendiri, dan ini tampaknya sesuai bagi sekelompok kecil orang yang sudah sangat akrab satu sama lain. Tetapi manakala kelompok-kelompok lebih besar yang heterogen berupaya membuat keputusan melalui konsensus, masalah serius kerap muncul. Dengan memprioritaskan kehendak individu, proses itu memungkinkan minoritas-minoritas kecil, bahkan minoritas yang terdiri dari satu orang sekalipun, bisa menggagalkan keputusan-keputusan yang didukung mayoritas komunitas. Individu akan berbeda pendapat lantaran tidak harus semua anggota komunitas bersepakat dengan setiap keputusan yang dikeluarkan. Dan memang mereka tidak wajib sepakat. Konflik selalu terdapat dalam politik, suatu sine qua non, karena memang seperti itulah keberadaannya. Orang-orang yang tidak setuju (untungnya) selalu ada. Sebagian individu akan selalu merasa bahwa keputusan tertentu tidak menguntungkan, baik bagi kepentingan mereka sendiri maupun bagi kebaikan bersama.

*Beberapa proses konsensus kurang begitu diperlukan ketimbang kebulatan suara—mungkin kesepakatan 80 persen– dalam rangka mengambil sebuah keputusan. Tetapi banyak persoalan yang didiskusikan di sini tetap ada. Masih meragukan misalnya, bahwa 21 persen orang yang memberikan suara mesti secara rutin mampu menghalangi pendapat mayoritas. Dalam banyak kasus, ini berarti bahwa tidak ada keputusan yang dibuat sama sekali karena konsensus sempurna tidak dapat dicapai.

Komunitas-komunitas yang memerintah dirinya sendiri melalui proses konsensus seringkali mencapai konsensus dengan memanipulasi kalangan yang tidak setuju agar terlihat sejalan dengan posisi mayoritas, atau bahkan memaksa mereka dengan menggunakan tekanan psikologis atau membuat ancaman. Jenis pemaksaan ini tidak mungkin terjadi di depan mata publik—ini bisa dan acap kali terjadi diluar pengawasan majelis. Tapi ini tetap pemaksaan dan lebih jahat.

Ketika isu-isu yang dipermasalahkan memerlukan pemungutan suara, kalangan yang tidak setuju yang dipaksa dan dimanipulasi cenderung membiarkan diri untuk menyetujui kesepakatan publik karena kalah jumlah, mungkin untuk menghindar agar tidak mengganggu mayoritas—terlepas dari posisinya yang kuat. Dalam kasus demikian, ketidaksetujuan mereka bukan lagi masalah publik, sebuah upaya yang dihargai jika gagal. Ketidaksepakatan mereka memang akan terhapuskan seakan-akan tidak pernah ada, dan ini sangat merusak perkembangan politik kelompok tersebut.

Jika kalangan yang tidak setuju itu tidak bisa ditekan agar mengubah pilihannya, alternatif lain adalah mereka mungkin ditekan agar sama sekali tidak memberikan suara. Yakni, mereka bisa "memilih" untuk menarik diri dari proses pengambilan-keputusan dalam isu itu—"menyingkir", dalam jargon prosedur konsensus. Tetapi pilihan ini akibatnya meniadakan golongan yang tidak setuju *(dissenter)* sebagai makhluk politik. Pilihan ini berarti memecahkan masalah perbedaan pendapat dengan

mengeluarkan golongan yang tidak sependapat itu dari ruang politik dan melenyapkan pandangan-pandangan tak sejalan dari forum ide-ide.

Dengan menegaskan persetujuan suara bulat, konsensus justru mempertajam konflik sampai tingkat pecahnya komunitas sekaligus juga membungkam orang-orang yang tidak sependapat. Ketimbang menghormati minoritas, ia malah membungkamnya. Cara sehat yang jauh lebih terhormat dan lebih bermoral dalam menangani perbedaan pendapat adalah dengan memperkenankan golongan yang tidak sependapat untuk memberikan suaranya secara terbuka, disertai visibilitas tinggi, sesuai keyakinan mereka, juga dibarengi peluang mengubah keputusan pada masa datang dan secara potensial memajukan perkembangan politik komunitas.

Dalam komunitas dimana keputusan-keputusannya dibuat oleh kekuasaan mayoritas, minoritas tidak wajib menyesuaikan diri dengan keputusan mayoritas itu agar kehidupan sosial tidak terdis integrasi menjadi sebuah hiruk pikuk individu-individu cengeng. Tetapi kalangan minoritas tetap memiliki kemerdekaan krusial untuk berupaya menggagalkan keputusan tersebut. Mereka bebas untuk secara terbuka dan terus menerus menyuarakan ketidaksetujuannya yang beralasan dengan cara yang tertib, mengungkapkannya kepada para anggota komunitas lain dalam rangka membujuk mereka agar mempertimbangkan kembali keputusan tersebut. Dengan berbeda pendapat, bahkan dengan bergairah, kalangan minoritas itu men-

jaga sebuah isu tetap hidup, meletakkan dasar bagi perubahan sebuah keputusan buruk, menjadi mayoritas atas dirinya sendiri dan dengan penuh harap mengembangkan kesadaran politik komunitas.

Golongan yang tidak setuju akan dan harus selalu ada dalam sebuah masyarakat bebas, jika tak ingin tenggelam dalam stagnasi. Dalam hal ini apakah mereka akan mempunyai kebebasan mengekspresikan ketidaksetujuannya. Pengambilan keputusan yang demokratis—melalui kekuasaan mayoritas–meyakinkan mereka akan kebebasan, dengan menggoreskan ketidaksetujuan mereka dalam riwayat komunitas sebagai saksi publik atas posisi mereka.

BAB 7

MEMBANGUN GERAKAN

Jika ranah politik adalah untuk direbut kembali oleh warga munisipal, jika majelis-majelis adalah untuk dibentuk dan warganya diber dayakan, maka tujuan-tujuan ini harus dikejar dan diperjuangkan dengan usaha keras yang penuh kesadaran. Tujuan-tujuan tersebut tak akan tercapai sebagai hasil memasrahkan kedirian seseorang kepada kekuatan-kekuatan sosial yang ada; tidak juga kepada kuasa yang mereka percayakan kepada para aktivis. Berseberangan dengan itu, momentum sosial pada masa kini tampaknya tengah berpihak pada sentralisasi dan otoritarianisme ketimbang desentralisasi dan demokratisasi. Untuk mendidik dan memobilisasi warga serta untuk menegakkan majelis-majelis warga, membutuhkan gerakan munisipalis libertarian yang terorganisir dengan baik.

Gerakan demikian tidak akan muncul serta merta. Ia harus dibentuk dengan penuh kesadaran dan pada komunitas tertentu, ia harus digerakkan oleh sedikitnya beberapa orang yang memiliki komitmen bulat bahwa mereka memang hendak membangunnya. Bagaimanakah individu-individu sebaiknya mengawali itu?

Tindakan pertama yang harus mereka lakukan adalah bertemu satu sama lain dan mengenali kesamaan pandangan. Mereka lantas bisa memutuskan membentuk kelompok studi dan memanfaatkannya untuk mengakrabkan diri dengan gagasan-

gagasan munisipalis libertarian sebanyak mungkin. Mereka bisa mengkaji literatur dasar tentang munisipalisme libertarian (lihat “Bacaan Lebih Lanjut”) dan bertemu secara rutin untuk mendiskusikannya, mengajukan setiap permasalahan dan pertanyaan yang muncul serta mencari jawaban-jawaban terbaik sekemampuan mereka. Dengan mendidik diri mereka sendiri, dengan mempersiapkan diri untuk menghadapi penentangan yang mungkin mereka temui, mereka akan melengkapi diri guna belajar dengan lingkaran yang terus meluas dan memajukan gerakan.

Disamping mempelajari munisipalisme libertarian, mereka juga bisa membaca buku-buku yang tema-temanya relevan. Ini bisa mencakup karya-karya tentang ekologi sosial. Ini filosofi yang lebih luas dimana munisipalisme libertarian merupakan dimensi politiknya; atau tentang tradisi-tradisi demokratis di kawasan dekat mereka sendiri maupun di belahan bumi lainnya; atau tentang sejarah gerakan-gerakan radikal dan teori demokrasi dan politik pada umumnya, termasuk karya-karya para anarkis. Mereka dapat juga mempelajari karya-karya kritisisme sosial. Tentu saja akan memakan waktu seumur-umur jika mesti menguasai literatur yang tercakup dalam saran-saran diatas. Kelompok studi memang tidak perlu melakukan seperti itu. Sebab toh begitu mereka meluncurkan gerakannya, pendidikan mereka akan terus berjalan dan pasti akan berlanjut sepanjang kehidupan pergerakan.

Setelah mendapatkan landasan teoretis ihwal munisipalisme libertarian, kelompok tersebut

sebaiknya berlanjut dengan mendidik orang atau kelompok lain. Mereka mesti mencari kawan dan berkenalan dengan orang-orang yang mungkin tertarik dalam proyek itu, kemudian meluaskan kelompok studi untuk mengikutsertakan orang-orang. Alternatif lainnya, mereka bisa membantu menciptakan kelompok-kelompok yang berafiliasi, yang kepada berbagai kelompok inilah mereka mengaitkan dirinya sebagai basis gerakan politik pada masa depan. Dengan membantu orang memahami gagasan-gagasan ini, mereka juga akan menguji pemahaman mereka sendiri dan mempelajari betapa baiknya merespon pertanyaan, keberatan dan kritik.

Pendidikan Publik

Manakala anggota-anggota kelompok studi sudah lebih percaya diri bahwa mereka telah cukup menguasai gagasan-gagasan ini dan mampu mengungkapkannya kepada rekan-rekannya, mereka harus bekerja untuk menjadi sebuah kekuatan dalam komunitas tempat mereka hidup. Sebelum mereka melakukannya, mereka harus memberi kelompoknya nama yang pasti dan mudah dikenali sehingga kelompok itu bisa mengembangkan identitas politik yang jelas dalam komunitas tersebut.

Tugas utama mereka, kini dan guna mempertahankan keberadaan gerakan, berupa menggelar pendidikan publik. Tempat atau situs yang baik untuk mulai adalah masalah-masalah politis dan ekologis lokal yang menjadi perhatian komunitas umumnya. Mereka harus benar-benar mempelajari

masalah-masalah ini, menentukan posisi terhadapnya dan mengembangkan analisa ekologi-sosiol jika memungkinkan. Mereka harus menumbuhkan literatur atas masalah-masalah tersebut, dengan jelas dan terang, yang berkaitan dengan gagasan-gagasan munisipalis libertarian. Mereka bisa membuat tulisan sebagai kajian posisional *(position papers)* atau laporan umum, misalnya, mengenai konteks luas permasalahan lingkungan yang mempengaruhi munisipal mereka, atau semacam konsekuensi-konsekuensi sosial dan lingkungan dari perkembangan pembangunan di sekitar mereka. Akan sangat bermakna kiranya jika mereka mengawali dengan menerbitkan suratkabar atau *newsletter* komunitas. Sebagian dari mereka yang berkemampuan artistik bisa merancang poster-poster dan selebaran yang bisa menjuruskan perhatian terhadap isu tertentu dan membangkitkan kesadaran publik akan isu tersebut. Idealnya, mereka mesti menerbitkan dan mendistribusikan semua literaturnya ke seluruh komunitas, di toko-toko buku setempat, pusat-pusat lingkup pertemanan komunitas kecil atau kafe-kafe. Untuk setiap dokumen yang mereka terbitkan, sebaiknya mencantumkan nama kelompok sehingga bagi orang yang ingin bergabung akan tahu kemana harus menghubungi.

Daya tarik berorganisasi yang akan menjadi bobot terbesar dalam upaya mereka di bidang pendidikan publik adalah seruan mereka akan demokrasi lokal, persisnya pada penciptaan majelis-majelis warga di munisipal mereka. Kelompok ini boleh jadi lebih suka menyebut majelis-majelis

tersebut dengan nama yang lebih sesuai dengan tradisi-tradisi lokal mereka. Namun pada intinya mereka akan menyerukan kelembagaan demokrasi-langsung yang populis yang memajukan musyawarah dan pengambilan keputusan demokratis.

Kelompok sebaiknya berseru kepada kota setempat atau dewan kota untuk mendirikan majelis-majelis ini secara legal dengan mengubah tata pemerintahan munisipal, yaitu dengan menambahkan klausa-klausa yang mengakui keberadaan majelis-majelis tersebut sembari menguraikan keunggulannya. Bilamana majelis-majelis warga kota telah hadir, kelompok harus menyerukan penguatan kuasa mereka.

Sebagai bagian kembangan program pendidikan publik, mereka bisa menggelar serangkaian kuliah terbuka di ruang-ruang publik atau di kafe-kafe yang akrab. Mereka bisa meluncurkan percakapan ini oleh mereka sendiri, menampilkan anggota-anggota kelompok mereka sebagai para pembicara, atau mereka bisa mengundang pembicara dari luar komunitas. Pembicara bisa menyajikan topik yang beragam, seperti demokrasi dalam teori dan praktek, sejarah radikal, atau isu-isu terkini yang menjadi perhatian komunitas. Jika pembicara dari luar tidak mengaitkan pembicaraannya dengan munisipalisme libertarian, moderator yang ditunjuk oleh kelompok harus melakukannya, atau anggota kelompok sebagai peserta bisa mengutarakannya dalam tahapan diskusi. Mereka harus senantiasa menegaskan perlunya menciptakan majelis-majelis warga.

Mereka juga dapat mengorganisasikan aksi-aksi yang berhubungan dengan isu-isu terdekat dan selalu mempertautkannya dengan tuntutan warga akan majelis-majelis warga guna membuka ruang bagi warga untuk mengambil keputusan. Atau mereka mengorganisasikan demonstrasi untuk memprotes pembangunan pusat perbelanjaan atau *mall*, misalnya, dan menguraikan kuasa-kuasa sosial yang beroperasi dibalik pembangunan itu. Manakala masalah-masalah yang menjadi perhatian muncul ke hadapan dewan kota setempat atau komisi perencanaan, mereka mesti bersaksi dalam setiap sidang atau hearing yang digelar dan menyerukan demokrasi langsung sebagai solusi jangka-panjang. Ini akan memberi mereka pengalaman dalam ke terlibatan publik dan sekaligus pada saat yang sama menyebarkan gagasan-gagasan munisipalis libertarian.

Sangat mungkin bahwa anggota-anggota kelompok itu akan bertemu atau sudah terlibat dengan usaha kooperatif dalam komunitasnya —kerja-bareng membuka toko atau kafe, komune-komune, kolektif produksi, distro-distro dan semacamnya. Usaha-usaha ini berharga karena peran yang dimainkan dalam mengembangkan semangat kerja-bareng antar individu-individu, amat dibutuhkan bagi solidaritas komunitas yang menjadi landasan demokrasi langsung. Tetapi semua tersebut tidak dengan sendirinya sama dengan institusi-institusi munisipalis libertarian mengingat itu lebih berada di ranah sosial (lihat Bab 2) ketimbang di ranah politik. Berada dalam pelukan sistem kapi-

talis, kegigihan unit-unit kerja-bareng tersebut tak bisa sebagai tempat bersandar (lihat Bab 12). Kalangan munisipalis libertarian yang terjun dalam unit-unit kerja-bareng itu sebaiknya tetap cermat memahami kekuatan dan keterbatasan mereka: sembari tetap terus meninggikan aspek kerja-bareng, juga tetaplah memusatkan energi terbesar pada seruan akan majelis-majelis warga, mengembangkan kehidupan budaya dan politik yang vital. (Lebih lanjut tentang kerja-bareng atau kooperasi ini, simak wawancara dengan Murray Bookchin pada bagian kedua buku ini). Yang terpenting, para anggota munisipalis libertarian harus berbicara kepada sebanyak mungkin orang sejauh mereka mampu rengkuh, kepada siapapun yang mau mendengarkan, menjelaskan dengan sabar mengapa majelis-majelis warga diperlukan, mengulangi penjelasan-penjelasan serupa terus menerus jika perlu, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan serta keberatan-keberatan dengan kemampuan terbaik mereka.

Manakala kelompok ini mampu menarik perhatian orang terhadap gagasan-gagasan yang diajukannya dan berkembang menjadi sebuah kekuatan dalam komunitas, maka pada gilirannya ia meng undang anggota-anggota baru. Tentunya sebelum ketertarikan menumpuk banyak, kelompok tersebut sudah harus menata diri dengan seperangkat aturan bagi administrasinya sendiri. Aturan-aturan ini akan menegakkan keberadaan kelompok, prosedur pengambilan keputusannya, penghimpunan iuran anggota dan sebagainya. Namun aturan-aturan ini juga harus menegakkan kondi-

si yang bermakna bagi keanggotaan tersebut. (Akan menyenangkan, misalnya, jika kelompok menggelar periode percobaan enam-bulan sehingga anggota-anggota baru bisa mengakrabkan diri dengan kelompok beserta gagasan-gagasannya). Dalam kasus tertentu, untuk mendidik anggota-anggota baru, anggota kelompok awal atau terdahulu bisa jadi menggelar pertemuan-pertemuan pendidikan yang terpisah bagi para anggota baru tersebut. Mereka tentunya mesti memberikan porsi pendidikan untuk setiap pertemuan kelompok—tiada lain dengan membahas tulisan atau karya-karya yang relevan dengan munisipalisme libertarian dan demokrasi langsung.

Kawasan Pinggiran (Suburbia)

Kelompok yang berlokasi di kawasan pinggiran (kota) akan menghadapi sekumpulan problem unik yang tidak dihadapi oleh para penghuni kota besar dan kota kecil. Di pinggiran, ruang publik tidaklah banyak. Berbeda dengan penghuni kota besar, ketika penduduk pinggiran berangkat dari rumahnya, langkah kaki mereka biasanya samasekali tidak bersentuhan dengan ruang publik. Melainkan mereka langsung masuk ke mobil atau kendaraan pribadi mereka dan mengendarainya sampai tiba di ruang privat lainnya—toko, pom bensin, mall atau tempat kerja. Mereka boleh jadi selama berhari-hari atau berminggu-minggu pergi-pulang tanpa memasuki apapun selain ruang-ruang dibawah kepemilikan privat atau swasta. Trotoar dan ruang-ruang publik

lainnya langka adanya di pinggiran, sementara komunitas terpojokkan tinggal di rumah-rumah terpencil yang jauh dari jalan raya, membuat peluang bertemu orang lain menjadi sangat kecil.

Berbasis atas keberadaan komunitas, politik munisipalis libertarian tentu lebih mudah dimulai di tempat-tempat dimana orang hidup dalam komunitas dan sering bertemu satu sama lain. Namun demikian, kendati rasa dan taut komunitas jauh lebih cair ketimbang di kota besar atau kota kecil, penduduk pinggiran juga memiliki keresahan serius yang menjadi pokok berbagi dengan para tetangganya dan yang membutuhkan upaya-upaya bersama untuk ditangani: keresahan akan lingkungan, pendidikan, transportasi, perawatan anak dan ekonomi lokal, diantara banyak hal lainnya. Penduduk pinggiran masa kini justru ditimpa masalah yang ditimbulkan oleh polusi, buruknya fasilitas-fasilitas dan kebangkrutan korporasi. Kedaruratan hidup kawasan pinggiran yang tak kurang beratnya dibanding dengan di kota-kota, membutuhkan pertemuan antar penghuninya – malah mereka harus melakukannya dengan dorongan yang lebih mendalam dan berkesadaran ketimbang bergantung pada peluang atau kesempatan, dan bahkan jika mereka harus mengais-ngais ruang dan menatanya sebagai basis temporer *(ad-hoc)* demi mencapai tujuan diatas.

Di kawasan-kawasan demikian, gerakan munisipalis libertarian tampaknya mesti berupaya ekstra menggelar rapat-rapat publik, menempelkan pengumuman-pengumuman di toko kecil maupun warung kebutuhan sehari-hari, di papan-papan

buletin umum, di koran-koran lokal dan sebagainya. Mereka juga mesti memfasilitasi atau memimpin rapat-rapat itu jika para anggota komunitas di kawasan setempat menginginkannya.

Kota-Kota Besar

Kota-kota metropolitan besar menampilkan tumpukan problematika yang berbeda berkaitan dengan pembentukan demokrasi langsung. Sebaran sabuk atau lingkar urban seperti New York dan Los Angeles adalah rumah bagi jutaan orang yang padat terkonsentrasi. Kebanyakan antar mereka adalah orang asing seutuhnya satu dengan yang lainnya, bahkan manakala mereka menghuni ling kungan ketetanggaan yang sama. Populasi tertentu ini sepertinya terlampau besar untuk memungkinkan terciptanya majelis-majelis populis. Secara logistik murni, musyawarah dan pengambilan keputusan amat sulit dilaksanakan dan penuh halangan. Bahkan sekedar di lingkungan ketetanggaan, jumlah warga akan terlalu banyak untuk berkumpul dalam satu ruang pertemuan. Andaikata segenap warga New York atau London pernah berusaha bersidang dalam satu eklesia, masalah logistik tampaknya tidak akan tertanggulangi. Pada titik inilah pentingnya keyakinan Aristoteles bahwa sebuah polis harus cukup kecil untuk memungkinkan warganya bisa mengenal akrab satu sama lain.

Kota-kota ini bukan saja terlampau luas tetapi, sebagaimana yang tampaknya disimpulkan oleh kalangan munisipalis libertarian, juga

pemerintahannya bersifat impersonal dan berjarak sehingga lebih mirip Negara ketimbang kota. Balaikota-balai kotanya digerakkan oleh para elite —memang mereka pribumi kota, tetapi tetap saja elite–dan mesinisasi mereka tidak bisa dimasuki oleh warga biasa. Kampanye-kampanye pemilihannya dipenuhi rasa sinis, manipulatif dan korup yang setara dengan kampanye nasional lain manapun. Begitu memegang jabatan, para walikota dan anggota dewan menjalankan birokrasi maha besar yang tidak memperkenankan diri mereka di desentralisasi. Transportasi, sanitasi dan aktivitas komersial memerlukan tingkat koordinasi tinggi setiap harinya.

Tak pelak, penggumpalan atau aglomerasi urban berskala besar ini mengandung banyak masalah bagi terciptanya demokrasi langsung. Betapapun demikian kemunculan megalopolis terurbanisasi bukanlah tanda tamat bagi tradisi historis politik sipil.

Pertama-tama, sebagaimana telah kita simak, entitas besar urban berbeda dari Negara-Negara dalam beberapa sisi penting. Bukan saja sejarah kota dan Negara itu saling berbeda secara radikal, melainkan juga pemerintahan kota menyisakan arena-arena kehidupan politik yang tidak ada dalam Negara-Bangsa. Acap kali para penduduk suatu kota—bahkan hanya satu orang dalam skala New York–masih mungkin untuk ikut berperan dalam urusan-urusan komunitas sampai taraf yang tidak bisa mereka lakukan dalam urusan-urusan nasional. Balaikota-balaikota munisipal, bahkan yang ada di kota-kota besar, seringkali jauh lebih terbuka bagi

warga biasa ketimbang negara bagian, propinsi dan legistatif federal. Pusat-pusat lingkungan kecil tidak sulit diciptakan dalam kota-kota besar, sementara dewan-dewan sekolah dan rapat-rapat distrik memperkenankan warga dari lingkungan yang sama untuk mengadakan pertemuan dan mendiskusikan persoalan-persoalan bersama.

Kedua, desentralisasi akan sulit jika anggota-anggota kelompok memahaminya dalam pengertian fisik yang kaku—yakni, dipandang dari segi teritorial dan logistik. Desentralisasi fisik seperti ini tampaknya butuh banyak waktu untuk disempurnakan.[1] Tetapi desentralisasi institusional bisa dimulai kapan pun, di kota mana pun, seluas apa pun, dan bisa berhasil relatif cepat. Majelis-majelis rakyat dapat dimulai dimanapun bahkan pada tingkat blok, tanpa memandang besarnya ukuran keseluruhan kota.

Manakala majelis-majelis dimulai di satu atau beberapa lingkungan kecil di kota besar, mereka bisa menjadi model bagi lingkungan-lingkungan kecil lainnya yang juga bisa membentuk majelis-majelisnya sendiri. Bermacam lingkungan kecil yang terdemokratisasi itu pada akhirnya bisa saling berhubungan satu sama lain dan membentuk konfederasi-konfederasi yang berupaya mengkoordinasikan transportasi, sanitasi dan sarana lainnya. Lingkungan-lingkungan yang tengah berada dalam proses didesentralisasi secara institusional ini sampai taraf tertentu bisa memainkan peran transfor-

1. ni tidak bisa dilakukan lebih cepat dari yang kita perkirakan, sebagaimana pelajaran dari rekonstruksi singkat kota-kota besar di Jepang dan Jerman setelah Perang Dunia Kedua.

matif dalam kehidupan politik kota sebagai satu kesatuan dan akhirnya membawa perubahan luas dalam aspek logistik dan struktural.

Adalah masalah memadukan desentralisasi fisik dan institusional—yakni memadukan akhir proses dengan awal proses–yang membuat proses desentralisasi kota besar, pada kesan lapis pertamanya, tampak sangat sulit.

Bahkan dibalik lingkar urban terbesar *toh* terdiri dari komunitas-komunitas lebih kecil yang saling berbagi warisan kultural yang khas atau saling beririsan kepentingan ekonomi yang beragam. Kebanyakan kota-kota besar terdiri dari kota-kota yang lebih kecil atau tebaran kewilayahan *(boroughs)*. Salah satu yang terkenal adalah London. Lima kota-wilayah dari New York adalah fenomena yang belum lama usianya: umurnya menjejak ke belakang ke tahun 1897. New York City pada 1874 hanya terdiri dari satu wilayah, yakni Manhattan. Tentunyalah sebuah kota yang berusia baru mencapai seratus tahun belum menjadi abadi, berlawanan dengan apa yang bisa kita percayai dari sebagian pengkritik munsipalisme libertarian.

Sebagian kota-kota besar di Amerika telah menjalani setingkatan tertentu desentralisasi institusional. Pada 1975, New York mengubah traktat kotanya sedemikian rupa guna memperkuat lima puluh sembilan distrik komunitasnya, beserta komisi-komisi komunitasnya masing-masing. Los Angeles pernah memiliki cabang-cabang balai kota untuk beberapa lama. Detroit, Pittsburgh dan Honolulu melembagakan setingkatan tertentu kon-

trol dari lingkup ketetanggan kecil pada 1970-an. Anchorage dan Alaska mengadopsi sistem dewan-dewan komunitas, sementara Dayton dan Ohio melembagakan enam distrik perencanaan partisipatif.

Pada 1980-an perdana menteri Prancis waktu itu, Francois Mitterand, berupaya mendesentralisasi Paris dengan mendirikan balaikota-balaikota lokal. Tetapi mungkin contoh paling dramatis mengenai desentralisasi institusional adalah kasus majelis-majelis seksional Paris selama Revolusi Prancis. Penduduk Paris pada masa itu sudah sangat banyak jumlahnya—setidaknya setengah juta jiwa, yang menjadikan Paris sebagai kota megalopolis menurut standar abad kedelapan belas. Lebih jauh, masalah logistik kehidupan kota luar biasa sulitnya mengingat pada masa itu tak ada sesuatu pun yang bergerak lebih cepat daripada kuda. Tetapi seksi-seksi itu berfungsi dengan sangat berhasil, berdiri pada otonominya sendiri, yang untuk sebagian berkat terkoordinasi oleh delegasi-delegasi di Komune, dan sebagian lagi karena mengkonfederasi atas inisiatif mereka sendiri. Dalam demokrasi langsung *face-to-face* mereka, mereka tidak hanya berurusan dengan masalah-masalah politik, melainkan juga memainkan peran penting dalam mengerahkan diri mengurus kota, mencegah penimbunan pangan, menekan spekulasi, mengawasi kontrol harga dan menjalankan banyak tugas administratif rumit lainnya serta mempertahankan milisia yang merupakan kekuatan bersenjata paling hebat di ibukota Prancis.

Jika pada 1793 desentralisasi institusional di Paris sudah bisa ditegakkan, maka mestinya juga bu-

kan mustahil mengawalinya di kota-kota besar masa kini. Bukan saja kita beruntung karena transportasi dan komunikasi yang lebih maju, namun kita juga memiliki pemahaman lebih maju mengenai proses demokrasi, yang tidak dimiliki oleh warga Paris di abad ke delapanbelas.

Banyak kota besar yang menderita secara fisik dan logistik karena beban keluasan wilayahnya, dan mereka mencari jalan untuk menata-ulang dirinya menjadi kota-kota yang lebih kecil atas kehendak sendiri. Lebih penting lagi, ketika di tanya dalam survey opini publik, kebanyakan orang Amerika lebih memilih hidup di kota yang lebih kecil atau perdikan ketimbang di megalopolis—ini panggilan hati yang bisa membuat mereka terbuka terhadap gagasan-gagasan munisipalis libertarian.

BAB 8

PEMILIHAN

Sungguh mustahil pemerintahan akan menerima tuntutan kalangan munisipalis liber tarian agar pemerintahan munisipal lama menyerahkan kekuasaannya kepada majelis-majelis warga. Oleh sebab itu para munisipalis liber tarian haruslah menjalankan pemilihan pejabat lokal mereka sendiri. Dengan demikian pada gilirannya nanti mereka bisa mengubah traktat kota untuk menciptakan majelis-majelis warga yang sepenuhnya berdaulat dengan meminggirkan Negara.

Juga sangat tidak mungkin bahwa para kandidat munisipalis libertarian yang akan memegang jabatan itu akan segera meraih kemenangan. Kampanye pemilihan mereka pertama-tama akan berupa upaya-upaya pendidikan, menggelar kesempatan belajar bersama warga dan mengenalkan gagasan-gagasan dasar munisipalisme libertarian. Semua literatur yang telah diproduksi oleh kelompok bisa disajikan dalam acara kampanye tersebut. Tetapi untuk kampanye itu sendiri dibutuhkan dokumen spesifik: sebuah *platform* atau konsep ajuan politik yang merangkum gagasan-gagasan kelompok dalam tampilan yang ringkas.

Platform pemilihan harus berisikan serangkaian tuntutan yang mencerminkan tujuan-tujuan yang diperjuangkan kelompok—yakni yang terpenting adalah demokratisasi radikal pemerintahan munisipal melalui pembentukan majelis-majelis

warga. Namun tidak cukup hanya menuntut demokrasi langsung. *Platform* juga harus mengajukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan itu. Malah *platform* mesti sekalian mengapungkan serangkaian tuntutan mendesak yang spesifik dan terang, serta menempatkannya dalam konteks radikal dengan cara mengaitkannya dalam kerangka tujuan jangka panjang yang hendak mengubah masyarakat secara fundamental. Jangan lupa, munisipalisme libertarian adalah gerakan revolusioner, bukan gerakan reformis dan bertujuan bukan untuk mereformasi sistem yang ada melainkan menggantinya dengan sistem yang membebaskan.

Dalam kerangka programatis, tujuan mendesak bisa disebut tuntutan minimum dan tujuan jangka panjang dinamakan tuntutan maksimum. Tuntutan minimum adalah tuntutan-tuntutan yang realisasinya diperhitungkan bisa dicapai dalam sistem yang sedang berjalan; ini tuntutan-tuntutan yang spesifik dan konkrit. Tuntutan maksimum, sebaliknya, bersifat lebih umum yang kandungannya berupa pembentukan masyarakat rasional sebagaimana pada ujungnya kelak diharapkan tercapai. Tuntutan minimum mesti dirumuskan sedemikian rupa sehingga bergerak menjurus atau berada dalam satu tahapan ke arah tuntutan maksimum. Dengan mengaitkannya seperti ini, program juga harus mencakup tuntutan-tuntutan transisional bagi penciptaan dan perluasan alternatif-alternatif sosial. Setelah memenuhi tuntutan minimum spesifik, untuk lantas masuk ke pemenuhan bentuk perkembangan transisional, maka lanjutannya

mengarah masuk ke pemenuhan tuntutan maksimum yang lebih umum.

Misalnya, tuntutan minimum untuk "mengubah traktat kota guna mewujudkan majelis-majelis warga" dapat diikuti oleh pernyataan yang menunjukkan maksud dari mengembangkan majelis-majelis itu. Yakni untuk mencapai tujuan jangka panjang atau tuntutan maksimum berupa "demokrasi langsung." Tuntutan minimum lain yang mungkin dapat disuarakan oleh *platform* misalnya adalah "mengakhiri penyebaran toko-toko besar dan mal" di kawasan setempat. Tuntutan maksimum untuk soal ini adalah untuk menggantikan ekonomi pasar dengan ekonomi moral, karena yang terakhir ini lebih mempertimbangkan kebutuhan ketimbang keuntungan. Sebagai transisinya, program bisa menyerukan bagi munisipal untuk memulai badan usaha milik sendiri yang, seiring berkembangnya usaha-usaha tersebut, ia bisa menggantikan ekonomi pasar. Tuntutan minimum lainnya boleh jadi adalah "melestarikan lahan basah *(wetland)*," dan tuntutan maksimum yang terkait dengannya adalah "menciptakan masyarakat ekologis." Masih merupakan tuntutan mendesak, misalnya tuntutan membangun pusat-pusat perawatan sehari-hari dan rumah perlindungan bagi para perempuan yang teraniaya. Tuntutan ini bisa menjadi bagian dari tujuan jangka panjang untuk mencapai "keadilan sosial" bagi masyarakat sebagai satu kesatuan.[1]

---

1. Mengenai contoh platform pemilihan yang digunakan dalam sebuah kampanye munisipalis libertarian, lihat Appendiks.

Platform pemilihan harus selalu memuat nama kelompok dan kontak informasi sehingga orang yang tertarik bisa langsung menghubungi. *Platform* yang baik kiranya bisa digunakan untuk pendidikan publik bukan hanya pada saat kelompok sedang mengajukan kandidat untuk jabatan munisipal, melainkan bisa untuk kapan saja, apakah diluar masa kampanye mau pun selama masa kampanye pemilihan.

Harus dipahami dengan jelas oleh para anggota kelompok bahwa munisipalisme liber tarian bukanlah suatu upaya membangun pemerintahan kota yang lebih progresif atau lebih ramah lingkungan melalui pemilihan para kandidat "tercerahkan" untuk duduk di dewan kota. Arah reformis seperti ini akan menetralisasikan upaya gerakan untuk menciptakan dan memperluas majelis-majelis warga, juga menetralkan tujuannya yang lebih besar, yaitu mengubah masyarakat. Melainkan bahwa para kandidat harus menegaskan sesering mungkin tentang tujuan maksimum gerakan mereka yaitu hendak menciptakan demokrasi langsung di munisipal mereka maupun di wilayah luarnya.

Kampanye sebagai Pendidikan Publik

Anggota-anggota yang dipilih kelompok untuk maju mengikuti pemilihan pejabat lokal idealnya harus individu-individu yang paling berkecakapan dan yang paling merasa nyaman dalam menyuarakan dengan nyaring gagasan-gagasan munisipalis libertarian. Maklum, dalam jangka pendek ini kampanye-kampanya munisipalis libertarian

juga sembari menopang tujuan berupa pendidikan publik yang berkelanjutan, sebagai kesempatan bagi kelompok untuk memperkenalkan gagasan-gagasan mereka dan untuk memicu diskusi publik. Dalam setiap kesempatan—wawancara, debat dan pidato –para kandidat mesti menyerukan pembentukan majelis-majelis warga dan mengajukan demokrasi langsung. Debat kandidat secara khusus merupakan arena yang paling dikehendaki dalam momentum ini, sementara membagi-bagikan selebaran dari pintu ke pintu adalah cara yang sangat baik untuk menarik perhatian publik terhadap *platform* beserta gagasan-gagasan yang terkandung didalamnya.

Kelompok munisipalis libertarian harus benar-benar memahami bahwa para kandidat mereka yang sedang merebut jabatan bukanlah sebagai pribadi-pribadi melainkan sebagai juru bicara bagi gagasan-gagasan yang terkandung dalam *platform* kelompok. Adalah gagasan-gagasan inilah yang ditawarkan oleh kampanye kepada publik untuk disetujui atau tidak disetujui—dan bukan pribadi individu kandidat. Sementara para kandidat sendiri, mereka harus senantiasa bertanggungjawab kepada kelompok atas perilaku politik mereka dan bukan demi memajukan kepentingan pribadi.

Hamparan terbaik bagi kampanye adalah debat-debat yang dihadiri oleh warga dan warga bisa mengungkapkan permasalahannya serta mengajukan pertanyaan. Acara-acara semacam ini merupakan kesempatan untuk menumbuhkan ranah politik *face-to-face* yang adalah unsur mendasar dalam demokrasi langsung. Pemberitaan dan jang-

kauan liputan media mungkin kelihatannya lebih efektif ketimbang wacana percakapan langsung karena bisa menjangkau lebih banyak orang, tetapi kelompok mesti mendekati media dengan berhati-hati. Pertama-tama karena media meletakkan partisipasi politik komunitas dari kejauhan atau secara berjarak—tidak lagi *face-to-face*–dan karenanya melemahkan keluasan daya-rengkuh atau inklusivitas yang diperjuangkan munisipalisme liber tarian dan mengekalkan isolasi terhadap rakyat biasa dari urusan-urusan publik. Selain juga menjauhkan para kandidat beserta gagasan-gagasannya dari pertanyaan tajam dan tantangan yang justru mungkin terjadi dalam kontak secara langsung.

Tak kalah penting untuk diperhatikan, bahwa reportase berita dalam televisi komersial toh terdefinisi untuk bias ke arah *status quo* dan pada dasarnya bertentangan dengan gerakan munisipalis libertarian. Kendati sebagian reporter mungkin bersimpati terhadap gerakan tersebut, stasiun televisi komersial setempat akan sangat berorientasi pada kepentingan pasar, para pemasang iklan yang selama ini menghidupi mereka. Liputan berita mereka, jika tidak sepenuhnya bertentangan, bisa mengubah para kandidat munisipalis libertarian menjadi selebriti media dan memerosotkan wacana politik ke tingkat hiburan dan hanya menawarkan ucapan layak-kutip serta gambar ketimbang pemberitaan yang seksama dan menyeluruh. Media penyiaran terbaik yang bisa digunakan kelompok boleh jadi adalah televisi yang mengakses publik lokal, yang seringkali memperkenankan pemberitaan yang penuh, tidak

disunting dan tidak terpotong mengenai forum-forum pertemuan dan perdebatan.

Kegagalan Pemilihan

Reaksi politik dalam periode masa terkini di banyak wilayah dunia sekarang, boleh jadi menghambat keberhasilan segera dari kampanye pemilihan, bahkan untuk lingkup komunitas yang kecil dan relatif progresif sekalipun. Untuk perkiraan masa depan pun, para kandidat munisipalis libertarian kemungkinan besar akan kalah untuk jenis pemilihan apa pun yang mereka ikuti. Tapi paling tidak, pada 1990-an, minoritas revolusioner boleh berharap meraih dukungan publik yang meluas dengan cepat. Tampaknya memang masih perlu waktu yang harus dijalani sebelum gerakan ini mencapai keberhasilan pemilihan, bahkan pemilihan sederhana sekalipun.

Namun dalam era reaksioner seperti ini, paradoks dengan tampilan permukaan, keberhasilan pemilihan bukanlah suatu hal yang harus menjadi fokus perhatian gerakan munisipalis liber tarian. Kendati tetap jelas bahwa mereka harus berpartisipasi dalam kampanye-kampanye pemilihan, memenangkan kampanye bukanlah perkara yang harus jadi menentukan. Dalam terlalu banyak kasus, gerakan-gerakan alternatif radikal telah kadung mencapai keberhasilan pemilihan sebelum gagasan-gagasan mereka menjadi bagian dari kesadaran publik—dengan mengorbankan prinsip-prinsip dasar mereka. Mereka mendapatkan suara karena warga sepakat bukan dengan tujuan-tujuan

yang lebih besar melainkan hanya sepakat dengan tujuan-tujuan minimum, bahkan seringkali tujuan reformis. Pendidikan publik yang mewadahi tujuan maksimum mereka agar terbentuk masyarakat rasional ternyata tak ditegaskan jalurnya. Akibatnya, berkembanglah kesenjangan antara *level* politik gerakan dengan *level* politik warga. Adapun para kandidatnya, manakala terpilih untuk menjabat, lebih bertanggungjawab kepada para warga yang telah memilihnya, bukan kepada *platform* gerakan. Perkembangan ini, tak terelakkan lagi, melemahkan radikalisme gagasan-gagasan mereka demi kepentingan "keberhasilan" pemilihan.

Contoh kasus di sini ialah gerakan Hijau yang muncul pada akhir 1970-an dan awal 1980-an di banyak negara Eropa, terutama di Jerman. Kelompok Hijau yang mulanya adalah gerakan budaya-tanding, dengan tegas bertekad merekonstruksi masyarakat dalam jalur batas-batas yang lebih ekologis. Pada awal 1980-an, kelompok Hijau mengikuti pemilihan parlemen federal Jerman dan memenangkan suara yang cukup memenuhi syarat bagi sekitar dua puluh orang anggota untuk masuk parlemen.

Partai Hijau ini menjelaskan bahwa para anggota baru dalam parlemen tersebut—anggota-anggota mereka yang duduk di parlemen–yang tiba-tiba menjadi sorotan publik, akan menggunakan jabatan-jabatan Kenegaraan mereka hanya sebagai platform untuk mendidik publik. Tetapi harapan-harapan segera meninggi bahwa para anggota parlemen itu akan mampu mengesahkan un-

dang-undang yang progresif dan tercerahkan secara ekologis, dan bahwa mereka harus berusaha keras untuk memperjuangkannya. Namun mengesahkan perundang-undangan seperti itu hanya mungkin jika undang-undang itu tidak mengganggu sistem yang sudah ada. Begitu pencapaian legislasi perundang-undangan telah menjadi tujuan, maka partai tersebut sudah tidak lagi radikal. Perlahan-lahan, demi meningkatkan perolehan jumlah suara, partai ini menanggalkan tuntutan-tuntutan radikalnya. Akibatnya partai ini dengan cepat terhisap ke dalam institusi-institusi Negara. Pada awal 1990-an, setelah partai Hijau mengeluarkan pernyataan tentang kapitalisme yang nyata-nyata berposisi sepihak dengan Vatikan yang kanan, sayap kiri partai tersebut yang dikenal berprinsip kuat akhirnya dengan amat berang memisahkan diri. Saat ini anggota-anggota partai Hijau selebihnya, bergerak sepenuhnya dalam sistem yang ada—malah mereka bekerjasama amat bersemangat dengan partai-partai konvensional, termasuk Kristen Demokrat, seberapapun "ongkosnya" menggerogoti prinsip-prinsip mereka. Perkembangan serupa terjadi di Inggris, Perancis dan Italia, juga di Amerika Serikat dalam skala yang lebih kecil.

Untuk menghindari jenis "pendidikan mundur" ini, gerakan munisipalis libertarian seharusnyalah menandaskan diri untuk tumbuh secara perlahan saja dan organis serta dengan tekun, sabar, menguraikan gagasan-gagasannya kepada warga biasa, mendidik mereka dalam setiap kesempatan, tanpa dibelokkan oleh kemunduran-kemunduran

yang tidak bisa dielakkan. Gerakan harus senantiasa ingat bahwa tujuannya bukan untuk menghasilkan lebih banyak anggota dalam elite pemerintahan setempat. Melainkan menciptakan kembali ranah politik yang memperkenankan tingkat kemungkinan tertinggi bagi demokrasi langsung. Untuk menciptakan ranah politik ini, gerakan harus mendidik publik dan menolak dijinakkan oleh Negara.

Kisah gerakan Hijau tadi boleh jadi mengarahkan sebagian kalangan munisipalis libertarian untuk sama sekali menolak berpartisipasi dalam pemilihan umum, bahkan pemilihan lokal sekalipun. Tetapi kampanye-kampanye lokal adalah forum terbuka tingkat pertama bagi aktivitas pendidikan. Terlepas dari perubahan dan perkembangan akibat pemilu serta akibat-akibat yang secara potensial bisa mendemoralisasi lantaran kekalahan dalam kampanye, berpartisipasi dalam pemilu harus tetap menjadi bagian yang dijalani konsisten dan berkelanjutan dalam praksis munisipalis. Selama gerakan tetap menganut tujuan dan prinsipnya, ia akan menumbuhkan alternatif berarti bagi masyarakat masa kini : demokrasi langsung munisipal.

Yang sebaiknya tidak dilakukan kalangan munisipalis libertarian, yang mungkin sulit, adalah mengarahkan aktivitas mereka berdasarkan jumlah suara yang mereka raih dalam pemilu, atau begadang bermalam-malam merenungi dan menganalisa persentase para pesaingnya. Keasyikan seperti ini selalu membawa salah satu dari dua akibat: berputus asa, atau menginginkan keberhasilan dalam pemilihan, sebagaimana yang terjadi pada

gerakan Hijau. Ketimbang semata-mata meraup lebih banyak suara dari anggota-anggota komunitas, kelompok munisipalis-libertarian lebih baik menegaskan kualitas diatas kuantitas. Mereka sebaiknya meyakini pertumbuhan kelompok yang berjalan perlahan, namun terdiri dari para anggota dan pendukung yang berkesadaran tinggi ketimbang sibuk meraih sejumlah besar pemberi suara yang hanya sedikit mengenal gagasan-gagasan munisipalis liber tarian—yakni, *constituency*, para pemberi suara.

Hanya dalam komunitas yang kesadaran politik dan demokratisnya telah tertumbuhkan tinggi oleh gerakan, yang bakal memicu gairah kandidat munisipalis libertarian untuk sungguh-sungguh memenangkan pemilu. Hanya bilamana warga benar-benar memilih seorang kandidat munisipalis libertarian untuk menduduki jabatan karena mereka menyetujui *platform* kelompok bersangkutan, maka kandidat harus bertanggungjawab baik kepada *platform* maupun kepada kewargaan yang segera bersiap sedia mulai membentuk majelis-majelis warga dan mendemokratisasikan pemerintahan munisipal. Dia harus secara agresif mengajukan perubahan traktat demi terbukanya jalan menciptakan majelis-majelis warga (atau jika majelis-majelis itu sudah ada, ia mesti meningkatkan kekuasaan majelis-majelis itu, termasuk kekuasaan legal untuk merumuskan kebijakan-kebijakan bagi munisipalitas secara keseluruhan).

Libertarian Anti-Elektoralisme

Banyak anarkis individualis yang akan merasa keberatan terhadap pernyataan bahwa pengalaman-pengalaman seperti yang dimiliki orang-orang Hijau itu sudah melekat pada setiap gerakan manapun yang ikut serta dalam pemilihan. Mereka menolak pendekatan munisipalis libertarian tepatnya karena pendekatan tersebut melibatkan partipasi dalam pemilihan, bahkan pemilihan-pemilihan munisipal yang tersusun berdasarkan demokrasi langsung. Pemilihan munisipal, menurut mereka, adalah sebagian dari pemilihan negara bagian, propinsi dan nasional. Para pemegang jabatan munisipal secara kualitatif tidak berbeda dari para pemegang jabatan dalam Negara-Bangsa. Rupanya, siapapun yang secara konsisten anti-Negara, ia harus menolak pemi lihan-pemilihan lokal dan politik munisipalitas.

Penentangan terhadap Negara memang sangat diharuskan, tetapi Statisme (sikap mendukung Negara) bukan hal yang sama dengan elektoralisme. Partisipasi dalam pemilihan munisipal dan dewan kota hampir berbeda dengan ke-Negara-an, terutama ketika gerakan libertarian secara sadar mengarahkan partisipasi ini menentang Negara (lihat bab 12). Kota dan Negara berasal dari dua tradisi yang sama sekali berbeda yang telah berulangkali menjalani perebutan kekuasaan satu sama lain. Bahkan di Perancis yang disertai dengan sistem Negara tersentralisasi yang begitu buruk. Berpartisipasi dalam pemilihan munisipal—dengan niat mendemokratisasi munisipal dan mempertentangkannya

dengan Negara–berarti berpihak pada golongan anti-Negara dalam perjuangan yang terus berlangsung ini.

Kalangan anarkis ini, mesti dicatat, tidak membuat pembagian masyarakat menjadi tiga elemen yaitu bidang politik, sosial dan Negara. Mereka terutama meniadakan bidang politik dengan membaurkannya dengan Negara, dengan menerima anggapan konvensional bahwa politik dan Negara bisa saling mengubah—sebuah kekacauan yang menjalar langsung kepada kalangan Statis (golongan yang mendukung Negara). Perjuangan melawan Negara, di mata mereka, harus dijalankan oleh bidang sosial, yakni, oleh kelompok-kelompok sosial alternatif seperti kooperasi-kooperasi dan bukan oleh bidang politik, yang keberadaannya mereka ingkari.

Tetapi anarkisme itu sendiri senantiasa mengandung kecenderungan komunalis, berdampingan dengan sifat-sifat individual dan kulturalnya. Komunalisme mempertahankan cita-cita akan adanya "komune-komune" atau komunitas-komunitas yang terdesentralisasi, tanpa Negara dan dikelola secara kolektif—pada hakikatnya, ini juga adalah cita-cita munisipalitas terkonfederasi. Orientasi kecenderungan komunalis ini sudah lama menjadi munisipalis, sebagaimana bisa dilacak dari tulisan-tulisan Bakunin dan Kropotkin. Bakunin melihat misalnya, bahwa dewan-dewan munisipal adalah hal mendasar bagi kehidupan politik rakyat. Rakyat, tulisnya, "memiliki common sense yang sehat dan praktis tatkala menjalankan urusan-urusan komunal. Mereka hampir memahami dan tahu betul bagaima-

na memilih para pejabat yang berkemampuan ditengah-tengah mereka. Karena inilah pemilihan-pemilihan munisipal selalu dengan baik mereflek-sikan sikap dan kehendak rakyat."[2] Namun titik inti politik dalam kecenderungan komunalis belum cukup terartikulasikan dalam tulisan-tulisan kalangan anarkis sosial. Kekosongan itulah yang dicoba diisi oleh munisipalisme libertarian.

Majelis-Majelis Ekstralegal

Di banyak tempat, kelompok munisipalis libertarian akan menemukan bahwa munisipalitas tidak memiliki piagam, atau bahwa dewan kota atau badan munisipal lainnya secara konsisten merintangi usaha-usahanya untuk mengubah piagam demi memperkuat majelis-majelis warga. Seorang anggota dewan munisipalis libertarian bisa saja menyadari bahwa tidak mungkin membujuk dewan untuk melegalisasi majelis-majelis warga. Atau mungkin komunitas itu belum mencapai tahap dimana para anggota dewan munisipalis libertarian bahkan bisa dipilih.

Dalam kasus-kasus seperti ini, kelompok tersebut bisa membuat majelis-majelis warga yang ekstralegal atas inisiatif mereka sendiri dan memanggil mereka agar menggelar rapat, juga menyeru kepada semua warga dalam komunitas tersebut agar hadir dan berpartisipasi didalamnya. Majelis-majelis ini bisa menggelar rapat secara ru-

1. Sam Dolgoff, ed., *Bakunin on Anarchy* (New York: Alfred A. Knopf, 1972, terbitan ulang Montreal: Black Rose Books, 1980, *Bakunin on Anarchism*), hal. 223.

tin dan memperdebatkan isu-isu lokal, regional, nasional dan bahkan internasional jika mereka sangat menginginkannya, dan mengeluarkan resolusi serta pernyataan publik sebagai ekspresi pandangan mereka. Untuk menerapkan struktur pada rapat-rapat itu, para partisipan harus mengadopsi seperangkat aturan formal yang diberlakukan untuk menjalankan urusan-urusan mereka dan menegakkannya sebagai hukum. Akhirnya, mereka bisa menegaskan kekuasaan politik yang ujungnya mereka klaim bagi diri mereka sendiri.

Bahkan majelis-majelis yang tidak memiliki kekuasaan legal bisa menjalankan kekuasaan moral yang sangat besar. Semakin jauh warga melihat signifikansi majelis-majelis itu dan menghadiri rapat-rapatnya, struktur-struktur munisipal tidak mempunyai pilihan akhir kecuali memberi mereka sejumlah kekuasaan struktural yang legal.

Manakala langkah minimum ini diambil, sebuah program transisi untuk mengembangkan kekuasaan majelis bisa dijalankan. Bersamaan dengan tumbuh dewasanya demokrasi rakyat —seiring pesatnya kehadiran dalam majelis, seiring warga membuat sendiri lembaga-lembaga ini–majelis-majelis tersebut akan memperoleh kekuasaan *de facto* yang lebih besar. Akhirnya piagam kota mesti diubah agar mengakui kekuaasaan rakyat yang baru ini, agar menegaskan bahwa majelis-majelis tersebut memiliki kedaulatan tinggi dalam komunitas. Lalu majelis-majelis itu akan bekerja untuk mencapai tuntutan maksimum akan adanya pemerintahan munisipalis libertarian: konfederasi

majelis-majelis munisipal dan pembentukan masyarakat rasional.

Seberapa cepat ruang publik yang dikelola sendiri ini dilembagakan dalam majelis-majelis itu, tentunyalah akan tergantung pada kesadaran rakyat. Kesabaran yang tinggi, mesti ditegaskan, harus dimiliki oleh kelompok munisipalis libertarian tersebut, tetapi upaya politiknya secara potensial telah memperluas kemungkinan-kemungkinan adanya transformasi besar dalam kehidupan politik.

BAB 9

MEMBENTUK KEWARGAAN

Liberalisme, teori politik yang mendasari ke-Negara-an representatif, memajukan dalil bagi dia yang menentukan dirinya sendiri yaitu individu, sebagai unit terkecil, bahwa individu pada puncak kedaulatannya akan menjalankan kehendak otonomnya dengan memilih sejumlah opsi dalam sebuah bilik pemungutan suara. Masyarakat kita menerima pandangan individualistis ini dengan sangat serius, merayakan dan meninggikan dengan berlebihan sosok berdaulat yang tanpa rasa iba memaksimalkan kepentingan dirinya setiap saat. Individu-individu semacam ini dikatakan menikmati kemerdekaan termasuk kebebasan dari kekangan dalam memburu profit. Demikianlah dalam ideologi Amerika: kebebasan biasanya dikaitkan dengan individualisme heroik, kemandirian, otonomi dan *entrepreunership*.

Tetapi individu otonom yang diusung tinggi-tinggi itu sebenarnyalah merupakan fiksi. Tidak ada seorang pun yang bisa otonom atau independen dari segala keterkaitan sosial, baik apakah itu berupa kehidupan pribadi yang menopang mereka secara personal maupun kehidupan komunitas yang menopang mereka secara komunal. Kebebasan juga tidak bisa dihitung hanya oleh gagasan tentang otonomi dan independensi, mengingat kedua gagasan ini utamanya merupakan konsep negatif "bebas dari" (sesuatu)—atau malah jadinya sebagai kon-

sep kemerdekaan personal yang dipertentangkan dengan kebebasan sosial. Alias, bukannya mempertinggi kebebasan sosial dan politik individu, otonomi justru malah merusakkannya. Pada ujungnya, otonomi menegasikan kebebasan dengan cara melenyapkan saling ketergantungan yang menguntungkan, keterjalinan hubungan, lapisan dasar sipil dan sosial, yang kepada semua inilah kebebasan bersandar.

Secara paradoks, individualitas yang beroposisi dengan individualisme, memperoleh darah dan dagingnya dari saling ketergantungan atau interdependensi sosial, bukan dari independensi, mengingat dukungan komunitas dan solidaritas menyuguhkan konteks yang di dalamnya individu bertindak. "Kualitas personal paling berharga," sebagaimana ditulis Max Horkheimer, "seperti independensi, kehendak untuk bebas, simpati dan rasa keadilan, semua itu adalah kebajikan-kebajikan sosial sekaligus individual. Individu yang sepenuh-penuhnya berkembang adalah perwujudan dari masyarakat yang juga berkembang sepenuhnya. Emansipasi individu bukanlah emansipasi dari masyarakat, melainkan pembebasan masyarakat dari proses keterpecahan hingga semata sebagai partikel-partikel terkecil, itulah atomisasi yang mencapai puncaknya pada masa-masa kolektivisasi dan budaya massa."[1]

Setidak-tidaknya, masyarakat yang ter atomisasi akan terdesak untuk aktif, kewargaan

1. Max Horkheimer, *The Eclipse of Reason* (New York: Oxford University Press, 1947), hal. 135.

yang matang akan terpanggil menuju demokrasi langsung. Sebagaimana kita maklumi bersama, dalam masyarakat massa dewasa ini, warga direduksi menjadi sekedar "pemilih" atau "pembayar pajak." Jauh dari upaya memperkuat kecakapan mereka, Negara beserta sistem kapitalis justru melemahkan mereka. Membayangkan diri layaknya seorang kepala keluarga atau *paterfamilias*, Negara mengelola kehidupan sipil berdasarkan kepentingannya, mungkin juga demi kebaikannya sendiri, tetapi dengan demikian berarti melanggengkan ketergantungan dan subordinasi sipil terhadap Negara. Pada saat yang sama, kapitalisme tanpa bergeming membuat warga melulu sial, serombongan besar konsumen yang kebutuhannya tak berujung, yang senantiasa lapar bukan akan kuasa-diri tetapi lapar tawar-menawar. Kepasifan warga, serba goyahnya mereka di hadapan proses-proses Negara membuat mereka rawan dimanipulasi, baik oleh pribadi-pribadi berkuasa ataupun oleh institusi-institusi berkuasa.

Pemungutan suara massa dalam privasi bilik pemilihan tak lain merupakan substitusi pucat dari kehidupan politik yang aktif. Disini preferensi pribadi terhadap para kandidat diregistrasi, di tabulasi dan dikuantifikasi layaknya preferensi konsumen dalam sebuah survei riset pasar, yang lantas diolah lagi untuk menemukan strategi pasar yang lebih efektif untuk masa pemilihan sejumlah kandidat berikutnya.

Guna memperluas partisipasi warga dan demokrasi itu sendiri, sebagian pengamat men-

gusulkan dikembangkannya penggunaan "alat-alat" demokratisasi seperti referendum, dengan itu rakyat dapat memberikan suara mengenai isu-isu spesifik. Tetapi referendum semata-mata menawarkan opsi-opsi yang sudah agak terumuskan; dengan kata lain referendum tidak mengijinkan perumusan kebijakan kolektif atau diekspresikannya kemungkinan-kemungkinan dalam rentang yang lebih luas. Sebagaimana halnya *voting* massa untuk kandidat, *voting* massa untuk referendum memperlanjutkan kemerosotan partisipasi politik menjadi sekedar registrasi preferensi. Ia juga merendahkan derajat warga menjadi konsumen, cita-cita luas menjadi selera pribadi dan gagasan-gagasan politik menjadi persentase.

Tidak ada realitas yang bisa lebih berjarak dari ideal liberal tentang individu otonom yang menentukan diri sendiri, dalam menegakkan diri dan lingkungannya selain serombongan konsumen pasif yang dikurung oleh opsi-opsi Kenegaraan *(Statis)* paternalistik. Betapapun, ideal tentang otonomi adalah ideologi yang berlaku dalam masyarakat massa dewasa ini, yang secara mendalam berkompromi dengan Negara, urbanisasi, hierarki dan kapitalisme. Dengan demikian, ideologi itu bukanlah sekedar kepura-puraan, ia adalah lelucon kejam.

Kewarga(kota)an

Munisipalisme libertarian mengajukan bahwa ketergantungan pasif pada Negara elite, bukanlah kondisi akhir eksistensi politis manusia. Jalan

keberadaan yang lebih aktif bukanlah mustahil, demikian diyakini oleh munisipalisme libertarian. Persisnya karena sejumlah tampilan toh membedakan manusia dengan jelas sebagai makhluk sosial, yakni terutama kapasitasnya dalam bernalar, dalam ketergantungan saling menguntungkan sesama mereka dan kebutuhan mereka akan solidaritas. Khususnya interdependensi dan solidaritas mereka dapat menjadi landasan psikologis dan bahkan basis kerja moral bagi kewargaan dan dengan demikian juga bagi penciptaan kembali ranah politik dan demokrasi langsung munisipal.

Menciptakan masyarakat munisipalis libertarian pada puncaknya bergantung pada perkara merubah relasi-relasi sosial: menggusur Negara, urbanisasi, hierarki dan kapitalisme dengan demokrasi langsung, institusi-institusi ko-operatif yang berbasiskan pada ranah politik munisipal. Tetapi keberhasilannya juga bergantung pada kualitas logiko-karakter individu warga yang membentuk masyarakat itu.

Masyarakat yang demikian akan memerlukan sejenis karakter yang berbeda dari sekedar para pembayar pajak pasif dan pemberi suara. Warga yang menjadi penghuni aktif dan inovatif dalam ranah politik akan mengembangkan seperangkat kekuatan karakter, kebajikan sipil dan komitmen-komitmen terhadap kebaikan bersama yang pada masa kini tidak tersebar luas dan juga tidak begitu menggema di tempat mereka berada. Kualitas personal seperti demikian akan membentuk struktur karakter bagi warga matang yang berkemampuan

dalam partisipasi politik demokratis.

Kebajikan-kebajikan tersebut, yang terpenting diantaranya adalah solidaritas dan akal sehat atau nalar. Sebab sesungguhnya keberadaan komunitas bergantung pada kemampuan komunitas mempercayakan masa depannya kepada solidaritas dan rasionalitas tiap warganya.

Kewargaan, dalam definisi apapun, mengisyaratkan komitmen bagi kebaikan umum, yakni bagi solidaritas. Berbeda dengan sinisme yang meruyak akhir-akhir ini, warga yang matang dan aktif akan paham bahwa kelanggengan komunitas politik mereka bergantung pada dukungan aktif mereka dan partisipasi didalamnya. Mereka akan paham bahwa mereka memiliki tugas dan kewajiban kepada komunitas mereka, dan mereka akan memenuhinya dengan pengetahuan bahwa setiap orang di komunitas terikat oleh seperangkat kewajiban yang sama. Mereka akan mengerti bahwa tanggung jawab dan upaya bersama akan membuat komunitas menjadi hal yang mungkin.

Akal sehat, setingkatan kualitas manusia yang banyak tergerus dewasa ini, juga menjadi unsur yang sangat penting bagi demokrasi langsung. Kecakapan rasio warga akan sangat diperlukan sehingga mereka bisa mempertimbangkan tindakan terbaik yang harus dilakukan komunitas untuk menangani masalah tertentu. Akal sehat sangat dibutuhkan bagi diskusi konstruktif, dalam perundingan tentang suatu isu, ketimbang emosi dan sikap berat sebelah. Akal sehat akan sangat diperlukan untuk mengatasi praduga-praduga pribadi

yang mungkin dimiliki warga sehingga mereka bisa memperlakukan sesama warganya dengan jujur dan murah hati. Manakala tengah diupayakan untuk membangkitkan kembali properti pribadi dan *entrepreunership*, serta semangat pemburu *profit*, warga akan membutuhkan akal sehat untuk mengenali mengapa upaya-upaya tersebut harus ditentang keras, terutama mengingat tampilan-tampilan yang amat membuai emosi pastilah bakal diluncurkan demi perayaan kepentingan-diri mereka. Mereka butuh akal sehat—sebagaimana juga kekuatan karakter dan kepribadian–agar cukup kuat untuk menegakkan kebaikan komunitas.

Ini bukan berarti mengatakan bahwa dalam masyarakat munisipalis libertarian, individu, laki-laki dan perempuan, harus sepenuhnya mengorbankan diri dan tunduk pada kolektivitas. Sebaliknya, setiap individu sudah tentu juga akan hidup dalam wilayah atau domain personal, bersama anggota keluarga terdekat, bersama teman-teman pun orang-orang yang dipilihnya untuk hidup berdampingan dan bersama sesama kawan pekerja dalam aktivitas produksi. Dalam komunitas munisipal yang terberdayakan, relasi pribadi mungkin akan jauh lebih kaya ketimbang yang ada masa kini, ketika orang-orang yang bertetangga hampir tidak mengenali satu sama lain dan tatkala keluarga inti, dalam keterasingan, harus mengerjakan semua tugas personal untuk menopang individu, tugas yang dulu pernah dikerjakan bersama-sama oleh komunitas yang lebih luas dan keluarga yang lebih besar. Kondisi saling ketergantungan ini meng-

isyararatkan derajat relasi timbal balik antar individu. Sebagai sesama partisipan dalam pertemuan yang jujur apa adanya, warga bergantung satu sama lain untuk berbagi tanggung jawab—manakala mereka kian bertaut saling percaya, mereka akan menaruh kepercayaan satu sama lain.

Demikianlah individualitas dan komunitas, keduanya akan saling menciptakan dan menumbuhkan satu sama lain. Keputusan-keputusan komunal yang dibuat oleh individu warga pada gilirannya akan membentuk konteks sosial tempat mereka hidup. Domain politik akan memperkuat wilayah personal sebab ia memberdayakan diri personal, sebaliknya domain personal memperkuat ranah politik karena ia memperkayanya. Dalam proses timbal balik ini, individu dan kolektivitas akan saling memelihara ketimbang saling menundukkan satu sama lain.

Meski ada banyak perbedaan diantara mereka, warga demokrasi Athena kuno umumnya memahami kewargaan sebagai bentuk ekspresi diri yang paling otentik ketimbang sebagai beban kewajiban pengingkaran-diri. Mereka yakin bahwa manusia, sudah dari pembawaannya, adalah makhluk politik dan bahwa partisipasi politik adalah bagian dari sifat kemanusiaannya. Mereka tidak menyukai politik yang menempatkan kepentingan pribadi diatas kebaikan umum. Pengakuan kolektif akan tugas dan tanggung jawab yang dijalani bersama, didasari oleh sentuhan solidaritas kolektif yang kuat dan komitmen pada akal sehat. Lebih dari dua milenium kemudian, salah satu versi dari gagasan ini mene-

mukan ekspresinya dalam semboyan *First Socialist International*, "tak ada hak tanpa kewajiban, tak ada kewajiban tanpa hak," yang diadopsi oleh kalangan anarkis dan Marxis sebagai bagian dari etika sosialisme revolusioner.

Paideia

Sementara otoritas Negara mengasumsikan bahwa "warga" sedari kandungannya adalah mahluk tak dewasa yang tak kompeten dan tak bernalar sehingga segenap urusannya harus ditangani oleh para profesional, munisipalisme libertarian justru mengasumsikan sebaliknya. Munisipalisme libertarian menganggap setiap warga secara potensial memiliki kompetensi dan cukup bernalar untuk berpartisipasi langsung dalam politik demokratis. Ia juga mengisyaratkan bahwa dengan latihan dan pengalaman warga mampu dengan cermat melahirkan keputusan-keputusan secara damai dan melaksanakan pilihan-pilihannya secara bertanggungjawab. Munisipalisme libertarian menilai bahwa politik kelewat genting untuk dipasrahkan kepada para profesional; politik justru harus menjadi bidangnya para amatir atau rakyat biasa.

Orientasi menuju amaterisme ini, sebagaimana telah kita simak, sudah sedemikian meresap di polis Athena. Dengan hanya sedikit pengecualian, para pemegang jabatan dipilih bukan melalui pemilihan melainkan melalui penyortiran, yakni melalui undian. Kebanyakan pejabat dipilih pada dasarnya secara acak, berdasar pada prinsip

bahwa setiap warga secara politis berkemampuan menangani panggilan tugas dari jabatannya.

Politik amatir karenanya mengandaikan bahwa warga telah mencapai tingkat kedewasaan politik yang tinggi sehingga tidak dibutuhkan adanya elite "spesialis" yang bertanggungjawab atas pemerintahan. Tetapi kebajikan-kebajikan dan praktek-praktek yang diperlukan bagi kewargaan, tidak muncul dari spirit kemanusiaan semata. Melainkan, seperti bentuk-bentuk perilaku beradab lainnya, semua itu dihasilkan dari instruksi yang teliti. Sampai taraf tertentu, anak-anak mempelajari praktik-praktik ini di keluarga mereka: yang paling muda sering diajari untuk saling memberi, menerima dan berbagi, sementara yang lebih tua belajar mandiri dan berpikir kritis. Utamanya, kebajikan-kebajikan dan kompetensi spesifik kewargaan harus secara sadar ditanamkan melalui proses pendidikan politik spesifik yang juga mencakup pembentukan karakter.

Orang-orang Athena menamakan pendidikan demikian sebagai *paideia*, yaitu tindak penyuburan yang diniatkan perihal kualitas etika dan kualitas sipil yang diperlukan bagi kewargaan. Kualitas-kualitas ini mencakup tidak hanya kebajikan etis tetapi juga pengenalan yang matang terhadap komunitas beserta nilai-nilainya dan rasa tanggungjawab terhadap komunitas. *Paideia* menanamkan pengendalian dan norma kelayakan yang diperlukan untuk menjaga majelis sipil tetap tertib, toleran, fungsional dan kreatif. "Pemberadaban" seperti inilah yang bisa mengubah sekelompok in-

dividu berkepentingan menjadi tubuh politik yang memerdekakan atau deliberatif, rasional dan etis.

Bagaimana dan dimana *paideia* dijalankan? Studi akademis di sekolah-sekolah saja tidaklah cukup. Sementara media massa bukannya memajukan *paideia* tetapi malah menenggelamkannya. Sebenarnyalah sekolah bagi kewargaan dan karakter yang menjadi struktur penopangnya tiada lain adalah ranah politik itu sendiri. Kewargaan tercipta ditengah partisipasi politik demokratis, ditengah-tengah semaraknya diskusi dan interaksi yang melahirkan pengetahuan, latihan, pengalaman dan penalaran. Di jantung proses pengambilan keputusan, warga berkembang baik sebagai individu maupun sebagai makhluk politik, karena warga adalah hasil dari aktivitas politik mereka sendiri. Sekolah politik sesungguhnya adalah politik itu sendiri.

Pada puncaknya, perkembangan kewargaan tersebut akan menjadi sebuah seni, bukan sekedar pendidikan. Setiap perkakas estetis dan institusional akan digunakan untuk menyingkap kemampuan tersembunyi yang dimiliki warga menjadi realitas aktual. Kehidupan sosial dan politik akan dengan sadar diorkestrasikan untuk mengembangkan sensitivitas mendalam guna memutuskan silang perbedaan-perbedaan tanpa mengingkari kebutuhan akan perbedaan pendapat. Ko-operasi dan tanggung jawab sipil menjadi ekspresi sosiabilitas dan saling ketergantungan *(interdependence)*.

Kewargaan Saat Ini

Tampaknya tantangan terberat yang dihadapi oleh gerakan munisipalis libertarian adalah secara sadar menghidupkan kembali dan mengembangkan tradisi etis kewargaan serta menciptakan ruang publik yang mampu menyuburkannya. Dalam jaman kita kini yang dipenuhi anomi dan egoisme, tantangan itu boleh jadi sukar sekali dicapai. Kebajikan-kebajikan dan praktek-praktek kewargaan yang aktif tampil sebagai sesuatu yang asing bagi banyak orang saat ini. Sinisme tentang "politik" sudah mewabah dan isyarat apapun yang orang-orang golongkan sebagai "kebaikan bersama" diatas kepentingan pribadi—atau sebutlah itu kepentingan satu keluarga–sepertinya akan disambut dengan ejekan. Ketidakpercayaan dan bahkan permusuhan terhadap "politik" telah meresap begitu dalam.

Tetapi pengamatan lebih dekat mengungkapkan bahwa sasaran kebencian rakyat itu bukanlah politik melainkan Negara. Lebih mendalam lagi, kebencian terhadap Negara itu memang sehatlah adanya dan sah-sah saja. Maklum, Negara mencerminkan sekumpulan majikan dan bukan kebaikan bersama. Sialnya, pada masa kini politik sudah sangat disamakan dengan Kenegaraan sehingga bagi kebanyakan orang, sikap permusuhan terhadap Negara telah meracuni sikap mereka terhadap politik. Mereka menjadi benci kepada pedoman-pedoman yang bisa memberdayakan mereka, yang bisa menggantikan anomi mereka dengan komunitas, juga menggantikan kelemahan sosial dengan keberdayaan.

Tantangan menciptakan kembali etika sipil dengan demikian tampaknya tidak sesulit tampilan sekilas tadi. Proses merebut kembali kuasa warga dan menciptakan masyarakat munisipal libertarian bisa dipopulerkan dengan cara menawarkan masukan bergizi bagi kondisi kelaparan makna yang sedemikian meruyak saat ini. Asupan tersebut bisa berlaku layaknya benih cita-cita yang ditanamkan pada kehidupan yang sudah terprivatisasi dan tampak tidak bertujuan ini, sehingga orang memiliki sesuatu yang melampaui semata kepuasan-diri untuk dijalani dalam hidupnya. Mereka bisa memobilisasi seluruh kekuatan dan bakatnya serta dalam prosesnya tumbuh dengan cara yang tidak pernah mereka ramalkan sebelumnya. Pemenuhan tujuan gerakan tersebut akan menciptakan masyarakat yang lebih baik, yang didalamnya anak-anak mereka bisa hidup kreatif dan memiliki rasa solidaritas ketimbang kegelisahan, kepasifan dan kepasrahan.

Gerakan itu karenanya harus menawarkan lebih dari sekedar *platform* pemilihan dalam rangka mengatasi urbanisasi dan Negara-Bangsa. Ia harus menawarkan etik ideal yang bukan hanya memberikan penilaian moral atas berbagai penyimpangan masyarakat yang ada, melainkan juga mencerminkan kebajikan-kebajikan kewargaan. Ia harus menawarkan penggantian atas kekosongan dan kesepelean hidup dewasa ini, dalam bentuk ideal-ideal radikal tentang solidaritas dan kebebasan. Seperti halnya manifesto-manifesto besar yang pernah dihasilkan oleh gerakan-gerakan sosialis pada peng-

hujung abad 19 yang silam, ia harus menyerukan transformasi moral sekaligus material, disertai etika yang menopang keduanya.

Pendidikan sipil dan *paideia* merupakan bagian integral dalam gerakan munisipalis libertarian pada semua tahapannya, dari mulai kelompok studi sampai dengan majelis munisipal dan konfederasi. Gerakan sebaiknya memulai prosesnya dari kelompok-kelompok diskusi dan forum-forum kuliah, dalam diskusi-diskusi terbuka di kafe dan restoran, di rumah dan dimana saja orang bisa berkumpul dan terutama di dalam gerakan itu sendiri, dalam pertemuan-pertemuan berkalanya. Disinilah orang-orang yang tidak berpengalaman dalam tata-cara politik dapat terbiasa menyuarakan pandangan-pandangan politik mereka kehadapan khalayak, kehadapan para tetangganya, dan memperdebatkan pandangan-pandangan itu secara rasional. Ketika majelis-majelis warga didirikan, *paideia* akan berlanjut disana, dengan dasar yang lebih formal, dimana tanggung jawab dan solidaritas akan menjadi elemen krusial dalam merumuskan kebijakan publik.

Tepatnya karena pendidikan sipil semacam itu berdasar pada hubungan *person-to-person*, ia akan menghasilkan interaksi personal dan kepercayaan, juga solidaritas yang diperlukan bagi kewargaan. Partisipasi politik yang serius dan berkelanjutan akan membantu menghilangkan praduga serta sentimen sempit dan menggantikannya dengan kerjasama serta pengakuan akan adanya saling ketergantungan. Manakala rakyat menjadi

warga aktif, mereka akan mempelajari atau mengkaji-ulang makna loyalitas terhadap sesamanya, sementara komitmen mereka terhadap pencapaian sukses akan memperdalam dan mempertinggi semangat keberanian dan kemurahan hati.

Dengan diperkuat oleh partisipasi politik yang berkelanjutan, *paideia* akan bertambah kuat sebagaimana halnya majelis-majelis munisipal menarik lebih banyak warga, menghimpun lebih banyak kuasa dan menyebarkannya lebih luas ke munisipal-munisipal lainnya. Perkembangan ini masih merupakan titik awal. Partisipasi serius dalam perjuangan restrukturisasi sosial adalah pembentukan-diri dan pemberdayaan-diri. Setelah menjalani proses pendidikan sipil, rakyat yang telah memulai proses penciptaan gerakan itu sendiri akan mengalami perubahan menjadi makhluk yang secara politis lebih dewasa manakala mereka telah merampungkan seluruh tugasnya.

BAB 10

LOKALISME DAN INTERDEPENDENSI

Menurut pandangan beberapa pemikir, prospek dari banyaknya majelis-majelis munisipal yang masing-masing membuat keputusan secara otonom, menimbulkan beberapa keraguan. Mereka mengakui bahwa demokrasi langsung dan kewargaan partisipatif kedengarannya memang bagus diatas kertas, tetapi akibat dari fragmentasi seperti ini kemungkinan besar tidak akan menjadi pemberdayaan rakyat, melainkan kekacauan. Tiap majelis mungkin akan berusaha memajukan kepentingannya masing-masing dengan mengorbankan pihak lain.

Selain itu, keberatan mereka lebih lanjut adalah bahwa masyarakat industri modern terlalu besar dan terlalu rumit untuk dikelola oleh kesatuan-kesatuan politik sekecil kota dan lingkungan ketetanggaan. Khususnya sehubungan kehidupan ekonomi yang sudah sangat saling terkait dan global, pada komunitas-komunitas lokal mustahil diharapkan membuat keputusan-keputusan dengan tingkat efisiensi yang dibutuhkan oleh produksi dan perdagangan. Pada dasarnya, masyarakat kita memerlukan pemerintahan berskala luas agar terhindar dari kehancuran masyarakat tersebut secara bersamaan. Kita diyakinkan untuk percaya bahwa Negara adalah instrumen sempurna untuk tujuan ini. Negara memungkinkan kebijakan-kebijakan dibuat dan diperkuat untuk mencangkup kawasan yang luas.

Bahkan para pemikir sosialis atau utopis yang ingin menggantikan ekonomi pasar kompetitif dalam masyarakat saat ini dengan ekonomi pasar kooperatif, juga meragukan demokrasi munisipal. Keberatan mereka, betapapun demokratisnya munisipal itu, ia tetap tidak akan pernah mampu melawan tekanan-tekanan kepentingan ekonomi dan kelas. Mereka bersikeras bahwa untuk mencapai masyarakat kooperatif, Negara—lantaran kekuasaannya yang besar–akan sangat dibutuhkan untuk menahan hebatnya daya rambah perusahaan-perusahaan kapitalis dalam memupuk keuntungan.

Kritikus lain juga mengungkapkan keberatannya bahwa komunitas-komunitas kecil, karena kepicikannya, cenderung berpikiran sempit. Bahkan dalam masyarakat yang saling berhubungan dewasa ini, lokal-lokal kecil berpuas diri dengan budaya khasnya masing-masing yang dihormati. Dan jika pandangan politik mereka dipersempit dari tingkat nasional ke tingkat kota atau wilayah yang lebih kecil, mereka mungkin akan menarik diri dengan mengorbankan kesatuan yang lebih luas. Mereka bisa saja menjadi para pelindung reaksioner atas budaya lokal yang sebenarnya tidak adil atau diskriminatif. Jika tertantang, mereka akan mempertahankan budaya lokal itu, atau malah menjadi *chauvinis*. Sejenis tribalisme munisipal bisa muncul, tribalisme yang melindungi ketidakadilan atau bahkan tirani didalamnya.

Warga munisipal *chauvinis* bahkan bisa memutuskan—secara demokratis, dalam majelis warga, melalui *voting* berdasarkan kekuasaan mayoritas

–bahwa hanya orang kulit putih yang boleh tinggal dalam komunitas mereka. Mereka bisa secara terbuka mengambil keputusan yang mendiskriminasi orang-orang kulit berwarna. Mereka bisa memutuskan untuk mengeluarkan kaum perempuan dari kehidupan publik, atau para *gay* dan lesbian, atau kelompok lainnya. Para kritikus ini berpendapat, tanpa kekuasaan Negara-Bangsa yang memperkuat hukum anti-diskriminasi, hak-hak sipil tidak akan memperoleh kesempatan. Dalam politik Amerika tradisional, seringkali terdapat kecenderungan "mendesentralisasi"—menuntut hak-hak negara bagian–yang telah berperan menyuburkan supremasi kaum kulit putih dan meniadakan kaum kulit hitam dari dunia politik.

Akhirnya, mereka yang keberatan dengan lokalisme munisipalis berpendapat, permasalahan lingkungan tidak mengakui seorang pun membuat batas-batas politik. Misalnya sebuah kota membuang sampahnya ke sungai yang merupakan sumber air minum bagi kota-kota yang berada di hilir sungai tersebut. Persoalan seperti ini harus ditangani pada tingkat yurisdiksi yang lebih luas ketimbang setingkatan munisipal. Mereka menyatakan bahwa hanya Negara berkuasa beserta instrumen-instrumen pemaksaan yang dimilikinya, yang bisa mencegah kota di hulu sungai untuk tidak merusak suplai air umum.

Berbagai argumen ini menyimpulkan bahwa ketimbang mengejar rencana demokrasi langsung yang utopis dan tidak bisa diharapkan, orang yang berupaya menciptakan masyarakat yang lebih

baik semestinya bekerja memperbaiki sistem yang ada, bahwa mereka harus berusaha mempertinggi representasi rakyat didalam Negara. Argumen-argumen diatas mengungkapkan kepada kita bahwa Negara-Bangsa memang tidak memberikan kekuasaan pengambilan keputusan secara langsung kepada rakyat biasa, tetapi paling tidak Negara memberikannya kepada para wakil rakyat. Secara umum, bahkan jika Negara bersalah karena beberapa penyimpangan, Negara diperlukan untuk mencegah penyimpangan yang lebih luas.

Di permukaan, pandangan dan kasus dari kalangan pengusung Negara tersebut mungkin terlihat tegas dan benar. Pertama-tama, memang benar bahwa dunia sekarang ini rumit. Tetapi kerumitan masyarakat toh tidak lantas berarti memerlukan kontrol Negara. Kerumitan itu justru sebagian besar ditimbulkan oleh Negara, juga oleh bentuk-bentuk perusahaan kapitalis. Menghilangkan Negara dan kapitalisme akan sangat menyederhanakan masyarakat dengan cara menghilangkan "kompleksitas" birokratis yang bersemayam didalamnya.

Kedua, sementara diskriminasi dan ber bagai jenis penindasan hak asasi manusia bisa timbul dalam masyarakat tanpa Negara, itu semua juga bisa timbul dalam masyarakat ber-Negara. Bukankah begitulah yang telah seringkali terjadi? Negara-Bangsa telah memperkuat penindasan-penindasan itu mulai dari pemisahan rasial sampai dengan *apartheid*, dari perbudakan sampai pembantaian, dari pekerja anak sampai patriarki, juga peng aniayaan seksual minoritas. Penindasan hak asasi

manusia toh seringkali dilakukan oleh Negara.

Pada akhirnya, benar bahwa banyak permasalahan sosial dan lingkungan yang melanggar batas-batas munisipal, dan bahwa tidak ada satu munisipal pun yang bisa menanganinya sendirian. Dan juga benar bahwa beberapa munisipal bisa menjadi picik dan melanggar kebebasan pihak lainnya. Kecil tidak selalu indah sama sekali, dan otonomi munisipal itu sendiri tidak menjamin bahwa munisipal tersebut akan bebas dan tercerahkan. Dan akhirnya, memang benar bahwa munisipalitas relatif tidak memiliki kekuatan untuk menentang kekuatan-kekuatan sosial yang besar—berjuang dalam keterasingan, ia hampir tidak mungkin memberikan ancaman sama sekali.

Para kritikus pengusung Negara memang benar dalam keberatan mereka terhadap lokalisme. Tetapi meskipun munisipalisme libertarian menegaskan dan mempertinggi kekuasaan, ia bukanlah sebuah filosofi lokalis. Ia mengakui bahwa sejenis organisasi transmunisipal memang diperlukan jika warga mesti menciptakan dan mengelola masyarakat yang bebas dan demokratis. Desentralisme dan lokalisme sempurna memiliki konsekuensi-konsekuensi, paling tidak, tidak seburuk yang ditimbulkan oleh Negara.

Lokalisme dan Desentralisasi

Ketika kebanyakan pemikir politik lingkungan radikal akhir-akhir ini berpaling ke persoalan bagaimana menciptakan masyarakat alternatif, mereka me-

mikirkan bagaimana menyederhanakan gaya hidup dan membangun habitat-habitat lebih sederhana di tingkat lokal, yang cocok dengan gaya hidup yang lebih sederhana itu. Mereka berpendapat bahwa kita harus melepaskan pola konsumsi yang tak pernah terpuaskan yang ditanamkan masyarakat kepada kita dan menyusun kembali diri kita sebagai anggota lingkungan hidup, yakni tempat alamiah yang dibatasi oleh batasan alamiah, seperti batas air atau pegunungan. Kita harus mengurangi sejumlah kepemilikan yang kita anggap perlu dan masyarakat mesti membuang teknologi yang (berisiko) merusak alam. Rakyat bangsa-bangsa yang lebih makmur terutama harus secara drastis memotong tingkat konsumsi mereka dan membongkar landasan teknologis produksi ekonomi.

Sebagai pengganti masyarakat *shopping-mall*, kita harus menyusun masyarakat terdesentralisasi, yang disitulah "rumah" kita, lokal kita, menjadi seotonom mungkin semampu kita. Kita harus membangun pabrik-pabrik lokal yang menggunakan alat-alat sederhana. Kita harus menciptakan kooperasi-kooperasi lokal, seperti kerjasama pangan. Kita harus bercocok tanam untuk pangan kita sebanyak mungkin. Kita harus membuang uang jika kita bisa dan mengadopsi barter atau alternatif pembayaran. Komunitas-komunitas lokal yang mampu memenuhkan kebutuhannya sendiri mungkin akan bisa bertahan, diluar arus utama masyarakat. Perlahan-lahan komunitas-komunitas tersebut akan berkembang-biak menciptakan masyarakat manusiawi yang ramah lingkungan.

Seruan para *bioregionalist* ini memiliki beberapa titik kesamaan dengan munisipalisme libertarian, terutama dalam keberatan mereka terhadap ekonomi kompetitif, komodifikasi dan penciptaan kebutuhan-kebutuhan artifisial, serta dalam keinginan mereka untuk merekonstruksi masyarakat sepanjang batas-batas ramah lingkungan. Baik bioregionalisme maupun munisipalisme libertarian menempatkan pentingnya mempertinggi kepentingan lokal-lokal demi terwujudnya desentralisasi masyarakat.

Tetapi banyak kesamaan ini bersifat dangkal. Sementara munisipalisme libertarian berupaya memperkuat kembali tingkat lokal, ia juga menilai kemandirian terisolasi sebagai sesuatu yang tidak sempurna dan menyedihkan. Apalagi sebagai sebuah prinsip yang menjadi dasar untuk menciptaulang masyarakat dan hubungan kita dengan alam. Tidak ada lokal—bahkan juga tidak munisipal yang mempraktikkan demokrasi langsung–bisa mencukupi dirinya sendiri. Sementara kita berusaha keras mendesentralisasi produksi, swa-sembada sempurna tidak hanya mustahil tetapi juga tidak diinginkan. Munisipalitas jenis apapun mempunyai ketergantungan satu sama lain, sebagaimana memang seperti itulah sebaiknya, dan memiliki kesamaan dalam isu-isu bersama. Paling tidak komunitas-komunitas individu mesti otonom dalam kehidupan ekonominya. Komunitas individu memerlukan lebih banyak sumber daya dan bahan mentah yang bisa saja berasal dari lahan diluar daerahnya sendiri. Saling ketergantungan dalam ekonomi benar-benar

merupakan sebuah fakta. Ia bukanlah fungsi dalam ekonomi pasar kompetitif dan kapitalisme, melainkan fungsi dalam kehidupan sosial, paling tidak sejak era Neolitikum. Bahkan para tukang dan petani saling tergantung satu sama lain: petani bergantung pada pertambangan, pada pabrik dan pandai besi yang membuat bajak, pacul, sekop dan semacamnya; sementara para tukang membutuhkan alat-alat dan bahan mentah dari berbagai sumber.

Munisipalisme libertarian tidak akan menghilangkan teknologi produksi yang ada. Dalam kenyataannya, ia bertentangan dengan keyakinan eko-mistis rakyat bahwa teknologi adalah penyebab krisis ekologis. Sebagian besar teknologi bersifat netral secara moral (kecuali, energi nuklir jenis apapun). Bukanlah teknologi yang menyebabkan kerusakan ekologis melainkan struktur sosial, terutama kapitalisme, yang menggunakan teknologi itu untuk tujuan-tujuan destruktif. Kebanyakan teknologi bisa digunakan baik untuk tujuan mulia maupun tujuan hina. Teknologi semata-mata hanya memperbesar konsekuensi-konsekuensi hubungan sosial dimana teknologi tersebut tertanam.

Salah satu tujuan mulia penggunaan teknologi dewasa ini adalah mengurangi atau menghilangkan kerja berat. Mereka yang menganjurkan hidup bersahaja, dengan hanya menggunakan teknologi paling sederhana, kelihatannya tidak menyadari bahwa jika komunitas yang "disederhanakan" mesti berusaha memproduksi apapun yang dibutuhkan para anggotanya, dengan hanya menggunakan alat-alat tangan dan teknologi perta-

nian sederhana, hari-hari kehidupan para anggota komunitas tersebut akan dipenuhi kerja berat yang sangat melelahkan. Ini keadaan yang lazim pada masa sebelum revolusi industri. Kerja berat seperti itu tidak hanya membuat orang-orang pra-industri menjadi cepat tua, terutama kaum perempuan, tetapi juga hanya memberi sedikit waktu untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Jika orang harus mampu sepenuhnya berpartisipasi sebagai warga dalam kehidupan politik, sebagaimana dianjurkan, mereka mesti memiliki dasar ekonomi dan teknologi yang akan memberi mereka cukup waktu untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Sebaliknya, tuntutan untuk bertahan dan keamanan personal dalam dunia pribadi akan menyusul partisipasi politik.

Untungnya, menciptakan masyarakat yang ramah lingkungan dan terdesentralisasi tidak perlu kembali pada sistem kerja berat yang begitu menyiksa. Ekologi sosial (sehimpunan gagasan yang salah satu dimensi politisnya adalah munisipalisme libertarian) mengakui bahwa pertumbuhan pesat faktor-faktor produksi dalam jaman modern telah menimbulkan persoalan lama, yakni persoalan kekurangan materi. Saat ini, teknologi telah cukup berkembang untuk memungkinkan bertambah banyaknya waktu senggang, melalui otomatisasi tugas yang pernah dijalankan oleh tenaga manusia. Sejauh menyangkut persoalan produksi, alat-alat utama untuk menghilangkan pekerjaan yang berat dan membosankan, untuk hidup nyaman dan aman, secara rasional dan secara ekologis, bagi tujuan-tujuan sosial ketimbang

tujuan-tujuan pribadi, kemungkinan besar telah tersedia bagi semua orang di seluruh dunia.

Dalam masyarakat masa kini, sayangnya, janji untuk menghilangkan kekurangan ini—janji akan cukupnya alat-alat hidup dan bertambahnya waktu senggang–belum terpenuhi. Lagi-lagi bukan karena jeleknya teknologi itu melainkan karena buruknya struktur sosial yang menggunakannya. Dalam masyarakat sekarang, otomatisasi lebih sering mengakibatkan penderitaan ketimbang waktu senggang: biasanya mengakibatkan pengangguran, dimana orang tidak mampu mendapatkan alat-alat hidup sama sekali, atau melakukan pekerjaan bidang jasa dalam waktu lama tetapi dengan upah kecil. Sebuah masyarakat ekologis, dengan menghilangkan struktur sosial yang melahirkan kedua persoalan diatas, akan memanfaatkan potensi teknologi untuk menciptakan masyarakat yang tidak berkekurangan. Masyarakat tersebut akan mempertahankan banyak infrastruktur masa kini —termasuk pabrik-pabrik industri yang terotomatisasi–dan memanfaatkannya dalam produksi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. (Pabrik-pabrik itu, pada tingkat minimum, akan diubah sedemikian rupa agar menggunakan energi yang bersih dan bisa diperbaharui ketimbang menggunakan bahan bakar yang kotor). Permesinan akan memproduksi cukup barang untuk memenuhi kebutuhan individu dan menghilangkan kerja yang paling melelahkan, sehingga pria dan wanita bisa memiliki cukup waktu senggang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik sekaligus menikmati kehidupan pribadi yang

beragam dan berarti.

Jika sebagian saja dari potensi untuk mengakhiri kekurangan materi dimanfaatkan untuk kepentingan produksi, potensi itu akan mencapai pemenuhannya dengan membuat perubahan-perubahan penting dalam bidang distribusi. Yakni, hasil-hasil faktor produksi tidak akan dimiliki oleh satu kelompok, yang kemudian akan membuat hasil-hasil produksi itu tersedia di seluruh dunia dengan menjualnya, sebagaimana adanya sekarang. Hasil-hasil produksi itu akan dibagikan, didistribusikan sesuai dengan kebutuhan orang, yang diarahkan oleh etos tanggung jawab publik dan akal sehat.

Pembagian semacam itu menunjukkan keberadaan komunikasi, toleransi, ide-ide segar, cakrawala sosial lebih luas dan pemupukan budaya yang juga akan membantu mencegah timbulnya *chauvinisme* dan sikap fanatik. Namun dalam masyarakat ekologis, pembagian—distribusi yang adil –tidak hanya akan menjadi prinsip moral. Guna memenuhi janji menghilangkan kekurangan *(post-scarcity)*, pembagian itu harus dilembagakan. Ia mesti mendapatkan bentuk sosial konkret melalui prinsip kerjasama meluas *(cooperation)* yang terorganisasikan dengan baik.

Kerjasama terorganisasi akan timbul dari saling ketergantungan antar munisipal yang terdemokratisasi, terutama dalam kehidupan ekonomi mereka, dalam persoalan-persoalan ekologis, dan dalam isu-isu tentang hak asasi manusia. Munisipal-munisipal terdemokratisasi itu tidak saja

akan saling tergantung, mereka juga akan melembagakan kesalingtergantungan *(interdependence)* itu dengan cara demokratis-langsung.

BAB 11

KONFEDERALISME

Prinsip luas organisasi politik dan sosial yang bisa melembagakan interdependensi (saling ketergantungan) tanpa melibatkan Negara dan pada saat yang sama juga mempertahankan kuasa majelis munisipal adalah konfederalisme.

Konfederasi merupakan jaringan dimana beberapa kesatuan politik bergabung membentuk kesatuan yang lebih besar. Kendatipun kesatuan yang lebih besar dibentuk dalam proses berkonfederasi, kesatuan-kesatuan yang lebih kecil tidak melarutkan diri kedalamnya dan menghilang. Tetapi mereka justru melestarikan kebebasan, identitas dan kedaulatannya bahkan ketika mereka berkonfederasi.

Dalam masyarakat ekologis, munisipal yang telah menjalani demokratisasi—yakni yang traktat atau piagamnya telah diubah sehingga majelis warga memegang kekuasaan politik tertinggi dalam munisipal tersebut–akan membentuk konfederasi-konfederasi berdasarkan basis regional untuk mengurusi masalah-masalah lintas-munisipal atau regional. Konfederasi akan melembagakan interdependensi komunitas yang sudah menjadi sifatnya, tanpa mencabutnya dari kebebasan dan kedaulatannya.

Sebagai pengganti pemerintahan pusat beserta *voting* legislatif untuk menyetujui atau menolak hukum, konfederasi secara khas mewujud

dalam sebuah kongres delegasi yang menjalankan koordinasi kebijakan dan praktik komunitas-komunitas anggotanya. Dalam pemerintahan munisipalis libertarian, munisipal akan membentuk federasi semacam demikian dengan mengirimkan delegasi. Para delegasi ini tidak akan menjadi wakil rakyat. Artinya, tujuan mereka bukanlah menghasilkan kebijakan atau hukum atas nama para konstituennya, dengan cara-cara yang mereka bayangkan bisa menguntungkan. Para delegasi tersebut justru akan diberi mandat oleh warga di majelis-majelis munisipal untuk mewujudkan keinginan warga.

Fungsi-fungsi delegasi adalah menyampaikan keinginan munisipal ke tingkat konfederal. Dalam hubungannya dengan para delegasi lain dalam konfederasi, mereka mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan bersama yang telah disetujui oleh sejumlah anggota komunitas dan menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang mungkin muncul diantara mereka sendiri. Seluruh delegasi bertanggungjawab kepada majelis-majelis yang telah memberi mereka mandat sebagai agen.

Konfederasi dalam Sejarah

Struktur konfederasi, mesti ditegaskan, secara historis bukanlah hal baru. Kota-kota pada masa awal pencatatan sejarah telah mendirikan asosiasi-asosiasi konfederal, sebagaimana yang terjadi di Mediterania kuno dan daratan Eropa abad perte ngahan. Pada awal periode modern, konfederasi memperoleh peran penting sebagai alternatif utama

bagi Negara-Bangsa, sebelum Negara-Bangsa menjadi lumrah seperti dewasa ini.

Manakala kota-kota melawan penindasan yang dilakukan Negara, mereka telah seringkali melakukannya dengan cara bekerjasama membentuk konfederasi. Kita melihat beberapa contoh kota yang membentuk bermacam liga dan konfederasi dalam bab 5, tetapi dua kasus penting yang belum disebutkan adalah yang terjadi di Swiss dan Castile, Spanyol.

Swiss masa kini, karena masih merupakan konfederasi, kelihatan aneh ditengah-tengah banyaknya Negara-Bangsa di Eropa yang relatif lebih bersifat kesatuan. Tetapi pada masa-masa awal, terutama di Eropa tengah, yang lazim itu adalah konfederasi dan justru Negara-lah yang aneh. Konfederasi begitu banyak pada abad tiga belas dan empat belas, seperti liga-liga Rhenish dan Swabia. Swiss semata-mata hanya melestarikan kecenderungan lama konfederal ini, sementara tetangga-tetangganya menjalankan sentralisasi untuk menjadi Negara-Negara yang lebih modern. Struktur pemerintahan Swiss masih relatif terdesentralisasi, terdiri dari dua puluh dua wilayah *(canton)*, yang masih memiliki otonomi besar dari tingkat federal. Pada gilirannya, tiga ribu komune disitu masih mempunyai otonomi dari kanton-kanton tempat mereka berada.

Tetapi Swiss sekarang juga memiliki banyak ciri-ciri Negara (juga ciri-ciri sosial, sikap dan institusi yang sama sekali tidak tercerahkan). Konfederalisme Swiss jauh lebih menarik secara historis. Yang paling menyolok, di wilayah timur negeri itu

—yang pernah dinamakan Raetia oleh orang Romawi dan sekarang dinamakan kanton Graubunden–komune-komune Swiss membentuk konfederasi-konfederasi untuk kesejahteraan dan keamanan mereka.

Pada permulaan abad enam belas di Raetia, tiga liga konfederal (Gotteshausbund, Oberbund atau Grauer Bund dan Zehngerichtenbund) hidup berdampingan. Pada tahun 1524, ketiga liga ini bersekutu membentuk Negara Bebas Tiga Liga yang, meski mengandung nama "Negara," ia merupakan sebuah konfederasi. Konfederasi Negara Bebas itu berjalan selama hampir tiga abad, sampai Napoleon memaksanya masuk ke dalam Konfederasi Swiss pada 1803.

Ketiga liga yang menjadi komponen didalamnya itu, pada gilirannya terdiri dari berbagai komune yang benar-benar demokratis dan bebas. Kedaulatan tertinggi dalam Negara Bebas tersebut dipegang oleh komune-komune yang menggelar majelis-majelis seperti "rapat kota" dan memberikan kesepakatan atau ketidaksepakatan mereka terhadap serangkaian aksi melalui referendum. Mereka mengontrol urusan-urusan pengadilan dan ekonomi mereka sendiri, juga angkatan militer dan polisi lokal. Dan mereka berfungsi sepanjang garis-garis komunistis yang mengherankan, dengan menggunakan sumber-sumber daya lokal dalam cara-cara yang hampir menyerupai kepemilikan kolektif. Misalnya, mereka meng-istimewakan hak memelihara ternak sebagaimana mereka melakukan praktik-praktik yang sama dengan menolak properti pribadi

dan meniadakan kepemilikan tanah pribadi.

Satu-satunya "pemerintah" pusat dalam konfederasi Negara Bebas tersebut adalah sebuah komisi yang terdiri dari para pemimpin di tiap-tiap satu dari ketiga liga itu dan sebuah majelis elektif, yang bersama-sama mengajukan referendum dan memenuhi keinginan komune-komune. Para anggota komisi memiliki hak menangani urusan-urusan luar negeri dan mencegah liga-liga yang menjadi komponennya agar tidak membuat hubungan luar negeri sendiri. Tetapi komune-komune itu sendiri memutuskan persoalan-persoalan perang dan damai, juga isu-isu domestik.

"Pemerintah" pusat karenanya hampir tidak memiliki kekuasaan, sementara komune-komune—yakni, para warga itu sendiri yang berada dalam majelis–punya wewenang besar. Akibatnya, para anggota komisi hanya menjadi sekedar pembantu rakyat. Mereka akhirnya kalah oleh komune-komune dalam hal kekuasaan, bahkan kekuasaan menangani diplomasi dan membuat perjanjian sekalipun. Pada umumnya sejarah Raetia selama tiga abad ini adalah sebuah kesaksian menyolok atas kemampuan komunitas-komunitas demokrasi langsung memerintah diri sendiri dalam serikat konfederal.[1]

Di Castile abad enam belas, konfederalisme merupakan bagian dari perjuangan revolusioner. Pada 1520, dewan kota Toledo menyeru kepada

---

1. Untuk mendapatkan catatan bagus mengenai sejarah ini, lihat Benjamin Barber, *The Dealth of Communal Liberty: A History of Freedom in a Swiss Mountain Canton* (Princeton University Press, 1974).

semua kota yang memiliki perwakilan di Cortes agar mendirikan *front* bersama menentang pemerintah kerajaan, yang telah membuat perubahan merugikan dalam kebijakan pajak. Kota-kota di Castile satu demi satu bergerak menuju pemberontakan skala-penuh. Mereka mengorganisasikan milisia sipil dan mendemokratisasi pemerintah-pemerintah munisipal mereka.

Sebuah junta nasional—sederajat dengan dewan konfederal–didirikan beserta para delegasi dari seluruh kota dalam Cortes, membentuk kekuasaan ganda dalam penentangannya terhadap administrasi kerajaan. Dengan mengerahkan angkatan bersenjata yang berasal dari kalangan warga dan ditambah dengan prajurit profesional, junta comunero meraih kemenangan militer yang mengancam menggantikan Negara monarkis dengan konfederasi munisipal.

Tujuan konkret *comunero* adalah demokrasi munisipal dan sebuah Cortes yang tersusun dari para delegasi kota yang akan sangat membatasi otoritas kerajaan. Gerakan yang disebut Vallidolid itu, dalam artikel-artikelnya, menuntut bahwa para delegasi dalam Cortes dipilih atas persetujuan khalayak—yaitu oleh majelis warga–ketimbang dipilih oleh dewan kota. Pada gilirannya para delegasi ini akan diarahkan oleh mandat dari para pemilih mereka dan diwajibkan membawa instruksi-instruksi dari kota asal mereka. Cortes diharapkan menggelar rapat reguler dan menampung semua keluhan sampai akhir rapat.2

Setelah tuntutan-tuntutan ini terwujudkan,

Castile akan melihat munculnya demokrasi lokal yang berbasis luas, yang mengakar di lingkungan-lingkungan kota besar dan kota kecil. Tetapi setelah konflik penuntutan yang mencakup serbuan terhadap Toledo, Negara meraih kemenangan atas konfederasi ketika raja secara militer mengalahkan *comunero-comunero* rakyat itu.

Organisasi Konfederal

Dalam masyarakat ekologis, majelis-majelis munisipal demokrasi-langsung akan memilih para delegasi mereka untuk bertugas dalam dewan konfederal. Dewan ini akan berupa kongres para delegasi dari berbagai majelis munisipal. Seperti komisi dalam kasus Swiss, dewan ini memiliki kekuasaan yang sedikit dan semata-mata hanya menjalankan kehendak munisipal.

Selain itu para delegasi tersebut secara ketat diberi mandat untuk memberikan suara sesuai dengan keinginan munisipal asal mereka, yang memberi mereka instruksi-instruksi dalam bentuk tulisan. Mereka tidak akan diizinkan membuat keputusan-keputusan kebijakan tanpa instruksi khusus dari munisipal asal mereka. Karena sepenuhnya bertanggungjawab kepada majelis warga, para delegasi bisa di-*recall* jika mereka menyalahi mandat.

Dewan konfederal tercipta bukan untuk membuat keputusan kebijakan atas haknya sendiri, melainkan terutama demi tujuan-tujuan administratif, yakni mengkoordinasikan dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh majelis.

Penentuan-kebijakan versus Administrasi

Hal sangat mendasar bagi munisipalisme liber tarian adalah pembedaan antara penentuan-kebijakan dengan pelaksanaannya, atau antara penentuan-kebijakan dengan administrasi.

Pada tingkat munisipal, warga dalam majelis demokratis mereka akan menentukan kebijakan. Mereka akan merundingkan bermacam tindakan berkaitan dengan isu tertentu, lantas memutuskan tindakan mana yang akan diambil. Misalkan sebuah majelis sedang memperdebatkan apakah harus membangun jalan. Setelah menimbang pro-kontra dalam persoalan itu, warga bisa memberikan suara pilihannya bahwa jalan memang dibutuhkan. Keputusan mereka membangun jalan adalah contoh penentuan-kebijakan.

Jalan bisa dibangun melintasi beberapa rute. Para insinyur dalam komunitas akan memikirkan berbagai kemungkinan, memecahkan masalah-masalah teknis yang mungkin saja muncul dalam tiap rencana, lantas membawa rencana itu ke majelis. Disanalah para insinyur akan mengemukakan berbagai alternatif ke hadapan warga, dengan menerangkannya satu demi satu secara jelas. Segelintir warga dalam komunitas mungkin paham bagaimana membangun jalan, tetapi kemudian keahlian semacam itu tidak perlu mereka miliki. Mereka hanya perlu memahami penerangan yang jelas dan perbedaan-perbedaan diantara rencana-rencana itu.

Hal yang terpenting, para insinyur tidak

akan memutuskan jalan mana yang akan dibangun (kecuali dalam kapasitas mereka sebagai warga). Mereka hanya akan berfungsi sebagai dewan ahli. Setelah memperdebatkan kekuatan dan kelemahan masing-masing rencana, wargalah (termasuk para ahli dalam kapasitasnya sebagai warga) yang akan memilih preferensinya. Pilihan ini adalah contoh lain penentuan-kebijakan.

Akhirnya, jalan itu sendiri harus dibangun. Berbeda dengan fase-fase lain dalam prosesnya, konstruksi jalan akan menjadi tanggung jawab administratif—tidak memerlukan perundingan, tidak memerlukan *voting*. Para pembangun jalan akan melaksanakan keputusan yang dibuat oleh majelis, yakni membangun jalan sesuai rencana yang dipilih. Proses teknis yang ketat ini adalah satu contoh administrasi yang didalamnya tidak melibatkan penentuan-kebijakan.

Dalam pemerintahan munisipalis libertarian, seperti halnya di dunia kita saat ini, banyak keputusan mensyaratkan agar para pembuat keputusan mempertimbangkan berbagai faktor yang rumit dan sulit. Tetapi kemudian, seperti sekarang, pengetahuan teknis biasanya tidak dibutuhkan untuk membuat pilihan-pilihan politis. Sejumlah kecil anggota parlemen sekarang ini mampu merancang instalasi energi nuklir atau bahkan menjelaskan cara kerjanya, tetapi itu tidak menghalangi mereka dari membuat keputusan kebijakan mengenai penggunaan energi nuklir. Dalam masyarakat munisipalis libertarian, pengetahuan yang diperlukan akan disebarkan seluas mungkin ke tengah-tengah warga. Masalah-masalah teknis harus disajikan secara

jelas dan mudah dimengerti, sehingga warga biasa yang memiliki cukup pengetahuan bisa membuat keputusan kebijakan berkaitan dengan persoalan tersebut. Dengan menjamin bahwa semua persoalan kebijakan adalah bidang yang masuk akal, warga yang berkemampuan akan membantu mempertahankan pembedaan yang jelas dan terlembagakan antara penentuan-kebijakan dengan administrasi, dan dengan demikian memudahkan pelaksanaan demokrasi langsung.

Karl Marx dalam analisanya tentang Komune Paris pada 1871, berbuat sesuatu yang sangat merugikan bagi teori sosial radikal tatkala dia menyanjung fakta bahwa Komune tersebut telah menggabungkan antara penentuan-kebijakan terdelegasi dengan eksekusi kebijakan oleh para administratornya sendiri. Pada kenyataannya, penggabungan dua fungsi ini sebenarnya adalah kegagalan utama badan tersebut. Ketika para administrator juga membuat keputusan kebijakan, maka landasan bagi sebuah Negara telah tercipta: suatu elite sedang berada dalam proses merampas kekuasaan warga dalam penentuan-kebijakan.

Seperti telah kita lihat pada periode awal Koloni Teluk Massachusetts, dewan terpilih—yang diharuskan hanya menjalankan fungsi administratif–sebenarnya juga telah membuat keputusan kebijakan, dengan merebut kekuasaan yang menjadi hak milik rapat-rapat kota. Manakala badan-badan administratif itu diperbolehkan berfungsi diluar pengawasan publik, mereka bisa membuat keputusan kebijakan dengan diam-diam dan menutupinya

sebagai persoalan “praktis” atau administratif. Sebaliknya, dengan mengartikulasikan dan mempertahankan pembedaan antara dua fungsi ini, akan menjamin—yang secara semanusiawi mungkin–bahwa para administrator hanya membuat keputusan administratif, bukan kebijakan.

Referendum Konfederal

Di kota baru seperti yang dibayangkan disini, penentuan-kebijakan akan menjadi hak istimewa majelis-majelis munisipal, atau voting warga bebas dalam demokrasi langsung. Fungsi dewan konfe deral adalah murni administratif dan koordinatif semata, dengan melaksanakan kebijakan yang telah disetujui oleh munisipal.

Salah satu proses yang akan dikoordinasi oleh dewan konfederasi adalah *voting* konfederasi. Misalkan salah satu komunitas anggota konfederasi itu menimbulkan kerusakan ekologis (membuang sampah ke sungai) atau melanggar hak asasi manusia (menafikan orang kulit berwarna). Munisipal lainnya bisa mengusulkan agar semua munisipal anggota konfederasi mengadakan pemungutan suara untuk menentukan apakah komunitas itu boleh tetap meneruskan praktik berbahaya tersebut. Dewan federasi akan mengkoordinasikan semacam referendum konfederal dimana jika mereka memilih, munisipal-munisipal bisa memberikan suara dalam *voting* bahwa komunitas tersebut harus menghentikan penyalahgunaan jabatan yang dilakukannya.

Voting itu, dengan kekuasaan mayoritas,

akan dihitung berdasarkan suara rakyat, bukan berdasarkan yurisdiksi munisipal: yakni tiap delegasi di dewan konfederal akan melakukan penghitungan suara positif dan negatif dari munisipalnya sendiri. Suara yang terkumpul dari semua warga munisipal dalam konfederasi tersebut akan digabungkan untuk menentukan hasil akhir.

Proses demikian tidak akan merepresentasikan pengingkaran demokrasi, tetapi merepresentasikan penegasan kesepakatan bersama mayoritas warga dalam konfederasi bahwa integritas ekologis sebuah wilayah dan hak asasi manusia harus ditegakkan. Bukan dewan konfederal yang akan mengambil keputusan ini, melainkan mayoritas kumulatif semua warga di semua majelis, yang disusun dan dikumpulkan sebagai komunitas besar yang mengekspresikan keinginannya melalui konfederasi tersebut.

Dalam banyak isu, referendum tidak perlu menuntut jawaban ya atau tidak. Dalam referendum masa kini yang dipimpin oleh dan untuk Negara-Bangsa, orang memiliki pilihan yang sangat ter batas: mereka boleh memilih ya atau tidak dalam referendum, sebagaimana telah dirumuskan terdahulu. Tetapi dalam konfederasi munisipal, majelis bisa memutuskan selama masa perundingan dan debat, bahwa majelis tersebut tidak peduli pada opsi-opsi dan lebih suka merumuskannya sendiri. Dalam kasus seperti ini munisipal-munisipal terkonfederasi pada akhirnya bisa memilih dari sejumlah opsi yang disajikan ketimbang *voting* untuk menerima atau menolak salah satu.

Bahkan ketika mereka memiliki kekuasaan untuk mencegah munisipal tertentu agar tidak membuat kerusakan moral atau fisik terhadap anggota-anggotanya sendiri atau kepada kota-kota besar-kecil lainnya, munisipal itu memiliki kekuasaan tertinggi dalam konfederasi. Merekalah secara kolektif yang akan menjadi pemerintah tertinggi sebagai para perumus kebijakan.

Prinsip kedaulatan majelis inilah yang membedakan pendekatan munisipalis libertarian dari Ke-Negara-an *(Statism)*. Sebuah partai radikal anti-kapitalis yang menangkap para aparatur Negara-Bangsa tetapi semata-mata untuk melanjutkannya dengan membentuk kembali Negara lain mungkin akan menghapuskan properti pribadi dan mengambilalih alat-alat produksi. Namun Negara seperti ini tidak akan mewujudkan demokrasi langsung. Kekuasaannya atas rakyat pasti akan tumbuh dan, jika pengalaman terakhir digunakan sebagai panduan, akan berkembang luas memperkuat kekuasaan Negaranya dengan kekuasaan ekonomi. Ia pasti akan mengembangkan birokrasi besar untuk menjalankan kontrol yang komprehensif. Apapun keberhasilannya dalam membendung kapitalisme, cara kerja Negara ini akan mendatangkan malapetaka.

Karena secara sadar dibentuk untuk mengakomodasi kesalingtergantungan *(interdependency)*, konfederasi munisipal akan berdasar pada tanggung jawab penuh para delegasi konfederal, hak me-*recall*

dan mandat yang tegas. Dengan demikian, konfe derasi tersebut akan menyatukan penentuan-keputusan demokratis munisipal dengan administrasi lintas munisipal. Yang terpenting, konfederasi munisipal-munisipal itu bisa mewujudkan impian lama gerakan-gerakan revolusioner pada masa lalu, yaitu mewujudkan "Komune dari komune-komune."

BAB 12

EKONOMI TERMUNISIPALISASI

Gerakan untuk menciptakan masyarakat munisipalis libertarian akan menghadapi banyak musuh sosial seiring ia tumbuh dan menyebar ke wilayah yang lebih luas. Salah satu musuh ini tentu saja adalah Negara-Bangsa, sebuah struktur kuasa yang koersif, yang menggusur demokrasi langsung berganti sistem elite dan massa dan toh begitu tak malu melabeli itu sebagai demokrasi. Musuh lainnya adalah urbanisasi, yang membuat kota-kota tersesat dan terus menggerogoti hamparan politik dengan menggantikan kota dan komunitas menjadi megalopolis. Musuh yang lain lagi adalah hierarki, yaitu bermacam klasifikasi yang telah melembaga seperti pembagian manusia menurut gender, etnik, ras, usia dan status, dimana suatu kelompok menyandang hak untuk mendominasi kelompok lainnya dan seringkali dengan menggunakan mitos superioritas biologis sebagai pembenaran.

Tetapi mungkin musuh paling merusak dan keras kepala yang menghadang gerakan yang memperjuangkan perubahan fundamental pastilah sebuah tatanan lain dari seluruh soal di atas yang hadir sekaligus. Musuh itu adalah kapitalisme itu sendiri, juga kehancuran sosial yang telah ditimbulkannya pada masyarakat manusia di seluruh dunia.

Bagi banyak orang pada masa kini, tampaknya tidak pantas mengatakan bahwa kapitalisme berlawanan dengan kehidupan yang baik, apalagi

mengatakan bahwa kapitalisme telah mendatangkan kerusakan. Maklum, dengan berakhirnya perang dingin toh keruntuhan Uni Soviet dianggap membuktikan bahwa upaya apapun yang dilakukan untuk mengganti kapitalisme dengan sosialisme atau komunisme adalah sesat dan berbahaya. Bahwa upaya itu pasti akan mengarah pada totalitarianisme dan kerusakan lingkungan. Dalam pandangan ini, kapitalisme memenangkan pertempuran historis antara pasar "bebas" dengan musuh-musuhnya dan muncul membawa kejayaan. Karenanya kapitalisme secara moral dianggap benar.

Sikap ini sendiri adalah sebuah indikasi persoalan yang dihadapi oleh gerakan munisipalis libertarian. Kapitalisme kini, sebagaimana yang pernah ditakutkan Marx, dirasa semakin sama dengan "ekonomi". Yakni sebagai tatanan ekonomi yang paling cocok bagi manusia yang muncul secara alamiah dalam aktivitas manusia, sama seperti makan dan bernafas, lantaran kapitalisme mengekspresikan dorongan "alamiah" manusia untuk tumbuh, bersaing dan menang. Dalam banyak pemikiran, begitu tegasnya kemenangan kapitalisme diatas semua alternatif lain sehingga para pembela pasar tidak lagi merasa terpaksa untuk memikirkan apologi baginya seperti, katakanlah, yang dilakukan kalangan Darwinis sosial pada generasi permulaan. Kapitalisme membuktikan diri sebagai tatanan ekonomi "alamiah" dan dengan logika ini, kebenaran moralnya juga terbuktikan.

Tetapi sebuah sistem nyaris tidak bermoral ketika ia membiarkan segelintir orang hidup dalam

keistimewaan yang indah dan nyaman dengan mengeksploitasi tenaga orang lain. Ia tidak bermoral jika mengharuskan orang lain, bersama anggota keluarganya, untuk bekerja lebih lama demi mendapatkan imbalan yang kecil. Ia tidak bermoral jika menuntut mereka bekerja demi hidup, lantas gagal menyediakan pekerjaan terutama bagi mereka yang ingin melakukannya demi upah yang tidak memadai. (Kalangan ekologis sosial akan berpendapat bahwa sistem upah itu sendiri, jika tidak dikatakan memerosotkan manusia menjadi sekedar tenaga kerja, adalah amoral). Lebih lanjut, suatu masyarakat hampir tidak bermoral jika gizi, perumahan dan perawatan kesehatan menjadi hak istimewa golongan kaya ketimbang menjadi hak utama anggota-anggota komunitas. Ia nyaris tidak bermoral jika memerosotkan tujuan hidup menjadi sekedar untuk bertahan ketimbang membesarkan pengertian individu, sensibilitas dan pencapaian kebebasan sosial positif. Kondisi-kondisi amoral ini adalah penyakit menular kapitalisme yang menjangkiti bahkan di banyak negara terkaya saat ini, apalagi di negara-negara termiskin.

Pasar memang ada pada periode awal sejarah Barat. Namun berbeda dan masih bersifat marjinal pada masa itu, yaitu terdiri dari kantong-kantong perdagangan yang tersebar ditengah masyarakat yang nilai-nilai dan tradisinya hampir-hampir non-ekonomis dalam pengertian modern. Tenaga kerja memang dieksploitasi dalam masyarakat pra-kapitalis. Seperti telah kita lihat, sebelum munculnya teknologi produksi yang lebih rumit,

kerja berat bukan saja ada tetapi juga luar biasa melelahkan. Tirani-tirani kegerejaan dan feodalisme juga meremukkan jiwa manusia.

Namun yang integral bahkan bagi cara hidup kuno dan feodal adalah dasar tradisi desa dan adat komunal yang mempertinggi kehidupan dan memberi individu sejumlah makanan fisik dan emosi. Bahkan jika orang terlibat dalam pekerjaan yang sulit, pekerjaan mereka tidak merosot menjadi komoditas atau menjadi kapasitas yang sekedar memiliki nilai tukar dan kehidupan sekitar mereka juga tidak tersusun semata berdasarkan jual beli. Pasar beserta nilai-nilainya ditempatkan khusus dalam suatu ranah terbatas dalam kehidupan sosial. Adat berbantu saling menguntungkan *(mutual-aid)* dan tanggung jawab moral dalam masyarakat prakapitalis menawarkan perlindungan dari barter dan pertukaran serta, bila perlu, sampai taraf tertentu melakukan perlawanan terhadap sistem tersebut. Bahkan akhir-akhir ini, pada pertengahan abad dua puluh, kapitalisme masih merupakan hanya salah satu komponen—kendati yang mendasar–dari berbagai relasi sosial di Eropa dan Amerika Utara. Masih ada kemungkinan berlindung dari kapitalisme, yaitu dalam formasi politik dan sosial prakapitalis, termasuk kehidupan komunitas yang secara vital menopang upaya dan adat non-pasar.

Tetapi kapitalisme sekarang ini tengah meresap dan menetap bahkan pada bidang-bidang kemasyarakatan yang bebas dari perdagangan. Dewasa ini manusia dinilai terutama karena partisipasi mereka dalam sistem kapitalis

—yakni karena produktivitas ekonomi dan daya-belinya–ketimbang karena kontribusi mereka terhadap peradaban, atau karena jasa komunitas atau jasa publik yang mereka miliki, atau bahkan karena kesopanan mereka. Hubungan komoditas, kompetisi dan nilai-nila perolehan tengah merembes merasuki setiap pori-pori masyarakat, kedalam hubungan-hubungan keluarga, pendidikan, pribadi dan bahkan spiritual, serta bukan hanya menghasilkan ekonomi kapitalis tetapi juga masyarakat kapitalis. Manakala komoditas telah tersebar dimana-mana, kapitalisme tampaknya dirasa sebagai sesuatu yang "alamiah."

Mesti dipahami, bukanlah suatu kebetulan bahwa komodifikasi telah merasuk teramat dalam, begitu tersebar dimana-mana. Sistem kapitalis tersebut telah berkembang karena diorganisasikan dengan hukum "tumbuh atau mati," sebuah perintah persaingan dan ekspansi yang memaksa bisnis untuk bersaing guna mengejar keuntungan lebih besar. Komodifikasi aspek-aspek kehidupan, yang saat ini telah mencapai proporsi luar biasa, semata-mata adalah satu akibat dari proses kompetitif ini. Ekonomi pasar mempertautkan kehidupan ekonomi secara lebih ketat dan global, mencari tenaga kerja murah dan pemerintah otoriter yang ramah yang ingin menertibkan proses tenaga kerja itu, demi tujuan mendatangkan lebih banyak keuntungan bagi para pemilik modal. Bukannya menahan laju kapitalis, Negara-Bangsa justru malah memuluskan jalan kapitalis, memenuhi tuntutannya dan menjalankan perintahnya. Dengan diarahkan oleh

dinamika “tumbuh atau mati” ini, kapitalis tengah mengoyak-ngoyak masyarakat manusia dan alam, mengubah orang menjadi para pekerja menyedihkan dan tanah padat menjadi pasir, membuat planet ini kian lama kian tidak ramah terhadap bentuk-bentuk kehidupan yang kompleks.

Kooperasi alias Bekerjasama

Karena dikejutkan oleh ganasnya perkembangan ini, banyak kalangan libertarian-kiri dan orang yang memiliki perhatian terhadap masalah ekologi saat ini mendesak agar membubarkan korporasi-korporasi besar itu dan menggantinya dengan yang lebih kecil, yakni unit-unit ekonomi alternatif. Tujuannya adalah mengecilkan skala kehidupan ekonomi dan mengurangi korban manusia dan lingkungan yang diakibatkan oleh korporasi-korporasi predator tersebut.

Jenis unit alternatif yang mereka ajukan berbeda-beda, tetapi umumnya adalah semacam perusahaan yang dimiliki secara kolektif dan menjalankan jenis-jenis bidang tertentu. Mungkin berupa kooperasi produsen atau perusahaan-perusahaan lainnya yang dikontrol oleh pekerja, seperti perusahaan-perusahaan yang dikolekti visasi dan dikelola sendiri sebagaimana yang diajukan oleh kalangan anarko-sindikalis. Atau mungkin juga berupa kooperasi para konsumen, seperti lumbung penampungan pangan sebagaimana diajukan oleh banyak kalangan *environmentalist*. Namun bentuk spesifik apapun yang diambilnya, mereka

yang mengusulkan itu semua melakukannya dengan maksud menciptakan masyarakat alternatif kooperatif, memulihkan kehidupan ekonomi kepada skala yang manusiawi, meletakkannya ditangan orang-orang yang sangat terlibat didalamnya.

Sayangnya, pasar kompetitif menyulitkan unit-unit ekonomi alternatif manapun untuk tetap menjadi alternatif dalam waktu yang lama. Sudah lebih dari seratus tujuh puluh tahun hingga sekarang, sejak kooperasi-kooperasi sosialis pertama diupayakan di Eropa, perusahaan-perusahaan kooperatif pada akhirnya harus menyesuaikan diri dengan tuntutan pasar, terlepas dari maksud para penganjur dan pendirinya.

Proses menyesuaikan diri ini mengikuti pola standar yang agak baik. Pertama-tama, kooperasi terjerat dalam jaringan pertukaran dan kontrak yang menjadi khas semua perusahaan. Lantas ia menemukan saingan berat dalam perdagangan yang juga menawarkan barang-barang yang sama dengan yang ia tawarkan, tetapi dengan harga lebih murah. Seperti perusahaan manapun, kooperasi itu menyadari bahwa jika ia menjalani bisnis, ia harus bersaing dengan menurunkan harga-harga agar bisa memenangkan pelanggan. Satu cara untuk menurunkan harga adalah ia harus tumbuh membesar agar bisa mendapatkan keuntungan dari skala ekonomi. Sehingga pertumbuhan menjadi sangat diperlukan bagi kooperasi—alias ia juga harus "tumbuh atau mati."

Singkatnya, bahkan kooperasi yang paling bermotivasi idealis pun menyadari bahwa ia ha-

rus menjual lebih murah daripada para pesaingnya. Atau, jika tidak, lebih baik berhenti. Akhirnya, jika mesti bertahan, ia harus mencari keuntungan dengan mengorbankan nilai-nilai manusiawi (meskipun menyulap tampilan profesi berbasis nilai-nilai manusiawi dapat menjadi strategi pemasaran yang efektif). Sedikit demi sedikit tuntutan kompetisi akan mengubah kembali kooperasi menjadi perusahaan kapitalistik, meskipun dikelola dan dimiliki secara kolektif. Perkembangan ini terjadi bahkan pada situasi revolusioner di Spanyol pada 1936. Ketika itu perusahaan-perusahaan yang telah diambil alih oleh para pekerja sindikalis demi tujuan-tujuan idealistis, pada akhirnya toh harus bersaing satu sama lain guna memperoleh bahan mentah dan sumber daya, yang membuat birokrasi serikat atau Negara kembali mengambil alih semuanya.*

Dalam keadaan ini bahkan eksperimen kooperasi yang berniat baik pun, sialnya, akan terjuruskan kedalam rangkulan ketamakan kapitalisme. Kooperasi-kooperasi yang berjalan lebih dari dua atau tiga tahun, mayoritas besar telah benar-benar bermetamorfose dibawah tekanan persaingan. Ia lalu menjadi bisnis biasa atau bahkan mati sebagai korban dari dorongan-dorongan kompetitif yang digerakkan pasar. Apa yang jelas-jelas belum mereka lakukan adalah bagaimana menjadi lebih demokratis. Paling tidak mereka telah memberikan ancaman kepada sistem kapitalis. Bahkan eksperimen kooperatif Mondragon yang banyak dipuji pun,

* Sejarah Spanyol ini diuraikan lebih lengkap oleh Murray Bookchin dalam wawancara di bagian akhir buku ini.

di Basque Spanyol, pada akhirnya menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan pasar.

Terlepas dari catatan kekalahan mereka sebagai kekuatan dalam perubahan sosial, kooperasi masih memiliki daya tarik bagi orang yang berniat baik, yang tetap melihatnya sebagai alternatif yang dapat terus berjalan sebagai pengganti kapitalisme. Meskipun kooperasi tidak diragukan lagi merupakan bagian yang diperlukan dalam solusi, kooperasi itu sendiri belumlah cukup untuk menantang sistem kapitalis.

Kepemilikan Publik

Unit ekonomi yang dimiliki secara pribadi, apakah itu dikelola secara kooperatif atau dikelola oleh para pelaksana, apakah itu dimiliki oleh para pekerja atau oleh para pemegang saham, tidak hanya rentan terasimilasi dengan sistem kapitalis tetapi juga pasti pada akhirnya akan terasimilasi, disukai atau tidak oleh para anggotanya. Selama kapitalisme ada, kompetisi akan selalu membutuhkan perusahaan-perusahaan untuk mengejar harga yang lebih murah (termasuk harga upah tenaga kerja), pasar yang lebih luas dan keuntungan diatas saingan-saingan mereka, guna memaksimalkan keuntungan yang mereka dapat. Mereka akan cenderung lebih mengevaluasi manusia menurut tingkat produktivitas dan konsumsinya ketimbang menurut kriteria lain.

Jika kita harus menciptakan masyarakat alternatif kooperatif, pencarian keuntungan harus diredam atau lebih baik dihilangkan. Karena

unit-unit ekonomi tidak mampu meredam upaya mereka sendiri dalam mencari keuntungan dari dalam, mereka harus tunduk terhadap kekangan dari luar. Karenanya sebuah unit ekonomi alternatif yang ingin menghindari asimilasi mesti berada dalam konteks sosial yang membatasi upaya pencarian keuntungan secara eksternal. Ini harus ditanamkan dalam komunitas lebih besar yang memiliki kekuatan untuk mengekang, bukan saja mengekang pencarian keuntungan yang dilakukan perusahaan tertentu tetapi juga mengendalikan kehidupan ekonomi pada umumnya.

Tidak ada satu pun konteks sosial yang akan berhasil mengurangi upaya pencarian keuntungan jika membiarkan kapitalisme ada didalamnya. Tuntutan-tuntutan ekspansionis kapitalisme akan selalu berupaya menggulingkan kontrol eksternal, akan selalu bersaing, akan selalu menekan agar bisa berekspansi. Fakta sederhananya, dalam analisa terakhir, adalah bahwa kapitalisme itu sendiri harus dihilangkan. Sistem sekarang ini harus digantikan dengan sistem yang memiliki keinginan sekaligus kemampuan untuk mengurangi praktik pencarian keuntungan, sistem yang selaras dengan institusi, praktik dan nilai-nilai humanis.

Masyarakat semacam ini haruslah "memiliki" unit-unit ekonominya sendiri. Yakni, pemilikan atau properti yang secara sosial sangat penting —alat-alat produksi–ditempatkan dibawah kontrol publik atau kepemilikan publik, jika sistem kepemilikan masih ada.

Gagasan tentang kepemilikan publik tidak-

lah populer saat ini. Sejarahnya akhir-akhir ini bukanlah apa-apa melainkan keterpurukan, terutama dalam kasus Uni Soviet dahulu. Tetapi dalam kasus tersebut dan berbagai kasus serupa lainnya dimana properti telah dinasionalisasi, "kepemilikan publik" adalah sejenis istilah yang tidak cocok. "Kepemilikan publik" melalui nasionalisasi berarti kepemilikan oleh Negara-Bangsa. Walaupun frase "kepemilikan publik" menunjukkan kepemilikan oleh rakyat, kepemilikan Negara bukanlah kepemilikan publik karena Negara, seperti telah kita lihat, adalah struktur elit yang didirikan diatas rakyat. Negara bukanlah rakyat itu sendiri. "Kepemilikan publik" dalam pengertian nasionalisasi properti menjadikan rakyat tidak memiliki kontrol atas kehidupan ekonomi. Ia semata-mata memperkuat kekuasaan Negara belaka dengan cara melengkapinya dengan kekuasaan ekonomi.

Negara Soviet misalnya, mengambil alih alat-alat produksi dan memanfaatkannya untuk mempertinggi kekuasaannya, tetapi struktur hierarkisnya tetap utuh. Sebagian besar publik sedikit atau tidak memiliki keterkaitan dengan pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan kehidupan ekonomi mereka. Menamakan nasionalisasi semacam itu dengan istilah "kepemilikan publik" sama membingungkan dan sama curangnya dengan menamakan "politik" ke-Negara-an atau menamakan sebuah republik borjuis dengan istilah "demokrasi." Kepemilikan publik sejati adalah kepemilikan oleh rakyat itu sendiri dalam komunitas-komunitas mereka, bukan oleh Negara.

Munisipalisasi Ekonomi

Munisipalisme libertarian mengembangkan bentuk kepemilikan yang sepenuhnya bersifat publik. Ekonomi politik yang diajukannya adalah ekonomi yang tidak dimiliki secara pribadi, juga tidak dipecah menjadi kumpulan-kumpulan kecil dan tidak dinasionalisasi. Ia adalah ekonomi yang dimunisipalisasi–ditempatkan dibawah kontrol "kepemilikan" komunitas.

Munisipalisasi ekonomi ini berarti "kepemilikan" dan manajemen ekonomi oleh warga komunitas. Properti—termasuk tanah dan pabrik–tidak akan lagi dimiliki secara pribadi tetapi akan diletakkan dibawah kontrol menyeluruh dari warga dalam majelis. Warga akan menjadi para "pemilik" kolektif atas sumber-sumber daya ekonomi komunitasnya dan akan merumuskan dan menyetujui kebijakan ekonomi bagi komunitas. Merekalah, dan bukan para birokrat dan kapitalis, yang akan membuat keputusan mengenai kehidupan ekonomi.

Warga akan membuat keputusan-keputusan tanpa memandang pekerjaan atau tempat kerja mereka. Mereka pada akhirnya akan membuat keputusan-keputusan bagi seluruh kehidupan ekonomi komunitas mereka. Mereka yang bekerja di pabrik akan berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan tidak hanya bagi pabrik itu tetapi juga bagi seluruh pabrik, juga bagi peternakan-peternakan. Mereka akan berpartisipasi dalam penentuan-keputusan ini bukan sebagai pekerja, petani, teknisi,

insinyur atau profesional, melainkan sebagai warga. Keputusan-keputusan yang mereka hasilkan akan ditentukan oleh kebutuhan-kebutuhan komunitas mereka sebagai satu kesatuan, bukan oleh pekerjaan, perusahaan khusus atau perdagangan. Mereka akan melayani kepentingan-kepentingan terbaik komunitasnya.

Sudah sejak lama dipahami dalam sejarah pemikiran politik bahwa tidak ada demokrasi dan kebebasan politik yang bisa terwujud dalam masyarakat yang dirundung oleh ketimpangan kemakmuran dan pendapatan. Aristoteles paham, seperti halnya Thomas Jefferson, bahwa kekuasaan rakyat tidak akan bisa dipertahankan manakala sumber-sumber dayanya didistribusikan secara sangat tidak merata. Tanpa egalitarianisme ekonomi, demokrasi jenis apa pun paling-paling hanya akan berumur pendek dan segera akan membuka jalan bagi terciptanya oligarki atau despotisme.

Jefferson meramalkan bahwa kemerataan dan kesamaan kondisi akan sangat diperlukan bahkan jika republik Amerika ingin tetap berjalan. Tetapi tidak lama setelah kematiannya, kemerataan ekonomi relatif yang sempat berjalan pada masa hidupnya, sudah mulai menyerah kepada kekuasaan ekonomi pribadi. Saat ini, kesenjangan kekayaan dan pendapatan di Amerika Serikat begitu lebarnya sehingga masa depan penyamaran yang "demokratis" sekalipun, pada tingkat nasional, terlempar dalam keraguan, apalagi realitas potensial demokrasi pada tingkat munisipal. Ketimpangan ekonomi merupakan penghinaan terhadap cita-cita Athena

tentang terciptanya warga yang berdaulat secara politik, yang akan membuat pertimbangan rasional dalam urusan-urusan publik karena warga tersebut secara materil bebas dari kebutuhan atau klien.

Dalam masyarakat anarkis rasional, ketim pangan ekonomi akan hilang dengan cara mengalihkan kemakmuran, properti pribadi dan alat-alat produksi kepada munisipal. Melalui munisipalisasi ekonomi, kekayaan kelas kaya akan diambil alih oleh rakyat biasa dan ditempatkan dalam kekuasaan komunitas, untuk digunakan demi keuntungan bersama.

Kehidupan ekonomi seperti demikian akan diserap oleh komunitas dan dijalankan dibawah kontrol bidang politik, yang akan menyerap penentuan-keputusan ekonomi sebagai bagian dari bisnis publiknya, juga tanggung jawab majelis. Tidak ada pabrik atau tanah yang akan pernah bisa kembali menjadi unit kompetitif dan terpisah menurut kepentingannya.

Keputusan-keputusan majelis, mesti diharapkan, akan diarahkan oleh standar rasional dan ekologis. Ekonomi akan menjadi ekonomi moral. Gagasan klasik tentang batas dan keseimbangan akan menggantikan tuntutan kapitalis untuk berekspansi dan berkompetisi demi mengejar ke untungan. Komunitas akan menilai orang berdasarkan kontribusi positifnya terhadap kehidupan komunitas, bukan berdasarkan tingkat produksi dan konsumsinya. Dengan bertindak melalui majelis mereka, warga akan secara sengaja dan sadar mencegah kesatuan-kesatuan ekonomi agar

tidak mematuhi perintah-perintah kapitalis dalam mengejar keuntungan ketimbang etika kerjasama *(cooperation)* dan saling berbagi.

Majelis akan membuat keputusan-keputusan tidak hanya mengenai produksi tetapi juga mengenai distribusi materi alat-alat hidup dengan memenuhi janji *post-scarcity* (berakhirnya masa kelangkaan). "Dari setiap orang sesuai kemampuannya dan bagi setiap orang sesuai kebutuhannya" —ini tuntutan yang dilontarkan segenap gerakan pada abad sembilan belas–yang akan menjadi praktik hidup, sebuah tanggung jawab dunia politik yang terlembagakan. Semua orang dalam komunitas akan memiliki akses terhadap alat-alat hidup, tanpa memandang pekerjaan apa yang mampu dilakukannya. Komunitas akan melihat bahwa kemerataan ekonomi secara garis besar, berdasarkan kriteria kebutuhan yang dirumuskan secara moral dan rasional, akan terwujud ditengah-tengah warganya.

Dalam wilayah geografis yang lebih luas, kehidupan ekonomi akan dikontrol oleh konfederasi munisipal. Kekayaan yang diambil alih dari kelas pemilik properti akan didistribusi ulang tidak hanya dalam munisipal tetapi juga meliputi seluruh munisipal yang ada dalam sebuah wilayah. Pada tingkat konfederal, munisipal yang satu akan saling berbagi sumber daya dengan munisipal lainnya dan membuat keputusan-keputusan mengenai produksi dan distribusi. Jika sebuah munisipal berusaha mengasyikkan diri dengan mengorbankan yang lainnya, munisipal lain sesama anggota konfederasi akan mempunyai hak untuk mencegahnya. Politisasi eko-

nomi yang seksama akan terjadi dengan memperluas moral ekonomi menuju skala regional besar.

BAB 13

KEKUASAAN GANDA

"Dorongan memiliki kekuasaan" adalah dorongan yang sangat dihasratkan oleh kelompok-kelompok keagamaan, praktik psikoterapi dan bahkan terkadang oleh kelompok-kelompok politik saat ini. Setelah berpartisipasi dalam aktivitas tertentu, anggota-anggota suatu kelompok mungkin akan berkata bahwa semua itu membuat mereka "merasa berkuasa." Anggota kelompok spiritual misalnya, mungkin mengatakan bahwa mereka "merasa berkuasa" setelah berpartisipasi dalam ritual keagamaan. Orang-orang dalam kelompok-kelompok dua-belas-langkah* berbicara tentang kecanduan mereka akan "rasa memiliki kekuasaan." Para anggota sebuah kelompok mungkin "merasa berkuasa" setelah mengekspresikan kemarahan mereka dalam aksi protes jenis tertentu. Bahkan individu yang memanfaatkan pertolongan ajaib spiritual akan "merasa berkuasa" setelah menggumamkan "penegasan" bagi diri sendiri, atau setelah berbaring, menutup mata dan berkhayal melalui latihan-latihan dalam "imajinasi terarah."

Tetapi kekuasaan tidak bisa diperoleh dengan cara berkhayal atau melalui ritual atau bahkan melalui aksi-aksi langsung yang tujuannya hanya sebatas melakukan protes. Seseorang bisa mendapatkan rasa menyenangkan dari latihan-latihan seperti

*Kelompok-kelompok terapi kecanduan alkohol, narkotika, dan sebagainya, yang khas di Amerika.

itu, atau bahkan "perasaan" ilusif bahwa ia memiliki kekuasaan, tetapi ia tidak akan mendapatkan kekuasaan sosial atau politik yang sesungguhnya.

Kekuasaan bukanlah semata-mata perasaan spritual atau psikologis. Ia adalah fakta sosial yang kuat dan nyata serta mesti dipahami sebagaimana adanya. Kekuatan dan kekerasan yang dipaksakan oleh Negara-Bangsa dan berbagai korporasi saat ini tepatnya adalah persoalan kekuasaan institusional, didukung oleh polisi, pengadilan dan angkatan bersenjata. Mengabaikan faktualitas kekuasaan berarti mengucapkan perpisahan pada realitas dan hanyut menuju surga khayalan atau surga psikologis.

Michel Foucault menganggap kekuasaan sebagai fenomena yang bisa meresap yang, sudah tersimpul didalamnya, secara intrinsik bersifat jahat dan karenanya bertentangan dengan kebebasan jenis apa pun. Pemikiran seperti ini menuju pada kesimpulan bahwa gerakan libertarian-kiri harus berusaha keras menghapuskan tidak hanya Negara, kapitalisme dan hierarki tetapi juga menghapuskan kekuasaan.

Sialnya, kekuasaan tidak akan pernah bisa dihapuskan. Sebagian orang dalam sebagian institusi akan selalu memiliki kekuasaan, apakah menjadi diktator dalam Negara fasis atau warga bebas dalam majelis demokratis. Perolehan kekuasaan—kekuasaan rakyat–bukannya bertentangan dengan kebebasan, melainkan merupakan prakondisi menuju kebebasan. Politik adalah seni meraih dan menggunakan kekuasaan guna menciptakan kebebasan, khususnya dalam demokrasi langsung majelis-

majelis munisipal terkonfederasi.

Sangat penting bagi rakyat biasa untuk bersatu guna memperoleh kembali kekuasaan sosial kolektif, karena kekuasaan yang tidak dipegang oleh rakyat biasa akan diambil alih oleh Negara. Begitu pula jika rakyat ingin memperoleh kembali kekuasaan, mereka harus merebutnya dari Negara. Tidak mungkin ada kekosongan institusional: kekuasaan selalu ada dalam lembaga. Saat ini, massa rakyat luas di dunia justru kekurangan apa yang mereka butuhkan untuk mengelola urusan-urusan mereka dengan memuaskan kekuasaan.

Fakta terpenting mengenai kekuasaan karenanya bukan apakah kekuasaan itu ada melainkan siapa yang memilikinya. Bagi politik munisipalis libertarian, fakta ini berarti bahwa manakala Negara-Bangsa secara historis memperoleh kekuasaan dengan mengorbankan kemerdekaan dan kebebasan munisipal, maka kekuasaan apapun yang diperoleh munisipal-munisipal terkonfederasi akan didapatkan dengan mengorbankan Negara-Bangsa. Yakni, munisipal-munisipal terkonfederasi akan meningkatkan kekuasaan mereka sendiri dengan menghilangkan kekuasaan Negara-Bangsa, atau kalau tidak, Negara-Bangsa akan tetap memiliki dan meningkatkan kekuasaannya dengan menghilangkan kekuasaan munisipal-munisipal terkonfederasi itu.

Selama jangka waktu yang panjang, manakala gerakan-gerakan yang menuntut perubahan bermunculan dan tumbuh, kian lama munisipal-munisipal semakin ingin mendemokratisasi diri dan membentuk konfederasi. Akhirnya, pada titik tertentu, ketika sejumlah besar munisipal telah terdemokratisasi dan terkonfederasi, kekuasaan bersama yang mereka miliki akan menjadi ancaman bagi Negara.

Struktur kekuasaan yang ada hampir tidak akan toleran terhadap keberadaan konfederasi yang terdiri dari munisipal-munisipal terdemokratisasi yang telah menciptakan politik demokratis, warga yang memiliki kekuasaan dan ekonomi termunisipalisasi. Negara akan menentang demokrasi baru itu demi mempertahankan kapitalisme dan kekuasaannya sendiri. Gerakan tersebut akan diampuni Negara jika gagal menciptakan tentara sipil untuk melindungi dan mempertahankan kekuasaan konkrit rakyat yang telah mewujud. Jika gerakan tersebut ingin serius menentang Negara, ia harus melenyapkan atribut terpenting yang dimiliki Negara: monopoli dan angkatan bersenjata.

Terlepas dari popularitas milisia saat ini ditengah kelompok-kelompok kanan-jauh di Amerika Serikat, kalangan kanan tidak memiliki hak eksklusif atas tradisi milisia. Selama satu setengah abad, gerakan sosialis internasional mengakui adanya kebutuhan akan rakyat bersenjata atau milisia warga. Setiap gerakan sosialis internasional sedari yang paling awal, mereka menuntut adanya

milisia guna menggantikan angkatan bersenjata dan polisi. Juga gerakan-gerakan anarkis dan sindikalis pernah menganggap bahwa rakyat yang dipersenjatai adalah *sine qua non* bagi masyarakat bebas.

Tidak ada posisi radikal konsisten sekarang ini yang bisa menghentikan tuntutan akan adanya rakyat bersenjata tanpa memberikan kemungkinan bagi Negara untuk tetap ada. Munisipalisme libertarian, sebagai bagian dari tradisi sosialis dan anarkis, karenanya menyerukan pembentukan milisia sipil, atau tentara sipil, untuk menggantikan polisi dan angkatan militer. Milisia sipil ini akan berada dibawah pengawasan ketat majelis warga. Ia akan menjadi institusi demokratis, dengan para perwira yang dipilih.

Semakin besar dan banyak konfederasi munisipal, kian besar pula kekuatan tersembunyi yang mereka miliki dan semakin besar juga potensi mereka untuk membentuk kekuasaan-tandingan melawan Negara-Bangsa. Saat mereka menyadari potensi ini, akan muncul ketegangan antara mereka dengan Negara. Warga dalam konfederasi harus paham bahwa ketegangan ini memang diperlukan—bahwa munisipal-munisipal terkonfederasi tempat mereka berada itu bisa membentuk kekuasaan-tandingan yang potensial untuk melawan Negara. Harus dipahami bahwa mereka pada dasarnya membangkitkan konflik historis lama antara munisipal dengan Negara, dan bahwa konfederasi mereka tidak bisa hidup rukun dan selaras dengan Negara.

Dalam kenyataannya, konfederasi munisipal pada akhirnya bisa memperoleh cukup kekua-

saan untuk membentuk *kekuasaan ganda*, yaitu kekuasaan yang akhirnya bisa memperoleh kembali kekuasaan penuh bagi rakyat. Jika dan ketika titik ini dicapai, kondisi sosial politik mungkin akan menjadi tidak stabil. Menyusul tak lama kemudian akan muncul, kemungkinan besar melalui konfrontasi, isu tentang siapa yang akan berkuasa yang harus segera diputuskan—konfederasi munisipal ataukah Negara. Itulah, kekuasaan harus dialihkan kepada rakyat beserta komunitas-komunitasnya atau, jika tidak, kekuasaan akan tetap menjadi milik Negara dan para praktisi profesional ke-Negara-an.

Pada akhirnya, konfederasi-konfederasi mungkin akan bekerja secara militan untuk mengganti Negara dengan struktur yang mereka miliki. Pada saat inilah diharapkan agar gerakan munisipalis libertarian secara institusional akan bisa "melubangi" kekuasaan Negara, memenangkan mayoritas rakyat menuju struktur sipil dan konfederal baru. Jika otoritas Negara bisa dibuat tidak sah dalam pandangan sebagian besar rakyat, maka diharapkan otoritas itu bisa dihilangkan dengan kesulitan paling kecil.

Di Paris pada 1789, dan di St. Petersburg pada Februari 1917, otoritas Negara runtuh dihadapan konfrontasi revolusioner. Kerajaan-kerajaan Perancis dan Rusia yang dari luar tampak sangat berkuasa itu ternyata tidak berdaya sama sekali sehingga mereka hancur ketika ditantang oleh rakyat revolusioner. Yang terpenting dalam kedua kasus itu, angkatan bersenjata—para prajurit biasa yang memiliki pangkat–justru bergabung dengan

gerakan revolusioner tersebut. Yang terjadi pada masa lalu bisa saja terjadi lagi, khususnya ketika gerakan revolusioner yang efektif, bersemangat dan penuh kesadaran berproses mencapai tujuan itu.

Meningkatkan Ketegangan

Selama periode ketika kekuasaan ganda ditempa, ketegangan antara konfederasi dengan Negara tidak boleh disamarkan atau dikendorkan. Sebaliknya, gerakan munisipalis libertarian harus meningkatkan ketegangan itu dengan memperjelas oposisinya terhadap Negara dan mempertinggi serta mematangkan ketegangan jika mampu (tentu saja tidak perlu tergesa-gesa). Hanya dengan cara demikianlah konfederasi munisipal bisa menjadi kekuasaan-tandingan ketimbang menggunakan partai parlementer atau kesatuan lain yang berorientasi Negara.

Tetapi terlepas dari pentingnya mempertahankan ketegangan konfederasi versus Negara, sebagian anggota gerakan bisa saja menganggap bahwa mereka tidak perlu melanggengkan status oposisi mereka. Situasi selalu diarahkan agar individu atau kelompok dalam tatanan sosial yang ada akan berusaha untuk mengkompromikan atau mengkooptasi gerakan. Yakni dengan menawarkan penghargaan jangka pendek kepada anggota-anggota kunci, misalnya jabatan menguntungkan dalam struktur kekuasaan yang ada, dalam rangka mengorientasikan kembali gerakan tersebut menurut garis-garis Negara. Dan itu berarti berkompromi. Para anggota gerakan yang kurang teguh bisa saja menemui go-

daan yang terlalu memikat untuk ditolak sehingga mereka mungkin mengkhianati gerakan.

Sebagian orang mungkin mengkhianati gerakan berdasarkan kepentingan pribadi. Sebagian lainnya mungkin melakukannya dengan kurang hati-hati, berdasarkan keyakinan niat baik tetapi salah jalan, yaitu keyakinan bahwa aksi mereka akan meluaskan basis gerakan. Mudah untuk mengantisipasi bagaimana pemikiran seperti ini berjalan, yaitu sebagaimana tampilan banyak Negara-Bangsa sekarang ini, misalnya yang terdiri dari berbagai unit pemerintahan menengah seperti propinsi di Kanada, negara bagian di Amerika Serikat dan *Lander* di Jerman. Karena unit-unit menengah ini memiliki bermacam kekuasaan yang bisa menentang Negara-Bangsa, sebagian anggota munisipalis libertarian mungkin dengan keliru menganggap bahwa unit-unit itu merepresentasikan sejenis kekuasaan lokal atau kekuasaan terdesentralisasi, dan bahwa warga telah memiliki sejumlah kontrol lokal dalam unit-unit itu.

Mereka mungkin membayangkan bahwa walaupun unit-unit itu tidak dijalankan oleh rakyat, unit-unit menengah tersebut masih merepresentasikan suatu tingkat pemerintahan lokal dan berpotensi untuk didesentralisasi. Mereka, diantara anggota-anggota gerakan lainnya, bisa saja berpendapat dengan tanpa pikir panjang bahwa gerakan tersebut harus mencalonkan kandidat tidak hanya untuk jabatan munisipal tetapi juga untuk jabatan pada tingkat menengah tersebut. Argumen-argumen semacam ini mungkin persuasif. Maklum, para

kandidat yang mengejar jabatan "lebih tinggi" bisa menjangkau lebih banyak rakyat, terutama melalui media massa.

Namun jika gerakan munisipalis libertarian ingin mempertahankan identitas, ia mesti berkampanye untuk jabatan-jabatan tersebut. Propinsi, negara bagian dan *Lander* bukanlah institusi rakyat. Semua itu adalah Negara-Bangsa kecil yang diorganisasikan di sekitar institusi-institusi Negara yang represif dan berfungsi terutama sebagai saluran kekuasaan Negara sentralistis dan untuk menjalankan administrasi kebijakan-kebijakannya. Ketika konfederasi munisipal muncul sebagai kekuasaan ganda, unit-unit ini akan menentangnya dan menyatukan diri dengan Negara.

Seluruh jabatan diluar tingkat munisipal karenanya adalah kendaraan bagi Negara, dan kampanye untuk memperoleh jabatan itu akan mengendorkan dan menyamarkan ketegangan dengan Negara yang justru tengah diupayakan untuk ditingkatkan oleh gerakan. Dengan mengaburkan perbedaan antara munisipal dengan Negara, kampanye-kampanye tersebut akan membuat upaya-upaya pendidikan yang dilakukan oleh gerakan menjadi omong kosong belaka serta membuat tujuan-tujuan radikalnya menjadi tumpul.

Kampanye untuk Jabatan Negara

Sejarah sejak jaman kuno sampai sekarang telah menunjukkan segalanya, yaitu fakta tak terbantah bahwa kekuasaan Negara toh koruptif. Bahwa se-

seorang yang menempati jabatan Negara, tak bisa ditawar lagi, akan terbentuk oleh jabatan itu sehingga sejalan dengan penciptaan Negara, terlepas dari maksud-maksud idealisnya.

Pada akhir 1970-an dan awal 1980-an, gerakan Hijau yang muncul di berbagai wilayah di dunia, dalam ekspresi orientasi politiknya bersifat desentralistis. Dengan idealisme membara atas eksistensi diri yang mereka temukan kembali, mereka dengan penuh semangat menyuarakan prinsip-prinsip demokrasi dan kontrol lokal. Banyak partai Hijau di Eropa memperoleh popularitas yang cukup untuk tiba-tiba mendorong anggota-anggota mereka memasuki jabatan elektoral—tidak hanya jabatan propinsi atau *Lander* tetapi bahkan jabatan federal atau nasional. Banyak diantara para pemegang jabatan ini segera "lupa" akan desentralismenya dulu ketika mengejar karir "politik" yang menarik dan juga hak-hak istimewa, sementara partai-partai itu sendiri mengabaikan prinsip-prinsip dasarnya dan mencoba berkoalisi dengan partai-partai borjuis konvensional.

Mulanya pembenaran yang paling sering dikemukakan untuk kampanye pemilihan itu adalah bahwa kampanye tersebut semata-mata bersifat mendidik, bahwa kampanye itu membangkitkan kesadaran publik. Kesan, jika bukan janji, yang diberikan oleh para penyokong kampanye adalah bahwa jika orang-orang Hijau terpilih untuk menjabat, mereka akan menggunakan jabatan itu hanya sebagai *platform* untuk mendidik khalayak yang lebih luas agar memahami ide-ide Hijau, dan

tidak akan membiarkan diri menjadi pelayan Negara. Anggota-anggota lainnya, yang tidak menyadari cita-cita awal, berpendapat bahwa jika para kandidat Hijau memperoleh jabatan, mereka bisa membantu mewujudkan desentralisasi secara *top-down*, memberdayakan unit-unit pemerintahan lokal yang lebih kecil dengan menyalurkan kekuasaan dari atas.

Justifikasi semacam ini semata-mata hanya akan membuat para kandidat Hijau mendapatkan perolehan suara yang menganugerahi mereka *prestise* dan penghasilan dari jabatan. Sebagai para pemegang jabatan, mereka bekerja membuat perundang-undangan ala Hijau yang akan mereformasi Negara dan meredam pengaruh kapitalisme terhadap rakyat dan lingkungan. Tetapi mereka tidak mengembangkan tujuan radikal sedikit pun atau mendidik publik agar berpandangan radikal terhadap Negara. Sebaliknya, seraya dengan makin banyaknya anggota mereka yang memegang jabatan Negara, partai-partai itu beserta berbagai programnya menjadi kurang radikal, dan perwakilan Hijau mengupayakan reformasi yang akibatnya membuat Negara terlihat lebih ramah dan hormat kepada kebutuhan publik.

Partai-partai Hijau bukanlah satu-satunya kasus menghilangnya radikalisme. Secara historis hanya sedikit pemimpin revolusioner, bahkan yang paling berpegang teguh pada prinsipnya sekalipun, yang bisa menentang efek koruptif kekuasaan Negara. Paling sering terjadi, orang-orang sosialis, komunis dan anarkis yang berdedikasi justru kehilangan

integritas moral dan politik tatkala mereka meraih kekuasaan dalam jabatan-jabatan Negara. Begitu lazim dan begitu mudah diramalkan terjadinya "pendidikan mundur" ini sehingga ia tampaknya tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kita bisa saja menyimpulkan bahwa menerima jabatan Negara berarti "dididik" dengan cara-cara Negara, bukan mendidik publik dalam politik radikal anti-Negara. Juga berarti melanggengkan kekuasaan Negara, bukan mengembangkan demokrasi rakyat. Dan ini bahkan bisa menjadi kontribusi terhadap penyebaran otoritas dan kekuasaan Negara yang berlawanan dengan bangkitnya demokrasi rakyat yang pada mulanya didukung.

Sejak masa keemasan gerakan-gerakan Hijau pada 1980-an, gerakan-gerakan politik "independen" lainnya telah menyerukan "politik arus-bawah" ditengah-tengah banyaknya partai ketiga yang baru saja berdiri. Di Amerika Serikat mereka mencakup Partai Buruh dan Partai Baru diantara parta-partai lainnya. Selama membangun gerakan munisipalis libertarian, sebagian anggota mungkin menganggap perlu bergabung dengan partai-partai ini sebagai jalan untuk mendapatkan sekutu dan mengembangkan pengaruh gerakan mereka.

Namun manakala mereka bergabung dengan partai-partai yang pura-pura independen padahal sebenarnya secara intrinsik reformis ini, kalangan munisipalis libertarian mungkin akan mendengar argumen yang sama berulang-ulang: jika mengejar jabatan munisipal lokal adalah tindakan yang layak diterima, maka mengejar jabatan "lebih

tinggi" tentu juga layak diterima. Maklum, efektivitas seseorang dalam jabatan yang "lebih tinggi" secara proprosional bisa lebih besar ketimbang dalam jabatan yang lebih rendah. Dengan bergabung bersama partai reformis untuk menjalankan kampanye pemilihan bagi jabatan kegubernuran, kongres dan jabatan lainnya, mereka akan merasa bahwa gerakan tersebut bisa menarik lebih banyak perhatian publik terhadap ide-ide munisipalis libertarian.

Anggota-anggota gerakan harus berulangkali saling mengingatkan bahwa gerakan mereka bukanlah alat untuk mengejar jabatan Negara, juga bukan untuk "memperbaiki" Negara dalam arti semu atau memberi Negara sesosok "wajah manusiawi". Munisipalisme libertarian adalah perjuangan berkelanjutan yang bertujuan menciptakan institusi-institusi sipil yang radikal dan emansipatif. Bukan menyesuaikan diri dengan institusi-institusi yang ada yang bersifat menindas. Ia harus berjuang melawan Negara sejak masa kelahirannya dan selama keberadaannya. Perjuangan demi konfederasi munisipal, demi munisipalisasi properti dan demi politik demokrasi langsung, semua itu diarahkan menuju penciptaan-ulang masyarakat yang menyeluruh, bukan menuju pencapaian kemenangan reformis. Jika gerakan tersebut ingin menciptakan Komune revolusioner yang terdiri atas komune-komune, itu mesti dilakukan dengan cara berupaya setiap hari menciptakan kekuasaan ganda demokrasi-langsung sebagai kekuasaan tandingan terhadap Negara.

Kampanye Walikota

Haruskah kalangan munisipalis libertarian mengajukan calon walikota? Sebagian orang yang simpatik berpendapat bahwa pencalonan walikota akan tidak konsisten dengan perjuangan menciptakan majelis rakyat. Sebagai jabatan eksekutif, menurut mereka, kewalikotaan secara struktural dan secara moral sama dengan jabatan gubernur, perdana menteri dan presiden, sekalipun pada skala yang lebih kecil. Kaum munisipalis libertarian, dengan logika ini, mungkin mengajukan calon untuk badan "legislatif" lokal dan dewan kota, tapi tidak untuk walikota.

Tetapi justru munisipal sebagai satu keutuhan, dan bukan semata-mata dewan kota, yang berpotensi untuk berada dalam ketegangan dengan Negara. Munisipal memiliki sejarah yang secara kualitatif berbeda dengan Negara. Faktor krusial berkaitan dengan jabatan munisipal—apakah itu walikota, kanselir atau orang terpilih–adalah konteks munisipalnya, sebagaimana faktor krusial yang berkaitan dengan kepresidenan, keperdanamenterian, kongres atau parlemen adalah konteks Negara. Walikota biasanya berada dalam pengawasan publik yang lebih dekat ketimbang jabatan-jabatan negara bagian dan propinsi, dan kekuasaan mereka jauh lebih terkontrol.

Mengajukan calon walikota dalam program munisipalis libertarian karenanya secara kualitatif berbeda dari mengajukan calon gubernur propinsi atau negara bagian, apalagi presiden. Gerakan tersebut bisa saja mengajukan calon walikota. Tetapi itu

dikerjakan harus dengan komitmen untuk mengubah jabatan walikota menjadi sekedar seorang pimpinan, sebagaimana mengubah dewan kota menjadi dewan konfederal yang terdiri atas delegasi-delegasi dari majelis-majelis wilayah kecil dalam munisipal.

Munisipalisme libertarian memperoleh integritasnya, tepatnya dari proses menciptakan dan mempertahankan ketegangan dialektis antara konfederasi munisipal dengan Negara-Bangsa. “Hukum hidup”-nya terkandung dalam perjuangannya melawan Negara dan upayanya mencopot serta menghapuskan kekuasaan Negara. Jika ketegangan antara munisipal-munisipal terkonfederasi dengan Negara dalam praktiknya tidak jelas dan justru mengandung kompromi, maka gerakan tersebut akan kehilangan makna dan identitas radikalnya. Ketimbang menyelewengkan munisipalisme libertarian dengan cara seperti ini, orang yang ingin mengkompromikan identitasnya lebih baik disuruh keluar bergabung saja dengan partai konvensional.

BAB 14

MASYARAKAT RASIONAL

Manakala kekuasaan ganda dipecahkan dan munisipal-munisipal terkonfederasi telah mengatasi kekuatan-kekuatan yang menentang mereka, kedaulatan tertinggi masyarakat akan berada dalam genggaman mereka. Warga lantas akan membawa potensi ranah politik yang berdaulat ini menuju tujuannya dengan cara mengubah masyarakat sepanjang batas-batas rasional dan etis.

Sampai taraf dimana manusia dapat secara kolektif membentuk masyarakat tempat mereka hidup, cara-cara yang mereka pergunakan terletak bukan dalam ranah sosial dan bukan pula dalam Negara, melainkan dalam ranah politik. Ranah sosial, seperti kita ketahui, terlibat dengan persoalan-persoalan keluarga, pribadi individu dan aspek-aspek ekonomis dalam hidup beserta produksi dan distribusi. Persoalan-persoalan keluarga dan individu terlalu sempit cakupannya untuk bisa mempengaruhi masyarakat. Sementara persoalan-persoalan produksi dan distribusi memang memiliki pengaruh lebih besar, tetapi masih parsial. Pabrik-pabrik dan tempat-tempat kerja sama sekali bukanlah tempat dimana keputusan-keputusan yang berkaitan dengan seluruh masyarakat bisa dibuat, dan kehidupan ekonomi dengan mudah terpecah ke dalam sektor terpisah atau kepentingan-kepentingan usaha. Negara juga bukan tempat dimana orang secara kolektif membentuk masyarakat. Negara adalah

tempat dimana segelintir elite memegang kekuasaan atas mayoritas.

Karena itu, alat-alat untuk membentuk kembali masyarakat secara kolektif terletak dalam ranah politik itu sendiri, dimana keputusan-keputusan tentang bagaimana masyarakat berfungsi dibuat secara eksplisit dan secara sadar oleh komunitas. Jika pengambilan-keputusan mesti benar-benar kolektif, maka ia harus berbentuk demokrasi langsung. Yakni institusi-institusi politiknya harus menganut munisipalisme libertarian yang berbasiskan pada praduga bahwa semua orang dewasa normal berkemampuan untuk ikut serta dalam swa-kelola komunitas.

Manakala rakyat secara kolektif mengambil kendali kekuasaan pengambilan-keputusan, maka mereka bisa merencanakan dan memutuskan jenis masyarakat apa yang mereka inginkan dan menyerahkan kepada generasi masa depan yang akan menikmati dan meningkatkannya. Jenis masyarakat yang akan diciptakan tergantung pada mereka sendiri untuk memutuskannya secara demokratis. Ini tidak bisa ditentukan oleh para teoritisi munisipalisme libertarian. Tapi sampai taraf tertentu, eksistensi berkelanjutan ranah politik demokratis-langsung akan tergantung pada apakah warga membangun kembali ranah sosial sesuai dengan praktik dan nilai-nilai etika yang sama dengan yang melandasi ranah politik mereka. Ia tidak mungkin bisa bertahan jika pilihan-pilihan yang mereka buat berkaitan dengan seluruh masyarakat, bertentangan dengan praktik dan nilai-nilai tersebut.

Di antara nilai-nilai ini adalah mutualisme, yaitu suatu rasa identifikasi saling menguntungkan *(mutual)* antar warga dan saling melengkapi *(complementarity)*. Ini sebentuk rasa tanggung jawab sesama warga dan keluarganya dan rasa wajib peduli pada kesejahteraan setiap orang. Jika solidaritas dan akal sehat tertanam dalam kehidupan sipil, mereka akan berpijak pada mutualisme, humanisme dan kerjasama, yang juga meresap ke seluruh masyarakat.

Etos kerjasama dan solidaritas memiliki banyak konsekuensi, yaitu paling tidak adalah penghapusan hierarki dan dominasi. Dan itu bukan hanya dominasi Negara tetapi juga beragam stratifikasi sosial yang sudah terlembagakan, seperti stratifikasi berdasarkan gender, ras, etnis, usia dan pembedaan status lainnya. Stratifikasi menjadi penghambat bagi mutualisme karena adanya ketimpangan dan dominasi yang terkandung didalamnya.

Ekonomi Moral

Etos ini juga harus tertanam dalam kehidupan ekonomi jika ranah politik ingin tetap bertahan. Masyarakat yang terorganisasi sepanjang batas-batas mutualistis, non-hierarkis dan komunal akan menjadi paling rasional jika masyarakat tersebut memilih mengganti ekonomi pasar kapitalis dengan ekonomi moral, suatu ekonomi yang para anggotanya memiliki rasa kewajiban mutual yang tinggi. Ekonomi jenis ini akan mengganti kelas-kelas dan properti pribadi dengan kerjasama dan solidaritas.

Ia juga akan mengganti keuntungan dengan pengakuan akan kesejahteraan mutual. Ia akan mengganti penjualan dengan pembagian. Ia akan mengganti persaingan dan kemandirian ilusif dengan aksi saling timbal balik dan saling ketergantungan. Dengan mengganti hubungan ekonomi yang berorientasi keuntungan dengan hubungan ekonomi etis, ini akan mengubah ekonomi menjadi budaya.

Akan seperti apakah produksi ekonomi dalam masyarakat demikian? Bentuk-bentuk produksi yang sukar, yang memerlukan kerja keras sulit atau yang membosankan, akan dijalankan bukan oleh manusia tetapi oleh mesin-mesin di pabrik. Produk-produk dan bermacam teknologi dasar bagi masyarakat paska-kelangkaan *(post-scarcity)* akan dibuat di pabrik-pabrik industri: barang-barang tahan lama dan peralatan medis, tekstil, alat-alat komunikasi dan transportasi, alat-alat mesin, elektronik dan sebagainya. Teknologi produktif di pabrik-pabrik ini akan dipertinggi, jauh lebih baik dari yang sekarang, melalui proses-proses otomatisasi dan *cybernation* yang memungkinkan mesin itu sendiri menjalankan dengan sesedikit mungkin tenaga manusia. Mesin akan membuat mesin, sebagaimana yang telah dilakukan sampai taraf tertentu, dan akan memerlukan campur tangan manusia terutama dalam masalah perancangan dan perbaikan. Para spesialis akan merancang pabrik-pabrik sederhana yang mesin-mesinnya, jika mengalami kerusakan, akan diperbaiki oleh rakyat yang menjaganya. Dan akan sangat sedikit, jika ada, produksi manufaktur yang memerlukan kerja berat

atau membosankan.

Mungkin tampak mengagetkan ketika berbicara industrialisasi semacam demikian berderap seirama dengan nilai-nilai mutualisme dan saling melengkapi. Tetapi industrialisme bertentangan dengan kerjasama hanya jika seseorang menganggap industrialisme sama dengan kapitalisme dan eksploitasi tenaga kerja. Pabrik industri dalam masyarakat munisipalis libertarian akan dimiliki secara kolektif oleh rakyat dan dikelola secara kooperatif sebagai bagian dari ekonomi moral, bukan ekonomi kapitalis. Mungkin yang lebih penting adalah bahwa minimalisasi tenaga kerja manusia akan menciptakan pra-kondisi materil bagi masyarakat yang didalamnya telah tertanam mutualisme dan kerjasama. Produktivitas pabrik-pabrik seperti itulah yang akan memungkinkan menguatnya etos mutualistik masyarakat rasional.

Persoalan ini sangat krusial. Revolusi-revolusi pada masa lampau telah menegaskan fakta bahwa pada era mereka terdapat kekurangan alat-alat produksi untuk membebaskan rakyat dari kerja berat dan memberi mereka bukan hanya tingkat kenyamanan yang layak melainkan juga waktu senggang yang mereka butuhkan agar bisa terlibat dalam swa-kelola komunitas. Selama beratus-ratus tahun aktivitas revolusioner, massa rakyat yang berusaha mengubah kehidupan sosial menurut batas-batas rasional telah terdorong kembali ke belakang, yang sebagian disebabkan tingkat teknologi mereka tidak bisa menopang relasi-relasi sosial baru yang bisa membebaskan mereka dari kelaparan, jam

kerja yang lama dan kekuasaan kelas. Tetapi saat ini, kapasitas teknologi itu ada. Sebuah masyarakat anarkis rasional akan mengambil langkah berikutnya dan memanfaatkan keberlimpahan teknologi itu untuk memastikan bahwa rakyat memperoleh kebebasan, ketimbang menundukkannya agar patuh pada dominasi dan eksploitasi. (Sebagian tenaga kerja tentu saja akan selalu diperlukan untuk mempertahankan masyarakat. Dengan etos mutualistis yang ada, tenaga kerja yang dibutuhkan secara sosial akan dibagi rata diantara mereka yang berkemampuan melakukannya. Tetapi karena sebagian besar pekerjaan akan dilakukan oleh mesin, maka pekerjaan tidak memerlukan banyak waktu untuk diselesaikan).

Produksi pabrik tentu saja tidak perlu menghambat kerja pertukangan dalam membuat bermacam benda yang akan meningkatkan kehidupan, bagi mereka yang mendapatkan kepuasan dari pekerjaan seperti itu. Produksi pabrik untuk komponen-komponen dasar produk pertukangan akan membuat para tukang bebas berkonsentrasi mengurusi dimensi yang lebih artistik dan ekspresif. Mereka yang senang menenun kain, misalnya, bisa membiarkan mesin mengerjakan tugas membosankan, yaitu mengubah serabut menjadi benang. Maka mereka dapat menenun dengan tangan mereka sendiri demi kesenangannya, memproduksi tekstil untuk kawan dan juga komunitas.

Demikian juga orang yang menyukai pengalaman menyenangkan dalam berladang bisa menanam makanannya sendiri jika mereka me-

milihnya, dan kesenangan estetis dalam berladang skala kecil ini memang bagus. Tetapi banyak orang mungkin tidak akan memilih menghabiskan waktunya bercocok-tanam bahan pangan mereka sendiri karena lebih menyukai aktivitas lain. Mereka akan memperoleh pangan dari proses-proses pertanian yang sebagian atau mungkin seluruhnya telah terindustrialisasi. Sebagian besar produksi pertanian, pada kenyataannya, akan dimekanisasi sehingga memungkinkan kerja berat dalam pertanian menjadi berkurang dan menjadi bagian dari masa lalu yang jauh.

Pertanian terindustrialisasi bukan hanya dikehendaki, tetapi juga diperlukan jika masyarakat ingin menopang populasi manusia yang berkembang. Sebenarnya, adalah fantasi naif yang hinggap pada banyak kalangan pecinta-lingkungan radikal saat ini, jika menganggap bahwa masyarakat bisa kembali mengayunkan tombak, bertualang mencari makanan dan menggunakan bajak yang ditarik kuda, kecuali jika itu dilakukan berdasarkan keinginan individu untuk semata-mata memuaskan hasrat pribadi. Pertanian industri juga tidak bertentangan dengan metode organik. Tanaman pangan yang ditanam secara industri bisa bersifat organik, dan mesin-mesin yang digunakan untuk itu akan dirancang agar memiliki efek negatif terkecil terhadap tanah dan ekologinya.

Prinsip pilihan yang sama—dan memang mesti diingat kembali bahwa tanpa pilihan maka tidak ada kebebasan–bisa diterapkan pada produksi semua jenis benda materil. Sehingga pekerjaan se-

seorang akan menjadi panggilan moral atau pilihan pribadi, bukan pekerjaan yang mereka jalani karena terpaksa. Tanpa pekerjaan yang melelahkan fisik dan banyak menghabiskan waktu, rakyat akan bebas menjalani hidup yang lebih kreatif, ekspresif dan pilihan aktivitas mereka akan mencerminkan keinginan mereka ketimbang mencerminkan tuntutan keras karena kebutuhan.

Jika produksi yang berbasis pada pengurangan kerja manusia adalah pra-kondisi bagi ekonomi moral, maka distribusi yang adil akan membawa ekonomi itu mencapai tujuannya. Distribusi akan konsisten dengan nilai humanistis dan nilai kerjasama dalam sebuah pemerintahan munisipalis libertarian, jika ia bersifat partisipatif dengan memberikan unit terkecil alat-alat hidup bagi setiap orang dalam komunitas. Ia akan menawarkan kepada semua anggota komunitas, alat-alat materi yang mereka butuhkan untuk mewujudkan potensi kemanusiaan mereka dan mengarahkan kehidupan yang etis serta secara estetis menyenangkan.

Tak perlu dikatakan bahwa ketimpangan ekonomi akan menghilang. Satu-satunya ketidakmerataan adalah yang diakibatkan oleh kekuatan, usia, kesehatan dan bakat individu. Tetapi ketidakmerataan ini, ketimbang menjadi dalih bagi dominasi, malah akan tergantikan secara sosial. Sehingga mereka yang membutuhkan lebih banyak dukungan akan memiliki akses yang siap terhadap hal itu. Dengan dijalankan sesuai prinsip "dari setiap orang sesuai kemampuannya dan bagi setiap orang sesuai kebutuhannya," distribusi akan terhenti sebagai se-

buah persoalan ekonomi belaka.

Tanpa ekonomi kapitalis, yang tuntutan "tumbuh atau mati"-nya merupakan kekuatan utama dibalik krisis ekologis, warga akan bebas untuk membangun kembali ranah sosial mereka sepanjang batas-batas ekologis. Kota-kota besar secara fisik dan secara institusional bisa didesentralisasi. Kota kecil dan pedesaan dapat diintegrasikan ke dalam sebuah keutuhan tergabung dan konflik historis diantara mereka akan terhapuskan. Bahan bakar kotor pasti akan dihilangkan, digantikan dengan sumber-sumber daya energi yang bersih dan dapat diperbaharui, bahkan dalam produksi pabrik. Dunia non-manusia tidak akan lagi dipahami sebagai dunia yang penuh dengan kekurangan, sebagaimana kapitalisme menganggapnya seperti itu saat ini —dengan terlalu sedikitnya sumber daya yang mesti diperjuangkan demi dominasi satu terhadap lainnya–melainkan sebagai dunia produktivitas dan kemajuan evolusioner menuju keberagaman dan kompleksitas.

Bahwa warga dalam sebuah pemerintahan yang baru akan menginginkan penciptaan kembali masyarakatnya menurut prinsip-prinsip ini, bukanlah sesuatu yang bisa kita ramalkan dengan pasti. Esensi demokrasi, bagaimanapun juga, adalah bahwa mereka akan mempunyai pilihan-pilihan. Tetapi sejauh mereka ingin melestarikan demokrasi langsung mereka, pilihan-pilihan mereka harus diarahkan menurut akal sehat. Jika mereka ingin mengembalikan sistem komando tenaga kerja pabrik, misalnya, padahal itu tidak lagi diperlukan, maka itu

menjadi tidak rasional. Juga akan tidak rasional jika mereka memilih memulihkan kapitalisme dan lagi-lagi kembali pada motif keuntungan yang mengakibatkan kerusakan pada masyarakat dan lingkungan hidup. Akan tidak rasional jika mereka mengubah konfederasi-konfederasi munisipal menjadi Negara-Negara. Akan tidak rasional jika melarang suatu kelompok etnis atau gender dari keikutsertaannya dalam politik. Sebuah masyarakat anarkis ekologis dan liberatif akan menjadi mustahil tanpa adanya etos mutualisme dan saling melengkapi. Tetapi etos itu pada gilirannya juga tidak mungkin ada tanpa latihan berpikir untuk mendukung nilai-nilai dan praktik-praktik dalam rangka menentang segala alternatif buruk.
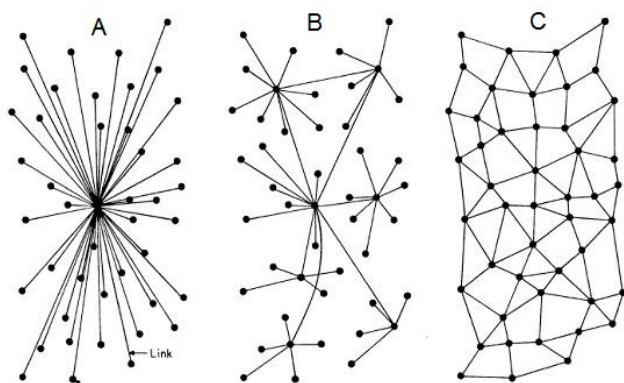
sentralisasi ke desentrallisasi (A ke C)

BAB 15

AGENDA HARI INI

Kapitalisme hari ini tengah mengancam mengkomodifikasikan semakin banyak wilayah kehidupan sosial. Ia bahkan menembus jauh ke ruang pribadi kehidupan kita dan menghapus kepribadian serta terlebih-lebih lagi menggerogoti individualitas. Sementara urbanisasi mengancam mengoyak-ngoyak kota dan desa sekaligus, yang menjerumuskan komunitas menuju arkhaisme. Adapun Negara, ia mengancam menyedot habis makna mendasar tentang gagasan kebebasan itu sendiri, dan penghisapan makna ini menggasak biosfera yang menghancurkan lingkungan hidup sampai tingkat yang mengerikan, yang berbagai akibatnya berpotensi menjadi bencana bagi segenap bentuk kehidupan beserta segala kerumitannya yang kaya.

Pada saat yang sama, berkembang-biaknya tiga kelembagaan diatas mendesakkan tekanan kuat terhadap ranah politik dan sosial sehingga menjadi perintang utama perubahan radikal dan memenjarakan khalayak luas dalam institusi-institusi yang ada. Media massa membius dan membisukan khalayak menjadi pasrah di hadapan dominasi dan eksploitasi, melembekkan gairah dinamik mereka menjadi semata kerumunan konsumen patuh dan pasif dan mereka menjadi subjek-subjek yang adaptif terhadap kekuasaan elite.

Menghadapi rentangan lebar tekanan-tekanan sosial yang menentang perubahan radikal

itu, warga, lelaki dan perempuan, pada masa kini akan membutuhkan motivasi yang bertenaga guna menjalankan revolusi sosial dan munisipal sebagaimana dipaparkan buku ini dan untuk menciptakan masyarakat sebagaimana diajukan oleh ekologi sosial. Maka, apakah kini yang bisa menginduksi, menyuntik, mereka untuk bergerak mencipta-ulang ranah politik, mendemokratisasi munisipal mereka dan mengkonfederasikannya untuk tampil sebagai kekuatan kembar melawan Negara?

Tidak diragukan lagi, yang terpenting dalam beragam kemungkinan motivasi yang bersemayam dalam diri mereka adalah kenyataan bahwa masyarakat anarkis rasional mengajukan kondisi-kondisi dengan tingkat kemungkinan paling besar bagi terpenuhkannya kebebasan sosial manusia. Pertumbuhan keterbelengguan dan ketimpangan di dunia saat ini tampaknya akan mendorong orang-orang untuk bangkit disulut kemarahan yang menentang ekploitasi, dominasi dan bahkan perbudakan (meskipun peristiwa khusus yang bisa mendorong mereka melakukannya tidak bisa diramalkan). Gagasan tentang kemampuan seseorang mengelola urusannya sendiri, dalam komunitas yang mempertautkan warga sesamanya, sudah menjadi daya dorong yang abadi, bahkan dan terutama dalam era meluasnya ketidakberdayaan dan ketercerabutan.

Juga mustahil bahwa Negara-Bangsa dan sistem kapitalis bisa bertahan untuk selamanya. Manakala sistem ini tengah menebar senjang kaya-miskin di dunia menjadi jurang ketimpangan yang

menganga lebar, toh sistem ini bahkan juga bertabrakan dengan biosfera, dengan segala titik ruang di bumi yang menunjang adanya kehidupan. Imperatif utama kapitalisme "tumbuh-atau-mati", yang memburu keuntungan dengan mengorbankan seluruh pertimbangan lain, secara radikal bertentangan dengan realitas praktis berupa saling ketergantungan dan keterbatasan, baik dalam pengertian sosial maupun dalam pengertian kapasitas planet ini untuk mempertahankan kehidupan.

Kapitalisme dan ekologi global sama sekali tidak bisa hidup berdampingan untuk jangka waktu tak terbatas. Pada awalan abad ini, semata masalah pemanasan global saja toh telah menimbulkan kekacauan iklim, yang menyebabkan naiknya permukaan air laut, bencana karena ekstrimnya cuaca, mewabahnya penyakit menular dan merosotnya lahan tanam sehingga melorotkan juga kapasitas pertanian. Pada tingkat paling minimal, kelaparan dan penyakit akan meruyak, sementara Negara akan malah semakin otoriter untuk membungkam kerusuhan sosial. Pilihan tampaknya kian tegas: Rakyat akan mendirikan masyarakat ekologis, atau jika tidak, tiang-tiang fondasi masyarakat akan ambruk. Pemulihan politik dan kewargaan karenanya bukanlah sekedar pra-kondisi menuju masyarakat bebas. Lebih genting dari itu, ia tampaknya menjadi pra-kondisi bagi keberlangsungan hidup kita semua sebagai spesies. Dengan kata lain, problema-problema ekologis (itu sendiri) mendesakkan tindakan rekonstruksi fundamental dalam masyarakat.

Dalam tahun-tahun mutakhir, krisis yang

tengah menghantui ini telah membangkitkan politik ekologis. Seperti telah kita lihat, partai-partai Hijau yang bermunculan di banyak negara berusaha mencapai tujuan-tujuan ekologis dan sosial mereka dengan memanfaatkan institus-institusi Negara. Tetapi toh hanya dalam beberapa tahun saja partai-partai itu merosot menjadi semata partai-partai borjuis konvensional, yang elite-elite profesionalnya mempraktikkan sistem ke-Negara-an dan mendukung kekuatan-kekuatan utama yang justru mengakibatkan krisis ekologis, sekalipun mereka berbendera hijau.

Kalangan Hijau merupakan gerakan terkini yang berupaya mewujudkan tujuan-tujuan kiri-radikal dengan bergerak semata dalam koridor Negara. Jejak awal mereka utamanya berangkat dari partai-partai sosialis Eropa, yang berpijak dari ideal-ideal dan prinsip-prinsip—pada beberapa generasi ke belakang–yang memiliki visi tentang masyarakat sosialis. Tragisnya, ketika gerakan sosialis berubah menjadi berbagai partai-partai konvensional berorientasi Negara *(Statist)*, visi mereka dirusak oleh pragmatisme perolehan berupa memegang dan meluaskan kekuasaan dalam bentuk jabatan-jabatan Negara. Kini, terpeleset dari pandangan-pandangan emansipatif mereka terdahulu, Partai Sosial Demokrat di Jerman, Partai Buruh di Inggris, Partai Demokrat Baru di Kanada dan Partai Sosialis di Perancis hanya sekedar memamerkan perbedaan-perbedaan palsu dengan rekan-kolaborator mereka yang kapitalis.

Abad kekalahan tersebut membawa efek

pengkerdilan spirit. Derap waktu pun mengauskan harapan, seiring kekecewaan demi kekecewaan datang berturut-turut. Berbicara tentang "politik baru" menjadi tidak meyakinkan, terutama tatkala orang-orang yang boleh jadi terbuka pada gagasan (pembaharuan) toh telah terjuruskan oleh pengalaman pahit sehingga menyimpulkan bahwa upaya-upaya semacam itu tidak berarti apa-apa selain sekedar menciptakan partai-partai *mainstream* lainnya. Dalam keputusasaan, mereka mungkin memutuskan untuk bekerja lebih keras dalam sejalur karier, dalam gerak yang memusat (melulu) pada satu isu tunggal.

Sejarah kalangan kiri telah memperlihatkan bahwa gerakan-gerakan yang amat keras dengan isu tunggal nyatanya juga sangat membatasi. Tentu saja, gerakan isu tunggal demikian memang memiliki signifikansi untuk memprotes ketidakadilan tertentu, tetapi hasilnya sangat minimal jika ditempatkan dalam proporsi bahwa perubahan-perubahan sosial dan ekologis yang diperlukan toh juga sangat berkembang. Diatas semua itu, mereka tidak mengajukan program untuk membangun institusi-institusi berkelanjutan yang sangat dibutuhkan guna merekonstruksi masyarakat. Mereka juga tidak sepenuhnya berkesadaran hendak menetapkan tujuan menciptakan arena politik yang didalamnya aktivitas demokrasi bisa menjadi keberadaan tetap dalam kehidupan sehari-hari.

Pelajaran dari seabad aktivitas kaum kiri tersebut menuju pada kesimpulan bahwa bukan parlementarisme dan bukan pula gerakan-

gerakan berisu-tunggal yang secara fundamental bisa merubah masyarakat. Kontrol pekerja terhadap pabrik-pabrik, misalnya, untuk sebagian utamanya akan mengarah pada kolektivisasi badan-badan usaha kapitalis. Maka alternatif apa yang ada? Gerakan politik apapun hari ini yang menampilkan dirinya sebagai tentangan terhadap kapitalisme dan Negara-Bangsa tak pelak harus distrukturkan secara institusional di seputar masalah restorasi atau penguatan kembali kuasa pada tingkatan-tingkatan munisipal-munisipal – tiada lain itu berupa demokratisasi, radikalisasi dan konfederasi.

Para pengkritik munisipalisme liber tarian menandaskan bahwa rintangan-rintangan yang menghalangi jalan gerakan tersebut adalah sesuatu yang tak tertanggulangi, utamanya pada luasnya ukuran kota-kota besar masa kini. Namun jika seseorang berpikir terjalur oleh logika ini, ia pastilah menyimpulkan bahwa keberadaan mendasar dari kondisi sosial tertentu itu memang abadi. Luasnya ukuran kota-kota besar masa kini memang sebuah persoalan, tetapi teknik-teknik basisnya yang telah menciptakan kota-kota tersebut itu jugalah yang memungkinkan untuk mengecilkan kota-kota itu ke dalam skala yang manusiawi dan membawanya menuju keseimbangan dengan lingkungan alam sekitarnya. Menghilangkan hambatan yang merintang dan menempatkannya dalam jalur perubahan sosial adalah bagian dari proses. Menganggap bahwa persoalan-persoalan yang ada saat ini sebagai sesuatu yang tidak bisa dipecahkan, disebabkan semata-mata dari keberadaannya, berarti

menyerah terhadap persoalan-persoalan itu. Fakta keberadaan saja dengan demikian digunakan untuk membenarkan diterimanya Negara dan kapitalisme, yang dalam kasus ini kalangan libertarian-kiri tampaknya bisa menyerah dan berhenti dari upayanya menggusur Negara dan kapitalisme, dan lalu menjadi sosial demokrat atau liberal.

Kapitalisme tidak akan memberikan institusi-institusi demokratis populis kepada para penentangnya untuk melawannya. Kapitalisme akan berjuang sampai akhir untuk melanggengkan dirinya, mengabadikan hubungan-hubungan sosialnya dan institusi-institusi Negaranya, seberapa jauh pun ia masih bisa membolehkannya. Atau bahkan menyambut upaya-upaya para reformis untuk "memperbaiki"-nya dan membuatnya menjadi bagus. Jika rakyat revolusioner berkehendak meraih institusi-institusi emansipatif, mereka harus menciptakannya atas inisiatif mereka sendiri. Jika mereka masih memiliki institusi-institusi tersisa yang bisa mereka bangun—seperti rapat-rapat kota dan dewan-dewan kota–maka akan lebih baik. Jika institusi-institusi itu tidak ada, maka mereka harus menciptakan seluruhnya sedari titik nol. Tugasnya jadi lebih berat memang, tetapi tetap bisa dilakukan. Tradisi emansipatif memang sangat membantu, namun bukan ia sendirian yang mesti menentukan apakah gerakan untuk menciptakan masyarakat rasional itu akan ada. Dalam kasus apapun, inisiatif perubahan sosial terletak dalam gerakan.

Kendati munisipalisme libertarian boleh jadi tampak utopis, langkah-langkah yang dikem-

bangkannya sesungguhnya cukup konkrit. Demikian juga persoalan-persoalan sosial yang memaksa kita untuk bertindak. Kerusakan ekologis global adalah persoalan yang dampaknya menimpa semua orang tanpa memandang kelas dan kehendak untuk melestarikan lingkungan hidup *(biosfera)* berlaku sebagai panggilan universal bagi kebanyakan warga yang rasional. Kebutuhan akan adanya komunitas bersemayam dalam jiwa manusia, kebutuhan yang berulangkali muncul dalam rentangan berabad-abad, terutama dalam masa-masa krisis sosial. Sedangkan mengenai ekonomi pasar, marilah kita ingat kembali bahwa ekonomi tersebut baru berusia dua abad; sementara dalam ekonomi campuran yang lebih dulu ada daripada ekonomi pasar, hasrat-hasrat serakah secara kultural diredam dan terdapat banyak alternatif yang tersedia untuk mengganti kapitalisme modern.

Apa yang telah diciptakan oleh orang-orang pada abad-abad lalu pasti bisa dipulihkan kembali dan dikembangkan oleh orang-orang pada masa kini. Jika nenek moyang kita, dengan segala keterbatasan sumber daya teknologi dan komunikasi, mampu mendesakkan perubahan sosial yang massif, orang-orang masa kini pun bisa melakukan hal yang sama. Adanya media-media baru yang bisa kita gunakan memberi kita keuntungan tak terhingga yang tidak dimiliki oleh para pendahulu kita.

Kita juga punya keuntungan bahwa di banyak tempat, institusi-institusi demokratis tetap hidup ditengah-tengah kuatnya Negara-Negara republik saat ini. Komune masih ada hidup tersem-

bunyi dan terdistorsi dibalik dewan kota. Seksional-seksional seperti di Prancis berada tersembunyi dan terdistorsi dalam lingkungan-lingkungan kecil dan pusat-pusat komunitas. Rapat-rapat kota tak hilang kendati tersembunyi dan terdistorsi dalam kekotaan. Dan konfederasi-konfederasi munisipal masih berdenyut tersembunyi dan terdistorsi dalam jaringan-jaringan regional kota-kota kecil dan besar. Dengan menggali, merenovasi dan mengandalkan institusi-institusi tersembunyi ini, dimana mereka berada, dan membangunnya di tempat-tempat dimana institusi-institusi itu belum ada, kita bisa mendemokratisasi republik dan meluaskan demokrasi untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi setingkatan tertentu kebebasan sosial yang terus meninggi yang belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarah.

Dengan meradikalisasi demokrasi langsung akan menyajikan pemenuhan politik bagi institusi-institusi yang telah diciptakan oleh gerakan-gerakan itu. Karenanya inilah slogan bagi gerakan munisipalis libertarian, “Demokratisasi republik! Radikalisasi demokrasi!”

Dengan pesatnya perubahan teknologi dan sains, pergolakan sosial yang terasa serba mendadak dan kepastian bahwa tuntutan inheren kapitalisme untuk tumbuh itu terbatas, maka mustahil untuk meramalkan kondisi-kondisi sosial dan peluang-peluang seperti apa yang bakal ada bahkan untuk satu generasi mendatang. Namun, yang jelas adalah bahwa tuntutan demi hadirnya masyarakat rasional mendorong kita untuk menjadi makhluk rasional

—yakni hidup dan menghidupkan terus keunikan potensi-potensi manusia kita–dan membangun Komune dari komune-komune untuk terus memenuhkan kemanusiaan sejati kita.

Murray Bookchin diwawancarai pada 12 November 1996 di Burlington, Vermont, oleh Janet Biehl.

Tanya (T): Murray, salah seorang anarkis yang mengkritik Anda telah mengambil slogan Anda, "Demokratisasi republik dan radikalisasi demokrasi" dan, dalam beberapa hal, separuhnya dipotong. Dia menuduh Anda hanya ingin mendemokratisasi republik namun dia mengabaikan bahwa Anda juga ingin meradikalisasi demokrasi. Bisakah Anda menjelaskan arti slogan ini?

Jawab (J): Di banyak Negara-Bangsa saat ini, kemerdekaan sipil yang ada di kota-kota kecil dan besar saat ini adalah hasil dari perjuangan yang dimenangkan dengan sulit yang dijalani pada masa lalu oleh berbagai jenis gerakan rakyat. Memang benar bahwa banyak kota (besar) tidak menikmati kebebasan sipil. Tetapi kota-kota yang memilikinya, memperoleh kemerdekaan itu terutama melalui perjuangan dari sektor-sektor wilayah berpenduduk tertindas, itulah kalangan yang menentang kaum bangsawan yang mengklaim kota sebagai bagian dari Negara atau yang berusaha meleburkan kota kedalam Negara yang hendak mereka mapankan. Benar bahwa di banyak kota kecil dan besar, sektor-sektor paling terdidik dan paling ternyamankan memainkan peran hegemonik dalam memenangkan kemerdekaan ini. Meski begitu, mereka selalu takut terhadap sektor-sektor yang lebih tertindas, yang bi-

asanya mereka eksploitasi.

Kemerdekaan yang dicapai dengan sulit ini semakin menyusut seiring perjalanan waktu dan semakin terbatasi oleh kalangan yang ternyamankan tersebut. Meskipun demikian, kemerdekaan itu masih ada, baik dalam bentuk tinggalan yang tersisa atau dalam bentuk endapan yang merembes ke dalam budaya politik masa kini.

Gerakan munisipalis libertarian masa kini harus melakukan dua hal. Pertama-tama, ia harus berusaha mempertahankan kemerdekaan-kemerdekaan ini. Dan kedua, ia harus berusaha mengembangkannya, menggunakannya sebagai batu loncatan untuk memperoleh kemerdekaan sipil yang lebih besar dan menciptakan kemerdekaan-kemerdekaan sipil yang baru, yang akan meningkatkan partisipasi penduduk secara keseluruhan, terutama sektor-sektor berpenduduk tertindas.

Jadi manakala saya bilang kita harus mendemokratisasi republik, maka yang saya maksudkan adalah kita harus mempertahankan tampilan-tampilan demokratis yang telah dimenangkan oleh rakyat pada masa lalu tersebut. Pada saat yang sama kita harus melangkah lebih dari itu dan berusaha meradikalisasinya dengan cara memperluasnya untuk melawan Negara dan tampilan-tampilan Negara yang telah menginvasi kehidupan sipil. Saya tidak perlu diberitahu bahwa banyak aspek dalam kehidupan di kota besar dan kecil saat ini dikontrol oleh Negara-Bangsa atau oleh badan-badan kaki-tangannya, sebagaimana ditemukan pada tingkatan propinsi-propinsi dan pemerintahan negara bagian

yang berfungsi demi kepentingan Negara-Bangsa. Ya, memang ada terlalu banyak tampilan-tampilan Negara di setiap kota atau bahkan desa, apalagi di kota-kota besar di dunia saat ini.

Tetapi *poin*nya adalah bahwa disamping tampilan-tampilan Negara yang kuat ini dalam kehidupan sipil, toh juga ada ciri-ciri demokratis, atau ciri-ciri demokratis yang masih tersisa, dan ini harus diperluas dan diradikalisasi. Dengan meradikalisasinya, saya tegaskan, itulah satu-satunya cara bagi gerakan munisipalisme libertarian untuk bisa berkembang sebagai kekuatan ganda melawan Negara.

Jadi, slogan itu menggambarkan perjuangan berkelanjutan yang akan melibatkan gerak serentak atau simultan, mempertahankan sekaligus meradikalisasi ciri-ciri demokratis dan kemerdekaan sipil. Dua proses ini adalah bagian dari satu proses besar dalam berupaya, untuk pada gilirannya dengan kekuatan publik yang cukup masif akan berkonfrontasi melawan Negara, menggusurnya dan menggantinya dengan masyarakat komunis libertarian.

Kekasaran Realitas Sosial Hari Ini

(T): Pertanyaan selanjutnya adalah sehubungan dengan rintangan-rintangan konkrit yang menghalangi proses ini. Salah satunya adalah kapitalisme transnasional. Munisipalisme libertarian berupaya menghapuskan kapitalisme dan juga Negara-Bangsa. Tetapi banyak orang percaya bahwa kemampuan Negara Bangsa untuk menahan laju kapital sudah sangat berkurang, terutama berkaitan dengan

fenomena globalisasi. Jika Negara sekalipun, dengan seluruh kekuasaan besarnya, impoten dalam melawan kapitalisme, bagaimana bisa munisipal atau munisipal-munisipal terkonfederasi itu bisa berharap untuk melawannya? Munisipal itu kecil, dan munisipal-munisipal terkonfederasi juga kurang bersatu. Kawasan Wilmington dan lembah Delaware misalnya, adalah pusat-pusat DuPont. Apakah mungkin berpikir bahwa Wilmington bisa memunisipalisasi korporasi transnasional itu?

(J): Itu memang tidak akan terjadi dengan segera. Baiklah, ambil Wilmington misalnya. Meskipun ia adalah kota tempat DuPont bermarkas, itu tidak akan mencegah munculnya gerakan munisipalisme libertarian disana. Andaikan saya penduduk Wilmington, saya akan berusaha mengembangkan dan berpartisipasi dalam gerakan di sekitar Wilmington, dan itu akan menciptakan bermacam alternatif sebanyak yang bisa diciptakan, terlepas dari DuPont dan pabrik-pabrik raksasanya. Sementara mengenai pabrik-pabrik itu, ya, akhirnya gerakan tersebut harus mengambil alih ekonomi dari kaum borjuis. Tetapi saat itu terjadi, munisipal-munisipal akan berkonfederasi dan demokrasi *face-to-face* akan membuat mereka sangat kuat.

"Globalisasi" yang sedang kita bicarakan hari ini bukanlah hal baru. Ekspor kapital adalah topik sentral yang dibahas dalam buku Lenin mengenai imperialisme dan dalam karya Rudolf Hilferding dengan topik yang sama pada awal abad 20. Lenin menilai ekspor kapital merupakan ciri kunci

kapitalisme pada zaman dia. Hal yang terjadi sekarang adalah bahwa kapitalisme tengah melakukan apa yang secara logis sudah diduga akan diperbuatnya sesuai dengan teori ekonomi Marxis, yakni ekspor kapital dan menggerakkan semuanya ke seluruh dunia, lalu akhirnya mengindustrialisasi total planet ini.

Jadi, mobilitas kapital selalu ada—dan statistik memperlihatkan bahwa mobilitas luar biasa besarnya itu lebih terjadi di negara-negara tunggal ketimbang dari negara ke negara. Tetapi gagasan bahwa pabrik hanya datang memetik lalu pergi serta pindah kemanapun di dunia ini, sebagian besar telah dibesar-besarkan. Di Amerika Serikat, beberapa korporasi memindahkan pabrik-pabriknya dari wilayah yang kurang baik ke wilayah-wilayah lain di dunia seperti Meksiko. Tetapi kebanyakan dari mereka pindah ke wilayah selatan Amerika, dimana serikat-serikatnya lemah dan tenagakerjanya murah. Tentu saja sebuah pabrik tekstil di belahan Timur Laut Amerika bisa saja tutup dan pindah ke Malaysia. Tetapi kemungkinan besar tidak akan demikian. Ia akan pindah ke wilayah lain di Amerika dan mendapatkan keringanan pajak atau keringanan pembayaran lainnya.

Sementara untuk soal jika ada yang pindah ke Meksiko atau Malaysia—ya, pergerakan yang sedang saya bicarakan ini adalah pergerakan yang akan meluas melintasi batas-batas Amerika Serikat. Jika kapital akan berfungsi dalam cara internasional, gerakan munisipalis libertarian harus bersifat internasional juga. Sudah sejak lama dike-

tahui dalam gerakan-gerakan sosialis masa lalu—sejak *First International*–kelas buruh harus berfungsi secara internasional. Dan selama era *First International*, ada begitu banyak contoh para buruh dari berbagai negeri berbeda saling menolong satu sama lain. Anggota-anggota *International* di Belgia mencegah orang-orang yang ingin menggagalkan pemogokan untuk tidak menyeberangi perbatasan Perancis agar mereka tidak bisa menghancurkan aksi mogok yang dilakukan para buruh tambang. Para buruh Inggris mengumpulkan dana pemogokan untuk para buruh di Perancis, yang akhirnya menumbuhkan solidaritas diantara keduanya. Hal yang mengejutkan saya sekarang ini adalah bahwa betapa kalangan kiri—selain sisa-sisa semi Maois–telah banyak kehilangan rasa solidaritas internasionalnya. Singkatnya, gerakan munisipalisme libertarian harus bersifat internasional, sebagaimana memang seperti itulah mestinya setiap gerakan radikal saat ini. Dan keperluan akan gerakan yang internasional ini sangat vital, namun juga sekaligus yang memiliki akar kuat berbasis lokal.

Sementara tentang merosotnya Negara-Bangsa, saya pikir pengertian tentang itu sebagian besar seakan-akan benar. Negara-Bangsa tengah menjalani mutasi tertentu, terutama di Amerika, Jerman, Cina dan mungkin Jepang. Negera-negara ini menjadi dominan dalam konstelasi Negara-Bangsa. Misalnya, Jerman saat ini meraih keberhasilan penting dengan apa yang diupayakan oleh Wilhelm II pada 1914 dan Hitler pada 1939 melalui kekuatan angkatan bersenjata, yakni menjajah

wilayah-wilayah luas di Eropa dengan *Deutschmark*, dengan kapital Jerman dan industri, tetapi saat ini di bawah nama Serikat Eropa dan sebagian berkolaborasi dengan Prancis. Orang bisa mengatakan hal yang sama tentang Amerika Serikat di Amerika Utara, yakni menyempurnakan penjajahannya terhadap Kanada dan Meksiko. Dan Amerika juga masih memiliki ambisi-ambisi lain, ambisi yang telah dimilikinya selama dua abad, kembali ke Doktrin Monroe, yakni menjajah seluruh Belahan Bumi Barat. Inilah Negara-Negara Bangsa yang sedang kita bicarakan, bukan hanya korporasi-korporasi lintas-nasional. Negara-Negara-Bangsa imperialis kunci, dengan kata lain, telah menemukan cara baru dalam menjalankan fungsinya secara imperialistis, yakni melalui perang industri dan finansial.

(T): Tetapi bukankah tujuan NAFTA, GATT dan EU adalah memperkuat korporasi-korporasi itu, bukannya Negara-Bangsa? Akan tampak bahwa kekuasaan pemerintah Amerika menjadi lemah oleh NAFTA, misalnya, menurunkan kemampuannya untuk mengesahkan hukum-hukum lingkungan. Bukankah kesepakatan "perdagangan bebas" yang merupakan bagian dari "globalisasi" ini berusaha menghapuskan campur tangan Negara dalam aktivitas-aktivitas korporasi sehingga kapital bisa memperoleh keuntungan lebih besar?

(J): Ya, saya setuju sepenuhnya dengan Anda bahwa kepentingan-kepentingan korporasi memang banyak diberikan kemudahan. Dan saya tidak yakin

bahwa Negara-Bangsa menyesali kekuatan korporasi-korporasi itu untuk mengelak dari hukum-hukum domestik tertentu. Negara borjuis selalu melayani kapital. Catat dengan baik, bahwa akhir-akhir ini administrasi Clinton telah menjatuhkan Delaney Clause, hukum yang menjauhkan *carcinogen* dari makanan. Saya memberi perhatian pada pestisida dalam makanan empat puluh tahun lalu, ketika anggota kongres Delaney menjalani persidangannya dan sekarang semua itu sedang diselesaikan.

Jadi, adalah komentar menyedihkan bahwa banyak kalangan yang menyebut diri kiri kini berpaling ke Negara-Bangsa borjuis untuk menebus kapital! Kekonyolan kalangan kiri itu telah begitu jauh sehingga orang seperti Chomsky, yang menyatakan diri sebagai seorang anarkis, ingin memperkuat atau setidaknya mendukung Negara tersentralisasi dalam menghadapi tuntutan-tuntutan "mewakilkan kekuasaan" kepada pemerintah negara bagian, seolah-olah Negara tersentralisasi itu bisa dimanfaatkan untuk melawan korporasi-korporasi, yang justru selalu dibantunya dalam jangka waktu yang lama!

Tetapi persoalan yang saya perhatikan adalah apa *sih* sebetulnya yang sedang terjadi dengan kekuatan-kekuatan mendasar Negara-Bangsa, terlepas dari bermacam kesepakatan internasional? Dengan alasan "memerangi obat-obat terlarang," Amerika benar-benar mengirimkan helikopternya—militernya, mungkin–ke Meksiko, untuk menekan kelompok-kelompok seperti Zapatista dan yang lainnya. Amerika sedang meningkatkan kekua-

tan polisi Mexico dalam menekan kaum petani. Amerika biasa melakukan hal-hal seperti itu dengan sembunyi-sembunyi, seperti ketika mensubsidi kaum kontra di Nikaragua. Namun sekarang Amerika bisa mengembangkan kekuasaan ini secara terbuka. Negara-negara Eropa juga memiliki lebih banyak kebebasan menggunakan kekuatan polisi mereka untuk membantu negara-negara lain dalam tindakan yang pada dasarnya kontra-revolusioner.

Sehingga, tak dapat disangkal lagi, sementara AS “mengkompromikan” hukum-hukum lingkungannya sendiri (dimana Negara tersebut dipaksa mengadopsinya dengan malas oleh kaum *environmentalis*), AS masih membantu korporasi-korporasi itu mengeksploitasi tenaga kerja asing dengan bayaran yang lebih murah, yang memang telah dilakukan oleh korporasi-korporasi itu, dan Negara mempunyai lebih banyak kekuatan polisi domestik yang tidak dimiliki sebelumnya. Lihatlah RUU anti-terorisme yang akhir-akhir ini telah disahkan oleh administrasi Clinton. Ini memungkinkan lebih banyak penyadapan telepon dan bahkan mengancam *habeas corpus* dalam segala hal, sebuah hak kuno pada abad pertengahan di Inggris. Jadi ketika kekuasaan lebih besar tengah diberikan kepada korporasi-korporasi dalam NAFTA dan sebagainya, Negara juga menikmati kekuasaan internal dan lebih terbuka daripada yang mereka miliki sebelumnya.

Negara pada akhirnya selalu berusaha mengembangkan pasar bagi korporasi-koporasi. Tak ada orang yang meragukannya. Ada bahaya

besar dalam proses meningkatkan taraf kekuasaan korporasi-korporasi itu, juga ekspor kapital dan ekspansi pasar asing. Orang bisa dengan mudah melupakan peran besar yang dimainkan Negara, dan kekuasaan besar yang ditumbuhkan Negara dalam proses mengembangkan kekuasaan korporasi-korporasi tersebut. Keduanya bisa saling berinteraksi satu sama lain. Inilah saatnya kita berbicara tentang totalitas Negara yang ada sebagai Negara-Negara borjuis, bukan hanya Negara-Negara-Bangsa.

(T): Bagaimana munisipal-munisipal terkonfederasi menjaga diri agar tidak menjadi pelayan korporasi-korporasi itu seperti yang telah terjadi pada Negara?

(J): Pertama-tama, munisipal-munisipal terkonfederasi bisa berusaha memobilisasi rakyat arus bawah. Mereka bisa berusaha menyatukan diri dalam sebuah gerakan, kendati gerakan tersebut tidak terlalu jauh. Kedua, munisipal-munisipal terkonfederasi bisa berusaha mengajukan berbagai alternatif, secara materil sekaligus secara politis, untuk mengganti kapitalisme. Sampai taraf tertentu dimana gerakan itu tumbuh, mereka bisa berusaha memobilisai opini publik sampai tingkat tertentu yang secara umum menghindari kapasitas partai—terutama pada saat begitu banyak sinisme mengenai politik –untuk secara aktif meredam ekspansi, katakanlah DuPont ke luar negeri.

Sementara saya tidak melihat adanya alternatif dalam membentuk sebuah partai seperti partai

Hijau yang mencalonkan Ralph Nader sebagai presiden. Meskipun tampaknya ia punya radikalisme, ia ingin beroperasi sepenuhnya dalam sistem yang ada. Untuk saya sendiri, saya berbicara tentang membentuk secara radikal bermacam alternatif itu bagi sistem sekarang. Saya berbicara tentang menegakkan budaya politik terpisah, cara-cara berorganisasi, cara-cara melakukan perubahan, baik secara politis maupun secara ekonomis, bukan hanya bagi Delaware tetapi juga bagi seluruh Amerika atau Kanada atau negara manapun, dimana orang-orang yang beroperasi dalam kerangka sosial masa kini hanya berupaya memoderatkan Negara, memberinya "wajah manusia." Karenanya, saya tambahkan, mereka membuat Negara itu menjadi lebih bisa diterima secara sosial.

Saya akan tambahkan hal lain. Jika sebuah partai yang kelihatannya radikal menjadi terkorupsi oleh parlementarisme, yang secara historis telah menjadi kasus setiap partai yang saya ketahui, maka partai tersebut, partai yang sangat parlementer tersebut akan berusaha keras memoderatkan situasi yang ada dan dalam kenyataannya akan memudahkan elemen-elemen paling buruk dalam masyarakat untuk menemukan jalannya.

Saat ini tidak ada satu pun yang tampil sebagai gerakan munisipalis libertarian, kendati belakangan ini banyak pembicaraan tentang demokrasi lokal di berbagai rupa lingkaran aktivisme. Toh begitu, hanya gerakan seperti itulah satu-satunya jalan lain yang kita miliki untuk menggantikan jalur parlemeter, jalur yang pasti akan mengakibat-

kan membludaknya kompromi dan pada akhirnya, dalam jangka panjang, akan bersekongkol dengan kekuasaan korporasi dan Negara sekaligus. Tentu saja, selain itu kita bisa saja bergabung dengan kaum anarkis hedonis dengan cara berlari-lari telanjang di hutan dan tidak berbuat apa-apa selain melestarikan ego kita.

(T): Persoalan lain bagi pendekatan ini sekarang, atau pendekatan apapun, adalah pertumbuhan kota-kota besar menjadi megakota. Anda telah menjelaskan bahwa kota-kota besar bisa didesentralisasi dan Anda mengemukakan pembedaan antara desentralisasi institusional dengan desentralisasi fisik. Tetapi megakota-megakota saat ini, seperti Rio de Janeiro, Jakarta, Shanghai dan Kairo, populasinya tengah meningkat pesat ketika kaum petani akhir-akhir ini bergerak pindah dari daerah bukan kota menuju kota-kota itu dengan berbagai alasan. Megakota-megakota ini masih bisa berkembang lebih pesat lagi dalam tahun-tahun mendatang, sampai mencapai angka populasi 15 atau 20 juta jiwa. Bisakah mereka dikomunalisasi dengan cara yang telah Anda gambarkan?

(J): Saya harus mengatakan bahwa di kota-kota raksasa tersebut, orang akan memiliki kesulitan terbesar dalam menciptakan gerakan dan budaya munisipalis libertarian. Tapi itu bukan berarti tidak mungkin. Rakyat masih memiliki kepentingan komunal bersama dalam segala hal, dari mulai masalah pembuangan limbah sampai pendidikan, dari

polusi udara sampai kemacetan, dan sebagainya. Itu tidak akan berubah. Dan mereka masih punya alasan untuk berusaha mengubah struktur fisik lingkungan kecil mereka. Sebuah budaya sipil bersama masih bisa dikembangkan.

Fenomena sangat penting adalah bahwa manakala daerah-daerah urban mencapai ukuran besar, mereka mulai mencipta-ulang dirinya menjadi kota-kota (besar) yang kecil. Saya punya keraguan kuat bahwa 20 juta orang dapat hidup dalam sebuah megalopolis tanpa mencipta-ulang pusat-pusat urban yang lebih kecil dan akhirnya membentuk konglomerasi kota-kota besar *(city)* yang relatif lebih kecil.

Dan ini benar-benar terjadi saat ini, meskipun ini diabaikan dalam banyak diskusi mengenai urbanisme. Di Amerika—dan saya lebih mengenal negara ini ketimbang negara-negara lainnya di dunia–megakota-megakota Amerika, yang secara fisik terlihat seperti konglomerasi-konglomerasi urban yang sangat besar yang juga terbentuk di tempat-tempat lain, pada kenyataannya, secara internal menyusut menjadi pusat-pusat kota yang kian lama kian kecil. Daerah pinggiran dalam pengertian tradisional, komunitas-komunitas *bedroom* yang merupakan tempat-tempat membosankan, kantong-kantong homogen *mediocrity* kelas-menengah, banyak diantaranya saat ini yang tengah berubah dan semakin berubah menjadi nyaris kota-kota tunggal dalam pengertian memiliki sektor-sektor kota dan industri tersendiri sekaligus juga daerah-daerah perdagangan. Ditempat-tempat yang selama

bertahun-tahun tidak ada apapun selain wilayah pemukiman, sebuah pengelompokan-ulang sedang terjadi, yang didalamnya bermunculan gedung-gedung, gedung institusional, sekolah, gedung peme rintahan dan bahkan jenis-jenis industri baru. Orang tidak lagi pergi ke “pusat kota” lama. Mereka sekarang menuju ke “sektor-sektor kota” baru yang telah dicipta-ulang di daerah pinggiran kota yang mereka tempati. Sehingga komunitas-komunitas yang pada awalnya terlelap itu berubah menjadi kota-kota (kecil) yang relatif berkelanjutan.

(T): Tetapi bukankah kota-kota (besar) yang lebih kecil ini seringkali menjadi benteng bagi hak-hak istimewa? Kota-kota itu terdiri dari orang-orang yang melepaskan diri dari kemiskinan di pusat-pusat kota dan di kota-kota asal mereka sendiri. Mereka membeli angkatan kepolisian sendiri, sistem sekolah sendiri. Para penduduknya cukup kaya untuk bisa membiayai sistem komunitas mereka sendiri. Dan para penduduk itu memasang gerbang-gerbang di sekitar kota yang telah diprivatisasi ini untuk mencegah masuknya orang-orang yang “tidak diinginkan.”

(J): Tentu saja banyak diantara kota-kota (besar) baru itu yang merupakan *ghetto* (pemukiman golongan tertentu) yang memiliki hak istimewa. Pada kenyataannya, saya telah meramalkan beberapa dekade lalu, dalam buku saya *The Limits of the City*, bahwa akan ada kecenderungan menuju sejenis *ghettoization*, yang di dalamnya golongan kaya

akan memisahkan diri dari golongan miskin. Kita tidak bisa mengabaikan kemungkinan bahwa ghetoisasi bisa menuju pada perkembangan yang sangat reaksioner.

Tetapi kita masih berada dalam proses transisi. Kita tidak tahu akan mengarah kemana penggumpalan kota atau *nucleated cities* ini dalam jangka panjang. Tidak semua dari mereka mempekerjakan angkatan kepolisian terpisah atau mengembangkan sistem pendidikan independen. Tidak semua dari mereka merupakan yurisdiksi terprivatisasi dengan dinding-dinding yang menutupinya. Itu terjadi pada sejumlah kasus dan memang sangat menggelisahkan, namun penggumpalan atau nukleasi ini kecil kemungkinannya untuk terjadi dimanapun.

Di sisi lain, bahkan kantong-kantong atau enklave wilayah ini membuka setaraf tertentu nukleasi yang akhirnya bisa dimanfaatkan dalam pengertian progresif. Tugas kita adalah menguji potensi-potensi yang ada yang, dalam krisis sosial, bisa menjadi peluang bagi pendekatan munisipalis libertarian. Apa yang sekarang ini mungkin merupakan kota yang memiliki hak istimewa, suatu hari nanti mungkin akan merasakan penggumpalan ekonomi sedemikian rupa sehingga kota itu menjadi kota yang hampir selalu memberontak. Sebuah komunitas yang terlindungi secara total, yang diterobos oleh kekuatan-kekuatan ekonomi, lingkungan dan budaya dalam masyarakat, bisa saja berubah menjadi kota radikal. Masa depan kota-kota (besar) ini tidak bisa dihalangi oleh gerbang-gerbang terkunci yang memisahkan mereka dari wilayah-wilayah

yang kurang memiliki hak istimewa.

Dinyatakan lebih lugas, kita akan memiliki sosialisme sekaligus juga barbarisme. Tidak diragukan lagi bahwa barbarisme memang dimungkinkan. Dalam kenyataannya, di banyak wilayah kehidupan, barbarisme sudah terlalu berkembang. Tetapi masih ada banyak wilayah kehidupan dimana barbarisme tidak berkembang terlalu jauh. Saya juga tidak menafikan adanya kemungkinan kegagalan. Tetapi jika ada landasan harapan, maka landasan harapan itu terletak dalam pendekatan munisipalis libertarian yang mengakui transisi yang mungkin terjadi, bahkan di sebagian wilayah yang paling terjaga dari wilayah-wilayah ternukleasi atau tergumpalkan ini.

(T): Satu lagi persoalan yang mungkin dihadapi oleh gerakan munisipalisme libertarian hari ini adalah media massa. Hari ini, media tengah mendesakkan suatu efek yang melemahkan semangat manusia, menyeretnya ke tingkat yang paling rendah dan mengakibatkan keterpecahan nurani. Mereka mempromosikan masyarakat konsumen, membujuk kita dengan segala cara yang memungkinkan agar kita berbelanja barang-barang yang tidak kita butuhkan. Bagi orang-orang yang berusaha membentuk budaya politik yang menghargai komitmen bagi kebaikan bersama dan semata-mata bukan bagi maksimalisasi kesenangan individu dan kepentingan diri, bagaimana kita bisa melawan tekanan budaya yang begitu besar ini?

(J): Sebuah gerakan munisipalis libertarian akan

bekerja pada tingkat kedekatan personal yang diharapkan berada diluar batas-batas yang bisa disentuh media. Satu hal yang harus dipahami adalah bahwa sampai taraf dimana media menjadi semakin terkonsentrasi, mereka akan menjadi kekuatan yang mengalienasi. Namun sekarang ini semakin banyak orang yang membenci media—institusi-institusi berjarak yang tampaknya sudah mengatur hidup mereka. Sembari memiliki kekuatan besar atas opini publik, media juga mengecewakan berjuta-juta orang. Pada kenyataannya, banyak orang yang muak dengan media.

Gerakan partai ketiga pada pemilu tahun 1996, betapapun lemahnya, tingkat abstain dalam *voting* yang belum pernah terjadi sebelumnya adalah bukti bahwa banyak orang di Amerika tidak menemukan, dalam semua organisasi yang ada dalam Negara, respon berarti bagi persoalan-persoalan mereka. Mereka bosan dengan tontonan media, beserta upaya-upaya media untuk memperlakukan mereka layaknya manusia yang tidak dewasa dan merendahkan derajat mereka. Cukup dengan menyimak reaksi rakyat terhadap rapat besar atau konvensi partai Republik dan Demokrat pada 1996, kita pun tahu bahkan media telah menyatakan bahwa mereka tidak akan lagi meliput pertemuan-pertemuan tersebut jika pertemuan itu jelas-jelas diorganisasikan untuk televisi. Ada sentimen yang tumbuh menghadapi badai media terkonsentrasi ini dan gerakan munisipalis libertarian bisa mengambil keuntungan dari alienasi yang dilakukan terhadap publik ini.

Pada kenyataannya, pendekatan munisipalis libertarian akan menjadi satu-satunya jenis yang diharapkan bisa menandingi kekuatan terkonsentrasi yang dimiliki media ini, karena pendekatan tersebut berusaha menjangkau rakyat pada tingkat komunitas mereka dan memberi mereka cara untuk menandingi dan menentang pengaruh media, dengan cara bekerja pada tingkat interaksi *face-to-face*.

(T): Masih ada persoalan lainnya saat ini, yakni persoalan waktu. Rakyat biasa—kalangan yang paling bisa diberdayakan oleh munisipalisme libertarian, sebagai warga yang menentang elite–kian lama semakin harus menjalani dua dan bahkan tiga pekerjaan sekaligus hanya untuk bisa melangsungkan hidupnya. Mereka tidak punya cukup waktu bahkan untuk melihat keluarganya. Bagaimana kita bisa mengundang mereka agar hadir dalam rapat publik jika untuk membacakan dongeng pengantar tidur bagi anak mereka saja, mereka harus susah payah berkompromi dengan waktu yang mereka miliki?

(J): Jika orang ingin menjadi manusia ketimbang menjadi organisme yang sekedar bertahan hidup, saya sarankan bahwa mereka harus membuat sejumlah kompromi. Jika orang saat ini siap menerima cara hidup yang mengharuskan mereka untuk bekerja sepanjang waktu kecuali jam-jam tidur, agar bisa mendapatkan nafkah, maka saya katakan bahwa saya tidak mengerti apakah yang mendorong

mereka untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya, selain naluri kebinatangan untuk bertahan hidup. Telah menjadi salah satu tuntutan paling menantang bagi filsafat Barat, terutama filsafat Hellenis, bahwa orang harus berusaha keras untuk merealisasikan dirinya sebagai manusia. Jika mereka tidak ingin melakukannya, jika mereka benar-benar tidak mampu melakukannya, maka orang lain yang bisa melakukannya mesti bertindak bagi mereka atas kepentingan mereka sendiri untuk sementara waktu, tanpa sikap merendahkan diri, tanpa menuntut hak-hak istimewa karena telah melakukannya. Ketidakadilan yang memaksa begitu banyak orang untuk bekerja selama berjam-jam harus diperbaiki sehingga mereka pada akhirnya bisa bebas untuk datang ke rapat-rapat majelis.

Saya pikir, dalam masyarakat rasionalis, kemajuan teknologi seperti otomatisasi, tak lain akan menghilangkan kerja berat, tetapi itu ada di masa depan. Saat ini, orang harus mengerahkan upaya moral agar bebas, agar punya waktu—dan memang itu tampaknya butuh perjuangan keras–untuk menghadiri pertemuan-pertemuan dan merebut kembali kendali atas kehidupan mereka.

Identitas dan Universalitas

(T): Anda seringkali merujuk Athena kuno dan New England kolonial sebagai teladan sejarah bagi demokrasi langsung. Tetapi Athena kuno benar-benar patriarkal dan menjalankan perbudakan. Begitu juga kaum Puritan New England, yang juga menggantung para anggota Quaker dan mem-

perbudak rakyat pribumi. Bukankah masyarakat seperti ini sudah tercemari oleh seksisme dan rasisme, mengeksklusifkan kaum pria kulit putih, sehingga mereka tidak bisa digunakan sebagai model masyarakat bebas manapun saat ini?

(J): Terlepas dari kritik konsisten yang saya terima dalam hal ini, saya tidak pernah menguatkan Athena kuno dan New England kolonial sebagai "model." Tidak ada satu pun contoh-contoh sejarah yang saya sebutkan di sini atau dimanapun, yang merepresentasikan sebuah "model" bagi gagasan munisipalis libertarian—tidak Athena kuno, tidak juga berbagai kota dan konfederasi kota di abad pertengahan–dan bahkan tidak pula seksi-seksi Paris revolusioner dan rapat-rapat kota New England. Saya tegaskan, tidak ada satu pun yang mencerminkan citra ideal yang bisa atau mesti dicapai di masa depan.

Semuanya secara signifikan dicemari oleh kelemahan-kelemahan penting, terutama pembagian kelas, antagonisme, kerapnya peminggiran terhadap kalangan yang tidak memiliki properti dan dinafikannya kaum perempuan dari aktivitas publik. Eklesia Athena tidak mengakui para penduduk asing, kendati sebagian diantara mereka telah mendiami kota itu selama beberapa generasi. Mereka memiliki konsep kewargaan yang tertutup. Terkadang rakyat bertindak kasar dan arogan dalam eklesia. Warga dengan mudah dipengaruhi oleh para orator dan pemimpin politik. Dan masyarakat mereka jauh dari menjadi masyarakat yang melampaui keterbatasan *(post-scarcity)*. Dalam tidak adanya kebe-

basan dari kerja berat, sektor-sektor penduduk yang bekerja paling keras terlalu lelah untuk bisa pergi ke majelis.

Jadi, tidak ada model dimanapun tentang masyarakat munisipalis libertarian. Namun, yang terpenting, masyarakat munisipalis libertarian akan berupa masyarakat rasional. Kendati banyak diantara budaya-budaya yang menghasilkan institusi-institusi ini bahkan tidak rasional. Orang-orang Athena menambahkan urusan-urusan keagamaan ke dalam majelis-majelis mereka, sehingga agenda mereka terbagi antara yang keagamaan dan yang sekuler.

Dan banyak cacat lainnya, kendati semuanya itu telah dijalankan akhir-akhir ini oleh Cornelius Castoriadis, yang mengklaim bahwa para budak terutama adalah properti milik segelintir elite kecil dan kaya. Ini semua tidak benar, menurut Hansen.[1]Saya akan menjadi orang terakhir yang menganggap kota-kota besar ini sebagai model. Kota yang saya impikan sebagai kota yang sepenuhnya rasional, bebas dan ekologis itu belum terwujud. Seluruh rujukan saya kepada kota-kota historis dirancang hanya untuk menunjukkan institusi-institusi hebat di masa lalu yang layak mendapat perhatian terdalam dari kita. Saya memuji kota-kota itu bukan karena apa yang telah mereka hasilkan pada masa itu, melainkan karena apa yang telah mereka ciptakan secara historis, dan karena tradisi yang mereka tegakkan yang tetap belum berakhir sampai sekarang, sebuah

1. ogens Herman Hansen, *The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes: Structure, Principles and Ideology*, terj. J.A. Crook (Oxford: Blackwell, 1991).

tradisi yang oleh munisipalisme libertarian mungkin bisa dibawa menuju perwujudannya yang rasional.

(T): Beberapa kawan di bagian dunia lain pernah mengajukan keberatan dengan dirujuknya rapat-rapat kota New England, karena ini lebih merupakan budaya Amerika ketimbang budaya mereka sendiri. Atau mereka merasa bahwa majelis-majelis seksi lebih merupakan budaya asli Perancis dan karenanya tidak relevan dengan daerah mereka. Bahkan demokrasi tampak asing bagi bermacam tradisi di berbagai belahan dunia. Memang demokrasi itu berasal dari Eropa. Bagaimana "gagasan-gagasan" asing ini bisa dibuat relevan dengan rakyat di berbagai belahan dunia lain, atau bisakah mereka? Haruskah mereka justru menengok tradisi-tradisi asal kendati mungkin tidak benar-benar demokratis?

(J): Perhatian saya terhadap institusi-institusi demokratis tidak mengkhususkan diri pada budaya-budaya darimana institusi itu berasal. Jadi, bukan karena saya orang Yunani ketika saya berbicara tentang eklesia Athena. Saya bukan orang Yunani. Juga bukan karena saya orang Prancis ketika saya berulangkali merujuk nilai-nilai dalam mempelajari seksi-seksi Paris. Saya juga bukan orang Spanyol kendati saya menyebut-nyebut *comuneros*. Dan saya bukan orang berlatar belakang New England. Saya tinggal di sini hanya sekitar sepertiga dari usia saya, yang kebanyakannya dihabiskan di New York City. Tetapi rapat kota adalah kasus luar biasa dalam de-

mokrasi langsung. Haruskah saya mengabaikannya karena saya tinggal di New England sekarang?

Pada 1960-an, lebih jelasnya lagi, saya sangat menaruh perhatian tentang memulai kerja dari tradisi Amerika secara spesifik. Tetapi pendekatan itu tidak timbul dari chauvinisme Amerika jenis apapun dalam diri saya, meski saya telah dituduh seperti itu. Saya menentang "Kiri Baru" yang berbicara kepada orang Amerika berdasar pada Marxisme Jerman, Leninisme atau Stalinisme Rusia dan Maoisme Cina. Tapi bukan untuk mengatakan bahwa Marxisme itu tidak relevan dengan Amerika Serikat, tidak sama sekali. Melainkan dalam oposisi yang dapat dimengerti yang mereka jalankan terhadap imperialisme Amerika, mereka benar-benar memuliakan totalitarianisme Cina dan Vietnam. Hari ini, banyak diantara mereka yang lupa akan kerusakan yang telah mereka akibatkan, jika kita melihat perkembangan akhir-akhir ini—perkembangan yang sungguh bisa diramalkan.

Ketika merujuk Athena, New England dan seksi-seksi Paris, saya berusaha menunjukkan bahwa kalangan libertarian-kiri memiliki contoh-contoh institusi kebebasan yang, dalam sebagian kasus, contoh-contoh itu berada tepat di depan pintu mereka. Mereka tidak mesti melihat ke luar negeri, bahka tidak ke Asia Tenggara, juga Cina.

Institusi-institusi itu sendirilah yang senantiasa menjadi fokus utama saya, bukan romantisasi terhadap kota-kota itu. Apa titik pentingnya merujuk eklesia Athena atau seksi-seksi Paris jika saya seorang chauvinis Amerika? Jelas-jelas saya mena-

ruh perhatian pada struktur dan kemungkinan terwujudnya institusi-institusi ini, dan bukan hal yang begitu penting bahwa mereka adalah bagian dari tradisi yang melengkapi pemikiran Amerika.

Jika manusia berpotensi rasional, sebagaimana dikatakan Aristoteles, maka rasionalitas institusilah yang harus diperhitungkan, bukan tradisi. Saya sama sekali tidak menyesal pergi ke tempat-tempat yang tidak memiliki tradisi demokratis, baik secara ideologis maupun institusional, dan berusaha menyampaikan kebaikan-kebaikan yang bisa didapat dari masyarakat yang benar-benar demokratis. Tugas saya adalah berfungsi layaknya juru propaganda dan agitator, dan berbicara kepada orang-orang tentang sesuatu yang baru, bukan yang lama. Bahkan mempertentangkan yang baru dengan yang lama, berupaya menerangkan mengapa-mengapanya atas dasar rasional yang kuat, bukan dasar-dasar tradisional. Mereka harus membuang ssitem lama dan mengadopsi sistem baru. Upaya keras seperti itu akan membantu mengimbangi sampai taraf dimana penindasan rakyat telah sangat berakar bahkan dalam pikiran mereka sendiri. Saya kira saya tidak berpatron atau elitis. Ada tradisi-tradisi yang sangat ingin kita hapuskan, seperti, "penyunatan" perempuan atau kewajiban memakai cadar bagi perempuan, atau interpretasi mitis terhadap suatu hal yang sebenarnya persoalan sosial. Tradisi-tradisi itu menyamarkan dan memistifikasi kekuasaan elite-elite yang ada.

Saya, sebagai seorang Yahudi, juga tidak melihat adanya sesuatu yang memperkaya atau

bermanfaat ketika kembali ke tradisi-tradisi Kitab Yahudi, yang benar-benar nyaris dipenuhi pertumpahan darah. Saya bisa bergerak melampaui "tradisi" saya sendiri dan memilih sebagian dan membuang sebagian lainnya. Tetapi saya tidak menganut atau menolaknya hanya karena tradisi itu bagian dari latar belakang etnis saya. Inti maksud saya senantiasa tetap, bahwa jika orang berpotensi menjadi makhluk rasional, mereka harus berusaha hidup dalam masyarakat rasional, terlepas dari tradisi mereka. Saya pikir bahwa manusia telah menjalani sepuluh ribu tahun pendidikan untuk bisa keluar dari primitivisme, tradisionalisme dan adat yang seakan-akan adalah akar budaya kita, dan kita tidak akan mencoba membangkitkan kembali tradisionalisme.

(T): Terkadang ketika rakyat membentuk kelompok-kelompok munisipalis libertarian, mereka menggelar rapat dalam majelis rakyat di lingkungan sekitar mereka, tetapi tidak banyak orang yang datang. Seorang pengunjung dari Moskow belakangan memberitahu kita tentang persoalannya ini. Soal ini cukup mengecilkan hati. Apa yang akan Anda katakan kepada orang-orang ini?

(J): Hargai orang-orang yang hadir. Hargai mereka. Cobalah didik mereka. Ingatlah bahwa dalam masyarakat munisipalis libertarian sekalipun, majelis-majelis tidak akan sepenuhnya dihadiri. Bahkan tidak pula Athena kuno yang berdasarkan pada partisipasi universal. Orang-orang Athena beroperasi

dalam suatu kondisi yang sangat menguntungkan bagi demokrasi dan memiliki budaya demokratis, tetapi meskipun begitu, kuorum yang mereka bentuk hanya dihadiri 5.000 orang, jauh dari potensi warga yang berjumlah 30.000 orang. Rakyat yang hadir hanya seperenam jumlah total. Dengan kata lain, mereka puas jika sudah bisa mengajak satu di antara enam orang warga untuk pergi ke eklesia.

Dan seksi-seksi Paris yang paling revolusioner adalah nyala energi yang menakjubkan, tetapi terlalu rumit bahkan bagi penduduk minoritas seksi. Rapat-rapat mereka seringkali hanya dihadiri oleh lima belas atau dua puluh orang dari seribu atau dua ribu populasi yang ada. Dan biasanya hanya dalam masa-masa krisis orang datang menghadiri rapat majelis seksi, itupun jauh diluar jumlah yang semestinya hadir. Hadirin dalam majelis-majelis seksi tampil berupa-rupa macam, tergantung pada isu apa yang ada dalam agenda.

Rakyat mungkin memutuskan menghadiri atau tidak menghadiri rapat majelis, bergantung pada perhatian personal mereka, perhatian pribadi, tingkat kepentingan, adanya waktu senggang, agenda, tingkat perkembangan sosial politik diri mereka sendiri, keadaan sakit, atau sebab apa pun lainnya. Seorang guru-filsuf, seorang *sofis* yang saya kenal dari New Orleans, John Clark, mengklaim bahwa kecuali semua orang menghadiri majelis, semuanya itu tidak demokratis. Dia melihat populasi total kota besar saat ini, memperhitungkan berapa banyak orang yang tinggal dalam tiap lingkungan terkecil dan mengambil kesimpulan bahwa sejumlah besar

orang akan dibagi-bagi ke setiap majelis, katakanlah, lima ribu atau sepuluh ribu. Dan mereka mesti datang agar semuanya ini bisa menjadi demokrasi yang sesungguhnya. Tetapi lihat, katanya, terlalu banyak jumlah mereka bagi sebuah demokrasi. Sehingga munisipalisme libertarian memang mustahil, itulah argumennya. Seolah-olah dia menggenggam kota berpenduduk delapan juta dan memperhitungkan berapa banyak orang dari setiap pojokan kecil bakal datang ke majelis.

Dengan asumsi tersebut berarti bahwa setiap bayi, setiap anak, setiap pasien Alzheimer harus hadir jika apa yang kita inginkan adalah memenuhi syarat bagi sebuah majelis rakyat. Ini menjadi logistikal *sofisme* yang berakibat menyamarkan ketimbang menjelaskan. Hal terpenting tentang majelis-majelis rakyat dalam masyarakat munisipalis libertarian, yang pada masanya pernah didesen tralisasi secara fisik sekaligus secara institusional —dan maksud saya bukan pertanian-pertanian terpencar di hamparan ladang-ladang luas–ketika semua ini akhirnya telah dicapai, adalah sebuah mukjizat jika mereka semua yang bahkan secara fisik mampu datang ke majelis, bahkan mayoritas, menghadiri majelis itu.

Yang terpenting adalah bahwa kebebasan untuk hadir itu ada. Kebebasan ini berperan sebagai pelindung dari kecenderungan otoriter atau hierarkis. Pintu-pintu terbuka dan akan sangat menghina jika rakyat dipaksa hadir. Upaya semacam itu bukan hanya tidak realistis tetapi juga merupakan ejekan terhadap kebebasan manusia,

yakni hak untuk tidak hadir sebagaimana hak untuk hadir. Titik penting yang saya ajukan adalah bahwa majelis-majelis rakyat itu akan terbuka bagi semua orang dengan usia tertentu yang tinggal dalam munisipal, tanpa pembatasan dan bahwa rakyat akan dianjurkan hadir dan diberitahu tentang topik yang akan didiskusikan, sehingga mereka bisa memutuskan apakah mereka ingin terlibat dalam melakukan demokratisasi. Saya akan sangat terkejut jika setiap orang dalam komunitas yang mampu hadir ternyata memang hadir, bahkan untuk sebuah rapat dimana keputusan-keputusan terpenting dibuat.

Hal penting lainnya: munisipalisme libertarian bukanlah semata-mata gerakan yang menciptakan majelis-majelis rakyat. Ia adalah suatu proses menciptakan budaya politik. Di banyak tempat, gerakan munisipalis libertarian tidak akan sukses selama beberapa tahun—tidak bisa saya katakan berapa banyak–dalam upaya meyakinkan rakyat bahwa gerakan tersebut menawarkan solusi bagi kebuntuan politik dan ekonomi saat ini. Munisipalisme libertarian adalah proses dan ia adalah gerakan yang berusaha mengembangkan proses ini, memperluasnya, menarik perhatian rakyat, bahkan sebelum institusi-institusi munisipalis libertarian didirikan. Perjuangan mesti berlanjut, dengan pasti melewati tahun-tahun kehidupan saya yang masih tersisa.

Jadi, orang tidak mesti bingung dengan masyarakat munisipalis libertarian, meskipun nyata-nyata tujuan gerakan tersebut adalah menciptakan masyarakat. Orang juga tidak perlu bingung dengan proses pendidikan, dengan keberhasilan yang cepat

di sini dan sekarang.

Saya meramalkan: jika munisipalis libertarian berhasil mendirikan majelis-majelis rakyat dalam bentuk apapun, dalam komunitas-komunitas tertentu, para pendiri majelis itu sendiri akan menjadi kelompok minoritas, karena ada upaya yang akan didesakkan oleh kepentingan-kepentingan lain, termasuk kepentingan kelas, dengan tujuan mengambil alih majelis. Sejarah harus berpihak pada kita. Banyak pertimbangan keliru akan diambil, banyak kegagalan akan terjadi, banyak tempat pengasingan akan dibutuhkan dan tahun-tahun akan berlalu ketika terlihat tidak akan ada respon positif terhadap propaganda gerakan tersebut. Tapi apanya yang baru tentang hal itu? Perlu waktu tujuh puluh tahun bagi gerakan anarkis untuk bisa mengakar di Spanyol. Dan para revolusioner Rusia perlu berusaha selama hampir satu abad untuk bisa mengubah kesadaran dan akhirnya menggetarkan rakyat Rusia sampai titik dimana mereka siap menghancurkan otokrasi Tsar.

Satu persoalan yang saya miliki hari ini adalah bahwa rakyat menginginkan hasil segera atau serba instan—inilah salah satu penyakit utama generasi. Pergolakan pada 1960-an, beserta seluruh cita-cita mulianya, mengalami kegagalan sebagian karena kaum muda radikal menginginkan kepuasan yang cepat dan keberhasilan yang sensasional. Jika rakyat hari ini berpikir bahwa politik harus seperti mesin keliling, dimana Anda memasukkan sesuatu dan lantas keluar permen, jika mereka menganggapnya seperti ini, maka saya akan menganjurkan

agar mereka kembali ke kehidupan pribadi. Rakyat harus dipersiapkan, ditempa, juga memiliki karakter. Mereka sendirilah yang harus mewujudkan budaya politik sesuai karakter mereka, untuk menciptakan gerakan yang mungkin suatu hari nanti akan mengubah masyarakat sedemikian rupa, sehingga menjadi libertarian, komunalis dan politis dalam arti kata terbaik.

Sifat Gerakan

(T): Anda telah mengkritik upaya-upaya ekonomi alternatif, seperti koperasi, dengan mengatakan bahwa pada akhirnya semuanya itu bisa berubah menjadi masyarakat kapitalis. Tetapi ekonomi termunisipalisasi Anda pasti akan diorganisasikan sepanjang garis-garis ko-operatif, sebagai lawan bagi garis-garis kompetitif. Bentuk-bentuk ekonomi alternatif mungkin akan sangat dibutuhkan disana, misalnya, kooperasi-kooperasi yang dimiliki secara munisipal. Ketika Anda mengkritik koperasi, apakah Anda bermaksud mengatakan bahwa upaya-upaya untuk membangun koperasi itu sama sekali tidak relevan dengan gerakan munisipalis libertarian?

(J): Tidak, saya tidak menentang koperasi pada prinsipnya. Koperasi itu tak terhingga nilainya, terutama sebagai sekolah untuk mengajarkan orang bagaimana berko-operasi, bekerjasama. Saya hanya berusaha menunjukkan bahwa kita tidak akan mampu menghapuskan kapitalisme dengan cara menjejalinya dengan lebih banyak koperasi, karena koperasi

akan berfungsi seperti perusahaan kapitalis dalam banyak hal. Yakni, mereka akan menjadi bagian dari sistem pasar, apapun niat para pendirinya.

Kembali ke tahun 1840-an, Proudhon mempunyai gagasan—dan dia bukan satu-satunya –bahwa dengan menciptakan bank-bank rakyat koperatif dan jenis-jenis koperasi lainnya, kapitalisme akan tergantikan olehnya. Hari ini, andaikan saya harus mengikuti Proudhon, saya mesti berpikir bahwa banyak institusi kredit kecil yang pada akhirnya bisa menggantikan Chase Manhattan, bahwa toko-toko makanan koperatif yang kecil pada akhirnya bisa menggantikan jaringan supermarket. Saya mesti precaya bahwa pabrik-pabrik kimia kecil bisa menggantikan korporasi DuPont di Delaware.

Nilai koperasi hari ini adalah bahwa ia mengajarkan rakyat bagaimana berko-operasi. Tetapi umumnya yang terjadi dalam kebanyakan koperasi, dalam pengalaman pribadi saya sendiri dan dalam pengalaman sejarah, adalah bahwa mereka menjadi perusahaan-perusahaan borjuis, memasuki situasi kompetitif yang diproduksi pasar. Dan yang tidak mengikuti dorongan itu, akan musnah.

"Kooperasi-kooperasi yang pemilikannya termunisipalkan" bukanlah koperasi dalam pengertian biasa. Mereka bukanlah kooperasi-kooperasi tunggal pribadi atau federasi dari berbagai kooperasi pribadi. Mereka akan "dimiliki" oleh komunitas, yang mengadakan rapat dalam majelis rakyat. Sehingga mereka akan beroperasi sebagai bagian dari komunitas tersebut, bukan bagi diri mereka sendiri, dan mereka akan bertanggung jawab kepada komu-

nitas tersebut. Bukan saja kooperasi-kooperasi sosial yang khas ini akan "dimiliki" oleh komunitas, tetapi juga banyak diantara kebijakannya yang akan diputuskan oleh komunitas di dalam majelis. Kooperasi hanya akan menjalankan administrasi lapangan praktis atas kebijakan-kebijakan tersebut.

Bukan saja komunitas secara keseluruhan itu akan menentukan kebijakan, tetapi juga khalayak umum akan membentuk sejenis hubungan etis dengan kooperasi, berdasar pada fakta bahwa kooperasi tersebut secara integral adalah bagian dari publik. Inilah suatu wilayah dimana sebuah budaya politik melangkah jauh keluar dari batasan politik kelembagaan majelis dan konfederasi. Bukan saja ekonomi akan termunisipalisasi, tetapi juga budaya politik akan membantu menciptakan ekonomi moral dalam komunitas tersebut, sejenis hubungan ekonomi baru antara warga dengan sumber-sumber kehidupannya, apakah itu produsen atau pengecer.

Dalam budaya politik dan dalam suasana munisipalisasi seperti itu, tidak akan ada bahaya bahwa tiap kooperasi akan menjadi perusahaan yang mengambang-bebas dalam pasar kapitalis. Kita tidak akan lagi mempunyai pasar otentik dalam pengertian borjuis. Dalam pasar borjuis, hubungan pembeli-penjual tidak hanya kompetitif tetapi juga anonim. Kooperasi yang dimiliki secara munisipal berpeluang menumbangkan pasar tersebut, karena komunitaslah yang akan memilikinya dan karena warga akan memiliki tanggung jawab etis untuk melanggengkan keberadaannya.

Saya tidak percaya kaum borjuis

akan toleran menghadapi perkembangan ini dalam jangka panjang. Munisipalisme libertarian tidak akan merangkak mendekati kapitalisme dan menggagalkan rencananya secara tiba-tiba. Semua yang saya gambarkan melibatkan konfrontasi, cepat atau lambat, tidak hanya melawan Negara tetapi juga melawan kapitalisme. Munisipalisme libertarian bertujuan membangkitkan perkembangan revolusioner dalam komunitas-komunitas yang pada berbagai tingkat mengikuti praktik-praktik munisipalis libertarian.

Bagaimana perkembangan dan konfrontasi ini akan terjadi adalah sesuatu yang mustahil bisa diramalkan. Cukup dikatakan bahwa mereka bisa membuka lebar pintu bagi peningkatan "strategi" yang tidak bisa saya ramalkan dengan berspekulasi. Kemana konfrontasi itu akan mengarah, bagaimana ia akan berlangsung, saya tidak tahu, tetapi saya tahu bahwa jika munisipalisme libertarian dianut oleh sejumlah besar komunitas, kita setidaknya memiliki peluang menciptakan semacam situasi revolusioner.

(T): Sebagian kalangan sosialis berpendapat bahwa Anda terlalu cepat mengenyampingkan kontrol buruh. "Buruh," menurut mereka, hampir bukan lagi kategori khusus. Sebagian besar orang dewasa berbadan normal, baik laki-laki maupun perempuan, pada masa kini pastilah ia buruh. Mengingat kategori tersebut berlaku sangat umum, mengapa munisipalisme libertarian tidak bisa dipadukan dengan kontrol buruh?

(J): Ya, mayoritas besar rakyat harus bekerja untuk mendapatkan penghidupan dan sejumlah besar diantara mereka adalah para buruh produktif. Dan para buruh yang tidak produktif juga banyak. Mereka beroperasi sepenuhnya dalam keadaan dan kerangka yang diciptakan oleh sistem kapitalis seperti faktur, kontrak, slip kredit, polis asuransi dan sebagainya. Mungkin sembilan dari sepuluh "buruh" tidak akan memiliki pekerjaan dalam masyarakat rasional, masyakat yang tidak memerlukan asuransi atau apapun transaksi komersial lainnya.

Dalam masyarakat munisipalis libertarian, majelis akan memutuskan kebijakan-kebijakan ekonomi secara keseluruhan. Para buruh akan melepaskan identitas pekerjaan khas yang mereka miliki, sejauh dunia publik diperhatikan dan melihat diri mereka sendiri sebagai warga dalam komunitasnya. Munisipal, melalui majelis warga, akan mengontrol dan membuat keputusan-keputusan luas bagi tempat-tempat usahanya, menetapkan kebijakan-kebijakan yang harus mereka ikuti dan senantiasa bekerja dengan menggunakan pandangan sipil ketimbang pandangan pekerjaan.

Anggapan yang dibuat orang yang ingin mengikutsertakan kontrol buruh dalam munisipalisme libertarian itu adalah bahwa tatkala kita telah mendemokratisasi masyarakat secara keseluruhan melalui majelis rakyat, maka kita juga akan menghendaki demokratisasi tempat kerja itu sendiri dan menyerahkannya kepada para buruh untuk dikontrol. Sekarang, apa artinya semua itu? Kecuali para buruh itu dalam sebuah perusahaan benar-benar

mulai melihat diri mereka sendiri terutama sebagai warga ketimbang sebagai pekerja, maka kita tengah membuka kemungkinan yang sangat kuat bahwa mereka akan mengklaim otoritas atas tempat-tempat kerja mereka dengan mengorbankan majelis rakyat. Sampai taraf dimana Anda mencabut kekuasaan dari majelis rakyat dan mengalihkannya ke tempat kerja, sampai taraf dimana Anda membuka perpecahan dalam kesatuan majelis rakyat dan meningkatkan kemungkinan bahwa tempat kerja itu sendiri akan bertindak sebagai elemen subversif dalam hubungannya dengan majelis rakyat.

Biar saya sederhanakan: semakin bertambah kekuasaan yang dimiliki tempat kerja itu, semakin berkurang kekuasaan yang dimiliki majelis, dan semakin berkurang kekuasaan yang dimiliki tempat kerja, semakin bertambah kekuasaan yang dimiliki majelis. Jika kontrol buruh harus menjadi penegasan utama dalam program kita, kita akan kekurangan kekuasaan terhadap majelis rakyat dan karenanya membuka kemungkinan bahwa tempat kerja tersebut akan menambah kekuasaannya dengan mengorbankan majelis rakyat.

Seperti telah saya katakan, sekedar pengambilalihan perusahaan dan dijalankannya perusahaan itu oleh para buruh tidak akan menghilangkan kemungkinan bahwa mereka akan mengembangkan—mereka sungguh-sungguh akan menyuburkan–kepentingan usaha tertentu dalam pengertian terkini. Kontrol buruh akan dengan mudah mengakibatkan para buruh menjadi terpartikularisasi, apapun pekerjaan mereka. Di Barcelona,

pada masa anarko sindikalis 1936, para buruh yang mengambil-alih, katakanlah, pabrik tekstil, seringkali menentang rekan-rekan mereka sendiri dalam industri yang sama yang juga telah mengambil alih perusahaan. Para buruh tersebut seringkali menjadi para kapitalis kolektif, seperti ditegaskan Gaston Leval dalam catatannya tentang kolektivisasi Spanyol di kota-kota besar,[2] dan mereka bersaing satu sama lain demi memperebutkan akses terhadap materi dan pasar. Semua ini terjadi meskipun para buruh itu mengaku sebagai anarko-sindikalis yang bekerja dalam industri yang sama, dengan bendera hitam dan merah yang sama, dan tergabung dalam serikat sindikalis yang sama! Akibatnya, serikat tersebut harus meregulasi-ulang industri-industri guna mencegah praktik-praktik kapitalis kolektif ini. Ironisnya, birokrasi CNT mengambil alih kontrol atas perusahaan-perusahaan dan pada dasarnya mengurangi kontrol buruh dalam rangka mempertahankan sejenis pendekatan kooperatif.

Jika perusahaan-perusahaan dibolehkan merumuskan kebijakan-kebijakan yang mengatur sepak terjang mereka tanpa melihat komunitas sebagai satu kesatuan, maka perusahaan-perusahaan itu mungkin mengikuti jalan yang bukan hanya berlainan dengan jalan yang diikuti oleh seluruh komunitas tetapi juga berkonflik dengannya.

Sebagian besar perdagangan diharapkan pada suatu hari nanti akan dimekanisasi, terutama operasi kerja yang paling sukar dan rutin. Lagipu-

---

2. Gaston Leval, *Collectives in the Spanish Revolution*, terj. Vernon Richards (London: Freedom Press, 1975).

la, itu bukanlah gagasan yang sama sekali utopis. Akhirnya saya yakin bahwa semakin banyak pekerjaan yang diambil alih oleh mesin maka persoalan kontrol buruh sebenarnya akan tidak berarti dan semua isu akan mengecil sampai titik insignifikansi. Saya menentang kalangan primitif yang bergaya anarkis, seperti mafia *Fifth Estate*, yang mengaku menentang kemajuan teknologi dalam segala kondisi.

(T): Apa kaitan antara gerakan munisipalis libertarian dengan aksi langsung?

(J): Munisipalisme libertarian adalah bentuk tertinggi aksi langsung. Ia adalah swa-administrasi —*face-to-face*–langsung sebuah komunitas. Rakyat bertindak secara langsung dalam masyarakat dan secara langsung menentukan nasib mereka sendiri. Tidak ada bentuk aksi langsung yang lebih tinggi ketimbang determinasi-diri.

Setelah mengatakan itu, saya secara empatik percaya bahwa ia adalah bagian dari setiap pendidikan politik radikal untuk terlibat dalam aksi langsung dengan cara mengambil tindakan sosial dan politik dalam setiap isu yang muncul saat ini; dan juga dengan berusaha menghentikan, katakanlah, berkembangnya pembangunan yang kasar, sebuah wahana yang kejam, menyeleweng dan agresif secara ekonomis. Termasuk dalam upaya ini adalah *sit-ins*—yaitu gerakan buruh Amerika pada 1930-an yang didirikan di atas pendudukan pabrik-pabrik

oleh para buruh. Bukan hanya pemogokan yang merupakan bentuk aksi langsung, tetapi bisa juga berupa pendudukan pabrik—nyatanya ia adalah bentuk aksi langsung yang bahkan lebih radikal yang mencakup pembocoran hukum yang melindungi pemilikan pribadi kalangan borjuis.

Sampai seberapa jauh aksi-aksi ini bisa mengakibatkan kekerasan, saya tidak tahu. Tetapi saya juga tidak percaya bahwa kalangan borjuis akan menyerahkan statusnya dengan sukarela.

(T): Akankah sebuah gerakan munisipalis libertarian mempunyai para pemimpin?

(J): Akan ada para pemimpin dimana-mana, dimana saja ada perjuangan. Apakah eksistensi para pemimpin itu lantas berarti eksistensi hierarki? Tentu tidak! Kata *pemimpin* tidak mesti membuat kita takut untuk mengenali bahwa sejumlah individu memang memiliki lebih banyak pengalaman, kedewasaan, perkembangan karakter dan sebagainya ketimbang orang-orang lainnya. Perbedaan ini pasti ada dan memang nyata. Menolak perbedaan itu dan mengatakan bahwa setiap orang berada pada tingkat pengetahuan, pengalaman dan penglihatan yang sama adalah mitos tidak masuk akal yang digugurkan oleh realitas kehidupan seharihari. Dan bukan hanya realitas kehidupan seharihari, tetapi juga realitas biologis. Orang yang telah hidup lebih lama seringkali bisa diharapkan tahu lebih banyak ketimbang mereka yang masih muda. Bahkan seseorang yang cepat dewasa yang berusia

dua belas tahun tidak akan bisa memiliki kebijaksanaan seseorang yang telah hidup selama tiga kali lipat dari usianya dan memiliki pengalaman yang kaya. Biologi membuat mustahil seorang bocah bisa memiliki pengetahuan seperti yang dimiliki seorang remaja dan seorang remaja juga tidak bisa memiliki pengetahuan seperti yang dimiliki orang dewasa, dan seterusnya.

Itu tidak berarti bahwa orang yang lebih berpengetahuan akan menggunakan pengetahuannya untuk mendominasi orang lain. Seorang pemimpin sedikit banyaknya adalah seorang pendidik, seseorang yang menawarkan pengarahan. Pada kenyataannya, kita sangat membutuhkan orang yang bisa mendidik kita. Saya bingung dengan kaum anarkis yang menolak kepemimpinan. Tidak ada tirani yang lebih halus daripada "tirani ketiadaan struktur," yang juga bisa mencakup tirani interpretasi palsu atas kesetaraan, yakni bahwa kita semua berpengetahuan sama. Ada perbedaan besar antara mengatakan bahwa kita semua berpengetahuan sama dan mengatakan bahwa kita semua mampu, secara potensial, belajar dan berbagi pengetahuan dengan landasan egaliter.

Yang menimbulkan pertanyaan sehingga Hegel, dalam tulisan-tulisan teologisnya yang mula-mula, mempertanyakan tentang perbedaan antara Socrates dengan Yesus. Socrates sudah pasti adalah seorang pemimpin, dan dia dicintai sebagai seorang pemimpin. Ia pemimpin dalam artian sebagai seseorang yang berusaha mengatasi perbedaan melalui pendidikan dan dialog, antara yang diketahui-

nya dengan yang diketahui oleh kaum muda Athena di sekitarnya, dan dengan demikian juga berarti berusaha menghamparkan lapangan bermain bagi wacana-wacana. Banyak diantara dialog-dialognya berupa cara-cara mengatasi perbedaan. Yesus, di sisi lain, adalah seorang pemimpin dalam pengertian otoriter. Dia menyerukan pernyataan yang tak seorang pun di hadapannya punya peluang untuk membantah tanpa takut akan murkanya. Sungguh sangat berbeda antara berusaha menjalankan ketaatan terhadap *Ten Commandments* karena Tuhan dianggap telah mentakdirkan kita untuk berbuat demikian, dengan tindak menyelidikinya serta menemukan apa yang sah dan apa yang tidak, sebuah tindakan mengajukan nalar alamiah ketimbang supranatural guna mematuhi gagasan apapun. Bagian-bagian dalam Sepuluh Perintah Tuhan-nya sangat regresif, seperti firman Yahweh bahwa ia adalah tuhan pencemburu yang tidak akan bertoleransi terhadap tuhan-tuhan lainnya, dan karenanya tidak ada kontradiksi.

Seorang pemimpin tidak menghasilkan suatu elite, dia juga tidak perlu menjadi seorang elite. Kepemimpinan karenanya tidak perlu hierarkis. Seorang pemimpin bisa jadi adalah seseorang yang tahu lebih banyak ketimbang orang-orang lainnya mengenai suatu situasi tertentu dan karenanya memainkan peran utama dalam menasihati orang tentang apa yang mesti mereka lakukan untuk mengatasinya. Dia tidak mendominasi orang atau menuntut kepatuhan mereka. Dalam masyarakat rasional, tentu saja para pemimpin tidak memi-

liki kekuasaan memaksa orang agar melakukan apa yang tidak ingin mereka lakukan. Sumber utama pengaruh yang dimilikinya adalah persuasi. Dan yang terpenting, para pemimpin bertanggung jawab kepada semua orang, yakni tindakan-tindakan mereka akan berada dalam pengawasan tetap.

Saya juga tidak menilai bahwa setiap orga nisasi pelopor pastilah otoriter. Ironisnya, lebih dari satu surat kabar anarkis pada masa lalu dinamakan *Vanguard* (pelopor) dan lebih dari satu karya anarkis menuntut adanya pembentukan organisasi pelopor. Organisasi *Vanguard* bisa menumbuhkan sentuhan arah kepada gerakan, bisa memberikan peta bagaimana bergerak dari sini ke sana dan membantu memobilisasi mereka dalam tindakan sistematis untuk mengubah masyarakat.

Tragis, bahwa kata vanguard dan leader didiskreditkan pada 1960-an oleh "Kiri Baru," disebabkan pengalaman-pengalaman Stalinisme dan Leninisme. Dalam banyak revolusi, ada banyak pemimpin beserta organisasi penting bahkan menentukan, yang memajukan revolusi dan dalam ketiadaan pemimpin yang menentukan, revolusi itu gagal. Dalam masa Komune Paris, Adolphe Thiers, yang memimpin revolusi balasan menghadapi para *communard*, menangkap tokoh revolusioner Auguste Blanqui sebagai tawanan. Komune menginginkan Blanqui dikembalikan dan mereka berusaha keras membebaskannya dengan cara dipertukarkan dengan diri mereka sendiri sebagai sandera, bahkan ditukar dengan uskup besar Paris. Thiers dengan cerdik paham bahwa memberikan

Blanqui kepada para anggota komune itu sama saja dengan memberi mereka sepasukan penuh tentara, karena Blanqui telah menegaskan akan adanya sebarisan konvoi panjang para *communard* menuju Versailles dan akan menaklukkan revolusi balasan yang dipimpin Thiers. Alhasil, orang tidak bisa begitu saja menghapus peran penting yang dimiliki oleh banyak individu dan pemimpin organisasi dalam sejarah, kendati senantiasa ada bahaya dalam revolusi yang dirancang untuk merebut kemajuan sampai tingkat tertentu, bahwa seorang pemimpin bisa berubah menjadi seorang tiran dan bahwa sebuah organisasi bisa berubah menjadi selingkaran kecil elite. Bagi intelijen dan badan-badan penyeimbang yang bertugas mencegah para pemimpin dan organisasi agar tidak menjadi tiran atau elite, tidak ada pengganti dalam berurusan dengan risiko-risiko ini —tentu saja dengan tetap menjaga agar tidak begitu saja menjadi penentangan terhadap para pemimpin dan organisasi.

(T): Pada waktu lalu Anda membedakan antara intelektual dan cendikiawan atau inteligensia. Intelektual adalah mereka yang selalu melekat dengan dunia akademis, sedangkan intelegensia adalah individu-individu terdidik dan secara teoretis penuh dengan pemikiran, yang merupakan bagian dari budaya politik publik yang menyertai sebuah revolusi. Apakah Anda menilai seorang inteligensia berperan penting dalam perjuangan munisipalis libertarian?

(J): Seorang inteligensia sangat diperlukan, dan

disini saya membedakannya dengan para intelektual akademis yang menganggap remeh pentingnya kalangan intelegensia. Hal yang lucu bahwa para profesor, yang ditempa dalam sistem universitas, mencela kaum intelegensia sebagai sekelompok elite. Saya kira akan sangat bagus jika setiap orang adalah anggota intelegensia, dalam sebuah kehidupan intelektual publik yang hidup, dimana ide-ide adalah bagian dari lingkungan pergaulan sehari-hari, dimana filsafat, etika dan politik bukan sekedar topik studi melainkan praktik-praktik hidup.

Bagi saya, tidak bisa dipahami—terlepas dari fatwa para teoritisi anarkis–bahwa kebijaksanaan yang terhimpun dalam diri seorang anggota sejati intelegensia bisa diabaikan. Saya melakukan studi seksama mengenai revolusi ketika saya menulis *The Third Revolution*, mulai dari Perang Petani pada 1520-an di Jerman sampai dengan Revolusi Spanyol pada 1936. Begitu seksama saya mempelajarinya sehingga saya merasa seolah-olah saya dibawa ke jalan-jalan tempat revolusi itu terjadi. Studi demikian menggerai kejelasan yang gamblang kepada saya bahwa revolusi-revolusi ini tidak bisa diharapkan sukses atau bahkan berkembang pesat tanpa adanya pengetahuan—dan bahkan kepemimpinan, dalam kasus-kasus terbaik–yang dimiliki oleh kalangan inteligensia atau para intelektual publik. Akan bagaimana jadinya revolusi Perancis tanpa Jean Varlet, yang jauh melebihi para pemimpin terbaik Jacobin? Akan bagaimana jadinya Revolusi Amerika tanpa Thomas Paine? Akan bagaimana jadinya berbagai revolusi pada 1848 di Paris tan-

pa seseorang sekaliber Blanqui yang mengilhami mereka? Bagaimana jadinya Komune Paris tanpa Eugene Varlin? Akan bagaimana jadinya Revolusi Rusia tanpa Martov, yang meramalkan bahaya otokrasi Bolshevik? Sungguh perlu kita memulihkan merosotnya tradisi pemikir ini, yakni mereka yang menjalani kehidupan publik vital dan pada saat yang sama juga merupakan bagian dari suatu lingkungan sosial dan politik revolusioner yang hidup.

(T): Ketika gerakan munisipalis libertarian mengajukan calon untuk bermacam jabatan, ia memerlukan program pemilihan. Jenis-jenis hal apa saja yang mesti ada dalam program ini? Jika kita hanya menetapkan tujuan jangka pendek dalam program itu, kita kelihatan layaknya partai reformis belaka. Jika kita mengajukan tujuan jangka panjang semata, misalnya menghapuskan kapitalisme, banyak orang yang tidak akan siap mendengarnya. Nah, haruskah kita menunggu sampai para warga biasa menjadi terdidik dalam gagasan ini sebelum kita menjalankan kampanye munisipalis libertarian? Atau haruskah kita menjalankan kampanye agar bisa mendidik rakyat? Bagaimana semestinya kita menyeimbangkan antara tujuan jangka pendek dengan tujuan jangka panjang?

(J): Tujuan jangka pendek dalam sebuah program dirancang untuk menarik orang dan pada akhirnya mendukung tujuan-tujuan jangka panjang gerakan. Orang mungkin mendukung seorang kandidat munisipalis libertarian karena mereka setuju dengan

tujuan-tujuan jangka pendek dalam programnya dan pada awalnya mereka mungkin setuju atau tidak dengan tujuan-tujuan jangka panjangnya. Saya yakin bahwa sesudah Perang Dunia Kedua, jutaan orang di Inggris yang takut terhadap sosialisme masih akan memberikan suaranya untuk Partai Buruh, kendati partai itu mengekspresikan komitmen jangka panjang kepada sebentuk sosialisme. Banyak persoalan sangat pragmatis yang menyebabkan mereka memilih Partai Buruh dan mereka juga memiliki aspirasi samar bahwa "sebuah dunia yang lebih baik," yang dirancang oleh kata *sosialisme*, mesti muncul seusai perang. Karenanya kemenangan besar Partai Buruh tercapai menjelang dan sesudah perang.

Gerakan munisipalis libertarian tentu saja akan berjuang demi memperbaiki berbagai ketidakadilan tertentu, dan ini harus ada dalam programnya, bahkan tatkala gerakan itu berjuang demi tujuan-tujuan kebebasan yang lebih luas dan demokrasi langsung. Tetapi berjuang melawan ketidakadilan saja, tanpa menawarkan ideal kebebasan, tidak akan bisa menjangkau akar ketidakadilan yang ingin kita perbaiki. Seorang anarkis yang saya kenal akhir-akhir ini pernah mengatakan bahwa dia masih memiliki "visi" tentang sebuah masyarakat anarkis, tetapi itu berada di kejauhan. Saat ini dia bekerja memenuhi "tujuan" yang lebih berjangka pendek, tujuan yang mencakup memperbaiki bermacam ketidakadilan, termasuk diperkuatnya Negara, tidak kurang dari itu!

Tetapi perjuangan melawan ketidakadilan tidak bisa dipisahkan dari perjuangan meraih ke-

bebasan. Jika seperti itu adanya, kita masih akan dibebani oleh tatanan sosial yang sama, yang mungkin agak atau lebih signifikan, tetapi masih tetap merupakan suatu tatanan yang pasti mengakibatkan kerusakan pada masyarakat dan alam. Keterkaitan hidup mesti ada di antara visi dan tujuan kita, karena visi kita akan mengisi tujuan-tujuan kita dan memberinya kesiapan. Sebaliknya, jika tujuan dan visi terpecah dua, kita akan berfungsi sekedar se bagai para pengemban kapitalisme yang memberinya wajah manusia, ketimbang sebagai para revolusioner yang berusaha menghancurkan akar penyebab berbagai ketidakadilan ini, juga pengekangan terhadap kebebasan dan realisasi diri segenap manusia.

Jadi, program munisipalis libertarian tidak akan membuat tuntutan jangka pendek tanpa disertai tuntutan jangka panjang pada saat yang sama. Pada kalangan Kiri pada 1930-an dan 1940-an, kita biasa menamakannya program minimum dan program maksimum. Tetapi hubungan antara program minimum dengan program maksimum bisa diuraikan dengan baik melalui program transisional, ini istilah berguna yang ditemukan, sepengetahuan saya, oleh Trotsky. Program transisional diniatkan untuk mengaitkan langkah-langkah kecil yang bisa diambil segera bersama tujuan-tujuan akhir, seperti komunisme atau sosialisme.

Bagi gerakan munisipalis libertarian, program transisional bisa mengaitkan tuntutan spesifik, seperti menghentikan "pertumbuhan," dengan tuntutan maksimum jangka panjang mengganti

kapitalisme dengan ekonomi moral. Dan ia pasti akan mengaitkan tuntutan sederhana dan segera seperti "administrasi lokal yang lebih baik" dengan tujuan jangka panjang gerakan untuk mencapai demokrasi langsung, menyuarakan perubahan dalam piagam kota yang akan memungkinkan berjalannya majelis-majelis publik dan lantas menuntut bahwa majelis-majelis publik ini memiliki kewenangan yang makin bertambah.

Manakala gerakan munisipalis libertarian tengah berlangsung, aksi langsung mungkin akan digunakan untuk memajukan tuntutan-tuntutan ini dan menampilkannya untuk merebut perhatian publik. Tetapi pertama-tama, gerakan tersebut akan menuntut adanya majelis-majelis publik di sini dan kini, dan pendirian pusat-pusat sipil dimana majelis-majelis ini bisa menggelar rapat. Katakanlah bahwa majelis-majelis ini dibentuk dengan basis informal dan diharapkan menjadi forum bagi diskusi di wilayah-wilayah kecil. Ini mungkin terjadi pada mulanya di daerah-daerah tertentu dalam sebuah kota, tetapi wilayah kekariban ketetanggaan itu kemudian bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain sekota yang belum melakukan gerakan politik. Umumnya, orang akan segera mulai melihat bahwa sesuatu sedang terjadi di kota mereka sendiri, dan mereka mungkin mulai melakukan hal yang sama.

Semakin lama, majelis-majelis itu bisa mengesahkan resolusi yang mengangkat bermacam tuntutan, apa saja, mulai dari kontrol lebih besar terhadap pelayanan kota, pemadam kebakaran, sampai dengan memperbaiki dan memperbanyak

sekolah. Gerakan tersebut mulai berkampanye di sekitar resolusi ini, menyajikannya sebagai tuntutan rakyat. Warga berbicara. Tetapi yang terpenting, gerakan tersebut mengangkat tuntutan perubahan traktat kota sehingga majelis-majelis warga mempunyai lebih banyak, jika tidak sepenuhnya, kekuasaan legislatif.

Dalam komunitas manapun, rakyat yang terlibat dalam gerakan munisipalis libertarian mungkin adalah sekelompok minoritas kecil dalam majelis publik yang telah mereka ilhami. Warga lainnya dalam majelis tersebut mungkin masih agak berhati-hati dan konservatif. Maka tugas munisipalis libertarian-lah untuk berdebat dengan para warga ini dalam majelis mengenai bermacam isu, untuk menjawab keberatan mereka, dan untuk menerangkan kekuatan-kekuatan sosial dan politik yang lebih besar yang bekerja dalam masyarakat. Dalam proses tersebut, mereka berusaha mendidik setiap orang. Anggaplah bahwa ada kepentingan-kepen tingan *real esate* untuk masuk ke forum rapat majelis dengan tujuan menjual komunitas dalam proyek pembangunan tertentu, atau proyek perumahan, atau komplek perkantoran. Atau ada muncul sebuah perusahaan yang menebar janji-janji memikat berupa lebih banyak kesempatan kerja jika komunitas mengijinkan mendirikan pabrik di sana. Penggagas munisipalis libertarian harus berusaha menghentikan semua tadi dengan menunjukkan secara terperinci bahaya-bahaya yang diakibatkan oleh usulan yang diajukan sesama warga mereka. Dan dalam prosesnya, diharapkan, mereka akan mendidik para

warga itu.

Banyak orang, harus saya katakan, tak punya waktu untuk menanggapi munisipalisme libertarian sebagai proses. Tetapi menurut saya bahwa memang dengan proses itulah kita berurusan. Penggagas munisipalis libertarian memulainya dengan meluncurkan tuntutan-tuntutan keseharian demi keadilan dengan isu-isu yang spesifik, yakni tuntutan-tuntutan yang menantang berbagai kepentingan kapitalis seperti *real estate*, konstruksi, jejaring bisnis pengecer atau *retail* dan sebagainya. Lantas gerakan itu mengembang dan mengembang dan, pada saat yang sama, gerakan itu, melalui majelis-majelis rakyat, menuntut lebih banyak kekuasaan dari negara bagian atau propinsi dan Negara-Bangsa yang diperuntukkan bagi majelis-majelis tersebut. Ini adalah proses dinamika yang melibatkan pembesaran institusi-institusi demokratis yang potensial—ingat, tidak pernah ada borjuis yang memberi gratisan kepada rakyat–yang mampu menyerukan perlunya sebuah traktat (kota) jika memang tidak ada, atau revisi traktat jika sudah ada. Semua ini adalah isu-isu yang berpotensi konfrontatif bagi kekuatan arus bawah. Gerakan munisipalis libertarian memainkan peran utama dalam proses ini. Tanpa gerakan, saya ragu apakah perkembangan yang telah saya gambarkan itu bisa berlanjut menuju kesimpulan logisnya.

Lantas jika perkembangan-perkembangan ini telah terjadi di seluruh wilayah tertentu, konfederasi bisa mulai dibentuk. Melalui proses tersebut, gerakan akan membentuk kekuasaan ganda.

Transisi akan melibatkan berbagai jenis konfrontasi sepanjang jalan, termasuk aksi langsung dan semuanya itu akan memperluas demokrasi dalam republik, sambil tetap meradikalisasi demokrasi secara berkelanjutan. Akhirnya kita akan berkonfrontasi dengan situasi revolusioner, dimana tantangan langsung dapat digelar untuk melawan Negara.

Karena pada akhirnya, bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya budaya politik ini, dengan memperoleh dukungan dari rakyat yang jauh lebih besar jumlahnya, gerakan tersebut—didorong oleh gerak dialektis menuju tuntutan maksimalnya–akan sampai pada titik terujung dari"visinya". Ia akan berhadap-hadapan dengan Negara dengan cara yang signifikan. Ia nyaris tidak bisa "me nyelinap" mendekati kapitalisme atau menumbangkan Negara dari bawah, atau membuat transisi bertahap. Ia harus berkonfrontasi dengan kapitalisme dan Negara dalam setiap langkah sepanjang jalannya dan mendorong mundur mereka sejauh mungkin sampai ke titik dimana konfrontasi tersebut akan membutuhkan proporsi-proporsi revolusioner. Dari sanalah gerak perkembangan hidup itu sendiri yang lantas akan memutuskan pendekatan, ukuran, atau "taktik"—ini kata yang sebetulnya tidak saya sukai –yang mana yang harus diadopsi oleh gerakan.

Saya tidak sedang menggambarkan sebuah proses yang mudah. Tetapi jika memperjuangkan munisipalisasi ekonomi dan pembentukan munisipal-munisipal libertarian terkonfederasi dianggap sebagai sesuatu yang utopis, lantas alternatif apa yang kita miliki hari ini? Membangun partai poli-

tik—belajar dari sejarah Partai Hijau Jerman, Partai Buruh Inggris dan partai-partai ketiga di Amerika Serikat–toh sudah pasti akan merosot menjadi bagian dari aparat Negara atau sama sekali lenyap. Maka alternatif apakah yang ada bagi munisipalisme libertarian? Bagaimana lagi kita akan mewujudkan tuntutan akan adanya "Komune dari komune-komune" *(Commune of communes)*—ini slogan tradisional para libertarian sosialis, anarkis dan komunis–untuk mempertautkan segi-seginya dalam ranah politik kita kini? Apakah dengan berpaling mundur jauh ke pengalaman-pengalaman pribadi kita, menyelami meditasi Taois, atau bergelut dalam *sensitivity sessions*, paket-paket sensitivitas itu, dan kelompok-kelompok pertemuan, sebagaimana dihasratkan kalangan anarkis sebatas gaya hidup yang kian meruyak itu?

Alternatif apa yang tersedia? Bekerja dengan mitos bahwa kita bisa menghancurkan ekonomi kapitalis dengan cara memulai berbagai kooperasi? Pada 1840-an dan 1850-an, Proudhon memiliki basis-basis alasan yang pasti bahwa cara berpikir ini bisa berjalan, khususnya di Perancis, sebelum kapitalisme berkembang mapan, ketika toko-toko grosir masih merupakan toko keluarga, dan bukan jaringan supermarket. Itu masa ketika industri dan perdagangan eceran masih berskala kecil. Tetapi tidak hari ini. Atau apakah kita mau menyerukan nasionalisasi ekonomi? Jika ya, maka kita ujung-ujungnya cuma memperkuat kuasa Negara yang bertemali dengan kuasa ekonomi. Atau mungkin kita menyerukan sosialisme pasar, istilah ini sendiri

bagi saya merupakan oksimoron—dalam dirinya sendiri saling bertentangan–seakan-akan pasar tidak membangkitkan dorongan-dorongan internal yang menjuruskan ke konsentrasi kapital.

Alhasil, alternatif-alternatifnya adalah pemilikan pribadi, nasionalisasi pemilikan, atau munisipalisasi pemilikan. Saya serahkan alternatif-alternatif itu kepada siapapun yang memiliki sensibilitas revolusioner untuk membuat keputusan sendiri.

Masyarakat Baru

(T): Manakala kita mencapai masyarakat munisipalis libertarian, bagaimana jika ternyata kebajikan sipil dan institus-institusi demokrasi-langsung tidak cukup menjaga setiap orang di dalam komunitas agar tidak bertindak hanya sesuai kepentingan mereka sendiri? Yang kemungkinan terjadi adalah segelintir orang berusaha memperkaya diri sendiri dan merusak karakter komunistis masyarakat. Haruskah dilembagakan sejenis kecaman yang bisa memperkuat norma-norma dalam masyarakat? Akankah ada hukum dalam masyarakat munisipalis libertarian? Atau konstitusi?

(J): Sebelum saya menjawab pertanyaan Anda secara spesifik tentang masyarakat munisipalis libertarian, sepaparan latar belakang historis akan sangat berguna. Dalam masa pra-sejarah, dalam serentang periode waktu yang tidak banyak dikenali, masyarakat manusia tersusun atas kelompok-kelompok keluarga—suku dan klan–dimana pertalian darah menentukan hak dan kewajiban seorang individu

terhadap individu yang lain. Siapapun diluar suku dianggap sebagai orang asing atau, dengan menggunakan istilah Marx yang sangat tepat, sebagai anorganik, dan karenanya orang asing itu menjadi sasaran perlakuan sewenang-sewenang dari suku tersebut.

Ini berimplikasi banyak terhadap cara orang memahami keadilan. Katakanlah seseorang berbuat kejahatan, seorang pria dari satu suku membunuh seorang pria dari suku lain. Satu-satunya cara untuk menuntut kejahatan itu dan menghukum pelaku pembunuhannya adalah jika para kerabat sang korban memutuskan balas dendam berdarah. Tentu saja setelah beberapa lama, sejumlah pertumpahan darah yang diperlukan untuk menebus kejahatan tersebut akan semakin berkurang, atau sejenis hukuman selain pertumpahan darah sudah ditemukan dan ditetapkan, misalnya kewajiban menyerahkan sejumlah hewan ternak. Cara-cara dan skedul penebusan pada masa itu kerap digali dengan terperinci. Tetapi sistem keadilan ini masih bergantung pada tindakan balas dendam—bergantung pada sang korban atau keluarganya untuk melakukan balas dendam terhadap pelaku kejahatan.

Telah menjadi salah satu kemajuan terbesar manusia, sepanjang sejarah, bahwa mereka telah bergerak meninggalkan sistem ketidakadilan yang berdasarkan faktor biologis ini, artinya sistem yang berdasar pada kekerabatan atau ikatan darah dan balas dendam, menuju sistem keadilan yang lebih rasional—kendati tidak berarti sepenuhnya rasional. *Eumenides* karya Aeschylus menggambarkan orang-

orang Athena yang persis berada dalam situasi seperti itu–yakni manakala balas dendam berdarah digantikan oleh keadilan yang bernalar: Orestes, yang membunuh ibunya, akhirnya diadili bukan sebagai orang yang membunuh pertalian hubungan darah semata-mata tetapi diadili oleh hakim yang berpijak atas landasan rasional dan diskursif. Dan dia dibebaskan, berdasarkan standar universal keadilan yang berbasis nalar, bukannya dihukum dengan berlandaskan balas dendam berdarah. Pada titik ini, nalar mulai menggantikan adat, dan masyarakat mulai mengganti biologi.

Tentu saja setiap institusi yang terkondisi secara biologis juga merupakan institusi sosial. Manusia bukan lagi sekedar binatang. *Toh* sangat sulit memisahkan yang sosial dari yang biologis pada tingkat yang paling awal. Namun dalam kurun sejarah yang panjang, biologi sedikit banyak telah memberi jalan bagi rasionalitas dan sosialitas. Kebangkitan *nomos*, sebagaimana orang Yunani menyebutnya, atau hukum—standar keadilan yang diturunkan dari rasionalitas, yang mendefinisikan hak dan kewajiban–menandai salah satu kenaikan derajat terbesar manusia dibandingkan dengan kebinatangan. Ini memang bukan kemajuan puncak, tetapi ini adalah kemajuan mendasar, kemajuan yang menjadi basis bagi perkembangan lainnya.

Saya tentu saja tidak berpendapat bahwa hukum itu rasional karena ia adalah hukum. Lebih tepatnya, saya mengklaim bahwa konsep *nomos*-nya itulah yang rasional. Hukum sebagai pengganti balas dendam berdarah adalah kemajuan rasional,

kendati banyak hukum tertentu yang sangat tidak rasional. Konstitusi-konstitusi kuno seperti kode legal Hammurabi menerima adanya perbudakan dan dominasi laki-laki terhadap perempuan—sejumlah besar ciri-ciri kekejaman yang tidak akan bisa dipertahankan hari ini dan tentu saja tidak bisa dimaklumi oleh masyarakat rasional. Namun kode Hammurabi menandai kemajuan meninggalkan adat buta, membuka hamparan diskusi tentang perilaku benar dan salah. Dalam kasus demokrasi Athena bahkan lebih banyak adat yang ditinggalkan dan digantikan oleh pertimbangan rasional tentang hak dan kewajiban, kejahatan dan kebaikan, tindakan berbahaya dan tindakan bermanfaat.

Masyarakat rasional, sesuai definisinya, tidak bisa berbuat kurang dari itu. Masyarakat munisipalis libertarian sungguh perlu sepenuhnya berkembang berbasis rasional, basis hak dan kewajiban rakyat, hukum-hukum atau *nomoi* masyarakat berikut modus-modus swa-kelola mereka. *Nomoi* ini diturunkan dari konstitusi rasional yang disusun oleh rakyat yang hidup dibawah konstitusi itu. Tiada lain itulah masyarakat yang dibentuk secara rasional, dalam pengertian bahwa rakyat benar-benar menciptakan sebuah kerangka dasar baginya, yang dibimbing oleh pertimbangan-pertimbangan etis yang disuguhkan oleh nalar dan pengalaman.

Jadi, ya, memang perlu adanya konstitusi dan memiliki nomoi yang sedemokratis, serasional, sefleksibel dan sekreatif mungkin. Menolak konstitusi tersebut beserta nomoi yang memperincinya berarti bergerak mundur kembali ke sistem seperti balas

dendam berdarah. Atau kita akan mundur menuju pengadilan sewenang-wenang, berdasarkan keyakinan mistis dalam sifat manusia yang tidak tergoyahkan yang memang berdaya-pikat magis. Beberapa pandangan tertentu memang sungguh absurd. Yakni pandangan yang bersandar pada keyakinan bahwa orang akan selalu berperilaku ramah terhadap orang lainnya dan terhadap komunitasnya, bahwa mereka pada dasarnya berpembawaan baik, dan bahwa mereka telah "dirusak" oleh peradaban. Gagasan apa pun tentang sifat dasar manusia yang tidak bisa berubah, bahkan ramah, sebagaimana juga mitos "kebiadaban bangsawan," adalah omong kosong sosio-biologis. Gagasan itu membuat perilaku orang benar-benar tidak fleksibel dan menyangkal salah satu ciri terpenting manusia, yakni kreativitas, ini ciri istimewa manusia, yang bertentangan dengan tipe adaptif binatang.

Jadi, dalam masyarakat munisipalis libertarian, yang saya kenali sebagai masyarakat rasional dan sebagai masyarakat komunisme libertarian, penting untuk memiliki nalar konstitusi beserta nalar *nomoi* yang berakal-sehat, yang akan bisa mencegah otoriterisme dan semua ciri-ciri yang tidak dikehendaki dalam masyrakat saat ini, seperti pemilikan pribadi dan Negara. Ia pada saat yang sama akan menawarkan sebentuk hukum positif, yang menetapkan garis-garis panduan etika berdasarkan akal sehat, yang cukup fleksibel untuk memungkinkan perubahan situasi.

(T): Bagaimana ide-ide ini secara spesifik diterapkan

dalam pengembangan gerakan munisipalis libertarian?

(J): Saya menyarankan agar gerakan itu sendiri memiliki konstitusi. Dalam hal ini, saya bertentangan dengan opini libertarian yang menginginkan kecilnya struktur. Seperti telah saya katakan, dimana Anda memiliki sejumlah minimum dalam struktur, maka Anda memiliki sejumlah maksimum kesewenang-wenangan. Orang yang serius dan berkomitmen senantiasa menginginkan organisasi; pertanyaannya adalah organisasi serupa apa? Situasi tanpa solusi yang membingungkan melanda kalangan anarkis yang semata gaya hidup, pada masa kini dalam berbagai variasinya yang berujung berupa sekedar penampilan atau berupa manipulasi otoritarian, sebagaimana yang saya temui dalam aliansi anti nuklir Clamshell pada 1970-an.

Alhasil, gerakan akan memiliki konstitusi beserta mukadimah untuk menyatakan karakter dan tujuan-tujuannya yang lebih luas. Lantas ia akan menentukan sejelas mungkin, namun juga tidak sampai membeku menjadi infleksibilitas, tentang bagaimana ia berfungsi dan, jika perlu, diterangkan mengapa ia berfungsi seperti itu. Konstitusi akan menentukan pengambilan keputusan berdasarkan voting suara mayoritas, yang dalam pandangan saya sangat diperlukan. Ia dengan jelas akan menentukan bagaimana para delegasi dipilih dan di-*recall* jika perlu, dan ia akan membedakan kekuasaannya dari kekuasaan seperti yang dimiliki perwakilan tipe parlementer. Ia akan mencakup perhitungan-

perhitungan tentang demokrasi munisipal dan konfederasi.

Manakala gerakan munisipalis libertarian berdiri dengan berpijak pada landasan kontitusi rasional dan dibimbing oleh *nomoi*, bagaimana ia akan lanjut bergandengan tangan dengan seruannya akan majelis warga? Di sini di Burlington, sepanjang akhir 1970-an hingga awal 1980-an, kelompok-kelompok anarkis dengan siapa kami bekerjasama, mengajukan adanya majelis warga di setiap enam distrik di satu kota. Kami terus menyuarakan tuntutan itu setelah kandidat dari partai-ketiga, *Progressive*, terpilih sebagai walikota pada 1981. Walikota ini, Bernard Sanders, kelihatannya tidak paham dengan apa yang sedang kami suarakan, tetapi dia siap bergerak beriringan dengan gagasan tersebut karena kedengarannya bagus. Lalu administrasi *Progressive*-nya sepakat membentuk Majelis Perencanaan Daerah *(Neighborhood Planning Assembly/ NPA)* di tiap distrik. Majelis-majelis itu memang bukan majelis warga yang otentik, melainkan "majelis perencanaan," yang dibentuk sebagai yang bertanggungjawab menyalurkan dana bagi pengembangan komunitas. Dalam kerangka pembuatan kebijakan, peranan mereka sebatas lembaga penasihat. Namun, setidaknya di Vermont, kuasa warga kota dalam majelis untuk memberikan mandat secara moral seringkali sangat menentukan, dan untuk beberapa lama—sampai banyak diantara para anarkis lokal kami mulai menghilang, kembali ke dalam kehidupan pribadi–mereka punya pengaruh yang besar.

(T): Di Vermont sistem pemerintahan lokal dan sistem politik lebih longgar dan lebih terbuka ketimbang di belahan lain Amerika Serikat, jika bukan seluruh dunia. Di sini akses pemungutan suara relatif lebih mudah dan peraturan pemilihan juga cukup rileks, sehingga lebih mudah menjalankan gerakan munisipalis libertarian di sini ketimbang di tempat-tempat lain. Di Kalifornia, misalnya, lebih sulit bagi kelompok-kelompok baru untuk terlibat dalam pemungutan suara. Di Prancis atau bahkan Kanada, kota-kota kecil dan besar lebih merupakan kreasi Negara ketimbang kota-kota di sini, dan mereka lebih berada dalam kontrol langsung Negara. Tentu saja di sebagian besar tempat, suatu hal yang ilegal jika majelis warga membuat undang-undang, membuat kebijakan bagi lokalnya, seperti yang pernah terjadi dulu. Apa yang bisa dilakukan gerakan munisipalis libertarian dalam keadaan seperti itu?

(J): Ya, pendirian NPA-NPA di Burlington adalah hasil kesepakatan antara gerakan-gerakan arus bawah dengan administrasi sipil yang agak simpatik. Saya bisa meramalkan situasi-situasi dimana kesepakatan seperti yang kita miliki di sini tidak akan terjadi—dimana balai kota akan dengan keras menentang pembentukan majelis-majelis warga semi-legal, apalagi majelis-majelis dengan kuasa legal yang akan menyisihkan majelis-majelis dalam dewan kota. Atau dimana traktat atau piagam kota belum bisa dirubah untuk memberikan kuasa lebih besar kepada majelis-majelis warga. Dalam kasus-

kasus tersebut, akan sempurna jika gerakan terlebih dahulu mendirikan majelis-majelis warga kota yang hanya memiliki otoritas moral dan, dalam kenyataannya, hanya itulah kekuasaan yang dimiliki majelis-majelis Burlington.

Sebuah gerakan munisipalis libertarian akan memprakarsai majelis-majelis warga, tanpa perlu mendapat persetujuan dari dewan kota tetapi diharapkan akan mendapatkan dukungan yang cukup dari warga kota dalam lingkungan kecil tertentu, distrik atau kota kecil. Atau jika majelis-majelis itu sudah ada, gerakan bisa menuntut pengakuan sebagai badan-badan legal yang memiliki wewenang mengesahkan peraturan dan hukum, dengan kata lain, nomoi. Pada saat bersamaan, tidak perlu dikatakan, gerakan itu akan mencalonkan kandidat yang secara konsisten harus menuntut pembentukan majelis-majelis ini dan/atau pemberian kuasa terhadap majelis-majelis itu.

Pada masa lalu, dalam periode ketika berbagai intitusi masih agak otoriter, suatu hal yang tidak lazim bagi institusi-institusi moral untuk mulai muncul. Pada abad pertengahan banyak kota kecil dengan tidak punya otoritas legal apapun, membentuk majelis-majelis dan menciptakan institusi-institusi yang menentang institusi raja feodal atau uskup yang benar-benar menguasai kota tersebut. Gerakan *ateneo* yang tumbuh di Spanyol ketika negeri itu dikuasai Franco, bisa menjadi contoh lain. Gerakan itu tampaknya telah memainkan peranan dalam mengurangi kekuasaan Negara yang digenggam Franco menjelang akhir hayat Franco.

Dalam kasus apapun, manakala gerakan munisipalis libertarian memprakarsai majelis-majelis ekstra-legal, penting bahwa majelis-majelis itu harus dilembagakan, bahkan jika hanya sebatas di atas kertas. Hal yang tidak semestinya dilakukan gerakan adalah menggelar majelis dengan basis *ad hoc*, hanya untuk sekedar mendiskusikan sebuah isu tertentu, lantas menghilang ketika isu tersebut lenyap dari perhatian publik. Saya katakan bahwa jika gerakan munisipalis libertarian akan memprakarsai majelis, tidak cukup hanya dengan menggelar rapat rakyat, seperti "rapat kota,"—sebagaimana sebutan yang dengan keliru mereka alamatkan pada majelis-majelis tersebut di kota New York–untuk mendiskusikan atau memperkenalkan isu tertentu dan lantas membiarkan eksistensi majelis-majelis itu raib dari peredaran.

Majelis tersebut justru harus dilembagakan —ini sangat penting–dan harus memiliki struktur yang jelas. Ia harus menggelar rapat reguler, apakah itu sekali dalam satu bulan, atau sekali dalam beberapa minggu, atau sekali dalam seperempat bulan. Ia harus memiliki konstitusi, yakni yang menegakkan kebutuhan-kebutuhan residensi dan segala peraturan penting yang turut mendefinisikan dirinya. Ia harus punya sebuah nama. Ia harus punya seorang moderator atau fasilitator, dan paling tidak, memiliki sebuah komite koordinasi. Ia harus memiliki sistem komunikasi dan, jika memungkinkan, ia harus menerbitkan media berkala. Dalam rapat-rapatnya ia harus memiliki agenda yang dengan seksama dipersiapkan bersama melalui partisipasi

para anggota komunitas. Jika ada sejumlah orang yang mencukupi, ia bisa memilih bermacam komisi untuk mempelajari isu-isu dan membuat berbagai rekomendasi.

Jika ia tidak sungguh-sungguh dilembagakan, majelis tersebut akan menjadi, meminjam istilah untuk ironi, sebuah "penanda mengambang" —seakan-akan tampilan kejelasan namun sebenarnya membingungkan tentang bagaimana ia seharusnya. Dengan lowongnya definisi dan institusionalisasi, ia akan sekedar menjadi forum dan tidak akan ditanggapi serius. Ia juga tidak, bagi saya, bersesuaian dengan agenda sosial dan politik munisipalis libertarian. Munisipalisme libertarian berupaya mematangkan tegangan antara munisipal dengan Negara, untuk menjadi kekuatan ganda oposisi yang akan, dalam kondisi menguntungkan, menghapuskan Negara dan menggantikannya dengan sistem administrasi sosial konfederal.

Majelis boleh jadi dengan cantiknya beralih menjadi ekspresi sejati dari opini yang empatik, yang mencerminkan komunitas dan penciptaan-ulang budaya politik, atau paling tidak, memodifikasinya secara signifikan. Majelis-majelis boleh jadi berkembang biak, dan pada akhirnya mengharuskan dewan-dewan kota agar mengakui mereka dan memberi mereka kuasa legal.

Semua ini adalah proses, sebuah perkembangan, yang akan memerlukan perjuangan panjang. Munisipalisme libertarian bukanlah sekedar strategi atau sekumpulan taktik, meskipun saya terpaksa menggunakan istilah-istilah ini dengan ter-

batas karena kita belum menemukan bahasa yang bisa mengekspresikan ciri-ciri masyarakat rasional. Juga bukan masyarakat yang bisa diwujudkan eksistensinya dengan hanya menekan saklar lampu. Ia adalah gagasan yang kaya, yang mengalir keluar dari sejarah itu sendiri. Dan pemenuhannya akan membutuhkan dedikasi. Ia membutuhkan komitmen, idealisme dan rasionalitas.

Saya hanya bisa mengatakan ini: saya sepenuhnya setuju dengan Marx bahwa kapitalisme adalah sistem yang menghancurkan masyarakat ini dengan prinsip utamanya, produksi demi kepentingan produksi dan pertubuhan demi kepen tingan pertumbuhan. Munisipalisme libertarian tidak boleh berkompromi dengan gagasan-gagasan reformis atau yang kurang buruk dari itu, seperti menciptakan partai ketiga atau bergelut dalam "politik independen" dalam kerangka Negara-Bangsa. Setiap kompromi, terutama politik yang sedikit banyak berdasar pada kejahatan, selalu menuju kejahatan terbesar. Melalui serangkaian kejahatan inilah, yang terjadi di Jerman selama Republik Weimar, Hitler meraih tampuk kekuasaan. Hindenburg, yang ter akhir dan yang terparah dari semua kejahatan, yang terpilih menjadi presiden pada 1932, memulai kerjanya dengan mengangkat Hitler sebagai kanselir pada 1933, membawa fasisme ke Jerman, sementara kalangan Demokrat Sosial tetap ber*voting* untuk melakukan kejahatan demi kejahatan sampai mereka mencapai kejahatan terparah.

Seseorang hanya mesti menyimak ke-Negara-an hari ini untuk mendapatkan contoh-

contoh lebih banyak. Di Amerika, Presiden Bush atau Dole akan memiliki lebih banyak kesulitan dalam membongkar sistem kesejahteraan ketimbang kejahatan yang dilakukan Bill Clinton. Semua oposisi potensial yang mungkin bangkit untuk menahan tindak kejahatan itu, bahkan untuk memprotesnya, secara politis dilenyapkan oleh Clinton, dimana kalangan liberal telah sejak lama menganggap seorang presiden dari kalangan Republik sebagai para penjahat. Sehingga kejahatan setengah-setengah *(lesser-evilism)* jelas-jelas telah menjadi formula bagi kapitulasi *(tindakan menyerah atau takluk yang dinyatakan dalam dokumen/SP-penerjemah)*.

Saya tidak tahu apakah struktur sosial seperti yang telah saya gambarkan itu akan terwujud nyata. Mungkin tidak. Sekarang ini saya sedang menulis esai tentang etika, dan baris pembukaannya adalah: "Manusia terlalu cerdas untuk tidak hidup dalam masyarakat rasional. Ia tetap dilihat apakah ia cukup cerdas untuk mencapai masyarakat yang seperti itu." Saya hanya bisa mencatat, cepat atau lambat, orang layak yang memiliki karakter, pandangan dan idealisme, sebagaimana yang telah sejak lama dimiliki oleh orang dari kalangan kiri, untuk melaksanakan pendekatan ini. Tetapi jika gerakan tersebut tidak muncul, satu hal bisa dikatakan dengan kepastian mutlak: kapitalisme bukan hanya akan mengakibatkan ketidakadilan-ketidakadilan ekonomi. Dengan hukum akumulasinya, tuntutan "tumbuh-atau-mati"-nya yang berasal dari persaingan dalam pasar itu sendiri, ia pasti akan menghancurkan kehidupan sosial. Tidak boleh ada kompromi dengan tatanan sosial seperti ini.

APPENDIKS

Platform Pemilihan Burlington Hijau

Kelompok Hijau (Vermont) Burlington menggunakan dokumen ini sebagai platform pemilihan mereka pada Maret 1989, ketika mereka mengajukan dua kandidat untuk dewan kota (yang kemudian dinamakan dewan aldermen atau dewan para anggota badan legislatif kota) dan satu untuk walikota, dalam sebuah kampanye munisipalis libertarian. Selain itu, mereka mengeluarkan serangkaian surat jabatan dan laporan komprehensif pertama tentang lingkungan Burlington. *Platform* tersebut disini bisa menjadi contoh sebuah program transisional.

Siapakah Kelompok Hijau Burlington Itu?

Kami tengah bekerja menciptakan politik baru bagi Burlington, politik yang berdasar pada ekologi, kontrol pertumbuhan, keadilan sosial ekonomi moral dan demokrasi arus bawah yang sebenarnya.

Kami tengah bekerja menciptakan gerakan baru di Burlington, gerakan yang bukan sekedar partai yang memilih para politisi untuk menduduki jabatan, melainkan gerakan yang melibatkan rakyat biasa dengan basis keseharian dalam proses politik, dalam organisasi-organisasi komunitas dan lingkungan kecil. Kami berharap mengembangkan gerakan kerakyatan sejati untuk menangani sebab-sebab persoalan sosial dan ekologis, bukan sekedar berurusan dengan gejala-gejala atau *symptom* yang berdasarkan kesemrawutan.

I. Ekologi dan Pertumbuhan
Masalah: Krisis ekologis adalah persoalan terbesar yang dihadapi jaman kita. Seperti telah ditegaskan media umum, Bumi itu sendiri tengah terancam bahaya saat ini. Planet ini benar-benar sekarat. Krisis ekologis menimbulkan problem gawat yang tidak bisa lagi diabaikan. Atau tidak cukup hanya dengan *lip-service*. Terlalu banyak aspek lokal spesifik dalam krisis ekologis yang harus ditangani melalui tindakan di tingkat lokal. Di sini, "pertumbuhan" adalah yang paling mendesak saat ini.

Burlington tumbuh dengan tidak terkontrol, dengan tidak memandang kebutuhan rakyat dan tidak memandang keseimbangan antara diri kita dengan lingkungan alam kita. Kita dihadapkan pada persoalan meningkatnya polusi, proyek-proyek pembangunan yang tidak sedap dipandang mata, kemacetan lalu lintas dan hancurnya lahan-lahan basah serta ekologi unik Danau Champlain. Kita dihadapkan dengan kemungkinan lebih banyak dan lebih lebarnya jalan-jalan layang, hilangnya tanah-tanah terbuka di kota kita dan permasalahan pembuangan sampah yang kian menggunung. Tingkat kematian karena kanker di Chittenden County lebih tinggi daripada di Vermont secara keseluruhan. Tekanan-tekanan kota besar tengah menyerbu setiap aspek dalam kehidupan kita.

Alternatif: Kelompok HijauBurlington menuntut penangguhan pertumbuhan. Penting bahwa warga harus diberi waktu untuk mendiskusikan persoalan-persoalan yang dihadapi Burlington dalam majelis-

majelis terbuka dan secara demokratis memutuskan bagaimana komunitas dapat berkembang sepanjang batas-batas ekologis, humanistis dan rasional.

Kita menuntut pemilihan sebuah Komisi Lingkungan dan pembentukan Dewan Penasehat Lingkungan Warga, yang terdiri dari para perwakilan organisasi-organisasi lingkungan, para spesialis yang tidak memiliki bisnis atau ikatan industri, warga yang menaruh perhatian, para perencana kota dan para arsitek. Dewan ini akan membantu Komisi Lingkungan dalam mengembangkan garis-garis panduan ekologis bagi perkembangan masa depan di Burlington dan akan memberikan kepada warga, laporan tahunan tentang kondisi lingkungan di kota kita dan sekitarnya.

Kita menuntut upaya-upaya serius untuk mengembangkan sumber-sumber energi alternatif seperti tenaga matahari, angin dan tenaga methane. Daur ulang dan reduksi sampah harus menjadi prioritas, sebagaimana diharuskannya pembuatan rencana regional untuk membagi sumber-sumber daya energi lokal kita dengan komunitas-komunitas ketetanggaan kita, dengan menggunakan cara yang kooperatif dan demokratis.

Kita yakin bahwa masa depan Burlington harus diarahkan oleh kebutuhan ekologis dan kebutuhan manusia, bukan oleh kepentingan-kepentingan tertentu dan para *"developer"* yang mengambil keuntungan dengan mengorbankan komunitas.

II. Ekonomi Moral

Masalah: Kita hidup dalam ekonomi kompetitif tumbuh-atau-mati yang tidak mengenal batas-batas moral dan ekologis. Ekonomi pasar pada dasarnya adalah tuntutan berkembang dan berkembang sampai ia menghancurkan planet ini. Bentuk pertumbuhan gila ini tidak hanya menghancurkan lingkungan manusia, ia juga menghancurkan komunitas manusia.

Kendati ekonomi lokal kita sedang "tumbuh" pada tingkat yang tidak paralel, ia tidak memberikan kebutuhan-kebutuhan dasar seperti perumahan yang layak dan pendapatan hidup bagi banyak warga. Tumbuhnya kelas orang-orang yang mempunyai hak istimewa dihadapkan dengan persoalan-persoalan tertentu yang terus memburuk. Mengejar keuntungan sendiri, yakni hubungan persaingan yang dikembangbiakkan oleh ekonomi pasar sedang menggantikan hubungan kerjasama dan hubungan moral antar orang.

Alternatif: Kita perlu menggunakan tidak hanya perspektif ekologis tetapi juga perspektif ekologi-sosial untuk mencermati persoalan-persoalan yang dihadapi kota kita. Kita tidak semestinya mempertentangkan antara isu-isu ekologis dengan isu-isu sosial, dengan menjual lingkungan alamiah demi keuntungan pertumbuhan yang meragukan.

Kelompok Hijau Burlington yakin bahwa perumahan yang layak, pendapatan hidup dan kondisi kerja yang baik merupakan hak, bukan hak istimewa *(privilege).* Dengan cara yang sama, kita

juga yakin bahwa rakyat memiliki hak alamiah untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan baik. Kita yakin bahwa langkah-langkah praktis bisa diawali oleh komunitas kita untuk mewujudkan hak-hak ini. Kita menyerukan : Ini hanyalah batu-batu loncatan yang dengannya kita berharap adanya ekonomi yang dikontrol secara munisipal dan dikelola oleh para warga kota dalam majelis-majelis bebas dan diarahkan oleh dimensi moral dan ekologis.

III. emokrasi Arus Bawah

Masalah: Persoalan-persoalan ekologis dan sosial yang dihadapi Burlington dan wilayah Burlington yang lebih luas, tidak dianggap serius karena sedikit kekuasaan yang dimiliki rakyat telah tercerabut yang diakibatkan oleh sistem balaikota-balaikota yang terlalu tersentralisasi dan lembamnya birokrasi pemerintahan. Dengan kedok kepemimpinan "rakyat," sejenis kelompok manajer teknokrat telah memerosotkan kita dari warga aktif menjadi para pembayar pajak yang pasif. Warisan budaya Vermont, yakni demokrasi partisipatif yang kita miliki tengah ditumbangkan oleh para teknisi yang merendahkan kekuasaan rakyat.

Alternatif: Kita butuh politik baru di kota kita, bukan sekedar administrasi. Kita menuntut majelis-majelis wilayah yang sesungguhnya dengan dilengkapi kekuasaan luas dalam menetapkan kebijakan untuk membentuk kebijakan sosial dan ekologis serta membantu administrasi kota kita. Kita yakin bahwa semua komisi penting kota harus dipilih oleh

rakyat, masa jabatan mereka dibatasi hanya satu tahun dan jumlah mereka ditambah untuk menandingi sentralisasi kekuasaan walikota. Kita menuntut revisi piagam kota yang akan memajukan pemerintahan-sendiri oleh publik dalam tradisi Vermont.

Harus disediakan banyak waktu untuk menggelar rapat-rapat bagi diskusi-diskusi terbuka oleh warga tentang berbagai isu. Perawatan anak harus disediakan gratis bagi semua orang tua yang ingin berpartisipasi. Warga juga harus memiliki hak untuk me-*recall* anggota dewan yang gagal menjalankan mandat dan komitmen mereka di distrik kota.

Kita yakin bahwa Burlington harus, dengan bersemangat dan tak henti-henti, memimpin jalan mencapai pemerintahan swa-kelola di Vermont sehingga kota-kota kecil dan kota-kota besar bisa mengelola urusan-urusan mereka sendiri sebebas mungkin tanpa campur tangan dari negara bagian. Burlington juga harus memimpin jalan untuk mendirikan konfederasi-konfederasi demokratis di seluruh negara bagian, beserta komunitas-komunitas lingkungan kecil guna mengurusi masalah-masalah regional seperti transportasi, pertumbuhan dan masalah-masalah ekonomi serta lingkungan lainnya.

IV. Keadilan Sosial

Masalah: Kita sedang menyaksikan kemunculan kelas-bawah baru, kelas rakyat miskin, terutama perempuan, yang menderita kemiskinan mengerikan di tengah-tengah kemakmuran yang luar biasa.

Sejumlah besar orang bekerja dengan upah kecil. Kaum jompo terabaikan dan terpuruk: mereka menjadi kaum tunawisma dan mereka tak diberdayakan untuk bisa memperoleh perumahan yang layak. Orang masih didiskriminasi dan seringkali dianiaya karena orientasi seksual dan warna kulit mereka. Ketidakadilan sosial telah menjadi faktor penting dalam kehidupan sehari-hari komunitas kita.

Alternatif: Kita yakin bahwa Burlington harus menjadi "kota yang paling enak dihuni" bagi segenap warganya. Kita menyuarakan penghijauan Burlington! Hijau bagi kita berarti ekologi, dan ekologi berarti komunitas harmonis dan partisipatif antara manusia dengan bentuk-bentuk kehidupan lainnya. Ini pada gilirannya berarti bahwa kita harus hidup dalam komunitas manusia yang harmonis dan partisipatif. Tanpa komunitas yang dipandu oleh prinsip-prinsip ekologis dan keadilan sosial, kita akan melihat kerusakan lingkungan kita pada skala yang mengejutkan dan penghancuran lebih lanjut terhadap segala sesuatu yang membuat wilayah Burlington menjadi tempat yang hanya seolah-olah nyaman dihuni bagi diri kita sendiri dan anak-anak kita.

Kita yakin bahwa feminisasi kemiskinan harus diakhiri dengan tindakan kooperatif yang menentukan. Kaum perempuan harus diberi upah yang layak dan sebanding dengan pekerjaannya. Perawatan anak secara gratis harus disediakan bagi setiap orang tua yang menginginkannya. Persoalan kaum tunawisma harus ditangani oleh komunitas

secara kreatif, dengan berupaya memberi kaum tunawisma itu kontrol terhadap perumahan mereka. Pelayanan bagi kaum jompo harus diperluas. *Economic Gentrification* atau proses pemodelan-ulang sebuah daerah beserta bangunan-bangunannya dengan motif ekonomi sempit harus diakhiri. Lingkungan-lingkungan kecil yang lebih tua harus ditingkatkan secara struktural berdasarkan kepentingan warga yang mendiaminya saat ini, bukan berdasarkan kepentingan orang yang memiliki hak istimewa yang justru berharap akan menyerbunya besok.

Dengan demikian warga harus memiliki kontrol bagi berdirinya,

✳ bank komunitas-munisipal yang menyediakan sumber-sumber dana dan pinjaman berbunga rendah bagi pembelian dan perbaikan rumah dan bagi dimulainya proyek-proyek perumahan ekologis inovatif untuk kalangan berpendapatan rendah
✳ pengeluaran obligasi dan perubahan dalam struktur pajak lokal untuk menyediakan perumahan dengan jumlah yang sesuai bagi keperluan orang yang membutuhkan dan bagi kaum jompo
✳ jaringan langsung antara petani dan konsumen untuk memajukan pertanian lokal
✳ disediakannya lahan-lahan terbuka oleh munisipal untuk dirawat oleh kepercayaan publik bagi rekreasi, kebun dan taman
✳ kooperasi-kooperasi yang terkontrol secara munisipal untuk mengembangkan dan melaksanakan

teknologi-teknologi alternatif dan memproduksi barang-barang berkualitas, cocok dengan reputasi Vermont dalam bidang pertukangan.

Kelompok Hijau Burlington tidak menganggap bahwa tujuan-tujuan kemanusiaan dan ekologis ini—dan banyak lagi lainnya yang kita harapkan bisa menampilkan publik dalam *position papers* –sebagai sesuatu yang tidak realistis atau mustahil untuk dicapai. Sebagian di antaranya bisa diwujudkan dengan segera, sebagian lainnya pasti memerlukan banyak waktu. Tetapi kita menganggap semua itu adalah tujuan-tujuan minimum. Dan para warga yang memiliki perhatian secara sosial dan berorientasi secara demokratis harus bekerja mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kita berpikir bahwa semua tujuan ini bisa dicapai hanya melalui gerakan yang bersifat kerakyatan dan anti-otoriter, yang berusaha menciptakan demokrasi arus bawah. Kita berusaha mengubah citra keseluruhan kita mengenai kemajuan sebagai pertumbuhan sembarangan menjadi kemajuan dalam visi ekologis yang pada akhirnya akan memajukan harmoni baru antar-rakyat dan antara manusia dengan alam.

Mari berbantulah menciptakan politik baru dan gerakan baru!

Bacaan Lanjutan

Karya mengenai Munisipalisme Libertarian oleh Murray Bookchin

"Libertarian Municipalism: An Overview", Green Perspectives, edisi no 24 (Oktober 1991).

"The Meaning of Confederalism", Green Perspectives, edisi no 20 (November 1990). Diterbitkan-ulang di *Our Generation*, no 22 (Musim Gugur 1990-Musim Semi 1991), dan di *Society and Nature*, volume 1, no 3 (1993), hal. 41-54

"Radical Politics in an Era of Advanced Capitalism", Green Perspectives, edisi 18 (November 1989). Diterbitkan-ulang di Our Generation, volume 21, no. 2 (Musim Panas 1990).

Remaking Society : Pathways to a Green Future, Montreal: Black Rose Books; Boston: South End Press, 1989.

"The Greening of Politics", Green Perspectives, edisi no. 1 (Januari 1986).

From Urbanization to Cities, London: Cassel, 1995. Versi awal diterbitkan sebagai *The Rise of Urbanization and the Decline of Citizenship*, San Francisco: Sierra Club Books, 1987; kemudian diterbitkan-ulang di Kanada sebagai *Urbanization Without Cities*, Montreal: Black Rose Books, 1982.

"Theses on Libertarian Municipalism", Our Generation volume 16, edisi no. 3-4 (Musim Semi/Panas 1985), Diterbitkan ulang sebagai *The Limits of the City,* Montreal: Black Rose Books, 1986.

The Limits of the City. New York: Harper & Row Colophon Books, 1974; Montreal: Black Rose Books, 1986.

"Spring Offensives and Summer Vacations", Anarchos no. 4 (1972).

Demokrasi Yunani Kuno

Finley, M.I. *Democracy Ancient and Modern*. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1972.

Finley, M.I. *Politics in the Ancient World*. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1983.

Forrest, W.G. *The Emergence of Greek Democracy*. New York: McGraw Hill, 1966.

Jaeger, Werner. Paedia : *The Ideals of Greek Culture*. New York: Oxford University Press, 1939.

Kitto, H.D.F. *The Greeks*. London: Penguin Books, 1951.

Zimmern, Alfred. *The Greek Commonwealth*. New York: Modern Library Editions, n.d.

Penghujung Abad Pertengahan dan Awal Eropa Modern

Barber, Benjamin. *The Death of Communal Liberty: A History of Freedom* in a Swiss Mountain Canton. Princeton University Press, 1974.

Blockmans, Wim P. *"Alternatives to Monarchical Centralisation : The Great Tradition of Revolt in Flanders and Brabant"*. Dalam H.G. Kooenigsberger, editor, *Republicanism in Early Modern Europe*. Munich: Oldenbourg, 1988.

Catells, Manuel. *The City and the Grassroots : A Cross-Cultural Theory of Urban Social Movements.* Berkeley dan Los Angeles: University of California Press, 1983. Bab 2 memaparkan tentang gerakan *communero*.

Laslett, Peter. *The World We Have Lost.* London: Methuen, 1965.

Martines, Lauro. P*ower and Imagination : City-States in Renaissance Italy.* New York: Alfred A. Knopf, 1979.

Mundy, John H. dan Peter Riesenberg. *The Medieval Town.* New York: Van Nostrand Reinhold, 1958.

Charles Tilly dan Wim P. Blockmans, editor. *City and the Rise of States in Europe, A.D. 1000 to 1800*. Boulder, Colo: Westview Press, 1994.

Waley, Daniel. *The Italian City-Republics.* New York: McGraw Hill, 1969.

Rapat Kota New England

Breen, T.H. *Puritans and Adventurers : Change and Persistence in Early America.* New York: Oxford University Press, 1980.

Gross, Robert A. *The Minute Man and Their World.* New York: Hill and Wang, 1976.

Katz, Stanley N., editor. *"Colonial Politics and Society : The Eighteenth Century"*, bagian 3 dari *Colonial America: Essays on Political and Social Development.* Boston: Little, Brown, 1971.

Lingeman, Richard. *Small Town America : A Narrative History, 1620 – Present*. New York: Putnam, 1980. Bab 1.

Lockridge, Kenneth A. *A New England Town : The First Hundred Years.* New York: W.W. Norton, 1970.

Morgan, Edmund S. *The Puritan Dilemma: The Story of John Winthrop.* Boston: Little, Brown, 1958.

Zuckerman, Michael. *Peaceable Kingdoms: New England Towns in the Eighteenth Century.* New York: Vintage, 1970.

Majelis Seksional Paris dalam Revolusi Perancis

Bookchin, Murray. *The Third Revolution*. London: Cassell, 1996.

Soboul, Albert. *The Sans-Culottes: The Popular Movement and*

Revolutionary Government, 1793-1794. Jilid 1. Terjemahan Remy Inglis Hall. Garden City, NY: Anchor/Doubleday, 1972.

Thompson, J.M. *The French Revolution.* Oxford: Basil Blackwell, 1943, esp. hal. 280-82, 295-98.

Kota dan Konfederasi Pada Abad ke 20

Bookchin, Murray. *The Spanish Anarchists.* New York: Harper and Row, 1977.

Catells, Manuel. *"The Making of an Urban Social Movement : The Citizen Moement in Madrid towards the End of the Franquist Era*", bagian ke 5 dari *The City and the Grassroots : A Cross-Cultural Theory of Urban Social Movements. Berkeley:* University of California, 1983.

Gerecke, Kent, editor. *The Canadian City.* Montreal: Black Rose Books, 1991.

Gordon, David, editor. *Green Cities : Ecologically Sound Approaches to Urban Space.* Montreal: Black Rose Books, 1990.

Kotler, Milton. *Neighborhood Government.* New York: Bobbs-Merrill, 1969.

Roussopoulos, Dimitrios, editor. *The City and Radical Social Change*. Montreal: Black Rose Books, 1982.

Schecter, Stephen. *The Politics of Urban Liberation.* Montreal: Black Rose Books, 1978.